Manajemen Pengelolaan Kawasan *Muara Angke*

DR. Ir. Benny Diah Madusari, M.Pi

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MANAJEMEN PENGELOLAAN KAWASAN MUARA ANGKE

Dr. Ir. Hj. Benny Diah Madusari, M.Pi.

AMERTA
MEDIA

MANAJEMEN PENGELOLAAN KAWASAN MUARA ANGKE

Diterbitkan pertama kali oleh CV Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Anggota IKAPI
Cetakan Pertama: Mei 2022
15 cm x 23 cm
ISBN:
978-623-419-109-7

Penulis:
Dr. Ir. Hj. Benny Diah Madusari, M.Pi.

Editor:
Dimas Rahman Rizqian, S.Sos

Desain Cover:
Adji Azizurrachman

Tata Letak:
Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh:
CV. Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24
Email: mediaamerta@gmail.com
Website: amertamedia.co.id
Whatsapp : 081-356-3333-24

Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi.
Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Dr. Ir. Hj. Benny Diah Madusari, M.Pi.
Manajemen Pengelolaan Kawasan Muara Angke, Dr. Ir. Hj. Benny Diah Madusari, M.Pi.. -- Purwokerto: CV. Amerta Media, 2022
XVIII + 553 hlm.; 15 x 23 cm

ISBN:
1. Manajemen Pengelolaan Kawasan Muara Angke
I. Judul

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya buku *Manajemen Pengelolaan Kawasan Muara Angke* ini dapat disajikan kehadapan pembaca. Hadirnya buku ini, berangkat dari kesadaran akan pentingnya pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan yang agar beroperasi sesuai dengan peran dan fungsinya.

Kawasan pelabuhan perikanan yang dikelola dengan efektif dan efisien, serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai (sesuai standar) dan menerapkan prinsip pengelolaan berkelanjutan, akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi peningkatan ekonomi wilayah. Dengan peningkatan ekonomi wilayah, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan buku ini, terbagi kedalam 6 (enam), yaitu BAB I membahas terkait urgensi pelayanan pelabuhan yang memenuhi standar. BAB II menyajikan gambaran kegiatan perikanan di kawasan Muara Angke. Pada BAB III penulis menguraikan informasi rinci rona lingkungan hidup. BAB IV, membahas tentang kegiatan operasional, identifikasi dampak dan pemantauan lingkungan hidup. BAB V mengupas terkait evaluasi dampak antar komponen kegiatan. Dan BAB VI dibahas mengenai rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

Akhir kata, dengan diterbitkannya buku ini, penulis mengucapkan terimakasih untuk suami tercinta H.Akhmad Faedhoni, S.H., M.H., Ananda Yusuf Isyrin Hanggara, S.H., dr. Fathia Kesumadinanti, menantu Laras Safitri, S.Sn., cucu yang sholeh

Kieveru Saladin, yang telah memberikan dukungan moril sehingga penulis tetap produktif dalam berkarya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, khususnya bagi kemajuan pengelolaan pelabuhan perikanan.

Pekalongan, April 2022
Penulis,

Dr. Ir. Benny Diah Madusari, M.Pi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
TENTANG BUKU.....iv
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI.....viii
DAFTAR TABEL.....x
DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I
Urgensi Pelayanan Pelabuhan yang Memenuhi Standar 1

BAB II
Gambaran Kegiatan Perikanan di Kawasan Muara Angke.....7

BAB III
Informasi Rinci Rona Lingkungan Hidup 69

BAB IV
Kegiatan Operasional, Identifikasi Dampak dan
Pemantauan Lingkungan Hidup.....133

BAB V
Evaluasi Dampak Antar Komponen Kegiatan.....191

BAB VI
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup 389

DAFTAR PUSTAKA.....534
INDEKS.....537
PROFIL PENULIS.....539

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Jenis Perizinan yang Dimiliki	5
Tabel II.1.	Kronologis Kepemilikan Lahan Kawasan Muara Angke	13
Tabel II.2	Peruntukan Lahan Kegiatan Perikanan di Kawasan Muara Angke Berdasarkan Kondisi Eksisting	14
Tabel II.3.	Kegiatan Perikanan di Kawasan Muara Angke	16
Tabel II.4.	Database Kapal Perikanan di Pelabuhan Barat dan Timur Dirinci per Gross Tonage	17
Tabel II.5.	Database Kapal Perikanan di Kawasan Muara Angke Dirinci per Alat Penangkap Ikan	17
Tabel II.6.	Data Kapal Masuk Keluar di Pelabuhan Barat dan Timur	18
Tabel II.7.	Rincian Tenaga Kerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Berdasarkan Jenis Kapal	25
Tabel II.8.	Produksi Ikan dan Nilai di Tempat Pelelangan Ikan Bulan Juli 2019	3
Tabel II.9.	Data Cold Storage di Kawasan Muara Angke	42
Tabel II.10.	Jumlah Pegawai PNS per 31 Desember 2018 Berdasarkan Tugasnya	51
Tabel II.11.	Skema Pengolahan Air Laut	58
Tabel II.12.	Kapasitas Jamaah Masjid	59
Tabel II.13.	Rincian Kapasitas Listrik di Kawasan Muara Angke	61
Tabel II.14.	Estimasi Kebutuhan Air Bersih pada Kegiatan Perikanan di Kawasan Muara Angke	63
Tabel II.15.	Neraca Air Kegiatan di Kawasan Muara Angke	64

Tabel II.16. Produksi dan Pembayaran Sampah di TPS Dekat PHPT Tahun 2019 67
Tabel II.17. Hasil Monitoring Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Tahun 2017 67
Tabel II.18. Hasil Monitoring Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Tahun 2018 68
Tabel III.1. Klasifikasi Skala Kualitas Lingkungan Hidup 70
Tabel III.2. Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Tipe Curah Hujan 73
Tabel III.3. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Jakarta Utara 2008-2017 74
Tabel III.3. Rata-Rata Curah Hujan Bulanan Periode (2008-2017) 75
Tabel III.4. Komponen sebagai Indikator dalam Penurunan Kualitas Udara 76
Tabel III.5. Kualitas Udara Ambien Kawasan Muara Angke 77
Tabel III.6. Hasil Uji Laboratorium Tingkat Kebauan di Kawasan PPN Muara Angke 78
Tabel III.7 Baku Tingkat Kebisingan 79
Tabel III.8 Hasil Uji Laboratorium Tingkat Kebisingan untuk Kegiatan Pelabuhan Laut di Kawasan PPN Muara Angke 80
Tabel III.9 Hasil Uji Kualitas Air Tanah di UPPP Provinsi DKI Jakarta 81
Tabel III.10 Hasil Uji Kualitas Air Permukaan di Kali Adem .
Tabel III.11 Hasil Uji Kualitas Air Laut di Kawasan Muara Angke 83
Tabel III.12 Geometri Jalan di Kawasan Muara Angke 85
Tabel III.13 Data Geometri Simpang Utama Masuk Muara Angke 92
Tabel III.14 Geometri Simpang Jalan Dermaga 93
Tabel III.15 Kapasitas Ruang Jalan di Kawasan Muara Angke 95
Tabel III.16 Volume Lalu Lintas di Kawasan Muara Angke ... 95
Tabel III.17 Kinerja Ruang Jalan di Kawasan Muara Angke ..
Tabel III.18 Penentuan Klasifikasi Vegetasi di Lokasi Kegiatan 96
Tabel III.19 Hasil Identifikasi Vegetasi di Lokasi Kegiatan 98

Tabel III.20 Keadaan Fauna di Lokasi Kegiatan 100
Tabel III.21 Identifikasi Plankton di Lokasi Kegiatan 101
Tabel III.22 Benthos di Lokasi Kegiatan 103
Tabel III.23 Jumlah Penduduk di Kawasan Muara Angke 104
Tabel III.24 Peta Sebaran Penduduk di Kawasan Muara Angke 105
Tabel III.25 Kondisi Rantai Bisnis Perikanan 105
Tabel III.26 Potensi Ekonomi Kawasan Muara Angke 106
Tabel III.27 Produksi PPN Muara Angke Tahun 2015-2018 (dalam kg) 106
Tabel III.28 Nilai Produksi PPN Muara Angke Tahun 2015-2018 107
Tabel III.29 Nilai dan Kapasitas Produksi TPI Muara Angke Tahun 2015-2019 107
Tabel III.30 Potensi PAD Kawasan Muara Angke 108
Tabel III.31 Mata Pencaharian Responden 108
Tabel III.32 Penghasilan Responden 109
Tabel III.33 Pengeluaran Responden 110
Tabel III.34 Kategori Tingkah Laku dalam Perwujudan Perilaku 111
Tabel III.35 Aspek-Aspek dalam Interaksi Sosial 112
Tabel III.36 Distribusi Responden Menurut Jenis Pekerjaan dan Status Sosial 113
Tabel III.37 Aktivitas Adat atau Keagamaan yang Masih Ada di Kawasan Muara Angke 115
Tabel III.38 Pendekatan Ruang Lingkup Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat 119
Tabel III.39 Sepuluh Besar Penyakit di Puskesmas Pluit Tahun 2019 122
Tabel III.40 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Pluit, 2017 126
Tabel IV.1 Matriks Hasil Identifikasi Dampak Kegiatan Operasional terhadap Komponen Lingkungan 146
Tabel IV.2 Hasil Identifikasi Dampak 148
Tabel IV.3 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan terhadap Komponen Lingkungan Hidup 153
Tabel V.1 Data Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap dari Kegiatan Perikanan di Kawasan Muara Angke 204

Tabel V.2 Hasil Kajian Evaluasi pada Tahap Operasional di Kawasan Muara Angke....216
Tabel V.3 Matriks Arahan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan 280
Tabel VI.1 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)....391
Tabel VI.2 Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)....483

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Pola Penggunaan Lahan di Kawasan Muara Angke 14
Gambar II.2. Pelabuhan Perikanan Nusantara .....
Gambar II.3. Lokasi Muara Kali Asin .....
Gambar II.4. Proses Bongkar Ikan .....
Gambar II.5. Proses Penimbangan .....
Gambar II.6. Proses Penyusunan Ikan .....
Gambar II.7. Proses Lelang Ikan .....
Gambar II.8. Lantai Lelang .....
Gambar II.9 Skema Kegiatan Usaha Pasar Grosir Ikan di Kawasan Muara Angke .....
Gambar II.10. Suasana Pasar Grosir pada Malam Hari 29
Gambar II.11. Suasana Pasar Grosir pada Pagi Hari 29
Gambar II.12. Ikan yang Dijual di Pasar Grosir 30
Gambar II.13. Pasar Eceran Muara Angke 31
Gambar II.14. Kondisi Pasar Eceran Malam Hari 31
Gambar II.15. Suasana PHPT 32
Gambar II.16. Proses Pencucian Ikan 33
Gambar II.17. Proses Pengambilan Kulit Ikan Pari 33
Gambar II.18. Proses Pemasakan Ikan 34
Gambar II.19. Proses Penjemuran Ikan 34
Gambar II.20. Pupuk Organik Cair 35
Gambar II.21. Perusahaan Pengolahan Ikan yang Menggunakan Cold Storage 38
Gambar II.22. Area Produksi di UPI 38
Gambar II.23. Ikan yang Sudah Siap Didistribusikan 39
Gambar II.24. Suasana Fasilitas Docking 40

Gambar II.25. Kapal yang Sedang Diperbaiki 40
Gambar II.26. Proses Pelapisan Bawah Kapal 41
Gambar II.27. Perkantoran di Kawasan Muara Angke 42
Gambar II.28. SPBU SVE 27 43
Gambar II.29. Kondisi Pujaseri 44
Gambar II.30. Kolam Limbah 45
Gambar II.31. Rumah Pompa Kolam Limbah 46
Gambar II.32. Pompa Air Limbah 46
Gambar II.33. Pipa Inlet Pompa Air Limbah 47
Gambar II.34. *Discharge* Air Limbah ke Laut dari Rumah Pompa 47
Gambar II.35. *Excavator* untuk Pengerukan Sedimen di Kolam Limbah 48
Gambar II.36. Lokasi Mangrove di Kawasan Muara Angke 49
Gambar II.37. Mangrove 49
Gambar II.38. Toilet Umum 50
Gambar II.39. Pipa Discharge Pompa Air Laut menuju Tangki Penampungan Awal 52
Gambar II.40. Tangki Penampungan Awal 52
Gambar II.41. Koagulan Injektor 53
Gambar II.42. Bak Pengendap 53
Gambar II.43. Filter Air 53
Gambar II.44. Tangki Penampung Akhir dan Kaporit Injekor 54
Gambar II.45. Pipa Distribusi Air Laut yang Telah Diolah 54
Gambar II.46. Saluran Drainase di Pasar Ikan Muara Angke 55
Gambar II.47. Saluran Drainase di Depan UPPP Muara Angke dan di Masjid Jami Nurul Falah 55
Gambar II.48. Saluran Drainase di Area Pelabuhan Perikanan Nusantara 56
Gambar II.49. Saluran Drainase ke Arah Muara dari Pasar Ikan Muara Angke 56
Gambar II.50. Saluran Drainase di Depan Mangrove 57
Gambar II.51. Kendaraan Penyedot Saluran Drainase 57
Gambar II.52. Masjid Safinatun Najah 58
Gambar II.53. Masjid Jami Nurul Falah 58
Gambar II.54. Area Parkir di Pasar Ikan Muara Angke 59
Gambar II. 55. Gardu Listrik dan Genset di Kawasan Muara Angke 60

Gambar II.56. Instalasi Air Bersih di Kawasan Muara Angke 62
Gambar II.57. TPS Kawasan Muara Angke 65
Gambar II.58. Komposter di TPS Muara Angke 65
Gambar II.59. Pupuk Organik Hasil Olahan Komposter 66
Gambar III.1 Konsep Penentuan Skala Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Komponen lingkungan hidup 71
Gambar III.2 Jaringan Jalan Eksisting Kawasan Muara Angke 72
Gambar III.3 Simpang Utama, Jalan Masuk Kawasan Muara Angke 89
Gambar III.4 Situasi Terminal Bus Kawasan Muara Angke .. 89
Gambar III.5 Simpang Jl. Dermaga Jalan Utama Menuju Dermaga Penyeberangan 90
Gambar III.6 Geometri dan Titik Konflik Simpang Utama Masuk Muara Angke 92
Gambar III.7 Situasi dan Lingkungan di Sekitar Simpang Utama Masuk Muara Angke 93
Gambar III.8 Geometri dan Titik Konflik Simpang Jalan Dermaga 93
Gambar III.9 Situasi dan Lingkungan di Sekitar Simpang Jalan Dermaga 94
Gambar III.10 Tanaman Mangrove di Kawasan Muara Angke 99
Gambar III.11 Tanaman di Lokasi Kegiatan 99
Gambar III.12 Foto Pengambilan Kuesioner 114
Gambar III.13 Sarana Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat di Kawasan Muara Angke 127
Gambar III.14 Adanya Nyamuk di Tempat Tinggal atau Unit Usaha Responden di Kawasan Muara Angke 129
Gambar III.15 Adanya Tikus di Tempat Tinggal atau Unit Usaha Responden di Kawasan Muara Angke 129
Gambar III.16 Adanya Lalat di Tempat Tinggal atau Unit Usaha Responden di Kawasan Muara Angke 130

Gambar V.1 Keterkaitan Komponen Kegiatan Operasional Perikanan dan Sarana Penunjang di Kawasan Muara Angke.....193
Gambar VI.1 Peta Pengelolaan Lingkungan Hidup 481
Gambar VI.2 Peta Pemantauan Lingkungan Hidup 533

BAB I

URGENSI PELAYANAN PELABUHAN YANG MEMENUHI STANDAR

Pengantar

Kawasan Pemusatan dan Pengembangan Perikanan Muara Angke memiliki luas ± 72 ha yang secara administratif terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Kawasan Muara Angke berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah Utara, Muara Karang di sebelah Selatan, Kali Adem di sebelah Barat dan Kali Asin di sebelah Timur. Kawasan Muara Angke sejak ditetapkan sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Daerah dan Pusat Pembinaan Kegiatan Perikanan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tahun 1990 sampai sekarang telah mengalami dinamika perkembangan. Sejak itu, Kawasan Muara Angke mengalami perkembangan pesat, baik perkembangan pelayanan maupun fungsi dan fasilitas PPI, di satu sisi, dan di sisi lain berkembang juga pemukiman padat dan kumuh di kawasan tersebut.

Muara Angke merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang sangat strategis, karena terletak di Jakarta yang merupakan Ibukota Negara sehingga sering dijadikan etalase Pelabuhan Perikanan di Indonesia dan sebagai tempat kunjungan serta studi banding bagi tamu-tamu dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, prospek pengembangan Muara Angke tentu akan pesat karena sangat didukung dengan kondisi sarana dan prasarana

perhubungan yang baik serta memiliki jumlah konsumen (pasar) yang besar.

Untuk mendukung kegiatan di Kawasan Muara Angke, terdapat Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), *docking* dan bengkel yang berlokasi di Eks BTPI, SPBU, Terminal Bus Muara Angke, Pasar Tradisional, Pelabuhan Penyeberangan Kali Adem, SPBU, aktivitas perkantoran serta tempat usaha seperti Pujaseri, toko/kios perbekalan, warungan dan resto apung. Oleh karena itu, Kawasan Muara Angke ke depan perlu dikelola dengan baik sesuai dengan peran dan fungsinya. Kawasan pelabuhan perikanan yang dikelola dengan efektif dan efisien serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai (sesuai standar), dengan menerapkan prinsip pengelolaan berkelanjutan akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi peningkatan ekonomi wilayah. Dengan peningkatan ekonomi wilayah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengoperasian Kawasan Muara Angke, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sehingga luas wilayah kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah seluas ± 35,86 Ha dari ± 72 Ha Kawasan Muara Angke. Sedangkan untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), SPBU, Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/ Kios Perbekalan, Warungan dan Resto Apung) serta sarana penunjang seperti kolam limbah, mangrove, toilet umum, unit pengolahan air laut, saluran drainase, sarana ibadah dan sarana parkir.

Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 Ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup" dan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dimana pada Lampiran I, point IV.A. Bidang Multi Sektor, Nomor 5, salah satunya disebutkan bahwa Pembangunan Gedung dengan skala/besaran luas lahan $\geq$ 5 Hektar atau luas bangunan $\geq$ 10.000 m^2, wajib memiliki AMDAL sehingga Kegiatan Perikanan di Kawasan Muara Angke dengan luas lahan ± 35,86 Ha > 5 Ha wajib memiliki dokumen AMDAL.

Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, pasal 3 ayat (1) huruf (b) menyatakan bahwa "telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan" dan huruf (d) menyatakan bahwa "tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Perikanan di Kawasan Muara Angke. Nantinya unit kegiatan yang ada di area Kegiatan Perikanan di Kawasan Muara Angke akan menyusun dokumen lingkungan sendiri.

Sistematika dan format penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Perikanan di Kawasan Muara Angke mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Lampiran I tentang Format DELH.

Berdasarkan uraian diatas, buku ini bermaksud memaparkan kegiatan perikanan di kawasan Muara Angke untuk meningkatkan pelayanan pelabuhan yang memenuhi standar operasional. Adapun tujuan kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke antara lain sebagai berikut.

1. Menerapkan sistem jaminan mutu hasil perikanan dalam mendukung industrialisasi perikanan tangkap.
2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur melalui peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat berfungsi dan mencapai standar pelayanan prima.
3. Meningkatkan mutu dan kualitas hasil perikanan.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta penyerapan tenaga kerja.
5. Meningkatkan peran serta pelabuhan perikanan sebagai fasilitator dalam sektor perikanan.

Manfaat kegiatan perikanan di kawasan Muara Angke dapat dibagi menjadi dua, yaitu bagi pemerintah dan bagi masyarakat. manfaat kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke bagi pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Menarik minat pengunjung untuk mengunjungi Kawasan Muara Angke.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari biaya retribusi sewa lahan.

Sedangkan manfaat kegiatan perikanan di kawasan Muara Angke bagi masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha di Kawasan Muara Angke.
2. Memberikan kemudahan akan tempat tinggal yang juga dapat mendukung kinerja nelayan berupa kemudahan mobilisasi dari tempat tinggal menuju ke lokasi kerja.

Terkait dengan perizinan, kegiatan perikanan di kawasan Muara Angke telah memiliki perizinan yang mendukung dalam penyusunan DELH, antara lain:

Tabel I.1. Jenis Perizinan yang Dimiliki

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan atau Tahun	Masa Berlaku	Pemberi Izin
1.	Penetapan Pangkalan Pendaratan Ikan	SK Gubernur No. 598 tahun 1990	-	Gubernur Kepala DKI Jakarta
2.	Ketetapan Rencana Kota	550/5.2/31/-1.711.53/2017/U tanggal 11 April 2017	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Stu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, 2019

Sementara itu, perizinan yang harus diurus untuk mendukung kegiatan di Kawasan Muara Angke antara lain sebagai berikut.

1. Izin Lingkungan.
2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
3. Izin Mendirikan Bangunan.
4. Rekomendasi Andalalin.
5. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah.

Adapun terkait dengan pelaksanaan kegiatan di kawasan Muara Angke ini, telah bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Serta, tim tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dibidangnya.

BAB II

GAMBARAN KEGIATAN PERIKANAN DI KAWASAN MUARA ANGKE

Pada tahun 1977, Kawasan Muara Angke merupakan Sentral Permukiman Nelayan seluas 21,16 Ha. Kemudian pada tahun 1984, Badan Pengelola Lingkungan (BPL) Muara Angke dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan kawasan delta Muara Angke. Selain itu, untuk melayani transaksi hasil tangkapan ikan dari nelayan di Kali Asin maka didirikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke.

Berdasarkan SK Gubernur No. 598 Tahun 1987, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melepaskan sebidang lahan di Angke Kapuk berupa lahan tambak seluas 10 Ha untuk ditukar dengan lahan di delta Muara Angke yang dikuasai Departemen Kehutanan seluas ± 72 Ha (tidak termasuk kawasan Suaka Margasatwa). Pada tahun 1990, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kawasan delta Muara Angke sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan dan Pusat Pembinaan Kegiatan Nelayan di Provinsi DKI Jakarta seluas ± 65 Ha. Hal tersebut sesuai dengan SK Gubernur No. 598 Tahun 1990 tentang Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke Jakarta Utara sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Daerah dan Pusat Pembinaan Kegiatan Perikanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana kedudukan, tugas dan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan bagian dari Dinas Perikanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan dengan kepentingan perikanan dilarang dilakukan pada kawasan tempat

pendaratan ikan Muara Angke Jakarta Utara. Untuk mengelola dan mengembangkan kawasan yang berbasis perikanan maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Perikanan Provinsi DKI Jakarta, UPT dimaksud merupakan hasil penggabungan antara BPL Muara Angke dengan TPI Muara Angke.

Pada tahun 1991, terjadi pertukaran lahan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Departemen Kehutanan secara resmi dilakukan oleh kedua belah pihak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Tukar Guling Lahan tanggal 13 Februari 1991. Kemudian pada tahun 1995, berdasarkan SK Gubernur No. 125 Tahun 1995, sebagian lahan seluas 2 Ha di darat dan 4 Ha di laut di Kawasan Muara Angke diserahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk keperluan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kapal Penumpang dari dan ke Kepulauan Seribu.

Tahun 1999, sebidang tanah seluas 1 Ha digunakan untuk keperluan Pendirian Lapangan Sepak Bola Muara Angke, pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada tahun 2003, lahan seluas 6.800 m^2 di Muara Angke diserahkan pengelolaannya kepada PD. Pasar Jaya Muara Angke untuk keperluan pendirian pasar tradisional.

Pada tahun 2006, berdasarkan SK Gubernur No. 1263 Tahun 2006, dilakukan pembuatan Panduan Rancang Kota Kawasan Muara Angke yang ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menunjuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (UPT. PKPP & PPI) Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola tanah dan bangunan milik Pemerintah di Kawasan Muara Angke. Hal tersebut sesuai dengan SK Gubernur No. 2364/073.541 Tahun 2006.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui SK Gubernur No. 3761/076.3 Tahun 2008 menunjuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (UPT. PKPP & PPI) Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan tanah dan bangunan milik Pemerintah di Kawasan Muara Angke. Selain itu, berdasarkan permintaan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu maka lahan seluas 1.000 m^2 di Muara Angke diberikan untuk

keperluan pengembangan kantor perwakilan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pada tahun 2010, sebagai bentuk penguatan organisasi UPT. PKPP & PPI maka tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pengelolaan Kawasan Muara Angke disempurnakan sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 192 Tahun 2010. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 44 Tahun 2015, dilakukan pembentukan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. UPPP merupakan penggabungan dari UPT. PKPP & PPI dengan UPT. BTPI).

Pada tahun 2016 dilakukan usulan revisi Panduan Rancang Kota atau *Urban Design Guidelines* (PRK/UDGL) Muara Angke. Pada tahun 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pelabuhan Perikanan Muara Angke sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 13/KEPMEN-KP/2017 tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Muara Angke sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Ketetapan dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018 dilakukan finalisasi revisi PRK Muara Angke seluas 72 Ha. Berikut adalah kronologis kepemilikan lahan Kawasan Muara Angke.

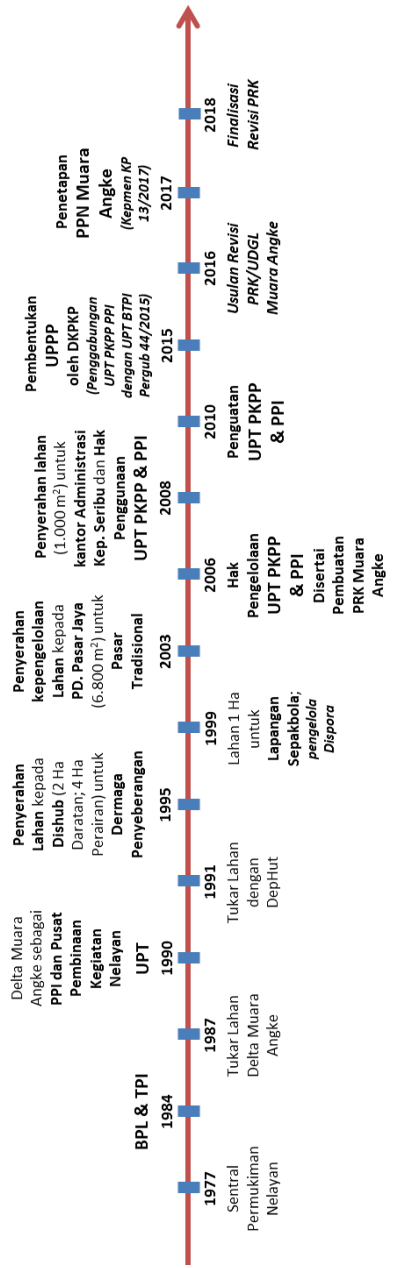

Tabel II.1. Kronologis Kepemilikan Lahan Kawasan Muara Angke

Kawasan Muara Angke memiliki lahan seluas ± 72 Hektar, secara geografis termasuk Delta Kali Angke dan merupakan Zona Tanaman Mangrove yang telah berubah menjadi pusat pembinaan perikanan di Provinsi DKI Jakarta. Saat ini selisih elevasi permukaan tanah dan ketinggian permukaan air laut di Kawasan Muara Angke sekitar ± 1 meter dan memiliki tanah yang lunak. Kawasan Muara Angke telah menjadi zona industri perikanan terintergrasi yang meliputi Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan dan pengolahan perikanan yang meliputi Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) serta pengolahan semi modern dan modern yang dilengkapi dengan pendingin dan *cold storage*. Untuk mendukung kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke, terdapat *docking* dan bengkel yang berlokasi di Eks BTPI, SPBU serta tempat usaha seperti Pujaseri, toko/kios perbekalan, warungan dan resto apung.

Dalam Kawasan Muara Angke terdapat berbagai kegiatan selain perikanan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kali Adem yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Terminal Bus Muara Angke, Pasar Tradisional, Dinas Pemadam Kebakaran, Puskesmas Pluit, Lapangan Sepak Bola serta Perumahan Nelayan. Akan tetapi, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini hanya mengkaji kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta yaitu kegiatan perikanan yang berada di Kawasan Muara Angke. Luas wilayah kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah seluas ± 35,86 Ha dari ± 72 Ha Kawasan Muara Angke. Sedangkan untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), SPBU, Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan dan Resto Apung) serta sarana penunjang seperti kolam limbah, mangrove, toilet umum, unit pengolahan air laut, saluran drainase, sarana ibadah dan sarana parkir.

Kesesuaian Lokasi Kegiatan dengan Tata Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ), perencanaan pada Kawasan Muara Angke dilakukan dengan:

1. Pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro Kali Muara Angke (Pasal 184 ayat 1).
2. Pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (Pasal 186 ayat 1).
3. Peruntukan ruang untuk fungsi lindung sebagai kawasan suaka margasatwa (Pasal 189 ayat 1).
4. Pengembangan hutan bakau untuk fungsi lindung (Pasal 189 ayat 1).
5. Pengembangan kawasan pembangunan terpadu untuk fungsi pelabuhan ikan, wisata, industri dan pergudangan, serta hunian (Pasal 189 ayat 1).

Selain itu, Kawasan Muara Angke telah memiliki Ketetapan Rencana Kota No. 550/5.2/31/-1.711.53/2017/U yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 April 2017 (bukti terlampir). Ketetapan Rencana Kota (KRK) ini berlaku untuk seluruh Kawasan Muara Angke. Luas lahan pada KRK ini adalah sebesar 633.483,89 m^2 dengan peruntukkan lahan untuk zona Perkantoran; Perdagangan dan Jasa KDB Rendah; Terbuka Biru; Perumahan Vertikal; Industri dan Pergudangan; Jalur Hijau; Taman Kota; Perkantoran; Perdagangan dan Jasa; Perumahan KDB-Sedang-Tinggi; Pelayanan Umum dan Sosial.

Berdasarkan KRK, masih ada kegiatan yang lokasinya tidak sesuai dengan rencana peruntukannya, seperti perkantoran yang terletak pada Sub Zona Industri dan Pergudangan (I.1), lokasi PHPT yang terletak pada Sub Zona Perumahan KDB Sedang (R.4), Sub Zona Rumah Susun (R.7), Sub Zona Rumah Susun Umum (R.8) dan Sub Zona Perkantoran, Perdagangan & Jasa KDB Rendah (K.3). Selain perkantoran dan PHPT, lokasi kegiatan/usaha sudah sesuai dengan Ketetapan Rencana Kota No. 550/5.2/31/-1.711.53/ 2017/U.

Penggunaan Lahan

Luas wilayah kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah seluas ± 35,86 Ha dari ± 72 Ha Kawasan Muara Angke dengan rincian sebagai berikut.

Tabel II.1 Peruntukan Lahan Kegiatan Perikanan di Kawasan Muara Angke Berdasarkan Kondisi Eksisting

No.	Komponen	Luas (m^2)	%
1.	Luas Lahan	358.600,00	
2.	Luas Lahan Tertutup Bangunan		
	a. Kantor dan Unit Usaha	69.717,11	
	Subtotal	**69.717,11**	
3.	Luas Lahan Terbuka Hijau		
	Taman dan Ruang Terbuka Hijau	17.871,05	
	Subtotal	**17.871,05**	
4.	Luas Lahan Terbuka Biru		
	a. Kolam Limbah	3.899,02	
	b. Mangrove	20.463,47	
	Subtotal	**24.362,49**	
5.	Luas Lahan Terbuka Non Hijau		
	a. Area Parkir	133.094,10	
	b. TPS	735,00	
	c. Jalan dan Sirkulasi	112.820,25	
	Subtotal	**246.649,35**	
6.	Prosentase KDB		19,44
7.	Prosentase KDH		4,98

Sumber : Analisis Tim DELH, 2020

Pola penggunaan lahan di Kawasan Muara Angke dapat dilihat dilihat pada Gambar II.1 sebagai berikut:

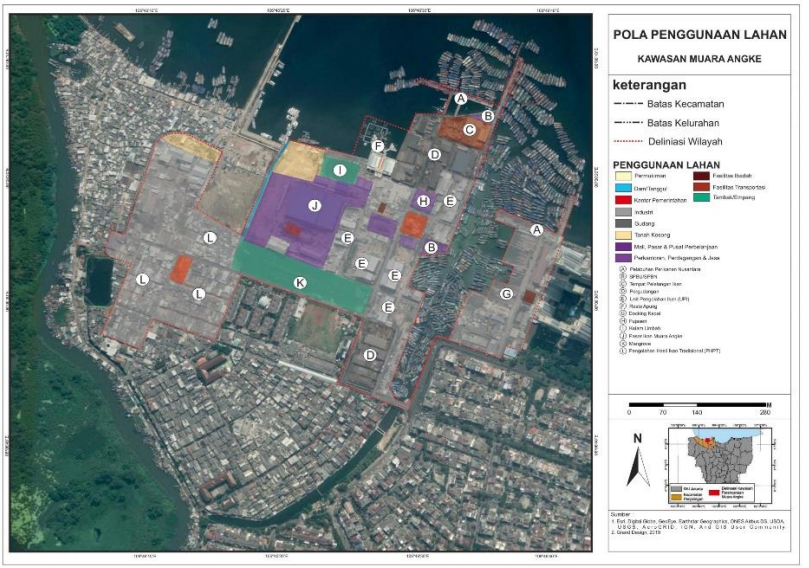

Gambar II.1 Peta Pola Penggunaan Lahan di Kawasan Muara Angke

Kegiatan Perikanan di Kawasan Muara Angke

Dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup ini, akan dievaluasi kegiatan perikanan yang telah berjalan di Kawasan Muara Angke serta menformulasikan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai bagian dari upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pemantauan lingkungan selanjutnya. Kegiatan perikanan yang ada di Kawasan Muara Angke dapat dilihat pada **Tabel II.3**.

Tabel II.2. Kegiatan Perikanan di Kawasan Muara Angke

No.	Nama Kegiatan
A.	**Operasional Kegiatan Perikanan**
1.	Pelabuhan Perikanan Nusantara
2.	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3.	Pasar Ikan Muara Angke
4.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)
5.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)
6.	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)

No.	Nama Kegiatan
7.	Aktivitas Perkantoran
8.	SPBU
9.	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)
B.	**Operasional Sarana Penunjang**

Sumber : Tim Studi DELH, 2019

Penanggung jawab kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, pengelola kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke dilimpahkan kepada Uni Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) Muara Angke. Setelah Izin Lingkungan terbit, pengelolaan kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke akan dilaksanakan oleh masing-masing unit usaha atau kegiatan sedangkan pemantauannya akan dilaksanakan oleh UPPP Muara Angke.

A. Operasional Kegiatan Perikanan

1. Pelabuhan Perikanan Nusantara

Pelabuhan Perikanan Nusantara memberikan pelayanan kepelabuhanan yang diberikan kepada kapal yang keluar masuk Pelabuhan Perikanan Nusantara meliputi:

a. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dikeluarkan oleh petugas pelabuhan setelah memeriksa:
   1) Kapal, untuk memastikan bahwa kapal tersebut adalah kapal perikanan.
   2) Muatan, untuk memastikan bahwa yang diangkut adalah hasil tangkapan perikanan.
   3) Dokumen, untuk memastikan keabsahan dokumen yang meliputi SIKPI, SIPI, SIUP, *Log Book*, Pas Besar, Surat Ukur dan lain-lain.
b. Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan (STBLK) bagi kapal yang berangkat dari pelabuhan.
c. Pelayanan administrasi di Pelabuhan berupa surat keluar, meliputi:
   1) Surat Keterangan Pendaratan Ikan;
   2) Surat Keterangan Rekomendasi Pangkalan;

3) Surat Keterangan Keberadaan Kapal;
4) Surat Keterangan Buku Layanan Bunker Baru;
5) Surat Keterangan Perpanjang Buku Layanan Bunker.

d. Pencatatan kapal perikanan yang melakukan bongkar ikan dan mendaratkan ikannya.
e. Pemberian rekomendasi penyaluran BBM bersubsidi dan BBM non bersubsidi.
f. Pengisian *log book* oleh nahkoda kapal sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.48/MEN/2014 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan serta dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang optimal dan berkelanjutan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara terdiri dari Pelabuhan Barat dan Pelabuhan Timur. Pelabuhan Barat terletak di sebelah utara Resto Apung sedangkan Pelabuhan Timur terletak di sebelah utara *Docking*. Pelabuhan Barat dan Timur berfungsi sebagai tempat hasil bongkar muat hasil tangkapan ikan. Kegiatan tambat labuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara lebih banyak terjadi di Muara Kali Asin yang memiliki luas 63.993 m^2 karena terjadi *over capacity*. Fasilitas pelabuhan yang tersedia saat ini sepanjang 430 m dengan 20 unit jalur *slipway.* Saat ini, sudah ada penambahan dermaga tipe T sepanjang 100 m sehingga Pelabuhan Perikanan Nusantara dapat menampung 1.336 kapal, dimana didominasi oleh kapal dengan jenis 21-30 GT, yaitu sebanyak 565 kapal.

Tabel II.3. Database Kapal Perikanan di Pelabuhan Barat dan Timur Dirinci per *Gross Tonage*

No.	Jenis Kapal	Jumlah (Kapal)
1.	1-10 GT	33
2.	11-20 GT	49
3.	21-30 GT	565
4.	31-50 GT	239
5.	51-80 GT	316
5.	81-100 GT	101
6.	Di atas 100 GT	33
Total		**1.336**

Sumber: UPPP Muara Angke, 2019

Tabel II.4. Database Kapal Perikanan di Kawasan Muara Angke Dirinci per Alat Penangkap Ikan

No.	Jenis Alat Penangkap Ikan	Kode Alat Penangkap Ikan	Jumlah (Kapal)
1.	Boke Ami/*Cast Nett*	BA/CN	1.080
2.	Angkutan Kapal	AK	38
3.	*Purse Seine*	PS	107
4.	*Gill Nett*	GN	33
5.	Pancing Cumi	PC	62
6.	*Hand Line*	HL	6
7.	Rawe Tuna (*Long Lane*)	RT	2
8.	*Lion Bun*	LB	4
9.	Bubu	BB	4
Total			**1.336**

Sumber: UPPP Muara Angke, 2019

Tabel II.5. Data Kapal Masuk Keluar di Pelabuhan Barat dan Timur

No.	Tahun	Kapal Masuk (Kapal)	Kapal Keluar (Kapal)
1.	2018	4.271	4.623
2.	2017	4.049	4.943
3.	2016	4.556	-
Jumlah		**12.876**	**9.566**

Sumber: UPPP Muara Angke, 2019

Tabel II.6. menjelaskan tentang rotasi kapal yang keluar masuk pelabuhan. Pada **Tabel II.6.** terlihat bahwa kapal yang keluar lebih banyak dari pada kapal yang masuk. Hal ini terjadi karena kapal-kapal tersebut memiliki tujuan *fishing ground* yang berbeda-beda jaraknya dari lokasi pelabuhan sehingga jumlah kapal yang keluar lebih banyak karena untuk kembali ke pelabuhan waktunya berbeda-beda.

Terdapat 1.336 kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara yang dimiliki oleh 577 pengusaha perikanan tangkap dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 19.986 orang. Berikut adalah rincian

tenaga kerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara berdasarkan jenis kapal.

Tabel II.6. Rincian Tenaga Kerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Berdasarkan Jenis Kapal

No.	Jenis Kapal	Tenaga Kerja (Orang)
1.	1-10 GT	132
2.	11-20 GT	490
3.	21-30 GT	7.345
4.	31-50 GT	3.585
5.	51-80 GT	5.688
5.	81-100 GT	2.020
6.	Di atas 100 GT	726
Jumlah		**19.986**

Sumber: UPPP Muara Angke, 2019 dan Analisis Tim DELH, 2020

Gambar II.2. Pelabuhan Perikanan Nusantara

Gambar II.3. Lokasi Muara Kali Asin

2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke merupakan salah satu fasilitas yang ada di Kawasan Muara Angke yang dikelola oleh Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) Muara Angke berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berfungsi meningkatkan kesejahteraan nelayan karena melalui pelelangan diharapkan tercapai harga yang optimal. Saat ini, TPI Muara Angke sedang melakukan pembenahan untuk mencapai TPI yang higienis yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, salah satunya adalah Laboratorium Mini yang nantinya akan menuju TPI higienis.

Sistem transaksi jual beli ikan di TPI oleh lelang melalui penawaran meningkat antara penjual dan pembeli yang menghasilkan penjualan ikan kepada orang-orang yang mengajukan penawaran tertinggi. Tidak ada batasan mengenai jenis ikan yang dapat dilelangkan. Akan tetapi, terdapat syarat-syarat tertentu bagi peserta lelang yang tertera pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke Jakarta.

Secara umum, berikut adalah proses yang terjadi di TPI.

a. Proses Bongkar Ikan

Pembongkaran ikan berlangsung mulai pukul 06.30 WIB yang dilakukan oleh:

1) Anak Buah Kapal (ABK) disaksikan pemilik, pengurus kapal atau perusahaan masing-masing; atau
2) Petugas Buruh Bongkar dengan ABK, pengurus, pemilik atau perusahaan masing-masing.

Tahapan yang terjadi pada saat proses bongkar ikan adalah sebagai berikut.

1) Pembongkaran ikan dari palka dilakukan oleh ABK atau nelayan
2) Pemisahan/penyortiran ikan sesuai dengan jenis dan ukuran ikan
3) Menempatkan ikan ke dalam wadah bak/*trays*
4) Memisahkan kualitas ikan dan mutu ikan

Gambar II.4. Proses Bongkar Ikan

b. Proses Penimbangan, Pengangkutan dan Pengawasan

Proses Penimbangan, Pengangkutan dan Pengawasan berlangsung mulai pukul 06.30 WIB.

1) Petugas Tempat Pelelangan Ikan (Karyawan PEMDA)
2) Pencatatan Hasil Tangkapan:
   - Nama kapal, pemilik, pengurus, perusahaan
   - Tanggal, gross ton (GT), tanda selar, SIPI

- Jenis ikan, mutu, ukuran, berat ikan (kg)
- Melakukan pengawasan pembongkaran, penyortiran ikan
- Menyiapkan timbangan, gantungan timbangan
- Pemberian label timbangan

3) Petugas buruh, karyawan perusahaan masing-masing
   - Penimbangan
   - Pengangkutan langsung ke *cold storage*, UPI, Pasar Pengecer, PHPT menggunakan gerobak, mobil
   - Pengangkutan ikan ke lantai lelang menggunakan lori roda 2, lori roda 4, gerobak
   - Penyusunan ikan-ikan yang akan dilelang ke lantai lelang sesuai dengan nama kapal per pemilik per jenis ikan

Gambar II.5. Proses Penimbangan

c. Proses Sebelum Lelang

1) Penyusunan ikan-ikan yang akan dilelang sesuai dengan nama kapal, jenis ikan dan pemilik atau pengurus kapal
2) Peserta lelang diwajibkan menyerahkan/menyimpan uang jaminan ke kasir pelelangan sesuai dengan besaran yang akan dilelang (tidak ada batasan)

3) Kasir menerima uang jaminan dari peserta lelang, diberikan tanda terima sementara dan kasir memberikan kartu peserta lelang
4) Petugas juru lelang melakukan pengontrolan/pengawasan ikan-ikan yang akan dilelang
5) Petugas mutu melakukan pengambilan sampel/contoh ikan untuk diuji di laboratorium mini di TPI
6) Menyiapkan buku bakul
7) Pengecekan *sound system*
8) Juru lelang melihat catatan uang jaminan peserta lelang dan berkoordinasi dengan petugas kasir

Gambar II.6. Proses Penyusunan Ikan

d. Proses Lelang Ikan

1) Dilakukan oleh petugas juru lelang
2) Kasir, juru bakul/buku, juru hitung
3) Peserta lelang minimal 3 orang atau lebih
4) Dalam mengikuti lelang, peserta lelang diwajibkan menggunakan kartu lelang
5) Pada saat lelang, pemilik atau pengurus ikan berada di samping juru lelang

6) Diawali dengan penyebutan nama kapal atau perusahaan, pemilik/pengurus ikan
7) Penyebutan jenis ikan dimulai dengan harga terendah sampai harga tertinggi, tinggal satu peserta lelang diputuskan oleh juru lelang pemenangnya
8) Jenis ikan, harga, no. pemenang lelang, berat ikan (kg), jumlah *trays*
9) Pencatat lelang oleh juru bakul/buku mengikuti juru lelang apa yang disebutkan oleh juru lelang
10) Juru hitung menghitung besaran lelangan per pemenang lelang sesuai peserta lelang mendapatkan ikan lelangan
11) Apabila kelebihan lelangan dengan uang jaminan maka juru hitung memberikan kode kepada juru bakul untuk memanggil peserta lelang tersebut untuk menambah uang jaminan, apabila tidak menambah maka peserta lelang terebut diberhentikan atau tidak mengikuti lelang lagi
12) Kasir menerima uang tambahan jaminan tersebut dan memberikan tanda bukti tambahan ke 2, 3 dan seterusnya
13) Di dalam pencatatan lelang ada juga pemilik ikan mencatat mengikuti juru lelang dengan tujuan untuk pencocokan data hasil lelangan tersebut.

Gambar II.7. Proses Lelang Ikan

e. Proses Input Data

1) Menjumlahkan hasil lelangan dari buku bakul
2) Mencocokkan hasil lelangan dengan buku catatan pengurus/pemilik kapal
3) Menginput data ke dalam komputer hasil lelangan dari juru bakul sesuai yang dicatat oleh petugas bakul
4) Mencetak tagihan kapal hasil lelangan dan pembayaran kapal
5) Mencetak tagihan peserta lelang dan pembayaran kapal
6) Mencetak tagihan peserta lelang hasil lelangan
7) Merekapitulasi hasil lelangan per hari
8) Menginput data produksi Opw (ikan non lelang)
9) Mencetak data produksi kapal yang di Opw
10) Merekapitulasi data produksi kapal yang di Opw

f. Proses Pembayaran Peserta Lelang dan Pembayaran Kapal

1) Petugas kasir/bendahara
2) Menerima *print out* pembayaran per pemenang lelang dan jumlah rekapitulasi pembayaran lelang
3) Menerima *print out* pembayaran per kapal dan jumlah rekapitulasi pembayaran kapal/nelayan
4) Menjumlahkan pembayaran pemenang lelang dari hasil lelangan dengan uang jaminan apabila ada kekurangan dari uang jaminannya terebut maka pemenang lelang menambah kekurangannya. Sebaliknya apabila jumlah lelangan lebih kecil dari uang jaminannya maka uang tersebut dikembalikan ke peserta lelang
5) Merekapitulasi jumlah seluruh uang hasil lelangan dari pemenang lelang
6) Membayar hasil lelangan kepada pemilik atau pengurus kapal sesuai dengan nota perhitungan nilai lelangnya
7) Bukti tanda terima pengambilan uang lelangan dari aksir ke pemilik kapal

Gambar II.8. Lantai Lelang

Tabel II.7. Produksi Ikan dan Nilai di Tempat Pelelangan Ikan Bulan Juli 2019

No.	Tanggal	Jumlah		Total KM/CST	Produksi		Totak Produksi (kg)
		Kapal (KM)	*Cold Storage*		Lelang (kg)	Non Lelang Opw (kg)	
1.	1-07-2019	6	-	6	8.191	62.192	70.383
2.	2-07-2019	4	-	4	1.941	26.994	28.935
3.	3-07-2019	9	2	11	2.746	65.572	68.318
4.	4-07-2019	10	4	14	5.276	70.512	75.788
5.	5-07-2019	15	-	15	2.256	57.318	59.574
6.	6-07-2019	5	1	6	2.728	32.635	35.363
7.	7-07-2019	3	-	3	-	19.325	19.325
8.	8-07-2019	16	3	19	22.087	69.399	80.486
9.	9-07-2019	4	4	8	27.354	27.005	44.359
10.	10-07-2019	7	2	9	9.096	44.955	54.051
11.	11-07-2019	9	1	10	27.651	61.372	89.023
12.	12-07-2019	14	2	16	10.358	81.830	92.188
13.	13-07-2019	6	1	7	2.805	31.709	34.514
14.	14-07-2019	7	-	7	-	39.189	39.189

No.	Tanggal	Jumlah		Total KM/CST	Produksi		Totak Produksi (kg)
		Kapal (KM)	*Cold Storage*		Lelang (kg)	Non Lelang Opw (kg)	
15.	15-07-2019	7	3	10	11.628	42.763	54.391
16.	16-07-2019	5	4	9	12.842	42.389	55.231
17	17-07-2019	13	-	13	18.786	113.800	132.586
18.	18-07-2019	7	4	11	6.839	73.199	80.038
19.	19-07-2019	4	2	6	9.525	39.743	49.268
20.	20-07-2019	4	-	4	16.589	27.087	43.676
21.	21-07-2019	4	2	6	11.650	19.414	31.064
22.	22-07-2019	6	1	7	6.903	96.789	103.692
23.	23-07-2019	4	2	6	9.059	20.862	29.921
24.	24-07-2019	7	2	9	5.861	31.817	37.678
25.	25-07-2019	8	3	11	10.284	41.221	51.505
26.	26-07-2019	3	2	5	7.060	10.997	18.057
27.	27-07-2019	8	3	11	6.020	53.008	59.028
28.	28-07-2019	3	-	3	3.375	6.674	10.049
29.	29-07-2019	18	3	21	9.089	120.171	129.260
30.	30-07-2019	9	4	13	12.720	61.680	74.400
31.	31-07-2019	12	1	13	6.634	71.687	78.321
	Jumlah	**237**	**56**	**293**	**266.353**	**1.563.308**	**1.829.661**

Sumber : Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke, 2019

3. Pasar Ikan Muara Angke

Pasar Ikan Muara Angke merupakan salah satu rantai distribusi yang aktivitasnya dilakukan pada malam hari. Akan tetapi, pada pagi hari pun tetap ada aktivitas di pasar ikan ini karena tidak diberlakukan jam buka pasar. Ikan yang diperdagangkan selain dari TPI Muara Angke dan Muara Baru, juga berasal dari luar daerah, seperti Tuban, Pekalongan, Cilacap, dan sebagainya yang transportasinya menggunakan truk. Pembeli ikan

di Pasar Ikan Muara Angke mayoritas berasal dari daerah Jabodetak dan Serang.

Pasar Ikan Muara Angke terbagi menjadi 2 (dua) area, yaitu:

a. Pasar Grosir

Pasar grosir ikan di Kawasan Muara Angke memiliki luas 9.800 m^2 dengan produksi ikan yang dipasarkan pada tahun 2018 sebesar 56.151.871 kg. Meskipun disebut pasar grosir, namun pedagang ikan di area ini juga melayani pembelian secara eceran. Bangunan pasar grosir terdiri dari 2 lantai bangunan, dimana lantai 1 berfungsi untuk berjualan dan lantai 2 berfungsi sebagai kantor pasar ikan. Pasar grosir ini menyediakan 1.358 buah lapak untuk pedagang dengan sistem sewa. Besarnya tarif sewa lapak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, yaitu Rp 6.000,00/m^2/bulan. Ukuran lapak di pasar grosir adalah 2 m x 1,7 m sehingga biaya sewa yang harus dibayarkan tiap bulannya adalah Rp 20.400,00 per lapak. Kegiatan pasar grosir ini dapat menyerap tenaga kerja sejumlah 2.716 orang.

Ikan yang dijual di Pasar Grosir sebagian besar berasal dari luar daerah Jakarta yang didatangkan melalui darat, dengan jumlah prosentase sebesar 90%. Sedangkan sisanya berasal dari TPI dan sisa sortiran dari UPI/Cold Storage. Jenis ikan yang dijual sangat beragam dari berbagai jenis ikan laut maupun ikan tawar.

Transaksi ekonomi yang terjadi di Pasar Grosir sebagai tempat kegiatan pemasaran di Kawasan Muara Angke cukup tinggi nilainya. Pasar Grosir ini beroperasi dari sore hingga dini hari. Rata-rata ikan yang dijual di Pasar Grosir setiap harinya mencapai 208,6 ton dengan nilai penjualan mencapai 8,5 miliar rupiah. Bila dibagi dengan jumlah lapak yang ada, maka omset harian untuk masing-masing unit lapak per harinya dapat mencapai 6 juta rupiah.

Untuk menjaga kualitas ikan tetap agar tetap segar, pedagang menggunakan es batu. Dengan kondisi tersebut, ikan hanya dapat bertahan beberapa hari saja dan seringkali menyisakan ikan yang tidak terjual. Adapun sisa penjualan ikan di Pasar Grosir yang tidak laku selama beberapa hari akan

masuk ke PHPT untuk diolah menjadi ikan asin dengan harga jual lebih rendah dari harga jual normal. Sisa penjualan tersebut seharusnya dapat dikurangi dengan adanya penyediaan Gudang *cool room* khusus untuk pedagang ikan di Pasar Grosir. Skema Kegiatan Usaha Pasar Grosir Ikan di Kawasan Muara Angke dapat dilihat pada **Gambar II.9**

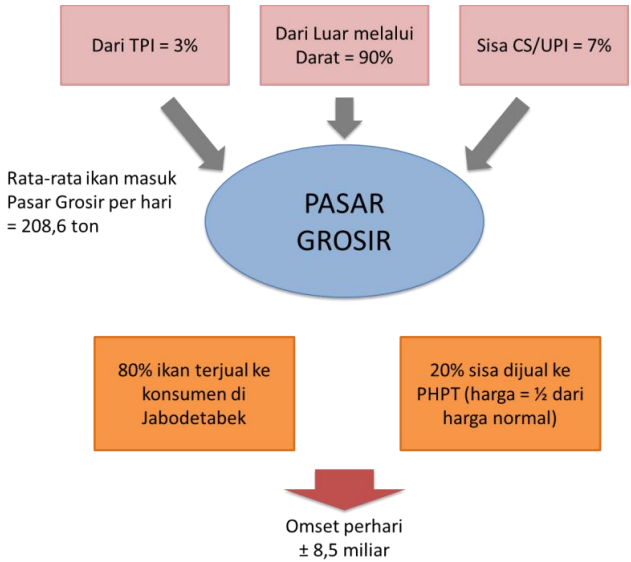

Sumber : Penyusunan Grand Desain Kawasan Muara Angke, 2019

Gambar II.9. Skema Kegiatan Usaha Pasar Grosir Ikan di Kawasan Muara Angke

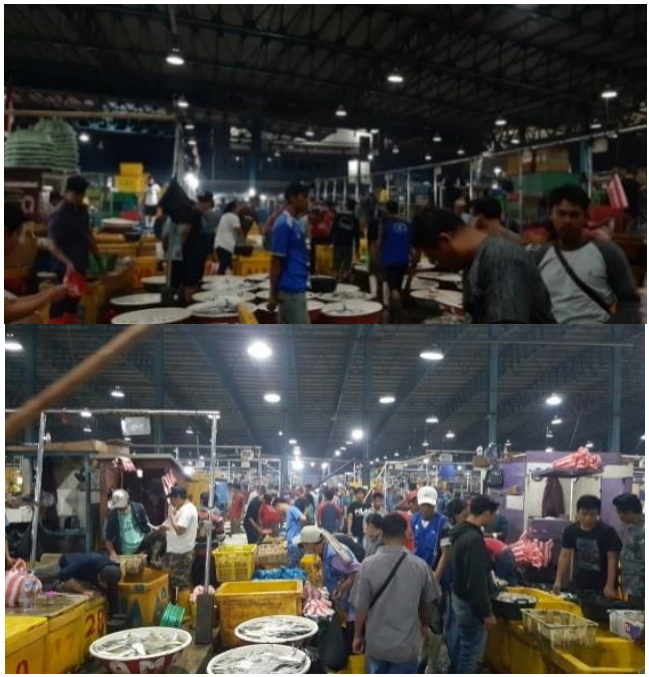

Gambar II.10. Suasana Pasar Grosir pada Malam Hari

Gambar II.11. Suasana Pasar Grosir pada Pagi Hari

Gambar II.12. Ikan yang Dijual di Pasar Grosir

b. Pasar Eceran

Di area pasar eceran ini, pembeli hanya bisa membeli ikan dengan sistem eceran. Pasar eceran ini terdiri dari 1 lantai bangunan dengan jumlah lapak sebanyak 89 dengan ukuran 2 m x 2 m. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, biaya sewa yang harus dibayarkan tiap bulannya adalah Rp 24.000,00 per lapak. Kegiatan pasar eceran dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 178 orang.

Gambar II.13. Pasar Eceran Muara Angke

Gambar II.14. Kondisi Pasar Eceran Malam Hari

4. Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)

Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) merupakan pengolahan hasil perikanan dengan jenis pengolahan yang terdiri dari kegiatan pengasinan, pengasapan ikan, pengolahan kulit ikan pari dan pengolahan limbah ikan. Produk yang dihasilkan dari PHPT antara lain ikan asin, cumi asin, pindang asap, trasi, penyamakan kulit ikan pari serta pupuk organik cair. PHPT berada di atas lahan seluas 5 ha dan terdapat 207 unit pengolah dengan jumlah pengusaha yang aktif sebanyak 133 pengusaha. PHPT dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta dan beroperasi sejak tahun 1984. Area PHPT dibagi menjadi 12 blok, yaitu blok A sampai blok K serta blok asap PHPT. Produksi rata-rata di PHPT sebesar 525 ton/bulan.

Sebagian besar ikan olahan PHPT merupakan ikan dengan kualitas rendah yang merupakan sisa dari UPI dan Pasar Grosir dengan prosentase sebesar 65%. Sebagian lainnya berasal dari TPI

sebanyak 20% dan sebagian lainnya sebanyak 15% dipesan dari luar daerah melalui darat.

Terdapat 2 macam proses pengasinan di PHPT, yaitu:

a. Dengan Dimasak
   Ikan dicuci hingga bersih kemudian direbus dengan menggunakan air garam selama 5 menit. Setelah itu, ikan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari.
b. Tanpa Dimasak
   Ikan dicuci hingga bersih kemudian direndam dengan air garam. Ikan sebanyak 5 kuintal membutuhkan garam 80 kg. Perendaman ini dilakukan selama 1 hari. Setelah itu, ikan dicuci untuk kemudian dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari.

Total tenaga kerja yang terserap dengan adanya PHPT adalah sebanyak 2.010 orang.

Gambar II.15. Suasana PHPT

Gambar II.16. Proses Pencucian Ikan

Gambar II.17. Proses Pengambilan Kulit Ikan Pari

Gambar II.18. Proses Pemasakan Ikan

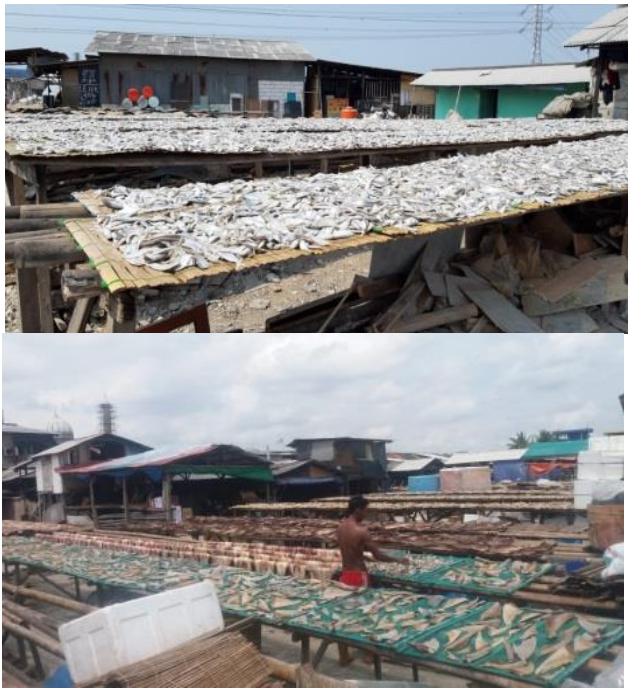

Gambar II.19. Proses Penjemuran Ikan

Gambar II.20. Pupuk Organik Cair

5. Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Untuk mendukung kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke terdapat sekitar 74 Unit Pengolahan Ikan (UPI) dengan luas bangunan berkisar 24-2.000 m^2 yang terdiri dari 36 unit pengepakan ikan dan 38 unit *cold storage*. Pengepakan ikan dilakukan dalam kondisi beku ataupun segar. Unit Pengolahan Ikan (UPI) tersebut berada pada Zona Industri Perikanan yang sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1263 Tahun 2006. Jumlah tenaga kerja yang terserap dengan adanya kegiatan UPI adalah sebanyak 4.599 orang.

Produk hasil perikanan dari Unit Pengolahan Ikan tersebut dipasarkan secara lokal Jabodetabek, Surabaya, Bandung maupun ekspor (Singapura, Malaysia, Taiwan, Cina, Hongkong dan Eropa). Banyaknya perusahaan yang melakukan adalah 14 perusahaan. Akan tetapi, yang sudah memiliki perizinan sebagai persyaratan ekspor (SKP, HACCP, dan HC) hanya 7 perusahaan yaitu PT. Prima Indo Bahari, PT. Alama Segar Jaya, PT. Sumber Mina Rezeki, PT. Samudera Sejahtera Sentosa, PT. Lautan Mutiara Jaya, PT. Mitranian Anugraha Samudera Indo, dan PT. Kamila Samudera Makmur.

Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kawasan Muara Angke sebagian besar mendapat pasokan ikan dari ikan laut di TPI Muara Angke dengan kualitas ikan yang cukup bagus. Jika ikan yang

didapatkan masih belum memenuhi pesanan, pengusaha UPI akan memesan ikan dari luar daerah (luar Jakarta) yang didatangkan melalui darat. Rata-rata total ikan yang dilakukan pengolahan/ pengepakan di UPI per harinya mencapai 154,6 ton.

Total kapasitas *cold storage* baik yang dibangun oleh Pemerintah maupun pihak swasta di Kawasan Muara Angke adalah sebesar 12.437 ton dari total 38 unit *cold storage*.

Tabel II.8. Data *Cold Storage* di Kawasan Muara Angke

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat Izin/Penunjukan	Kapasitas Cold Storage (Ton)
1	PT. Prima Indo Bahari	No. 1547/2014	150
2	UD. Lautan Mutiara	No. 645/2015	900
3	Kop. Putri Salju	No. 45/2018	50
4	PT. AGB Tuna	No. 518/085	400
5	PT. AGB ES	No. 518/085	1.500
6	PT. Marcelindo Citra Lestari	No. 37/2016	1.500
7	UD. Mina Sari	No. 44/2016	150
8	PT. Alam Segar Jaya	No. 57/2017	400
9	PD. Sumber Mina Rejeki	No. 52/2018	300
10	CV. Samudera Pasific Fishindo	51/2018	300
11	PT. Samudera Sejahtera Sentosa	No. 3865/B/-1.823.67	300
12	PT. Mitranian Anugraha Samudraindo	No. 9118/B/-1.823.67	150
13	PT. Multindo Pasifik Mandiri	No. 4721/A/-1.823.67	500
14	PD. Mahkota Samudra Megah	No. 4730/B/-1.823.67	85
15	PT. Dharma Sarana	No. 1188/B/-1.823.67	30
16	PT. Lautan Makmur Sentosa	No. 14669/C/-1.823.67	300

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat Izin/Penunjukan	Kapasitas Cold Storage (Ton)
17	PT. Surya Hasil Laut	No. 14785/B/-1.823.67	75
18	Gerry	No. 14482/C/-1.823.67	30
19	PT. Ocean Pasific	No. 14482/C/-1.823.67	180
20	CV. Kurnia Sea Food Jaya	No. 5492/C/-1.823.67	600
21	CV. Nelayan Barokah	No. 3553/C/-1.823.67	56
22	PT. Prima Indo Bahari	No. 721/2009	1000
23	Koperasi Putri Salju	No. 1260/2012	100
24	UD. Lautan Mutiara	No. 645/2015	900
25	PT. AGB Ice	No. 1880/075.5	600
26	James	No. 89/C/-1.283.67	300
27	CV. Nelayan Barokah	No. 3553/C/-1.823.67	56
28	UD. Sumber Jaya Abadi	No. 3703/C/-1.823.67	20
29	CV. Muara Jaya	No. 130/B/-1.823.67	150
30	PT. Sunrise Marine Product	No. 14784/B/-1.823.67	250
31	CV. Semangat Karya Mandiri	No. 13115/C/-1.823.67	25
32	PT. Sari Ayu Cipta Samudra	No. 3865/B/-1.823.67	150
33	PT. SIF	No. 4721/A/-1.823.67	80
34	UD Usaha Nelayan	No. 4667/-076.53	50
35	PT. Mitra Lautan Mina Sukses	No. 111/-076.53	300

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat Izin/Penunjukan	Kapasitas Cold Storage (Ton)
36	PT. Sinar Lautan Terpadu	No.5146/-076.53	300
37	PT. Dragon Jaya Sentosa	No. 538/076.5	100
38	CV. Sampurna Abadi	No. 832/-078.53	100

Sumber: UPPP Muara Angke, 2018

Gambar II.21. Perusahaan Pengolahan Ikan yang Menggunakan *Cold Storage*

Gambar II.22. Area Produksi di UPI

Gambar II.23. Ikan yang Sudah Siap Didistribusikan

6. Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)

a. Fasilitas *Docking*

Terdapat 4 (empat) unit *docking* kapal dan memiliki 20 jalur di Kawasan Muara Angke dan keempatnya sudah memiliki SK dari Gubernur DKI Jakarta. *Docking* ini hanya melayani perbaikan kapal perikanan. Dalam satu bulan, rata-rata dapat melayani 60 kapal dengan ukuran 10 GT hingga 100 GT. Berikut adalah proses *docking* atau perbaikan kapal.

- Pesan tempat ke pemilik *dock*/bengkel.
- Pemilik kapal mencari tukang untuk memperbaiki kapal serta mencari kebutuhan bahan untuk perbaikan.
- Pihak bengkel menaikkan kapal ke area perbaikan kapal.
- Kapal diperbaiki oleh tukang.

Biaya sewa *dock* per hari berbeda-beda tergantung pemilik fasilitas *docking*. Jumlah tenaga kerja yang terserap dengan adanya kegiatan *docking* adalah sebanyak 80 orang, yang terdiri dari 40 orang tenaga kerja tetap dan 40 orang tenaga kerja *freelance*.

Gambar II.24. Suasana Fasilitas *Docking*

Gambar II.25. Kapal yang Sedang Diperbaiki

Gambar II.26. Proses Pelapisan Bawah Kapal

b. Bengkel

Jasa perbengkelan kapal di Kawasan Muara Angke terdiri dari jasa tenaga perbaikan mesin, perbaikan konstruksi, dan perbaikan alat tangkap. Berdasarkan data *Grand Design* (2019), untuk jasa perbengkelan rata-rata biaya yang dikeluarkan pemilik kapal untuk perbaikan konstruksi kapal yaitu 10 – 30 juta rupiah/tahun, rata-rata biaya jasa tenaga perbaikan adalah 5 – 10 juta rupiah/tahun, dan rata-rata perbaikan alat tangkap adalah 5 juta rupiah/tahun. Berdasarkan data tersebut, nilai potensi ekonomi yang diperoleh dari kegiatan jasa perbengkelan di Kawasan Muara Angke adalah sebesar 52,9 Miliar Rupiah/ tahun. Jumlah tenaga kerja yang terserap dengan adanya kegiatan perbengkelan adalah sebanyak 1.045 orang, yang terdiri dari 495 orang tenaga kerja tetap dan 550 orang tenaga kerja *freelance.*

7. Aktivitas Perkantoran

Aktivitas perkantoran untuk kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berlangsung di kantor Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) Muara Angke. Dalam mengelola fasilitas pelabuhan perikanan, UPPP Muara Angke dibantu oleh Kantor Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kantor Pasar Ikan Muara Angke dan Kantor Pengolahan Hasil Ikan Perikanan Tradisional (PHPT). Berikut rincian tenaga kerja dari aktivitas perkantoran di Kawasan Muara Angke. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kawasan pelabuhan, UPPP Muara Angke didukung

oleh 142 orang yang terdiri dari 21 orang PNS dan 121 orang PJLP. Jumlah pegawai PNS per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.9. Jumlah Pegawai PNS per 31 Desember 2018 Berdasarkan Tugasnya

No.	Fungsi Penugasan	Tenaga Kerja (Orang)
1.	Kepala UPPP	1
2.	Sub Bagian Tata Usaha	9
3.	Satuan Pelaksana Kepelabuhanan	3
4.	Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	7
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	1
	Total	**21**

Sumber: Laporan Tahunan UPPP, 2018

Gambar II.27. Perkantoran di Kawasan Muara Angke

8. SPBU

Terdapat tiga buah stasiun pengisian bahan bakar di lokasi kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke, yaitu SPBU SVE 27, SPBB AKR Koperasi Mina Usaha Sejahtera dan SPBUN Koperasi Perikanan Mina Jaya. Ketiga stasiun pengisian bahan bakar tersebut melayani pembelian bahan bakar untuk umum kecuali SPBUN Koperasi Perikanan Mina Jaya yang hanya melayani pembelian bahan bakar untuk nelayan. Dalam satu hari, SPBU ini dapat melayani 140.000 liter.

Kegiatan di SPBU dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 70 orang tenaga kerja, baik yang bekerja di kantor, toko, maupun melayani pembelian bahan bakar.

Gambar II.28. SPBU SVE 27

9. Tempat Usaha

a. Pujaseri

Pujaseri Muara Angke merupakan pusat jajanan serba ikan yang ada di Kawasan Muara Angke. Pujaseri di Kawasan Muara Angke terletak di depan kantor UPPP. Jumlah pedagang kuliner Pujaseri di Muara Angke berjumlah 29 pedagang. Ikan yang dijual di Pujaseri berasal dari Pasar Ikan Muara Angke.

Gambar II.29. Kondisi Pujaseri

b. Kios/Toko

Kios/toko di Kawasan Muara Angke merupakan kios/ toko yang menyediakan untuk perbekalan untuk aktivitas perkapalan. Bahan yang dijual di kios/toko berupa sembako, pancing dan peralatan/*spare part* untuk kebutuhan kapal.

c. Warungan

Warungan di Kawasan Muara Angke berupa kedai, toko kecil, atau restoran sederhana yang melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitar Kawasan Muara Angke.

d. Resto Apung

Resto Apung digunakan sebagai Wisata Bahari yang ada di Kawasan Muara Angke. Di tempat ini, pengunjung bisa menikmati menu yang telah tersedia atau dapat juga membeli ikan di Pasar Ikan kemudian dimasak di tempat ini. Resto Apung ini terletak di sebelah timur Kolam Limbah. Saat ini Resto Apung belum beroperasi. Ke depannya, Pujaseri akan dipindahkan ke Resto Apung ini. Kegiatan usaha yang

ada di Kawasan Muara Angke ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.065 orang.

B. Operasional Sarana Penunjang

1. Kolam Limbah

Kolam limbah terletak di sebelah utara Unit Pengolahan Air Laut dan memiliki luas 3.899,02 m^2. Kolam limbah ini berfungsi untuk menampung air dari saluran drainase di area Pasar Ikan Muara Angke. Terdapat tiga buah *inlet* di kolam ini dimana masing-masing *inlet* dipasang saringan agar sampah dari drainase tidak ikut masuk ke kolam limbah. Akan tetapi, masih ada sampah yang terikut sehingga setiap harinya sampah tersebut dibersihkan oleh petugas dengan menggunakan getek dan *trays* untuk menampung sampah tersebut.

Gambar II.30. Kolam Limbah

Setiap harinya, air limbah ini disedot dan dibuang ke laut. *Suction* pompa dilengkapi dengan saringan agar tidak ada kotoran yang masuk ke pompa yang dapat menyebabkan pompa rusak. Terdapat empat buah pompa yang terletak di rumah pompa, dimana dua buah pompa merupakan pompa elektrik yang dapat beroperasi 24 jam/hari sedangkan sisanya merupakan pompa manual yang hanya dapat beroperasi 4 jam/hari.

Gambar II.31. Rumah Pompa Kolam Limbah

Gambar II.32. Pompa Air Limbah

Gambar II.33. Pipa *Inlet* Pompa Air Limbah

Gambar II.34. *Discharge* Air Limbah ke Laut dari Rumah Pompa

Sedimen yang terbentuk di kolam limbah dilakukan pengerukan seminggu sekali dengan bantuan *excavator*. Sedimen ini ditimbun di samping kolam limbah. Sebagian besar sedimen ini merupakan sisik ikan. UPPP DKI Jakarta memiliki dua buah *excavator* dengan jenis *amphibi* dan *back hoe loader*.

Dalam perawatan pompa dibutuhkan oli untuk pelumas mesin. Oli bekas ini ditampung di dalam wadah dan dimanfaatkan untuk membersihkan *excavator* dan alat-alat yang lain sehingga tidak ada timbulan oli bekas.

Gambar II.35. *Excavator* untuk Pengerukan Sedimen di Kolam Limbah

2. Mangrove

Terdapat 1 (satu) area mangrove di Kawasan Muara Angke. Lokasi mangrove ini berada di tengah-tengah Kawasan Muara Angke dengan luas 20.463,47 m^2. Jenis tanaman mangrove yang ada di lokasi adalah *Rhizophora mucronata.* Mangrove ini berfungsi sebagai daerah tangkapan hujan dan sebagai Lahan Terbuka Biru.

Gambar II.36. Lokasi Mangrove di Kawasan Muara Angke

Gambar II.37. Mangrove

3. Toilet Umum

Terdapat toilet umum yang terletak di sisi utara Pasar Ikan Muara Angke. Toilet ini dibuka untuk umum selama 24 jam.

Gambar II.38. Toilet Umum

4. Unit Pengolahan Air Laut

Unit pengolahan air laut terletak di sebelah utara Pasar Ikan Muara Angke. Unit ini mengolah air laut yang selanjutnya digunakan untuk membersihkan lapak di pasar ikan serta membersihkan ikan. Berikut adalah skema proses pengolahan air laut.

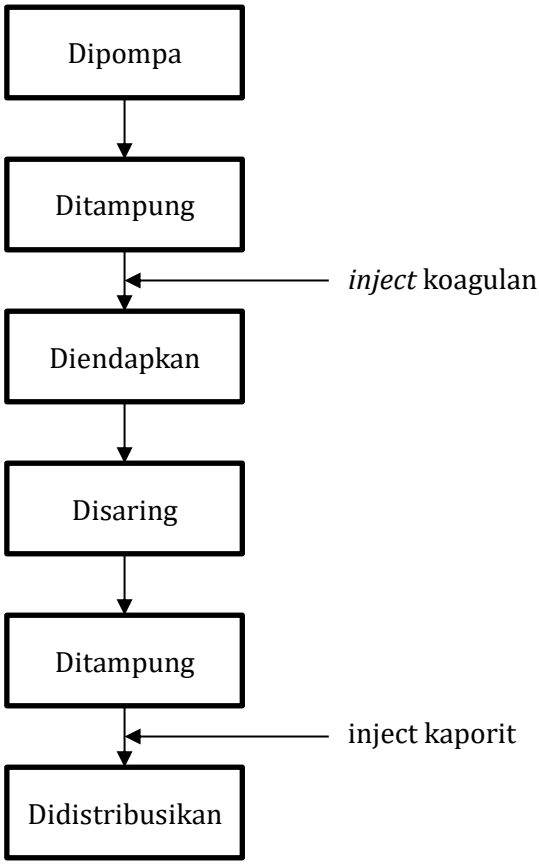

Tabel II.10. Skema Pengolahan Air Laut

Air laut dipompa dan dialirkan ke dalam dua buah tangki air. *Suction* pompa dilengkapi dengan saringan untuk mencegah sampah masuk ke dalam pompa. Setelah itu, pipa diinjeksi dengan koagulan untuk menggumpalkan padatan yang tersuspensi dalam air laut dan ditampung dalam bak pengendap. Bak pengendap ini berjumlah 2 buah. Air dari bak pengendap dialirkan ke filter ini. Filter ini berisi yang karbon dan pasir yang berguna untuk menyaring air. Terdapat dua buah filter di unit pengolahan air laut yang digunakan secara bergantian. Air yang sudah difilter kemudian diinjek dengan kaporit yang ditampung dalam tangki air untuk selanjutnya didistribusikan.

Dalam satu hari, unit pengolahan air laut ini beroperasi empat kali. Dalam satu kali proses, mampu mengolah 50 m^3 air laut. Dengan demikian, unit pengolahan air laut memiliki kapasitas pengolahan 200 m^3/hari. Air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di Pasar Ikan dan PT. Lautan Mutiara Jaya (UPI)

Gambar II.39. Pipa *Discharge* Pompa Air Laut menuju Tangki Penampungan Awal

Gambar II.40.Tangki Penampungan Awal

Gambar II.41. Koagulan Injektor

Gambar II.42. Bak Pengendap

Gambar II.43. Filter Air

Gambar II.44. Tangki Penampung Akhir dan Kaporit Injekor

Gambar II.45. Pipa Distribusi Air Laut yang Telah Diolah

5. Saluran Drainase

Terdapat saluran drainase di sepanjang jalan di Kawasan Muara Angke. Saluran drainase ini berfungsi untuk menampung air bekas kamar mandi maupun air hujan. Karena beberapa posisi saluran drainase lebih rendah dari muka air laut, air yang berada di saluran drainase tidak dapat mengalir ke laut. Oleh karena itu,

apabila saluran drainase sudah penuh, dilakukan penyedotan secara berkala. Khusus untuk saluran drainase di sekitar Pasar Ikan Muara Angke, dialirkan ke kolam limbah. Penanggung jawab dari saluran drainase yang ada di Kawasan Muara Angke adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, pelaksananya adalah UPPP DKI Jakarta.

Gambar II.46. Saluran Drainase di Pasar Ikan Muara Angke

Gambar II.47. Saluran Drainase di Depan UPPP Muara Angke dan di Masjid Jami Nurul Falah

Gambar II.48. Saluran Drainase di Area Pelabuhan Perikanan Nusantara

Gambar II.49. Saluran Drainase ke Arah Muara dari Pasar Ikan Muara Angke

Gambar II.50. Saluran Drainase di Depan Mangrove

Gambar II.51. Kendaraan Penyedot Saluran Drainase

6. Sarana Ibadah

Sarana ibadah yang ada di lokasi kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke adalah sarana ibadah bagi umat Muslim. Terdapat 2 masjid, yaitu Masjid Safinatun Najah dan Masjid Jami

Nurul Falah. Kapasitas jamaah di masjid yang dapat digunakan untuk ibadah Shalat Jum'at dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.11. Kapasitas Jamaah Masjid

No.	Nama Masjid	Kapasitas Jamaah (Orang)
1.	Masjid Safinatun Najah	1.168
2.	Masjid Jami Nurul Falah	550

Sumber: Survei Lapangan, 2020

Gambar II.52. Masjid Safinatun Najah

Gambar II.53. Masjid Jami Nurul Falah

7. Sarana Parkir

Di Kawasan Muara Angke terdapat tempat parkir yang disesuaikan dengan peruntukannya, yaitu Pasar Ikan Muara Angke. Sedangkan untuk kegiatan industri, tempat parkir yang tersedia adalah pada masing-masing unit usaha/kegiatan.

Gambar II.54. Area Parkir di Pasar Ikan Muara Angke

8. Penggunaan Energi

Pelayanan listrik di Kawasan Muara Angke saat ini sudah cukup terlayani. Terdapat beberapa gardu listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik, baik di kawasan pelabuhan maupun industri. Kawasan Muara Angke dilalui oleh jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Berikut data kapasitas listrik di Kawasan Muara Angke.

Tabel II.12. Rincian Kapasitas Listrik di Kawasan Muara Angke

No	Lokasi	Kapasitas Listrik (vA)
1	Kantor UPPP	53.000
2	Rumah Pompa	66.000
3	Kantor PHPT	5.500
4	Pasar Grosir Ikan	105.000
5	Pasar Pelelangan Ikan	6.600
6	Pasar Higienis UPT PKPP &PP	16.500
7	Masjid Jami Nurul Falah	16.500

Sumber: UPPP, 2020

Jika listrik mati maka secara otomatis akan beralih ke genset. Terdapat satu buah genset yang digunakan untuk meng-*cover* kebutuhan listrik di Pasar Ikan Muara Angke dan Tempat Pelelangan Ikan. Genset tersebut diletakkan di Ruang Genset yang berada di belakang toilet umum. Kapasitas genset tersebut adalah sebesar 150 kVA. Akan tetapi, genset ini jarang sekali digunakan karena sebagian besar pengguna listrik di Kawasan Muara Angke merupakan pelanggan dengan jalur premium sehingga jarang sekali terjadi pemadaman listrik. Oli bekas yang dihasilkan dari operasional genset ditempatkan dalam wadah kemudian dimanfaatkan kembali untuk melumasi alat berat yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

Gambar II. 55. Gardu Listrik dan Genset di Kawasan Muara Angke

9. Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan air bersih di Kawasan Muara Angke dipenuhi dari beberapa sumber, yaitu sumur bor sebanyak 4 titik yang berlokasi di kantor UPPP DKI Jakarta, Tempat Pelelangan Ikan, belakang kantor PHPT, dan eks Kantor Higienis, air PDAM (baik mobil tangki maupun yang dikemas dalam jerigen) serta dari air laut yang

diolah. Berdasarkan SNI 03-7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing, menyebutkan bahwa penyediaan air bersih di kantor/pabrik sebanyak 50 L/pegawai/hari. Oleh karena itu, estimasi kebutuhan air bersih untuk pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke dapat dihitung sebagai berikut.

Tabel II.13. Estimasi Kebutuhan Air Bersih pada Kegiatan Perikanan di Kawasan Muara Angke

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Kebutuhan Air (L/orang/hari)	Kebutuhan Air (m^3/hari)
1.	Tenaga Kerja			
	a. Pelabuhan Perikanan Nusantara	19.986	50	999.300
	b. Pasar Grosir	2.716	50	135.800
	c. Pasar Eceran	178	50	8.900
	d. Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	2.010	50	100.500
	e. Unit Pengolahan Ikan (UPI)	4.599	50	229.950
	f. *Docking*	80	50	4.000
	g. Bengkel	1.045	50	52.250
	h. Aktivitas perkantoran	142	50	7.100
	i. SPBU	70	50	3.500
	j. Tempat Usaha	1.065	50	53.250
2.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	-		120
3.	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-		120
4.	Pasar Ikan	-		534

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Kebutuhan Air (L/orang/hari)	Kebutuhan Air (m^3/hari)
5.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	-		402
6.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	-		80
Total		**31.891**		**1.595.806**

Sumber: UPPP, 2020 dan Analisis Tim DELH, 2020

Estimasi kebutuhan air bersih pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke adalah sebanyak 1.595.806 m^3/hari.

Gambar II.56. Instalasi Air Bersih di Kawasan Muara Angke

10. Pengelolaan Air Limbah

Pengolahan air limbah domestik yang berasal dari aktivitas tenaga kerja pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke, untuk *black water*-nya dialirkan ke *septic tank* sedangkan *grey water*-nya dialirkan ke saluran drainase. Menurut Pratiwi dan Purwanti (2015), air bersih yang menjadi limbah diprakirakan sebesar 80% dari kebutuhan air bersih. Oleh karena itu, prakiraan volume air limbah yang dihasilkan setiap harinya (diasumsikan ada 20% air yang tidak berpotensi menjadi limbah, yaitu air yang tercecer di dinding kamar mandi dan menempel di badan) dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

Air Limbah = 80% x Kebutuhan air bersih untuk tenaga kerja
= 80% x 1.594.550 m^3/hari
= 1.275.640 m^3/hari

Sementara itu, air limbah yang dihasilkan dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara langsung dibuang ke laut. Sedangkan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan lainnya, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dialirkan ke drainase. Berikut neraca air dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke.

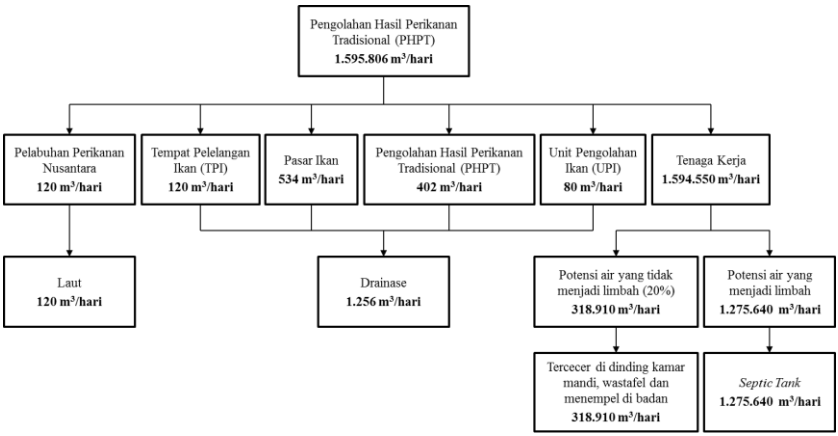

Tabel II.14. Neraca Air Kegiatan di Kawasan Muara Angke

11. Pengelolaan Persampahan

Timbulan limbah padat dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke dihasilkan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan, PHPT, UPI, *docking* dan bengkel, aktivitas perkantoran, SPBU serta tempat usaha. Jenis limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut beragam, seperti sampah ikan, kardus, kertas, plastik, botol, kaleng bekas, *styrofoam*, sisa makanan, dan lain-lain. Pengelolaan limbah padat ini dilakukan dengan cara penempatan limbah padat ke wadah atau tempat sampah kemudian diangkut oleh petugas UPPP Muara Angke setiap harinya untuk dibuang ke TPS.

Berdasarkan SK SNI S-04-1993-03 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah, besaran timbulan limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan kantor adalah sebesar 0,50-0,75 L/orang hari atau 0,025-0,10 kg/orang/hari. Oleh karena itu, estimasi limbah padat yang dihasilkan dari tenaga kerja di Kawasan Muara Angke dapat dihitung seperti berikut.

Volume Limbah Padat = 0,75 L/orang/hari x 31.891 orang
= 23.918,25 L/hari
= 23,92 m^3/hari

Berat Limbah Padat = 0,10 kg/orang/hari x 31.891 orang
= 3.189,10 kg/hari
= 3,19 ton/hari

Di Kawasan Muara Angke terdapat TPS yang terletak di dekat PHPT. Tiga kali dalam sehari, sampah dari TPS di dekat PHPT diangkut ke TPA dengan menggunakan truk tronton yang memiliki kapasitas 20 ton. Pengangkutan sampah ini bekerja sama dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara. Besarnya retribusi sampah yang dibayarkan adalah Rp 40.000,00/m^3. Berikut adalah rincian produksi dan pembayaran sampah di TPS dekat PHPT.

Tabel II.15. Produksi dan Pembayaran Sampah di TPS Dekat PHPT Tahun 2019

No.	Bulan	Nilai	Tonase, ton	Volume, m^3
1.	Januari	49.526.640	458,58	1.236,17
2.	Februari	49.820.000	461,30	1.245,51
3.	Maret	49.750.000	460,64	1.243,73
4.	April	45.812.520	424,19	1.145,31
5.	Mei	46.912.000	434,37	1.172,80
6.	Juni	48.939.120	453,14	1.223,48

Sumber : UPPP Muara Angke, 2019

Gambar II.57. TPS Kawasan Muara Angke

Sampah yang ditampung di TPS dipilah terlebih dahulu antara yang masih bisa dimanfaatkan dan yang menjadi residu untuk selanjutnya dibuang ke TPA. Sedangkan sampah organik akan diolah menjadi pupuk organik dengan bantuan komposter.

Gambar II.58. Komposter di TPS Muara Angke

Gambar II.59. Pupuk Organik Hasil Olahan Komposter

Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi maka Pelabuhan Perikanan Nusantara semakin meningkatkan upaya pengendalian mutu di tingkat produksi, pemasaran dan pengolahan. Upaya pengendalian mutu meliputi pembinaan dan *monitoring* setiap jenis ikan dan hasil tangkapan ikan di kapal yang mendarat di Muara Angke, dengan melakukan pengecekan kandungan bahan kimia berbahaya (formalin) pada produk perikanan.

Formalin atau formaldehida adalah bahan kimia berbahaya yang dapat disalahgunakan sebagai pengawet pangan terutama ikan. Penggunaan formalin dapat membahayakan kesehatan konsumen dan menyebabkan kematian jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama.

Dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian mutu terhadap hasil perikanan di Kawasan Muara Angke, maka dibentuk Tim Pengendali Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam pengambilan sampel dilengkapi dengan sarana Laboratorium Mini yang berlokasi di TPI Muara Angke. Tim ini bertugas antara lain melaksanakan pembinaan dan *monitoring* terhadap kandungan bahan kimia

berbahaya (formalin) pada produk perikanan di TPI, Pasar Grosir, Dermaga Kali Adem dan PHPT. Kegiatan Monitoring Pengendalian Mutu, meliputi :

- Pengambilan sampel produk perikanan secara berkala di TPI, Pasar Grosir, bongkaran ikan di Dermaga Kali Adem dan PHPT. Kegiatan ini bekerja sama dengan petugas dari kepolisian.
- Setelah pengambilan sampel dari lapangan langsung dilakukan pengujian formalin dengan metode formaldehide testkid.

Tabel II.16. Hasil Monitoring Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Tahun 2017

No	Bulan	Tempat Pengambilan Sampel				Total Sampel per Bulan	Jumlah Sampel Positif	Persentase (%)
		TPI	Pasar Grosir	Kali Adem	PHPT			
1	JANUARI	113	0	15	14	142	0	0,00
2	FEBRUARI	87	29	0	15	131	0	0,00
3	MARET	77	30	0	14	121	0	0,00
4	APRIL	59	60	0	20	139	0	0,00
5	MEI	64	27	0	0	91	0	0,00
6	JUNI	53	0	0	0	53	0	0,00
7	JULI	92	39	0	14	145	0	0,00
8	AGUSTUS	97	27	0	15	139	0	0,00
9	SEPTEMBER	44	30	5	15	94	0	0,00
10	OKTOBER	48	28	0	20	96	5	5,21
11	NOVEMBER	32	28	0	17	77	0	0,00
12	DESEMBER	56	32	0	10	98	0	0,00
TOTAL		**822**	**330**	**20**	**154**	**1326**	**5**	**0,38**

Sumber: UPPP Muara Angke, 2020

Tabel II.17. Hasil Monitoring Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Tahun 2018

No	Bulan	Tempat Pengambilan Sampel				Total Sampel per Bulan	Jumlah Sampel Positif	Persentase (%)
		TPI	Pasar Grosir	Kali Adem	PHPT			
1	JANUARI	115	15	0	27	157	0	0,00
2	FEBRUARI	95	34	33	10	172	0	0,00
3	MARET	51	25	18	66	160	0	0,00
4	APRIL	80	30	9	21	140	0	0,00
5	MEI	58	27	0	19	104	0	0,00
6	JUNI	74	0	0	0	74	0	0,00
7	JULI	48	15	22	15	100	0	0,00
8	AGUSTUS	50	0	20	23	93	0	0,00
9	SEPTEMBER	45	20	12	23	100	0	0,00
10	OKTOBER	54	18	0	20	92	0	0,00
11	NOVEMBER	96	0	10	17	123	0	0,00
12	DESEMBER	55	32	15	28	130	0	0,00
TOTAL		**821**	**216**	**139**	**269**	**1445**	**0**	**0,00**

Sumber: UPPP Muara Angke, 2020

Tabel II.18. Hasil Monitoring Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Tahun 2019

No	Bulan	Tempat Pengambilan Sampel				Total Sampel per Bulan	Jumlah Sampel Positif	Persentase (%)
		TPI	Pasar Grosir	Kali Adem	PHPT			
1	JANUARI	65	33	25	40	163	0	0,00
2	FEBRUARI	39	28	33	22	122	0	0,00
3	MARET	33	37	18	30	118	0	0,00
4	APRIL	46	45	18	20	129	0	0,00
5	MEI	38	43	15	10	106	0	0,00
6	JUNI	53	39	22	40	154	0	0,00
7	JULI	65	27	20	45	157	0	0,00
8	AGUSTUS	56	27	22	38	143	0	0,00
9	SEPTEMBER	64	28	15	40	147	0	0,00
10	OKTOBER	62	32	17	48	159	0	0,00
11	NOVEMBER	46	45	18	50	159	0	0,00
12	DESEMBER	55	30	20	25	130	0	0,00
TOTAL		**622**	**414**	**243**	**408**	**1687**	**0**	**0,00**

Sumber: UPPP Muara Angke, 2020

Berdasarkan data pengujian mutu hasil perikanan dari tahun 2017 hingga 2019 dapat diketahui bahwa secara umum ikan di Kawasan Muara Angke tidak mengandung formalin. Akan tetapi, pada Bulan Oktober 2017 ditemukan sebanyak 5 sampel dari 96 sampel yang positif mengandung formalin atau sekitar 5,21% sampel mengandung formalin.

BAB III

INFORMASI RINCI RONA LINGKUNGAN HIDUP

Deskripsi umum rona lingkungan hidup berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup (*environmental setting*) secara umum di Kawasan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Bab ini menguraikan kondisi rona lingkungan hidup eksisting yang mencakup informasi yang terkait atau relevan dengan dampak yang telah terjadi dari kegiatan operasional di Kawasan Muara Angke selama beroperasional hingga saat ini. Deskripsi rona lingkungan hidup ini berdasarkan data dan informasi primer dan sekunder yang bersifat aktual dan menggunakan sumber data dan informasi yang valid untuk data sekunder yang resmi dan kredibel untuk menjamin validitas data-informasi serta didukung dengan hasil pengukuran dan observasi lapangan. Komponen lingkungan terkena dampak (komponen atau *features* lingkungan yang ada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan serta kondisi lingkungannya), yang pada dasarnya memuat komponen lingkungan hidup:

- Komponen geo-fisik-kimia, yang terdiri iklim, kualitas udara ambien dan kebisingan, kualitas dan kuantitas air tanah, dan kualitas air permukaan.
- Komponen transportasi, yang terdiri kelancaran lalu-lintas, keselamatan lalu lintas dan gangguan ruang jalan.
- Komponen biologi, yang terdiri vegetasi dan satwa liar yang berada di lokasi dan sekitar tapak kegiatan.
- Komponen sosial-ekonomi-budaya, yang terdiri demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya di wilayah studi.

- Komponen kesehatan masyarakat, yang terdiri kesehatan masyarakat, sanitasi lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan dari kegiatan operasional di Kawasan Muara Angke, terdapat beberapa jenis dampak yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup di Kawasan Muara Angke dan lingkungan di sekitarnya. Pendekatan perhitungan atau analisis terhadap kondisi kualitas lingkungan hidup atau kondisi saat ini dengan menggunakan baku mutu lingkungan yang ada dan/atau kriteria tertentu berdasarkan ketetapan umum yang berlaku baik itu merujuk pada peraturan pemerintah, referensi penelitian maupun *professional judgement* seperti disajikan pada **Tabel III.1** mengenai interpretasi skala kualitas lingkungan.

Tabel III.1. Klasifikasi Skala Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Skala Kualitas Lingkungan	Keterangan
1.	Skala 1	Kualitas lingkungan sangat buruk
2.	Skala 2	Kualitas lingkungan buruk
3.	Skala 3	Kualitas lingkungan sedang
4.	Skala 4	Kualitas lingkungan baik
5.	Skala 5	Kualitas lingkungan sangat baik

Sumber: PSLH, 2015

Konsep penentuan skala kualitas lingkungan hidup atau rona lingkungan awal ini bertujuan untuk mengetahui *trendline* antara kualitas lingkungan saat ini dengan kualitas lingkungan dengan adanya kegiatan operasional di Kawasan Muara Angke ke depannya seperti disajikan pada **Gambar III.1** berikut.

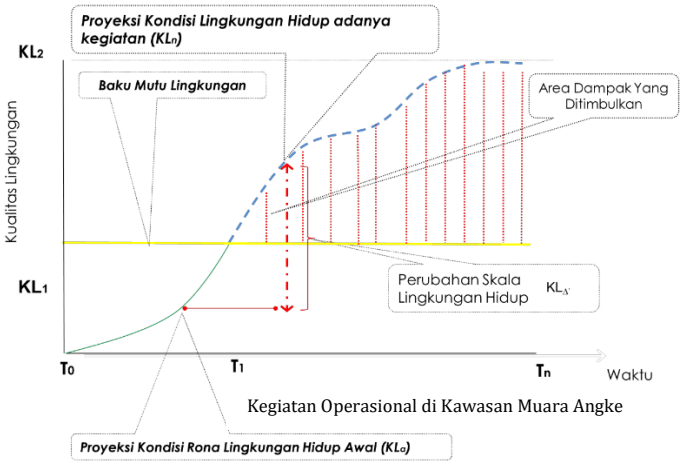

Gambar III.1 Konsep Penentuan Skala Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Komponen lingkungan hidup (Sumber: adopsi PSLH, 2015)

Lokasi pengumpulan data dan informasi mengenai deskripsi rona lingkungan hidup disajikan dalam informasi spasial seperti disajikan pada **Gambar III.2** berikut ini.

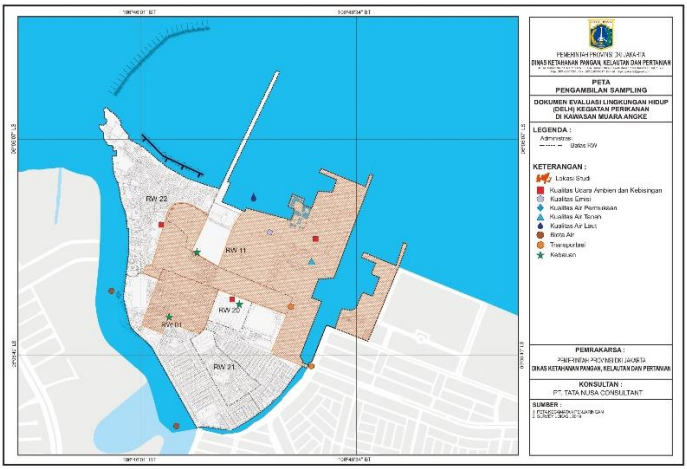

Gambar III.2 Peta Pengambilan *Sampling*

Komponen Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan di dalam dan sekitar lokasi kegiatan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pertimbangan kemungkinan terjadinya dampak terhadap komponen lingkungan yang diakibatkan oleh operasional di Kawasan PPN Muara Angke. Berbagai komponen lingkungan yang perlu dipertimbangkan yaitu komponen geofisik-kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat.

1. Komponen Geo-Fisik-Kimia

a. Iklim

Analisis mengenai iklim sangat penting untuk dibahas kaitannya dengan kajian DELH ini adalah kondisi curah hujan rerata bulanan selama > 10 tahun, curah hujan sebagai input utama untuk menganilisis siklus hidrologi, salah satunya adalah penerapan metode isohyet dalam menghasilkan kontur curah hujan di lokasi penelitian sebagai input variabel dalam analisis *recharge area*. Selain penerapan metode tersebut, kondisi curah hujan rerata bulanan selama > 10 tahun untuk mengetahui rerata bulan basah dan bulan kering selama setahun untuk penentuan pola iklim di daerah penelitian. Data iklim tersebut diperoleh dari hasil pencatatan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Klas I Tanjung Priok dalam periode 10 tahun (2008-2017).

Klasifikasi *Schmidt & Ferguson* dimanfaatkan untuk menunjukkan gambaran komponen utama iklim pada wilayah studi. Nilai Q (Quotient) menunjukkan perbandingan rerata jumlah bulan kering (BK) dan rerata jumlah basah (BB) dalam kurun waktu 10 tahun di suatu wilayah. Penentuan BK dan BB menggunakan metode *Mohr*, yaitu BK adalah bulan dengan curah hujan < 60 mm, sedangkan BB adalah bulan dengan curah hujan > 100 mm, sedangkan untuk bulan lembab yaitu jika curah hujannya antara 60 mm – 100 mm. Nilai Q maka dapat digunakan untuk menentukan klasifikasi iklim wilayah tersebut. Perbandingan antara jumlah rata-rata bulan kering dan rata-rata bulan basah merupakan tipe curah hujan menurut *Schmidt & Ferguson*, yaitu:

$$Q = \frac{Jumlah\ rata{-}rata\ bulan\ kering}{Jumlah\ rata{-}rata\ bulan\ basah}$$

Berdasarkan pada nilai Q (Quotient) di atas maka *Schmidt & Ferguson* menggolongkan tipe hujan seperti disajikan pada **Tabel III.2.** berikut.

Tabel III.2. Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Tipe Curah Hujan

No.	Golongan	Rentang nilai Q	Keterangan
1	Golongan A	0 ≤ Q < 0,143	Kondisi Wilayah Sangat Basah
2	Golongan B	0,143 ≤ Q < 0,333	Kondisi Wilayah Basah
3	Golongan C	0,333 ≤ Q < 0,600	Kondisi Wilayah Agak Basah
4	Golongan D	0,600 ≤ Q < 1,000	Kondisi Wilayah Sedang
5	Golongan E	1,000 ≤ Q < 1,670	Kondisi Wilayah Agak Kering
6	Golongan F	1,670 ≤ Q < 3,000	Kondisi Wilayah Kering
7	Golongan G	3,000 ≤ Q < 7,000	Kondisi Wilayah Sangat Kering
8	Golongan H	Q ≥ 7,000	Kondisi Wilayah Luar Biasa Kering

Sumber: Schmidt & Ferguson (1984)

Data pengamatan periode 10 tahun (2008-2017) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Klas I Tanjung Priok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.3. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Jakarta Utara 2008-2017

No	Bulan	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1	Januari	202,9	15	472,6	23	572,2	23	252	23	220	23	626,4	22	919	26	402	24	156,7	14	294,2	17
2	Februari	707,3	28	367,5	21	359,3	18	180,6	17	195,4	15	212	16	686,1	24	876	22	404,7	19	627,9	25
3	Maret	122,4	17	89,5	10	172,5	11	104,9	16	180,5	15	173,2	14	296	20	212,9	16	275,9	20	165,5	16
4	April	216,7	18	51,4	11	21,1	5	34,4	14	110,2	9	131,8	17	70,4	10	96,7	13	169,3	14	116,1	12
5	Mei	108,3	5	164	10	134,1	11	157,1	11	121,7	7	276	19	48,7	13	44,4	5	78,9	16	60	8
6	Juni	56,7	5	37,6	7	172,7	12	103,1	6	44,5	3	112,2	10	102,4	12	19,7	5	180,3	12	181,6	13
7	Juli	TTU	1	15,7	1	86,1	15	53,1	4	25	1	188,3	16	160	13	2,5	2	108,3	12	34,4	4
8	Agustus	23,1	6	6,7	2	67,2	9	135	2	0	0	116,8	6	33,5	4	24	4	207,7	17	1,9	1
9	September	21,0	3	25,2	3	194,9	18	2,8	2	25,5	3	70,1	5	0	0	16	1	252,9	17	74,6	7
10	Oktober	56,1	10	24,2	5	220,8	13	59,2	11	73	7	82,8	6	6	1	0	0	159,4	19	69,5	11
11	November	200,9	18	212,7	12	138,6	14	114	9	252,2	18	104,4	10	82,7	11	172,9	9	104,9	17	160,4	16
12	Desember	114,3	16	164,1	11	155	21	132,2	14	279,6	19	262,1	20	194,6	13	251,3	14	25,3	16	217,2	12
	Jumlah	**1829,7**	**142**	**1631,2**	**116**	**2294,5**	**170**	**1328,4**	**129**	**1527,6**	**120**	**2356,1**	**161**	**2599,4**	**147**	**2118,4**	**115**	**2124,3**	**193**	**2003,3**	**142**

Sumber : Stasiun Meteorologi Maritim Klas I Tanjung Priok, 2008-2017

Keterangan : TTU : Tidak Terukur

Tabel III.3. Rata-Rata Curah Hujan Bulanan Periode (2008-2017)

No.	Tahun	BB (> 100 mm/bulan)	BL (< 60 mm/bulan)	BK (60-100 mm/bulan)
1	2008	7	-	5
2	2009	5	1	6
3	2010	9	2	1
4	2011	8	-	4
5	2012	7	1	4
6	2013	10	2	-
7	2014	7	2	4
8	2015	5	1	6
9	2016	10	1	1
10	2017	7	3	2
Jumlah Bulan Rata-Rata		7,5	1,625	3,67
Q = (JBK/JBB)		**0,49**		

Sumber: Data Sekunder, Stasiun Meteorologi Maritim Klas I Tanjung Priok, 2008-2017

Berdasarkan pada tabel rata-rata curah hujan bulanan diatas dapat disimpulkan bahwa tipe curah hujan di Kawasan PPN Muara Angke berada pada golongan C yaitu kondisi wilayah agak basah.

b. Kualitas Udara Ambien

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan mengganggu estetika dan kenyamanan (Soemarwoto, 1989). Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional maupun global. Adanya kecenderungan semakin menurunnya kualitas udara ambien dengan parameter kualitas seperti disajikan pada **Tabel III.4** berikut ini.

Tabel III.4. Komponen sebagai Indikator dalam Penurunan Kualitas Udara

No.	Indikator Penurunan Kualitas Udara	Komponen Kimia	Keterangan
1	Bahan baku dan bahan yang dipergunakan	SO_2, H_2S, NO_x	Zat pencemar udara sangat dipengaruhi sifat bahan baku dan bahan penolong. Sebagai contoh minyak bumi pada umumnya didapat dalam keadaan tidak murni artinya mengandung bahan ikutan seperti sulfur, nitrogen dan SO_2, H_2S, NO_x lain sebagainya.
2	Bahan bakar	SO_2, H_2S, NO_x	Bahan bakar mengandung bahan ikutan disamping karena sifat bahan bakar itu sendiri yang mudah membentuk zat pencemar udara.
3	Transportasi	CO, NO_2, HC. TSP dan PM_{10}	Sumber pencemar yang bergerak (aktivitas transportasi), layak uji emisi kendaraan menjadi penting dimana kondisi emisi gas buang dari kendaraan bermotor yang masih belum memenuhi baku mutu emisi gas buang menjadi penyebab memburuknya kualitas udara.

Sumber: Environmental Resources Limited, 1984 dalam Soemarwoto, 1989

Pendekatan kualitas udara ambien dan tempat kerja sebagai data rona lingkungan hidup berdasarkan kondisi saat ini sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara. Dengan pendekatan kondisi saat ini tersebut maka indikator kualitas udara ambien akan dianalogikan sumber pencemar utama di lokasi ini adalah dari kegiatan transportasi yang dimungkinkan adanya peningkatan arus lalu lintas yang semakin meningkat yang disertai dengan emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta suasana Kawasan Muara Angke. Adapun hasil pengukuran dengan parameter kualitas udara ambien disajikan pada **Tabel III.5** di bawah ini.

Tabel III.5. Kualitas Udara Ambien Kawasan Muara Angke

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji			Baku Mutu	Spesifikasi Metode
			UA-1	UA-2	UA-3		
FISIKA							
1	Suhu Udara	^oC	34,2	35,1	39,2	-	-
2	Kelembaban	%	43	26	23	-	-
3	Arah Angin	-	Barat	Barat	Selatan	-	-
4	Kecepatan Angin	Km/Jam	4,32	4,68	4,68	-	-
5	Cuaca	-	Cerah	Cerah	Cerah	-	-
KIMIA							
1	Sulfur Dioksida (SO_2)*	µg/Nm³	33,5	39	47,5	900**	SNI 19-7119.7-2005
2	Karbon Monoksida (CO)*	µg/Nm³	2.618	2.454	2.781	26000**	IKM/5.4.35/LMP (Electro Chemical Sensor)
3	Nitrogen Dioksida (NO_2)*	µg/Nm³	48,9	52,5	59,2	400**	SNI 19-7119.2-2005
4	Total Partikulat (TSP)	µg/Nm³	146	180	143	230**	IKM/5.4.22/LMP (Gravimetric)
5	Timah Hitam (Pb)*	µg/Nm³	<0,0128	<0,0128	<0,0128	2**	SNI 19-7119.4.2005
6	Oksidan (O_3)*	µg/Nm³	37,2	31,8	37,6	200**	SNI 19-7119.8.2005
7	Hidro Karbon (HC)	µg/Nm³	21,7	21,7	25,1	160**	HC Analyzer

Sumber : Data Primer, PT. Laboratorium Medio Pratama, 2019

*Ket : *) Parameter terakreditasi oleh KAN (LP-758-IDN)*

***) Baku Mutu menurut Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta*

UA-1 : Pasar Ikan Muara Angke, Koordinat: 06^{o}06'29.05" LS dan 106^{o}46'34.09" BT

UA-2 : Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional Muara Angke, Koordinat: 06o06'41.02" LS dan 106o45'20.09" BT

UA-3 : Pelabuhan Perikanan Timur Muara Angke, Koordinat: 06o06'58.03" LS dan 106o46'44.09" BT

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara dengan 7 parameter kimia yaitu sulfur dioksida (SO_2); karbon monoksida (CO); nitrogen dioksida (NO_2); total partikulat; timah hitam (Pb); oksidan (O_3) dan hidro karbon (HC) di di Kawasan PPN Muara Angke dengan seluruh parameter masih berada di bawah baku mutu berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.

c. Kebauan

Pencemaran diakibatkan oleh adanya zat, energi atau komponen yang terinduksi ke dalam lingkungan, dan salah satu komponen yang dapat menyebabkan pencemaran adalah kebauan. Apabila manusia menghirup udara yang mengandung pencemar fisik kebauan, maka akan dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kesehatan. Dampak kesehatan akibat kebauan biasanya dapat menyebabkan gangguan psikologis dan iritasi saluran pernafasan apabila sumber bau berasal dari parameter kebauan seperti gas H_2S atau NH_3. Berikut hasil pengukuran tingkat kebauan di Kawasan PPN Muara Angke.

Tabel III.6. Hasil Uji Laboratorium Tingkat Kebauan di Kawasan PPN Muara Angke

No	Lokasi Sampling	Parameter*	Satuan	Hasil Uji	Baku Mutu**	Spesifikasi Metode
1	UA-1 : Tempat Pengasinan Arpani, Suhu Lingkungan 30,1 oC, Kelembaban 69%.	Amoniak (NH_3)	ppm	0,14	2	IKM/5.4.85/LMP (Spectrophotometri)
		Hidrogen Sulfida (H_2S)		0,02	0,02	IKM/5.4.29/LMP (Spectrophotometri)
2	UA-2 : Samping TPS, Suhu Lingkungan 29,2 oC, Kelembaban 75%.	Amoniak (NH_3)		0,17	2	IKM/5.4.85/LMP (Spectrophotometri)
		Hidrogen Sulfida (H_2S)		0,02	0,02	IKM/5.4.29/LMP (Spectrophotometri)

No	Lokasi Sampling	Parameter*	Satuan	Hasil Uji	Baku Mutu**	Spesifikasi Metode
3	UA-3 : Waduk Kali Adem, Suhu Lingkungan 30,4 °C, Kelembaban 68%.	Amoniak (NH_3)		0,1	2	IKM/5.4.85/LMP (Spectrophotometri)
		Hidrogen Sulfida (H_2S)		0,02	0,02	IKM/5.4.29/LMP (Spectrophotometri)

Sumber : Data Primer, PT. Laboratorium Medio Pratama, 2019
*Ket : * Parameter terakreditasi oleh Kan (LP-758-IDN)*
*** Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 tentang Bau dari Odoran Tunggal*

Berdasarkan data hasil uji laboratorium dapat diketahui bahwa parameter Amoniak (NH_3) masih dibawah baku mutu, namun untuk parameter Hidrogen Sulfida (H_2S) telah mencapai tingkat baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Bau dari Odoran Tunggal.

d. Kebisingan

Baku tingkat kebisingan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta, disajikan dalam **Tabel II.24.** berikut ini.

Tabel III.7 Baku Tingkat Kebisingan

No.	Peruntukan Kawasan/Lingkungan Kegiatan	Tingkat Kebisingan dB(A)
A.	Peruntukan Kawasan	
1.	Perumahan dan Permukiman	55
2.	Perdagangan dan Jasa	70
3.	Kawasan Niaga Terpadu	65
	• Perkantoran	50
	• Ruang Terbuka Hijau	70
	• Kawasan Industri	60
	• Pemerintahan dan Fasilitas Umum	70
	• Khusus: - Bandar Udara - Stasiun Kereta Api	 * *

No.	Peruntukan Kawasan/Lingkungan Kegiatan	Tingkat Kebisingan dB(A)
	- Terminal - Pelabuhan Laut - Cagar Budaya	70 70 60
B.	Lingkungan Kegiatan	
1.	Rumah Sakit atau Sejenisnya	55
2.	Sekolah atau Sejenisnya	55
3.	Tempat Ibadah atau Sejenisnya	55
4.	Fasilitas Sosial Kebisingan Sejenisnya	55

** :Mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan*

Sumber: Baku Mutu menurut Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta

Berdasarkan baku mutu tingkat kebisingan, wilayah studi berada pada peruntukan kawasan pelabuhan laut yaitu 70 dB(A). Hasil pemeriksaan tingkat kebisingan di Kawasan PPN Muara Angke tahun 2019 masih di bawah baku tingkat kebisingan menurut Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta. Sumber utama kebisingan ini adalah transportasi. Transportasi dari berbagai moda angkutan yang ada memberikan sumbangan yang besar terhadap nilai kebisingan.

Tabel III.8 Hasil Uji Laboratorium Tingkat Kebisingan untuk Kegiatan Pelabuhan Laut di Kawasan PPN Muara Angke

Lokasi Sampling	Satuan	Hasil Pengukuran	Baku Mutu
UA-1: Pasar Ikan Muara Angke, Koordinat: 06°06'29.05" LS dan 106°46'34.09" BT	dBA	59,2	70
UA-2: Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional Muara Angke, Koordinat:		50,8	70

Lokasi Sampling	Satuan	Hasil Pengukuran	Baku Mutu
06°06'41.02" LS dan 106°45'20.09" BT			
UA-3: Pelabuhan Perikanan Timur Muara Angke, Koordinat: 06°06'58.03" LS dan 106°46'44.09" BT		60,7	70

Sumber : Data Primer, PT. Laboratorium Medio Pratama, 2019

Keterangan : Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta

e. Kualitas Air

Air Tanah

Pada lokasi kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke terdapat 4 titik sumur yang airnya digunakan untuk kegiatan operasional. Untuk menggambarkan kualitas air sumur di Kawasan Muara Angke, diambil 1 titik sumur yang berada di UPPP Muara Angke. Air sumur tersebut kemudian dibandingkan dengan baku mutu air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum. Standar baku mutu kesehatan lingkungan pada media air untuk keperluan higiene sanitasi digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan dan pakaian serta untuk air baku air minum.

Tabel III.9 Hasil Uji Kualitas Air Tanah di UPPP Provinsi DKI Jakarta

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu**	Hasil Uji	Spesifikasi Metode
1	Suhu/Temperatur*	^{0}C	± 3	29	SNI 06-6989.23-2005
2	Bau	-	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Organoleptik
3	Kekeruhan (Turbidity)	NTU	25	<1	SNI 06-6989.25-

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu**	Hasil Uji	Spesifikasi Metode
					2005
4	Rasa	-	Tidak Berasa	Tidak Berasa	Organoleptik
5	Total Residu Terlarut (TDS)	mg/l	1.000	661	SNI 06-6989.27-2005
6	Warna*	Pt-Co	50	11,5	SNI 6989.80-2011
7	pH*	-	6,5-8,5	7	SNI 06-6989.11-2004
8	Air Raksa (Hg) Terlarut	mg/L	0,001	<0,0005	APHA Ed.22nd 3114.B, 3500-Hg-2012
9	Arsenik (As) Terlarut	mg/L	0,05	<0,005	APHA Ed.22nd 3114.B, 3500-As-2012
10	Benzene	Ppm	0,01	<0,0026	NIOSH 1501
11	Besi (Fe) Terlarut*	mg/L	1	<0,0131	SNI 6989.4-2009
12	Fluorida (F)*	mg/L	1,5	<0,0038	APHA (2012) 4500-F.D
13	Kadmium (Cd) Terlarut*	mg/L	0,005	<0,0029	SNI 6989.16-2009
14	Kesadahan Total ($CaCO_3$)*	mg/L	500	48,9	SNI 06-6989.12-2004
15	Krom Heksavalen (Cr^{6+})*	mg/L	0,05	<0,0056	SNI 6989.71-2009
16	Mangan (Mn) Terlarut*	mg/L	0,5	<0,0055	SNI 6989.5-2009
17	Nitrat (NO_3-N)	mg/L	10	0,32	IKM/5.4.48/LMP
18	Nitrit (NO_2-N)*	mg/L	1	0,002	APHA (2012) 4500-NO_2^-B
19	Pestisida Organoklor	mg/L	0,1	<0,0013	US EPA 8080A-1994
20	Selenium (Se) Terlarut	mg/L	0,01	<0,002	APHA Ed.22nd 3114.B, 3500-Se-2012
21	Seng (Zn) Terlarut*	mg/L	15	<0,0040	SNI 06-6989.7-2009
22	Sianida (CN^-)	mg/L	0,1	<0,001	IKM/5.4.49/LMP
23	Sulfat (SO_4)	mg/L	400	205	IKM/5.4.50/LMP
24	Surfaktan/Detergen (MBAS)*	mg/L	0,05	<0,0063	SNI 06-6989.51-2005
25	Timbal (Pb) Terlarut*	mg/L	0,05	<0,0047	SNI 6989.8-2009
26	Zat Organik ($KmnO_4$)*	mg/L	10	2,67	SNI 06-6989.22-2004
27	E.Coli	MPN/100ml	0	0	IKM/5.4.90/LMP
28	Total Koliform	MPN/100ml	50	26	IKM/5.4.90/LMP

Sumber : Data Primer, PT. Laboratorium Medio Pratama, 2019
*Ket : * Parameter terakreditasi oleh Kan (LP-758-IDN)*
*** Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2017 Lampiran I.A. tentang Air untuk Keperluan Higiene.*

Berdasarkan data hasil uji laboratorium dapat disimpulkan bahwa seluruh parameter di bawah baku mutu kualitas air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.

Air Permukaan

Dalam pembahasan informasi rona lingkungan hidup saat ini terkait kualitas air permukaan dilihat kualitas air Kali Adem yang berada di wilayah studi. Hasil dari laboratorium kualitas air permukaan Kawasan Muara Angke yang diambil di Kali Adem disajikan pada **Tabel III.10** berikut ini.

Tabel III.10 Hasil Uji Kualitas Air Permukaan di Kali Adem

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu**	Hasil Uji	Spesifikasi Metode
			Kelas IV		
1	Suhu/Temperatur*	^{0}C	±5°C	34	SNI 06-6989.23-2005
2	Total Residu Terlarut (TDS)	mg/L	2.000	715	SNI 06-6989.27-2005
3	Total Residu Tersuspensi (TSS)*	mg/L	400	23,3	SNI 06-6989.3-2004
4	pH*	-	5-9	7,2	SNI 06-6989.11-2004
5	Air Raksa (Hg) Terlarut	mg/L	0,005	<0,0005	APHA Ed.22nd 3114.B, 3500-Hg-2012
6	Arsenik (As) Terlarut	mg/L	1	<0,005	APHA Ed.22nd 3114.B, 3500-As-2012
7	Barium (Ba)	mg/L	-	0,28	APHA Ed.22nd 3020.A, 3120-Ba-2012
8	Besi (Fe) Terlarut*	mg/L	-	0,46	SNI 6989.4-2009
9	Boron (B)	mg/L	1	0,37	APHA Ed.22nd 3020.A,

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu**	Hasil Uji	Spesifikasi Metode
			Kelas IV		
					3120.B,3500-B-2012
10	Fenol*	mg/L	-	<0,0009	SNI 6989.21-2004
11	Fluorida (F)*	mg/L	-	<0,0038	APHA (2012) 4500-F.D
12	Fostat (PO_4)*	mg/L	5	1,05	SNI 06-6989.31-2005
13	Kadmium (Cd)* Terlarut	mg/L	0,01	<0,0029	SNI 6989.16-2009
14	Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD)	mg/L	12	13,4	IKM/5.4.3/LMP
15	Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)*	mg/L	100	112	SNI 6989.2:2009
16	Klor Bebas (Cl_2)	mg/L	-	<0,01	IKM/5.4.52/LMP
17	Klorida (Cl^-)*	mg/L	-	836	SNI 6989.19-2009
18	Kobalt (Co) Terlarut*	mg/L	0,2	0,12	SNI 6989.68-2009
19	Krom Heksavalen (Cr^{6+})*	mg/L	1	<0,0056	SNI 6989.71-2009
20	Mangan (Mn)* Terlarut	mg/L	-	0,19	SNI 6989.5-2009
21	Minyak Lemak (OG)	mg/L	-	<0,86	SNI 6989.10-2011
22	Nitrat (NO_2-N)	mg/L	20	3,06	IKM/5.4.48/LMP
23	Nitrit (NO_2-N)*	mg/L	-	0,01	APHA (2012) 4500-$NO2^-$D
24	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	0	4,37	IKM/5.4.42/LMP
25	Selenium (Se) Terlarut	mg/L	0,05	<0,001	APHA Ed.22nd 3114.B, 3500-Se-2012
26	Seng (Zn) Terlarut*	mg/L	2	<0,0040	SNI 06-6989.7-2009
27	Sianida (CN^-)	mg/L	-	<0,001	IKM/5.4.49/LMP
28	Sulfat (SO_4)	mg/L	-	217	IKM/5.4.50/LMP
29	Sulfida (H_2S)	mg/L	-	<0,002	SNI 6989.70.2009
30	Surfaktan/Detergen (MBAS)*	mg/L	-	<0,0063	SNI 06-6989.51-2005
31	Tembaga (Cu) Terlarut*	mg/L	0,2	<0,0150	SNI 6989.6.2009
32	Timbal (Pb) Terlarut*	mg/L	1	0,3	SNI 6989.8.2009
33	Amoniak (NH_2) Bebas	mg/L	-	0,04	SNI 06-6989.30-2004

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu**	Hasil Uji	Spesifikasi Metode
			Kelas IV		
34	Koli Tinja (Fecal Coli)	MPN/100ml	2.000	1.200	IKM/5.4.90/LMP
35	Total Koliform	MPN/100ml	10.000	3.300	IKM/5.4.90/LMP

Sumber : Data Primer, PT. Laboratorium Medio Pratama, 2019

*Ket : * Parameter terakreditasi oleh Kan (LP-758-IDN)*

*** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*

Lokasi Sampling Air Kali Adem dengan Titik Koordinat S = 06°06'46.03" dan E = 106°46'04.03"

Berdasarkan data hasil uji laboratorium untuk kualitas air sungai dapat disimpulkan bahwa parameter COD dan BOD sudah melampaui ambang batas yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air untuk kelas 4 (empat), kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Air Laut

Dalam pembahasan informasi rona lingkungan hidup saat ini terkait kualitas air laut yang berada di Kawasan Muara Angke. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan. Hasil dari laboratorium kualitas air laut yang diambil di Kawasan Muara Angke disajikan pada **Tabel III.11.** berikut ini.

Tabel III.11 Hasil Uji Kualitas Air Laut di Kawasan Muara Angke

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu**	Hasil Uji	Spesifikasi Metode
1	Suhu/Temperatur*[(c)]	^{0}C	Alami[3(c)]	30	SNI 06-6989.23-2005
2	Bau	-	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Organoleptik
3	Kecerahan[a]	m	>3	3,09	Sechi Disk
4	Lapisan Minyak[5]	-	Nihil[1(5)]	Nihil	Visual

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu**	Hasil Uji	Spesifikasi Metode
5	Sampah	-	Nihil[1(4)]	Nihil	Visual
6	Total Residu Tersuspensi (TSS)[b]	mg/l	80	8,33	SNI 06-6989.3-2005
7	pH*[(d)]	-	6,5-8,5[d]	7	SNI 06-6989.11-2004
8	Air Raksa (Hg) Terlarut	mg/L	0,003	<0,0005	APHA Ed.22nd 3114.B, 3500-Hg-2012
9	Amoniak (NH_3-N)	mg/L	0,3	<0,0031	SNI 06-6989.30-2004
10	Hidro Carbon (HC) Total	mg/L	1	0,21	EPA Method 8270
11	Kadmium (Cd)	mg/L	0,01	0,17	SNI 6989.16-2009
12	Minyak Lemak (OG)	mg/L	5	<0,86	SNI 6989.10-2011
13	PCB Total (Poliklor Bifenil)	µg/L	0,01	<0,0033	APHA 2012 6431 B
14	Salinitas[e]	‰	Alami[3(e)]	27,5	Refraktometri
15	Seng (Zn)	mg/L	0,1	0,03	SNI 06-6989.7-2009
16	Senyawa Fenol Total	mg/L	0,002	0,0009	SNI 06-6989.21-2004
17	Sulfida (H_2S)	mg/L	0,03	0,01	SNI 6989.70.2009
18	Surfaktan/Detergen (MBAS)	mg/L (MBAS)	1	0,01	SNI 06-6989.51-2005
19	TBT (Tri Butil Tin)[6]	µg/L	0,01	<0,0079	APHA 2012 6710 B
20	Tembaga (Cu)	mg/L	0,05	<0,0150	SNI 6989.6-2009
21	Timbal (Pb)	mg/L	0,05	0,54	SNI 6989.8-2009
22	Total Koliform[f]	MPN/100ml	1.000[f]	230	APHA Ed.22nd 9221.B-2012

Sumber : Data Primer, PT. Laboratorium Medio Pratama, 2019

*Ket : * Parameter terakreditasi oleh Kan (LP-758-IDN)*

*** Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 Lampiran I Tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan*

1. *Nihil adalah tidak terdeteksi dengan batas deteksi alat yang digunakan (sesuai dengan metode yang di gunakan).*
2. *Metode Analisa mengacu ada metode analisa untuk air laut yang telah ada, baik internasional maupun nasional.*
3. *Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan, bervariasi setiap saat (siang, malam dan musim).*
4. *Pengamatan oleh manusia (visual).*

5. *Pengamatan oleh manusia (visual). Lapisan minyak yang diacu adalah lapisan tipis (thin layer) dengan ketebalan 0,01 mm.*
6. *TBT adalah zat antifouling yang biasanya terdapat pada cat kapal.*
   a. *Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10% kedalaman euphotic.*
   b. *Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10% konsentrasi rata-rata musiman.*
   c. *Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <2°C dari suhu alami.*
   d. *Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <0,2 Satuan pH.*
   e. *Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <5% salinitas rata-rata musiman.*
   f. *Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10% konsentrasi rata-rata musiman.*

Berdasarkan data hasil uji laboratorium untuk kualitas air laut dapat disimpulkan bahwa parameter kecerahan, kadmium (Cd) dan timbal (Pb) sudah melampaui ambang batas yang dipersyaratkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan.

2. Komponen Transportasi

a. Kondisi Transportasi di Wilayah Studi

1) Status Jalan di Wilayah Studi

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum di Kawasan Muara Angke adalah Jalan Provinsi

2) Kelas Jalan di Wilayah Studi

Kelas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

a) Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan.
b) Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Pengelompokan jalan menurut Kelas Jalan di Kawasan Muara Angke adalah Jalan Kelas Khusus. Jalan Kelas Khusus adalah jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

b. Jaringan Jalan dan Kondisi Lalu Lintas di Wilayah Studi

Jaringan jalan eksisting di Kawasan Muara Angke dapat dilihat pada gambar berikut.

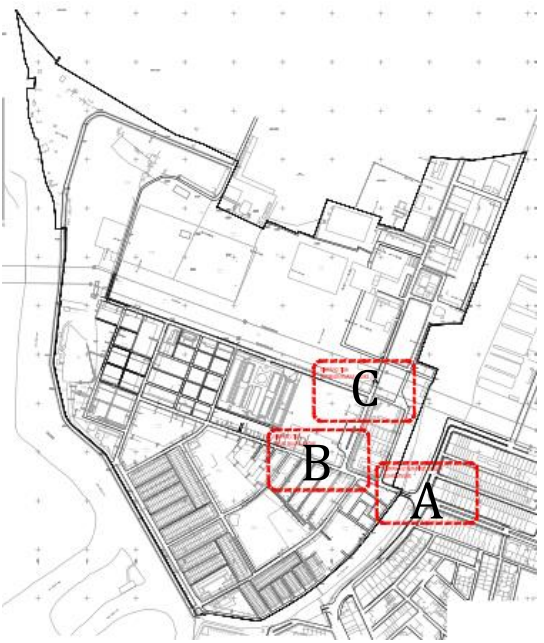

Gambar III.2 Jaringan Jalan Eksisting Kawasan Muara Angke

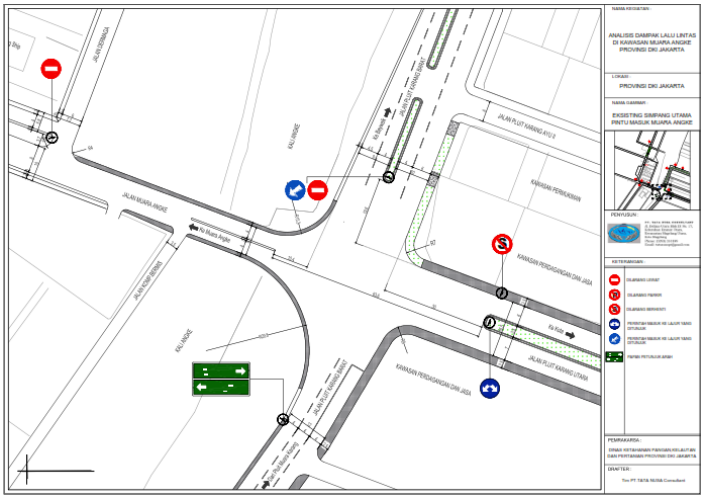

Gambar III.3 Simpang Utama, Jalan Masuk Kawasan Muara Angke

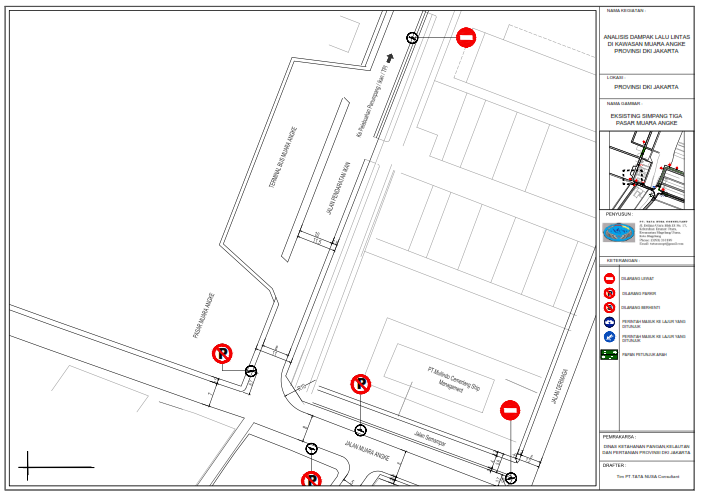

Gambar III.4 Situasi Terminal Bus Kawasan Muara Angke

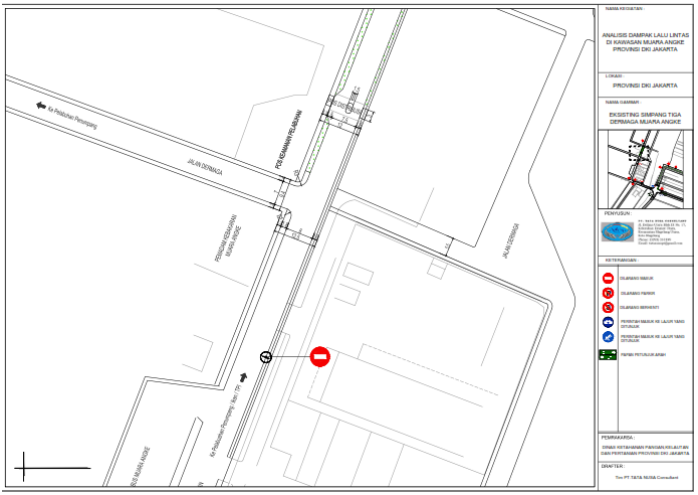

Gambar III.5 Simpang Jl. Dermaga Jalan Utama Menuju Dermaga Penyeberangan

c. Data Geometri Jalan dan Simpang yang Ditinjau

Geometri jalan yang ditinjau dalam kajian ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.12 Geometri Jalan di Kawasan Muara Angke

Nama Jalan	Lebar Per kerasan (m)	Median (m)	Bahu (m)	Trotoar (m)	Jenis Jalan	Tipe Jalan	Tipe Lingkungan	Hambatan Samping
Jalan Dermaga	7,00	0	0	1,20 sebelah kiri dan kanan	Jalan Kelas Khusus	2/2 UD	Komersil dan Permukiman	Tinggi
Jalan Muara Angke	8,5	0,5	0	1 sebelah kiri dan kanan	Jalan Kelas Khusus	2/2 D	Komersil dan Permukiman	Tinggi
Jalan Pluit Karang Barat	12	0	0	1 sebelah kiri dan 2,5 kanan	Kolektor sekunder	3/1 Satu arah	Daerah industri; bbrp toko di sisi jalan	Sedang
Pluit Karang Ayu Barat	19,5	2,5	0	0,9 sebelah kiri dan 2,5 sebelah kanan	Kolektor sekunder	4/2 D	Komersil dan Permukiman	Sedang
Pluit Karang Utara	16,5	3,5	0	2,5 kiri dan kanan	Kolektor sekunder	4/1 Satu arah	Komersil dan Permukiman	Sedang

Sumber: Hasil Survei, 2019

Geometri jaringan jalan yang ditinjau adalah simpang utama masuk Muara Angke dan simpang Jalan Dermaga. Berikut penjelasannya.

1) Simpang Utama Masuk Muara Angke

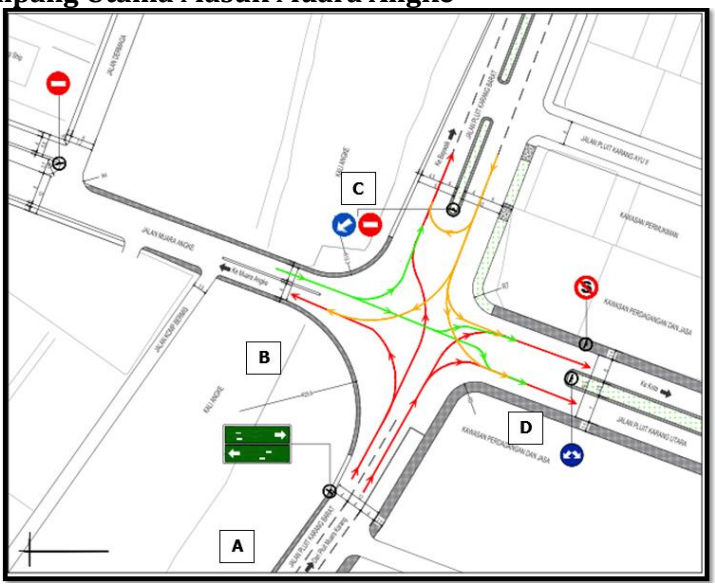

Gambar III.6 Geometri dan Titik Konflik Simpang Utama Masuk Muara Angke

Tabel III.13 Data Geometri Simpang Utama Masuk Muara Angke

Kode Pendekat	Tipe Lingkungan Jalan	Hambatan Samping	Median (M)	Kelan Daian (+/- %)	Lebar Pendekat (W Keluar)	Lebar Pendekat (W Masuk)
A	Komersial	Sedang	-	-	12	0
B	Komersial	Tinggi	0,5	10	4	4
C	Komersial	Sedang	2,5	-	10	9,5
D	Komersial	Sedang	3,5	-	0	13

Sumber: Hasil Survei, 2019

Gambar III.7 Situasi dan Lingkungan di Sekitar Simpang Utama Masuk Muara Angke

2) Simpang Jalan Dermaga

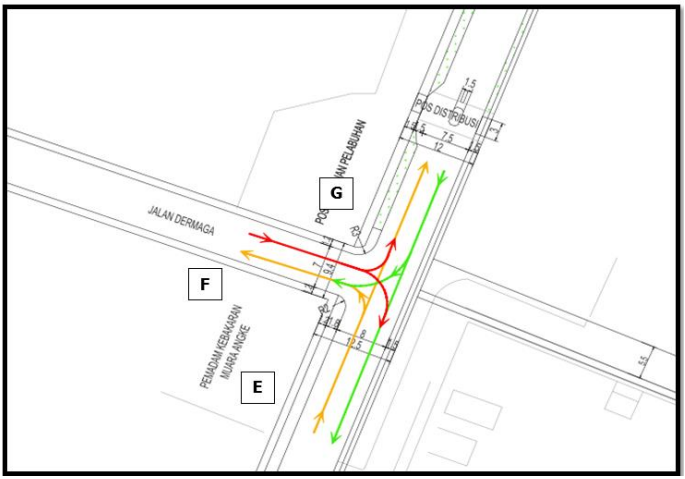

Gambar III.8 Geometri dan Titik Konflik Simpang Jalan Dermaga

Tabel III.14 Geometri Simpang Jalan Dermaga

Kode Pendekat	Tipe Lingkungan Jalan	Hambatan Samping	Median (m)	Kelandaian (+/- %)	Lebar Pendekat (W keluar)	Lebar Pendekat (W Masuk)
E	Komersial	Tinggi	-	-	4	4
F	Komersial	Tinggi	-	-	3,5	3,5
G	Komersial	Tinggi	-	-	3,75	3,75

Sumber: Hasil Survei, 2019

Gambar III.9 Situasi dan Lingkungan di Sekitar Simpang Jalan Dermaga

d. Aksesbilitas Kawasan

Untuk menuju atau meninggalkan Kawasan Muara Angke dapat ditempuh melalui beberapa alternatif jalan seperti uraian berikut ini.

1) Menuju Lokasi

- Dari TIMUR:
  Melalui Jl. Pluit Raya Utara ke arah Barat menuju Jl Pluit Karang Ayu Barat. Dilanjutkan belok ke kanan menuju Jl. Muara Angke.
- Dari BARAT:
  Melalui Jl. Mandara Permai ke arah Timur menuju Jl. Pluit Karang Barat. Dilanjutkan belok ke kiri menuju Jl. Muara Angke.

2) Meninggalkan Lokasi

- Ke TIMUR:
  Melalui Jl. Muara Angke ke arah Timur. Belok ke kiri menuju Jl Pluit Karang Ayu Barat dan/atau lurus menuju Jl. Pluit Utara Raya.
- Ke BARAT:
  Melalui Jl. Muara Angke ke arah Timur menuju Jl. Pluit Utara Raya. Belok ke kanan menuju Jl. Muara Karang Raya dan belok kiri menuju Jl. Mandara Permai.

e. Sistem Transportasi di Wilayah Studi

Sistem transportasi ditinjau pada ruas jalan yang terkena dampak langsung dan ruas jalan di sekitarnya, dengan pembahasan sebagai berikut.

- **Kapasitas Ruang Jalan**

  Berikut kapasitas ruang jalan di Kawasan Muara Angke.

Tabel III.15 Kapasitas Ruang Jalan di Kawasan Muara Angke

Nama Jalan	Faktor Koreksi					Kapasitas C (smp/jam)
	Co Kapasitas Dasar (smp/jam)	FCw Penyesuaian Lebar Jalan	FCsp Penyesuaian Pemisah Arah	FCsf Penyesuaian Hambatan Samping	FCcs Penyesuaian Ukuran kota	
SEGMEN 1						
JL. PLUIT KARANG AYU BARAT [UTARA] - [US]	3300	0,90	1,00	0,80	1,04	2471
JL. PLUIT KARANG AYU BARAT [UTARA] - [SU]	3300	0,90	1,00	0,80	1,04	2471
SEGMEN 2						
JL. PLUIT KARANG UTARA [TIMUR] - [TB]						
JL. PLUIT KARANG UTARA [TIMUR] - [BT]	6600	0,90	1,00	0,80	1,04	4942
SEGMEN 3						
JL. PLUIT KARANG BARAT [SELATAN] - [US]						
JL. PLUIT KARANG BARAT [SELATAN] - [SU]	4950	0,90	1,00	0,80	1,04	3707
SEGMEN 4						
JL. MUARA ANGKE [BARAT] - [TB]	1650	1,00	1,00	0,70	1,04	1201
JL. MUARA ANGKE [BARAT] - [BT]	1650	1,00	1,00	0,70	1,04	1201

Sumber: Hasil Analisis Tim DELH, 2019

- **Volume Lalu Lintas di Kawasan Muara Angke**

  Berikut volume lalu lintas di Kawasan Muara Angke.

Tabel III.16 Volume Lalu Lintas di Kawasan Muara Angke

VOLUME LALULINTAS - EKSISTING		Tahun	2019
			EKSISTING
Nama Jalan		Jam	Volume (smp/jam)
SEGMEN 1			
JL. PLUIT KARANG AYU BARAT [UTARA] - [US]	PAGI	08.15 - 09.15	784
	SORE	16.00 - 17.00	569
JL. PLUIT KARANG AYU BARAT [UTARA] - [SU]	PAGI	08.00 - 09.00	758
	SORE	17.45 - 18.45	416
SEGMEN 2			
JL. PLUIT KARANG UTARA [TIMUR] - [TB]	PAGI	06.00 - 07.00	0
	SORE	15.00 - 16.00	0
JL. PLUIT KARANG UTARA [TIMUR] - [BT]	PAGI	07.45 - 08.45	3026
	SORE	17.45 - 18.45	2490
SEGMEN 3			
JL. PLUIT KARANG BARAT [SELATAN] - [US]	PAGI	06.00 - 07.00	0
	SORE	15.00 - 16.00	0
JL. PLUIT KARANG BARAT [SELATAN] - [SU]	PAGI	07.45 - 08.45	2944
	SORE	17.45 - 18.45	2439
SEGMEN 4			
JL. MUARA ANGKE [BARAT] - [TB]	PAGI	08.30 - 09.30	407
	SORE	18.00 - 19.00	498
JL. MUARA ANGKE [BARAT] - [BT]	PAGI	08.45 - 09.45	524
	SORE	17.45 - 18.45	499

Sumber: Hasil Analisis Tim DELH, 2019

- **Kinerja Ruas Jalan di Kawasan Muara Angke**
  Berikut kinerja ruas jalan di Kawasan Muara Angke:

Tabel III.17 Kinerja Ruang Jalan di Kawasan Muara Angke

Nama Jalan	Tahun Kapasitas smp/jam	2019 Volume smp/jam	Derajat Kejenuhan (DS)	LoS
SEGMEN 1				
JL. PLUIT KARANG AYU BARAT [UTARA] - [US]	2471	784	0,32	B
JL. PLUIT KARANG AYU BARAT [UTARA] - [SU]	2471	758	0,31	B
SEGMEN 2				
JL. PLUIT KARANG UTARA [TIMUR] - [TB]				#DIV/0!
JL. PLUIT KARANG UTARA [TIMUR] - [BT]	4942	3026	0,61	C
SEGMEN 3				
JL. PLUIT KARANG BARAT [SELATAN] - [US]				#DIV/0!
JL. PLUIT KARANG BARAT [SELATAN] - [SU]	3707	2944	0,79	D
SEGMEN 4				
JL. MUARA ANGKE [BARAT] - [TB]	1201	498	0,41	B
JL. MUARA ANGKE [BARAT] - [BT]	1201	524	0,44	B

Sumber: Hasil Analisis Tim DELH, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pelayanan jalan di:

- Jl. Pluit Karang Ayu Barat dan Jl. Muara Angke berada pada tingkat pelayanan B, yaitu arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan, dan pengemudi masih cukup bebas memilih kecepatannya dengan jalur jalan yang digunakan.
- Jl. Pluit Karang Utara berada pada tingkat pelayanan C, yaitu berada dalam tingkatan arus stabil tapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, dan pengemudi mulai dibatasi dalam memilih kecepatan.
- Jl. Pluit Karang Barat berada pada tingkat pelayanan D, yaitu arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus, kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar, dan pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat.

3. Komponen Biologi

a. Komponen Biologi : Jenis Vegetasi

Banyaknya vegetasi yang menyusun ruang terbuka hijau akan mengoptimalkan peran vegetasi di dalam ekosistem. Jumlah jenis yang menyusun keanekaragaman vegetasi di dalam suatu area disebut sebagai kekayaan jenis (*richness*), semakin tinggi *richness* berarti keanekaragaman hayati juga semakin tinggi, sedangkan menurut Odum (1998), ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang tinggi akan berlangsung lebih stabil dan tahan terhadap gangguan. Oleh karena itu, keberadaan vegetasi menjadi indikator yang penting. Hal ini terkait dengan fungsi vegetasi sebagai penyerap gas rumah kaca (CO_2) dan mengurangi polusi udara karena menyerap gas-gas pencemar di udara (Rohman, 2009), pengatur iklim mikro, dan fungsinya dalam siklus hidrologi (Arsyad, 1989). Semua fungsi vegetasi tersebut tentunya berpengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan hidup manusia di sekitarnya. Beberapa fungsi dari vegetasi itu sendiri merupakan komponen yang penting dalam menarik perhatian satwa liar dimana akar, daun dan batang sebagai tempat habitat untuk bertengger dan bersarang. burung, serangga maupun hewan lainnya. Oleh karena itu, keberadaan vegetasi sangat mempengaruhi keberagaman jenis satwa liar.

Dalam Pembahasan data terkait komponen biologi yaitu jenis vegetasi dan satwa liar menggunakan pendekatan analisis data yang mengacu pada penelitian terdahulu, Berdasarkan penelitian Kartasasmita, K. (1976) menyatakan dalam inventarisasi flora, hanya dibedakan tiga tingkat tumbuhan yaitu pohon, pancang dan semai. Pohon adalah tumbuhan yang mempunyai keliling batang lebih besar dari 31,4 cm atau diameter lebih besar dari 10 cm. Dengan batasan ini jika ada tumbuhan pemanjat berkayu, paku pohon, palma, bambu, pisang yang mempunyai keliling batang lebih dari 31,4 cm atau diameter lebih dari 10 cm dimasukkan dalam kelompok pohon. Belta adalah tumbuhan yang menyukai keliling batang 6,3 cm tetapi 31,4 cm atau diameter 2 cm tetapi < 10 cm. Dalam kelompok ini termasuk pula perdu, tumbuhan memanjat dan anakan pohon. Semai adalah tumbuhan yang mempunyai keliling batang < 6,3 cm seperti disajikan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel III.18 Penentuan Klasifikasi Vegetasi di Lokasi Kegiatan

No	Vegetasi	Kriteria
1	Pohon (trees)	Pohon berdiameter ≥ 20 cm atau keliling ≥ 62,8 cm (kecuali jenis mangrove, pohon berdiameter ≥ 10 cm atau keliling ≥ 31,4 cm)
2	Tiang (poles)	Pohon dengan diameter 10-20 cm atau keliling 31,4 – 62,8 cm (di hutan mangrove strata ini tidak ada)
3	Pancang (sapling	Anakan pohon dengan tinggi 1,5 m s/d diameter 10 cm
4	Semai (seedling)	Semai dengan jumlah daun ≥ 2 helai dan tinggi s/d 1,5 m
5	Liana (woody climber	Liana dengan panjang ≥ 1,5 m
6	Pohon Palem	Palem dengan tinggi ≥ 1,5 m, atau sudah dewasa
7	Palem memanjat	Batang rotan dengan panjang ≥ 1,5 m
8	Tumbuhan Pandan	Catat tumbuhan pandan rendah, pohon, atau memanjat
9	Epifit	Catat sampai dengan tinggi 2 m dari permukaan tanah
10	Paku/epifit paku/paku merambat	Catat semua tumbuhan paku s/d tinggi 2 m di atas permukaan tanah
11	Semak dan herba	Catat semua

Sumber : Kartasasmita, K., 1976

Metode analisis vegetasi mengacu pada konsep keanekaragaman jenisnya melalui pendekatan jumlah jenis vegetasi saat ini, untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan data diperoleh secara sensus untuk mengetahui gambaran (*description*) kualitas lingkungannya. Inventarisasi vegetasi di tapak kegiatan melalui sensus di lapangan terdapat sejumlah vegetasi yang ditemukan yang mencirikan karakteristik dari ekosistem alami dan buatan di lokasi tapak kegiatan seperti disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar III.10 Tanaman Mangrove di Kawasan Muara Angke

Tipe ekosistem kebun campuran berada di lokasi Kawasan Muara Angke. Komposisi vegetasi di lokasi ini didominasi oleh jenis Ketapang Kencana (*Terminalia mantaly*) dan Pucuk Merah (*Sczygium oleina*).

Gambar III.11 Tanaman di Lokasi Kegiatan

Berdasarkan hasil inventarisasi ditemukan sebanyak 12 jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam 9 famili.

Tabel III.19 Hasil Identifikasi Vegetasi di Lokasi Kegiatan

No	Nama		Famili	Jumlah	Klasifikasi*
	Lokal	Latin			
1	Kelapa	*Cocos nucifera*	Arecaceae	11	Ph dan Ti
2	Bambu kuning	*Bambusa vulgaris*	Gramineae	2 rumpun	Ph dan Ti
3	Ketapang Kencana	*Terminalia catappa*	Combretaceae	10	Ph dan Ti
4	Pucuk Merah	*Sczygium oleina*	Myrtaceae	26	Ph dan Ti
5	Kamboja	*Plumeria pudica*	Apocynaceae	4	Ph dan Ti
6	Mangga	*Mangifera indica*	Anacardiaceae	3	Ph dan Ti
7	Jambu air	*Syzygium aqueum*	Myrtaceae	2	Ph dan Ti
8	Sukun	*Artocarpus communis*	Moraceae	3	Ph dan Ti
9	Palem kuning	*Dypsis lutescens*	Arecaceae	7	An
10	Bintaro	*Cerbera manghas*	Apocynaceae	47	Ph dan Ti
11	Glodokan tiang	*Polyalthia longifolia*	Annonaceae	84	Ph dan Ti
12	Bakau	*Rhizophora sp*	Rhizophoraceae	44	Ti dan Pc

Sumber : Analisis Tim DELH
*Keterangan : *Kalasifikasi (PH: Pohon, Ti: Tiang, Pc : Pancang, dan An: Anakan)*

- **Komponen Biologi : Satwa Liar**

  Jenis-jenis fauna di sekitar wilayah studi, berdasarkan pengamatan sesaat dan informasi penduduk, teridentifikasi beberapa jenis dari kelas mamalia, reptil, amphibi, aves dan pisces. Jenis-jenis fauna yang dapat diidentifikasi antara lain : Kelas Mamalia : Anjing (*Canis familiaris*), Kucing (*Felis domesti*ca) dan Tikus (*Rattus rattus*). Kelas Reptil : Biawak bakau (*Varanus cerambonensis*). Kelas Aves : Walet (*Collocalia esculenta*) dan Bondol Jawa (*Lonchura leucogastroides*).

Tabel III.20 Keadaan Fauna di Lokasi Kegiatan

No.	Nama Species	Nama Lokal	Famili	Keterangan *)
Aves				
1.	*Collocalia esculenta*	Walet	Apodidae	Tidak dilindungi
2.	*Lonchura leucogastroides*	Bondol jawa	Estrildidae	Tidak dilindungi
Reptilia				
1.	*Varanus cerambonensis*	Biawak bakau	Varanidae	Tidak dilindungi
2.	*Eutropis sp*	Kadal	Scincidae	Tidak dilindungi

No.	Nama Species	Nama Lokal	Famili	Keterangan *)
Mamalia				
1.	*Rattus rattus*	Tikus	Muridae	Tidak dilindungi
2.	*Felis domestica*	Kucing	Felidae	Tidak dilindungi
3.	*Canis familiaris*	Anjing	Canidae	Tidak dilindungi

**) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/ Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi*.

- **Komponen Biologi : Plankton dan Benthos**

Komponen biologi berupa plankton dan benthos digunakan sebagai indikator kualitas air sungai. Beberapa organisme plankton dan benthos bersifat toleran dan mempunyai respon yang berbeda terhadap perubahan kualitas perairan. Berikut ini tabel identifikasi plankton dan benthos yang ada di Kali Adem dan Kali Asin.

Tabel III.21 Identifikasi Plankton di Lokasi Kegiatan

Kelimpahan Identifikasi Plankton			
No	**Organisme Plankton**	**Kali Adem**	**Kali Asin**
	Fitoplankton		
1	*Oscillatoria sp*	2	2
2	*Bidhulphia mobiliensis*	2	3
3	*Chaetoceros brevis*	2	3
4	*Chaetoceros curvisetum*	3	2
5	*Chaetoceros didymus*	2	2
6	*Chaetoceros sp2*	2	1
7	*Coscinodiscus sp*	3	1
8	*Ditylum sol*	4	0
9	*Fragillaria sp*	7	2
10	*Hemiaulus dp*	2	2
11	*Navicula sp1*	3	3

Kelimpahan Identifikasi Plankton			
No	**Organisme Plankton**	**Kali Adem**	**Kali Asin**
12	*Navicula sp2*	5	3
13	*Nitzshia longissima*	6	2
14	*Nitzchia sp*	1	2
15	*Rhizosolenia alata*	3	1
16	*Rhizosolenia calcar-alvis*	2	1
17	*Rhizosolenia sp1*	1	0
18	*Rhizosolenia sp2*	1	3
19	*Surirella sp*	0	3
20	*Thalassionema nitzschiodes*	0	5
21	*Thalassionema frauenfeldii*	0	4
22	*Bacteriastrum hyalinum*	0	4
23	*Chaetoceros pendulum*	2	3
24	*Lauderia borrealis*	2	3
25	*Pleurosigma angulatum*	3	2
26	*Pleurosigma elongatum*	1	2
27	*Pleurosigma sp1*	1	1
28	*Euglena sp1*	1	2
29	*Euglena sp2*	0	2
30	*Phacus sp*	0	1
	Jumlah	**65**	**66**
	Zooplankton		
31	*Copepoda sp*	2	1
32	*Copepoda sp1* (nauplius)	2	1
33	*Acartea sp*	3	2
34	*Acartea sp* (nauplius)	3	2
35	*Oithona sp* (nauplius)	1	3
36	*Ciliata sp1*	1	2
37	*Ciliata sp2*	1	2
38	*Colpoda sp*	1	1
39	*Condonellpsis parva*	2	0
40	*Didinium sp*	3	3
41	*Favella campanula*	2	2
42	*Liprotinnus nordgvisti*	3	2
43	*Prorodon sp*	3	2
44	*Tintinnopsis beroidea*	2	3

Kelimpahan Identifikasi Plankton			
No	**Organisme Plankton**	**Kali Adem**	**Kali Asin**
45	*Tintinnopsis gracilis*	2	2
46	*Tintinnopsis radix*	4	1
47	*Liprotintinnus boltnicus*	2	0
48	*Euglypa sp*	3	2
49	*Anisonema sp*	2	2
	Jumlah	**42**	**33**

Sumber: Data Primer, PT. Laboratorium Medio Pratama, 2019

Berdasarkan hasil analisis uji laboratorium menunjukkan bahwa keanekaragaman plankton di Kali Adem dan Kali Asin adalah 0,8882 (fitoplankton) dan 0,975 (zooplankton). Sedangkan keanekaragaman plankton di Kali Asin adalah sebesar 0,952 (fitoplankton) dan 0,9431 (zooplankton).

Tabel III.22 Benthos di Lokasi Kegiatan

Kelimpahan Identifikasi Benthos			
No	**Organisme Benthos**	**Kali Adem**	**Kali Asin**
1	*Tellina sp1*	2	2
2	*Tellina sp2*	2	2
3	*Terebra sp2*	2	3
4	*Gastropoda sp1*	2	3
5	*Gastropoda sp2*	3	2
6	*Gastropoda sp3*	3	2
7	*Dentalium sp*	2	1
8	*Foraminifera*	2	1
9	*Cavarotalia sp*	2	2
10	*Pseudorotalia sp*	1	2
11	*Quinqueloculina sp1*	1	1
12	*Quinqueloculina sp1*	1	1
	Jumlah	**23**	**22**

Sumber : Data Primer, PT. Laboratorium Medio Pratama, 2019

Berdasarkan hasil analisis uji laboratorium menunjukkan bahwa keanekaragaman benthos di Kali Adem adalah 0,8912. Sedangkan keanekaragaman benthos di Kali Asin adalah sebesar 0,9147.

4. Komponen Sosial, Ekonomi dan Budaya

a. Demografi dan Kependudukan

Lokasi tapak kegiatan Kawasan Muara Angke secara administrasi terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Luas lahan permukiman di Kawasan Muara Angke adalah sebesar 37,68 Ha. Jumlah penduduk di Kawasan Muara Angke pada tahun 2018 sebanyak 13.124 jiwa yang terbagi dalam 5 RW dan 56 RT. Berikut adalah rincian jumlah penduduk di Kawasan Muara Angke.

Tabel III.23 Jumlah Penduduk di Kawasan Muara Angke

No.	RW	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Warga
1.	1	10	1.000	4.000
2.	11	13	565	1.695
3.	20	12	577	2.291
4.	21	9	650	1.100
5.	22	12	1.346	4.038
Total				**13.124**

Sumber: Penyusunan Peraturan Penataan Ruang tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke, 2019

Data kepadatan penduduk di wilayah Kawasan Muara Angke sebagai data dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ Penduduk}{Luas\ Wilayah} = orang\ atau\ jiwa/km^2$$

Sehingga diperoleh 13.124 jiwa dibagi 0,38 km^2 sebesar 34.536 jiwa/km^2, hal ini dapat diterjemahkan bahwa kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni, diperolehnya kepadatan penduduk 34.536 jiwa/km^2.

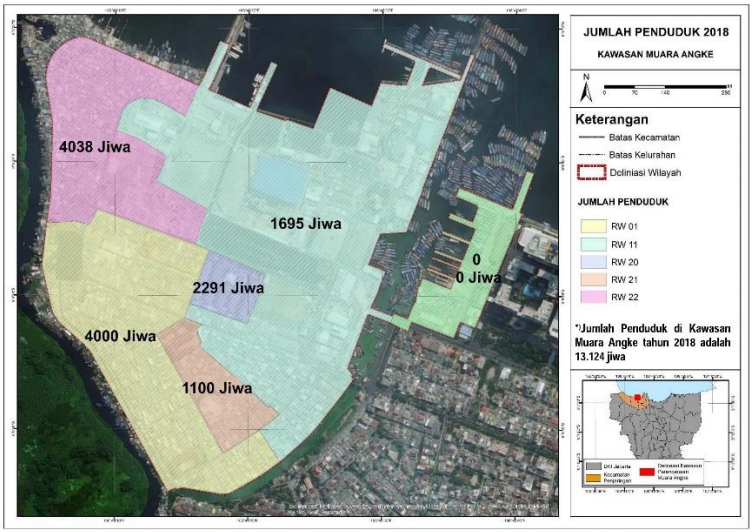

Tabel III.24 Peta Sebaran Penduduk di Kawasan Muara Angke

b. Sosial Ekonomi

Industri pengolahan perikanan Kawasan Muara Angke merupakan komoditas unggulan. Selain itu, ada usaha pengolahan ikan tradisional dan bengkel serta alat perikanan. Kondisi rantai bisnis perikanan disajikan pada gambar berikut ini.

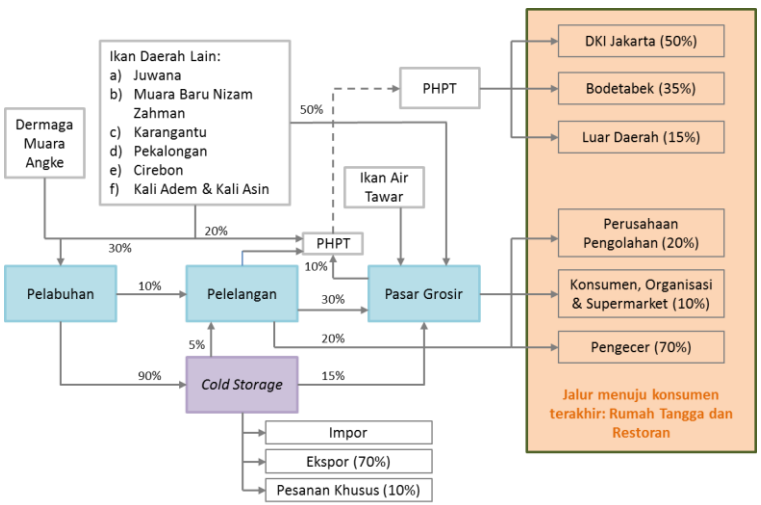

Tabel III.25 Kondisi Rantai Bisnis Perikanan

1) Potensi Ekonomi Kawasan

Potensi ekonomi kawasan di Kawasan Muara Angke diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu potensi produksi penangkapan ikan, potensi pengolahan dan pemasaran ikan, serta potensi penunjang yang dirinci sebagai berikut.

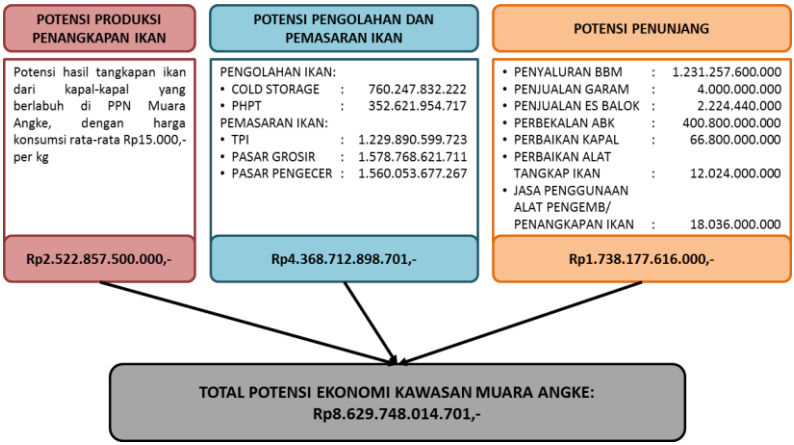

Tabel III. 26 Potensi Ekonomi Kawasan Muara Angke

Tabel III.27 Produksi PPN Muara Angke Tahun 2015-2018 (dalam kg)

No.	Tahun	Produksi *Cold Storage*	Produksi Pasar Ikan	Produksi PHPT
1.	2015	22.709.506	51.657.320	7.447.895
2.	2016	22.712.734	56.997.390	8.607.665
3.	2017	25.874.903	57.056.834	9.030.830
4.	2018	23.046.987	51.198.671	1.080.775

Sumber: Penyusunan Peraturan Penataan Ruang tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke, 2019

Tabel III.28 Nilai Produksi PPN Muara Angke Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Nilai Produksi *Cold Storage*	Nilai Produksi Pasar Ikan	Nilai Produksi PHPT
1.	2015	Rp787.584.791.714	Rp1.280.759.650.000	Rp241.711.815.000
2.	2016	Rp791.021.642.433	Rp1.596.961.747.700	Rp224.866.080.000
3.	2017	Rp710.603.904.965	Rp1.547.414.700.000	Rp238.413.676.225
4.	2018	Rp735.707.477.430	Rp1.657.879.860.000	RP536.559.775.000

Sumber: Penyusunan Peraturan Penataan Ruang tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke, 2019

Tabel III.29 Nilai dan Kapasitas Produksi TPI Muara Angke Tahun 2015-2019

No.	Tahun	TPI Muara Angke				Total/ Bulan
		Kapal (unit)	CS (unit)	Produksi (kg)	Nilai (Rp)	Kapal/CS
1.	2015	5.960		34.507.207	437.428.496.600	5.960
2.	2016	6.196		50.253.204	1.566.987.197.915	6.196
3.	2017	5.058		41.526.164	1.483.750.339.055	5.058
4.	2018	3.311	393	36.585.550	1.533.008.547.935	3.704
5.	2019/Juni	1.516	171	14.041.762	513.333.117.250	1.687

Sumber: Penyusunan Peraturan Penataan Ruang tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke, 2019

2) Potensi Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kawasan Muara Angke didapatkan dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan perikanan dan kegiatan penyeberangan. Total potensi pemasukan PAD Kawasan Muara Angke adalah Rp. 98.422.594.405,-. Hal ini hanya 1,14% dari total potensi ekonomi kawasan. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

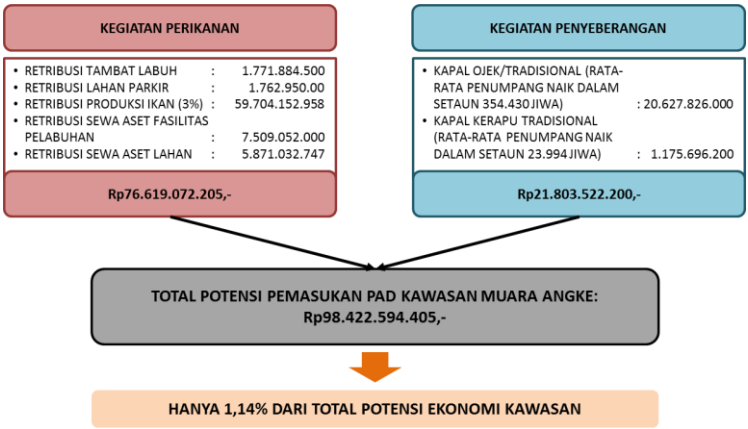

Tabel III.30 Potensi PAD Kawasan Muara Angke

3) Kondisi Sosial Ekonomi Responden

Secara umum tingkat sosial ekonomi responden dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Berdasarkan data primer hasil olahan wawancara warga masyarakat Kawasan Muara Angke sebagai responden dengan jumlah sebanyak 85 responden dimana 65 responden merupakan masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Terdampak, dan Tokoh Masyarakat yang berada di RW 01, RW 11, RW 20, RW 21,dan RW 22. Sementara, 20 responden lainnya merupakan pemilik maupun pekerja pada unit usaha yang terdapat di Muara Angke yang bergerak di bidang Unit Pengolahan Ikan (UPI), Pujaseri, Kios, Penyedia Air bersih, Docking Kapal, Bengkel, dan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) tetapi tidak bertempat tinggal di Kawasan Muara Angke.

Pekerjaan responden sebagai mata pencaharian pokok yang paling banyak adalah Pedagang/Warung (22,35%), dan Ibu Rumah Tangga (21,18%), secara rinci mata pencaharian pokok responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.31 Mata Pencaharian Responden

No	Jawaban	Jumlah	%
a.	Pegawai Negeri Sipil/ABRI	0	0,00
b.	Buruh Bangunan	0	0,00

No	Jawaban	Jumlah	%
c.	Pedagang/Warung	19	22,35
d.	Wiraswasta	9	10,59
e.	Jasa (Pelayan Toko, Supermarket,dll)	4	4,71
f.	Buruh Kapal	1	1,18
g.	Nelayan	15	17,65
h.	Lainnya		
	• Pensiunan	1	1,18
	• Penjahit	1	1,18
	• Ibu Rumah Tangga	18	21,18
	• Pemilik Usaha	12	14,12
	• Karyawan	5	5,88
	Jumlah	**85**	**100,00**

Sumber: data primer, survey, 2020

Dilihat dari penghasilan responden dari pekerjaan pokok, sebanyak 52,94% responden berpenghasilan diatas Rp 3.600.000; sementara sebanyak 22,35% responden berpenghasilan antara Rp 2.600.000 - Rp 3.500.000 dan bahkan terdapat 17,65% responden yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 1.500.000. Hal ini menunjukkan adanya penghasilan yang cukup, terlebih dengan adanya kegiatan operasional Kawasan Muara Angke, diharapkan akan lebih meningkat lagi baik sebagai nelayan maupun usaha lainnya untuk memenuhi kebutuhan para nelayan. Secara rinci penghasilan responden dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.32 Penghasilan Responden

No	Penghasilan/Bulan	Jumlah	Persentase (%)
a.	Kurang dari Rp 1.500.000,-	15	17,65
b.	Rp 1.600.000,- s/d Rp 2.500.000,-	6	7,06
c.	Rp2.600.000,- s/d Rp 3.500.000,-	19	22,35
d.	Di atas Rp 3.600.000,-	45	52,94
	Jumlah	**85**	**100,00**

Sumber: data primer, survey, 2020

Sedangkan pengeluaran rata - rata responden setiap bulannya bervariatif meskipun sebagian besar dari responden didalam pengeluarannya sama dengan pendapatannya. Secara rinci pengeluaran responden dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.33 Pengeluaran Responden

No	Pengeluaran/Bulan	Jumlah	Persentase (%)
a.	Kurang dari Rp 1.500.000,-	15	17,65
b.	Rp 1.600.000,- s/d Rp 2.500.000,-	6	7,06
c.	Rp2.600.000,- s/d Rp 3.500.000,-	19	22,35
d.	Di atas Rp 3.600.000,-	45	52,94
	Jumlah	**85**	**100,00**

Sumber: data primer, survey, 2020

Pertanyaan khusus untuk masyarakat dan tokoh masyarakat apabila terjadi kesulitan keuangan/ekonomi, kebanyakan responden pada umumnya lebih memilih menghemat (60%), minta bantuan keluarga (6,67%), dan lainnya (33,33%). Hal ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan keuangan pada saat tertentu saja. Apabila ada kelebihan dana/keuangan pada umumnya responden ditabung sebanyak 59,70%, untuk dipergunakan membeli elektronik (TV, Tape, dll) sebanyak 29,85%; membeli perhiasan sebanyak 4,48%, membeli perabotan rumah tangga 2,99%; biaya perbaikan rumah 1,49% dan lainnya 1,49%.

c. Sosial Budaya

Dalam aspek budaya untuk kondisi rona lingkungan hidup saat ini berdasarkan kondisi budaya dapat dilihat dari keragaman dimana wilayah studi merupakan masyarakat yang memiliki ciri khas khusus yaitu masyarakat yang berada di Kawasan Muara Angke yang didominasi oleh masyarakat suku jawa. Budaya ini mempengaruhi pengetahuan, sikap dan persepsi. Notoatmodjo (1985) menyatakan bahwa perilaku merupakan keadaan jiwa (berfikir, berpendapat, bersikap dan sebagainya) untuk memberikan respon terhadap situasi di luar objek tertentu. Dalam merespon ini bersifat positif (tanpa tindakan) dan bersifat aktif (dengan tindakan). Pengetahuan menjadi penting ketika daya

pengetahuan manusia dalam mempertahankan dan mengembangkan hidup dan kehidupannya, bermodal kepada daya itu manusia membentuk sikap dan nilai hidup, menentukan pilihan-pilihan serta tindakan-tindakan (Pranarka 1987). Perilaku diwujudkan dengan tingkah laku, secara individual tingkah laku tersebut dapat dikategorikan yang disajikan pada **Tabel III.34** menjadi 3 jenis tingkah laku dalam perwujudan perilaku pada masyarakat sosial.

Tabel III.34 Kategori Tingkah Laku dalam Perwujudan Perilaku

No.	Kategori	Bentuk	Keterangan
1	Perilaku	Persepsi	Perilaku yang berdasarkan pengetahuan situasi dan rangsangan dari luar
2	Perilaku	Sikap	Perilaku hasil tanggapan batin terhadap keadaan atau rangsangan dari luar diri subjek
3	Perilaku	Tindakan	Perilaku berupa perbuatan terhadap situasi rangsangan dari luar seperti keikutsertaan dalam suatu kegiatan tertentu

Sumber: Pranarka (1987)

Berdasarkan perilaku yang menentukan persepsi, sikap dan tindakan dalam kehidupan sosial dimana saling berhubungan dalam interaksi sosial yang dapat memunculkan konflik sosial budaya maupun kepentingan yang diwujudkan dengan masih adanya kegiatan budaya, adat istiadat dan gotong royong di kalangan masyarakat.

Selain konsep persepsi, sikap dan tindakan, dalam pembahasan rona lingkungan hidup saat ini terkait bentuk interaksi sosial berupa kerjasama (*cooperation*) dan pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Pelaku interaksi sosial adalah individu, dimana tidak ada individu yang bisa hidup sendiri, yang mampu bertahan hidup tanpa berinteraksi dengan individu lainnya dan tanpa interaksi tidak mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Berikut ini

disajikan pada **Tabel III.35** mengenai penjelasan aspek interaksi sosial.

Tabel III.35 Aspek-Aspek dalam Interaksi Sosial

No.	Aspek	Keterangan
1	Adanya hubungan	Setiap interaksi terjadi karena adanya hubungan individu dengan individu maupun antara individu dengan kelompok
2	Adanya individu	Setiap interaksi sosial menuntut tampilnya individu-individu yang melaksanakan hubungan
3	Adanya tujuan	Setiap interaksi sosial memiliki tujuan tertentu seperti mempengaruhi individu lain
4	Adanya hubungan dengan struktur dan fungsi kelompok	Interaksi sosial yang ada hubungan dengan struktur dan fungsi kelompok ini terjadi karena individu dalam hidupnya tidak terpisahkan dari kelompok, disamping itu tiap-tiap individu memiliki fungsi di dalam kelompoknya.

Sumber: Soekarno, 2006

Kegiatan survei lapangan sosial dan budaya hanya dilakukan pada responden masyarakat karena responden masyarakat semuanya berdomisili di Muara Angke sehingga interaksi antar masyarakat dapat tergambarkan dan mendapatkan respon serta tanggapan awal dari responden masyarakat dapat bersifat objektif terhadap kegiatan operasional Kawasan Muara Angke. Lokasi survei lapangan sosial, ekonomi dan budaya ini dilaksanakan di RW 01, RW 11, RW 20, RW 21 dan RW 22 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, yang diperkirakan akan menerima dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan tersebut. Distribusi Responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.36 Distribusi Responden Menurut Jenis Pekerjaan dan Status Sosial

No.	Distribusi Responden	Jumlah
1	*Informal Leader* (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua RT / RW, dsb.)	9
2	Masyarakat	56
Jumlah		**65**

Sumber : Tim Studi DELH, 2020

Jumlah responden sebanyak 65 orang dari 4.138 KK. Jumlah responden tersebut dirinci sebagai berikut: Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat dan masyarakat yang berada di Kawasan Muara Angke untuk dilakukan wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan. Dari hasil survei primer menunjukkan bahwa 47,69% responden berpendidikan tamat SMA/SMK, kemudian 23,08% responden tamat SMP, 23,08% responden berpendidikan tamat SD dan 6,15% responden tidak tamat SD. Hal ini menunjukan jawaban yang diberikan oleh responden sangat baik sekali. Sedangkan agama yang dianut oleh responden di lokasi studi mayoritas beragama Islam sejumlah 88,24%, Kristen 7,06% dan Budha 4,71%.

Rata-rata umur responden termuda berusia 20 tahun sampai yang tertua 78 tahun. Hal ini menunjukkan tingkat kematangan dalam memberikan jawaban atau pendapatnya mengenai kegiatan operasional Kawasan Muara Angke sangat baik.

Gambar III.12 Foto Pengambilan Kuesioner

Adapun hasil survei sosial dan budaya tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

1) Nilai Budaya Masyarakat Kawasan Muara Angke

Aktivitas adat atau keagamaan yang masih ada di Kawasan Muara Angke dapat dilihat pada gambar berikut.

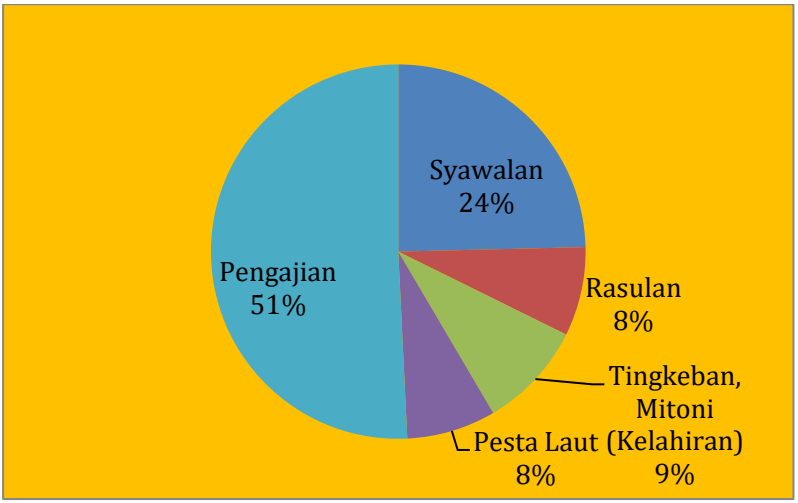

Tabel III.37 Aktivitas Adat atau Keagamaan yang Masih Ada di Kawasan Muara Angke

Aktivitas ini diadakan biasanya di Masjid (47,69%) lainnya seperti rumah warga secara bergantian, taman dan tempat pelelangan ikan (38,46%) dan Balai RW, RT dan Kelurahan (13,85%). Kegiatan ini masih tetap dilestarikan dengan baik oleh warga sekitar sebanyak 86,15% sedangkan yang menjawab kadang-kadang saja dilakukan sebanyak 13,85% karena dianggap pemborosan, terlalu banyak menyita waktu dan tenaga serta tingkat ekonomi rumah tangga yang tidak mendukung.

2) Pola Hubungan Masyarakat Kawasan Muara Angke

Dari hasil survei lapangan diketahui bahwa sebagian besar responden sudah lama tinggal di Kawasan Muara Angke. Responden yang bertempat tinggal 5 – 10 tahun sebanyak 45,88%, lebih dari 10 tahun sebanyak 44,71%, kurang dari 5 tahun sebanyak 5,88% dan sejak lahir sebanyak 3,53%.

lebih dari 10 tahun sebanyak 66,66% dan yang kurang dari 10 tahun sebanyak 33,34%. Bentuk kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong sebanyak 86,15% antara lain berupa kerja bakti kebersihan lingkungan (84,62%); arisan (32,31%); hajatan (61,54%); siskamling (6,15%) dan memperbaiki rumah/kapal (1,54%). Sedangkan

kondisi kebersamaan warga saat ini di Kawasan Muara Angke sebanyak 55,38% responden menjawab biasa saja, 23,08% responden menjawab semakin berkurang sedangkan 21,54% responden menjawab semakin baik.

Dari hasil survei asal pendatang mayoritas dari daerah Banten, Indramayu, Serang, Tegal, Palembang, Padang dan Bugis, yang dilakukan oleh penduduk pendatang agar bisa diterima oleh masyarakat setempat adalah bisa membaur dan bisa bekerjasama dengan masyarakat setempat (63,08%), ikut kegiatan gotong royong, kerja bakti, ronda, arisan dan kegiatan sosial lain yang diadakan di daerah setempat (9,23%) dan sisanya lainnya hanya melapor kepada Pak RT (27,69%).

Sedangkan orang yang biasa dituakan atau dianggap sebagai tokoh lainnya yaitu tokoh masyarakat (Karang Taruna) sebanyak 32,31%, pengurus administrasi wilayah (Camat, RT, RW, Kelurahan dsb) sebanyak 35,38% dan pemuka agama (Dai, Imam Masjid, dsb) sebanyak 32,31%. Di daerah Kawasan Muara Angke ini mudah muncul konflik sebanyak 69,23% responden menjawab jarang, 24,62% responden menjawab kadang-kadang dan 6,15% sering. Biasanya diselesaikan sendiri oleh pihak yang berkonflik sebanyak 69,23% jika tidak bisa langkah berikutnya yang diambil adalah lapor pak RT atau organisasi adat setempat sebanyak 29,23% dan lainnya seperti Karang Taruna sebanyak 1,54%.

3) Persepsi Masyarakat Terhadap Adanya Kegiatan Penataan Kawasan Muara Angke

Dari hasil survei diketahui bahwa, penduduk sekitar lokasi studi mayoritas (100%) setuju dengan adanya kegiatan penataan Kawasan Muara Angke karena dianggap menguntungkan masyarakat sekitar adalah sebagai berikut :

- Demi kebaikan wilayah Muara Angke, agar lebih tertata dengan rapi dan bersih.
- Agar dapat melestarikan Kawasan Muara Angke.
- Baik untuk lingkungan Kawasan Muara Angke.
- Asal ditata serentak dan rapi untuk lingkungan.
- Agar Kawasan Muara Angke lebih bagus.
- Kepentingan bersama.
- Membantu program pemerintah.

- Menguntungkan bagi buruh dan nelayan setempat, selain itu ada tempat berdagang dan perumahan yang lebih tertata.
- Daerah pesisir laut jadi jalan harus dinaikkan agar tidak terjadi banjir.
- Mempermudah akses.
- Agar lebih bersih dan lancar saluran drainase.
- Agar Kawasan Muara Angke tidak kumuh lagi.
- Masih bisa usaha di Resto Apung.
- Biaya sewa untuk pemilik usaha lama diringankan.
- Sektor informal (pedagang kaki lima) disediakan tempat/tidak di gusur.

Sedangkan kekhawatiran masyarakat jika kegiatan tersebut dilaksanakan adalah takut jika dibongkar bangunannya dan digusur, terjadi kebakaran, banjir, pencurian kendaraan bermotor dan gangguan terhadap nelayan.
Harapan/saran masyarakat adalah :

- Adil, memperhatikan masyarakat kecil.
- Tetap tinggal disini.
- Lebih baik dan rapi.
- Kesejahteraan rakyat diutamakan.
- Drainase dan bangunan ditata dan dikelola dengan baik.
- Membuat suasana menjadi lebih bersih dan rapi.
- Persampahan harus diurus.
- Kawasan Muara Angke ke depannya lebih maju, lebih indah dan berkembang.
- Pembangunan harus memperhatikan lingkungan sekitar.
- Pembersihan drainase secara berkala, karena banyak drainase di Muara Angke yang tidak berfungsi dengan baik akibat banyak sedimen dan sampah di saluran drainase.
- Pembangunan ke depannya untuk nelayan tradisional.
- Pembangunan boleh tapi jangan memaksakan.
- Reklamasi harus memperhatikan lingkungan.
- Lapangan usaha sebesar-besarnya ketika konstruksi.
- Mengutamakan drainase dan jalan.
- Sosialisasi kepada warga terkait dengan pembangunan.
- Pembangunan harus memperhatikan saluran drainase agar tidak ada masalah selanjutnya.

- Agar Kawasan Muara Angke lebih bersih, air dan listrik tercukupi untuk kedepannya.
- Agar jaringan PAM bisa masuk ke Muara Angke.
- Penambahan sarana usaha perikanan karena bahan baku cukup.
- Agar dipermudah saat melakukan pengurusan izin kapal.
- Dilakukan perbaikan sarana di pelabuhan.
- Fasilitas di pasar ikan masih kurang memadai karena kualitas air yang digunakan untuk mencuci ikan kurang memadai. Air laut kotor sedangkan air tawar mahal.
- Jalur transportasi antara unit usaha dan permukiman dibedakan, untuk mengurangi kemacetan.

d. Komponen Kesehatan Masyarakat

Aspek kesehatan masyarakat dalam kajian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup ini merupakan bagian dari strategi pembangunan kesehatan nasional yaitu mewujudkan program pembangunan nasional berwawasan kesehatan dimana program pembangunan kesehatan memberikan prioritas utama terhadap upaya pelayanan peningkatan kesehatan (promotif) dan upaya pencegahan penyakit (preventif) selain upaya pelayanan penyembuhan atau pengobatan (kuratif) dan upaya pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dilakukan secara menyeluruh dan terpadu serta berkesinambungan. Upaya prioritas tersebut menjadi acuan dalam mengkaji komponen kesehatan masyarakat khususnya pada upaya pencegahan penyakit (preventif) dari dampak terhadap komponen kesehatan masyarakat. Dalam implementasi upaya pencegahan penyakit (preventif) dari dampak terhadap komponen kesehatan masyarakat mengacu pada pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 876/MENKES/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL).

Kontribusi lingkungan dalam mewujudkan derajat kesehatan merupakan hal yang esensial di samping masalah perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Lingkungan memberikan kontribusi terbesar terhadap timbulnya masalah kesehatan masyarakat, sehingga keterkaitan antara kualitas atau karakteristik "lingkungan bermasalah dan status

kesehatan" perlu dipahami dan dikaji secara cermat agar dapat digambarkan potensi besarnya risiko atau gangguan kesehatan.

Konsep Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL), pada dasarnya merupakan model pendekatan guna mengkaji, dan atau menelaah secara mendalam untuk mengenal, memahami, dan memprediksi kondisi dan karakteristik lingkungan yang berpotensi terhadap timbulnya risiko kesehatan, dengan mengembangkan tatalaksana terhadap sumber perubahan media lingkungan, masyarakat terpajan dan dampak kesehatan yang terjadi. Dengan demikian penerapan ADKL dapat dilakukan guna menelaah kegiatan operasional Kawasan Muara Angke dalam tahapan pelaksanaan maupun pengelolaan kegiatan, serta melakukan penilaian guna menyusun atau mengembangkan upaya pemantauan maupun pengelolaan untuk mencegah, mengurangi, atau mengelola dampak kesehatan masyarakat akibat suatu usaha atau kegiatan pembangunan. Pendekatan konsep Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) melalui ruang lingkup dalam kajian aspek kesehatan masyarakat seperti disajikan pada **Tabel III.38** di bawah ini.

Tabel III.38 Pendekatan Ruang Lingkup Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator	Keterangan
1	Parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak kegiatan operasional Kawasan Muara Angke	Telaah 5 indikator dilakukan dengan pengukuran pada: 1. Sumber dampak atau sumber perubahan (emisi); 2. Media lingkungan (ambien) sebelum kontak dengan manusia; 3. Penduduk terpajan (Biomarker); 4. Potensi dampak kesehatan.
2	Proses dan potensi terjadi pemajanan	
3	Potensi besarnya risiko penyakit (angka kesakitan dan angka kematian)	
4	Karakteristik penduduk yang berisiko	
5	Sumber daya kesehatan	

Sumber: Kepmen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001

Penjelasan mengenai 5 indikator dalam pendekatan ruang lingkup kajian aspek kesehatan masyarakat dalam memahami dan mengkaji secara cermat agar dapat digambarkan potensi besarnya risiko atau gangguan kesehatan dan memprediksi kondisi dan karakteristik lingkungan yang berpotensi terhadap timbulnya risiko kesehatan, sebagai berikut:

a. **Parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak kegiatan operasional dan berpengaruh terhadap kesehatan**
   Parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak kegiatan operasional Kawasan Muara Angke berpengaruh terhadap gangguan kesehatan masyarakat di wilayah studi baik dalam tapak kegiatan Kawasan Muara Angke maupun area sekitar tapak kegiatan Muara Angke.

b. **Proses dan Potensi Terjadinya Pemajanan**
   Pemajanan merupakan proses pemaparan langsung maupun tidak langsung dimana dapat ditentukan prakiraan besaran, frekuensi, dan lamanya pemajanan pada manusia oleh suatu bahan melalui semua jalur dan menghasilkan perkiraan pemajanan numerik. Proses dan potensi terjadinya pemajanan ini dapat terjadi pada saat tahap konstruksi maupun operasi. Proses dan potensi tersebut dalam teridentifikasi melalui jalur pemanjanan, antara lain:
   - Jalur 1 (Sumber pencemar)
     Penjelasan sumber pencemar adalah asal mula pencemar, misalnya: adanya timbunan sampah dan emisi kendaraan.
   - Jalur 2 (Media lingkungan dan mekanisme penyebaran)
     Penjelasan media dan mekanisme penyebaran dalam lingkungan dimana pencemaran dilepaskan misalnya: air, tanah dan udara yang menyebarkan pencemar dengan mekanisme tertentu ke titik pemajanan.
   - Jalur 3 (Titik pemajanan)
     Proses pemaparan dalam suatu area potensial atau riil dimana terjadi kontak antara manusia dengan mekanisme tertentu ke titik pemajanan.
   - Jalur 4 (Cara pemajanan)
     Proses bagaimana pencemar masuk atau kontak dengan tubuh manusia misalkan: tertelan, pernapasan atau kontak kulit.

- Jalur 5 (Penduduk berisiko)
  Pendekatan terhadap penerima sumber pencemar yaitu orang-orang yang terpajan atau berpotensi terpajan oleh pencemar pada titik pemajanan.

c. Potensi Besarnya Risiko Penyakit

Pendekatan ruang lingkup kajian potensi besarnya risiko penyakit melalui 10 besar pola penyakit untuk melihat gambaran umum angka kesakitan secara riil maupun potensial sebagai rona lingkupan hidup saat ini yang nantinya digunakan untuk pembanding data di wilayah kajian. Data 10 penyakit diperoleh dari Puskesmas Pluit pada bulan Januari sampai Juli 2019. Data mengenai 10 besar penyakit dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.39 Sepuluh Besar Penyakit di Puskesmas Pluit Tahun 2019

Bulan	Diagnosa	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
Januari	Acute pharyngitis (common cold)	237	277	514
	Essential (primary) hypertension	80	93	173
	Supervision of other normal pregenancy	85	79	164
	Necosis of pulp	70	68	138
	Dyspepsia	50	69	119
	Diarhosa and gastoerisis of presumed infecifious origin	48	56	104
	Acute pharyngitis, unpecified)	45	37	82
	Mylagia	32	35	67
	Periodntal disease , unspecified	45	38	83
	Non insulin dependen diabetes melitis without complications	26	36	62
Februari	Acute pharyngitis (common cold)	372	579	951
	Essential (primary) hypertension	82	83	165
	Mylagia	81	75	156
	Necosis of pulp	75	72	147
	Dyspepsia	53	72	125
	Diarhosa and gastoerisis of presumed infecifious origin	45	43	88
	Acute pharyngitis, unpecified)	46	39	85
	Supervision of other normal pregenancy	35	36	71
	Periodntal disease , unspecified	35	32	67
	Non insulin dependen diabetes melitis without complications	27	32	59
Maret	Acute pharyngitis (common cold)	263	374	637
	Essential (primary) hypertension	86	75	161

Bulan	Diagnosa	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
	Mylagia	75	74	149
	Necosis of pulp	71	70	141
	Dyspepsia	52	70	122
	Diarhosa and gastoerisis of presumed infecifious origin	40	42	82
	Acute pharyngitis, unpecified)	43	37	80
	Supervision of other normal pregenancy	33	31	64
	Periodntal disease , unspecified	32	19	51
	Non insulin dependen diabetes melitis without complications	28	18	46
April	Acute pharyngitis (common cold)	378	374	752
	Essential (primary) hypertension	126	135	261
	Mylagia	88	121	209
	Necosis of pulp	111	72	183
	Dyspepsia	68	79	147
	Diarhosa and gastoerisis of presumed infecifious origin	45	52	97
	Acute pharyngitis, unpecified)	47	48	95
	Supervision of other normal pregenancy	45	35	80
	Periodntal disease , unspecified	35	33	68
	Non insulin dependen diabetes melitis without complications	38	28	66
Mei	Acute pharyngitis (common cold)	288	284	572
	Essential (primary) hypertension	123	130	253
	Mylagia	87	119	206
	Necosis of pulp	95	70	165
	Dyspepsia	58	75	133

Bulan	Diagnosa	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
	Diarhosa and gastoerisis of presumed infecifious origin	42	50	92
	Acute pharyngitis, unpecified)	48	35	83
	Supervision of other normal pregenancy	43	33	76
	Periodntal disease , unspecified	30	31	61
	Non insulin dependen diabetes melitis without complications	35	25	60
Juni	Acute pharyngitis (common cold)	278	274	552
	Essential (primary) hypertension	113	120	233
	Mylagia	77	109	186
	Necosis of pulp	85	65	150
	Dyspepsia	48	73	121
	Diarhosa and gastoerisis of presumed infecifious origin	32	47	79
	Acute pharyngitis, unpecified)	38	33	71
	Supervision of other normal pregenancy	38	31	69
	Periodntal disease , unspecified	28	29	57
	Non insulin dependen diabetes melitis without complications	30	23	53
Juli	Acute pharyngitis (common cold)	370	288	658
	Essential (primary) hypertension	203	122	325
	Mylagia	187	110	297
	Necosis of pulp	156	68	224
	Dyspepsia	120	75	195
	Diarhosa and gastoerisis of presumed infecifious origin	111	48	159
	Acute pharyngitis, unpecified)	89	34	123
	Supervision of other normal pregenancy	78	35	113

Bulan	Diagnosa	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
	Periodntal disease , unspecified	65	34	99
	Non insulin dependen diabetes melitis without complications	55	24	79

Sumber: Data Puskesmas Pluit, 2019

Dari **Tabel III.39** dapat dilihat bahwa penyakit yang paling banyak diderita oleh penduduk di wilayah kerja Puskesmas Pluit selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut adalah *Acute pharyngitis* (*common cold*). Jenis penyakit yang diderita penduduk di wilayah kerja Puskesmas Pluit selama 7 (tujuh) bulan terakhir ini tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan data primer hasil olahan wawancara warga masyarakat Kawasan Muara Angke sebagai responden dengan jumlah sebanyak 85 orang di wilayah studi (65 responden yang bertempat tinggal di Kawasan Muara Angke dan 20 responden yang bekerja tetapi tidak bertempat tinggal di Kawasan Muara Angke). Dapat diketahui bahwa penyakit yang di derita responden dalam satu bulan terakhir sebanyak 72,94% dengan Penyakit Batuk Pilek, 10,59% dengan Penyakit Sakit Perut dan Demam, sedangkan penyakit lainnya terdapat 5,88%.

1) Karakteristik Spesifik Masyarakat yang Berisiko

Kawasan Muara Angke secara administrasi kewilayahan memiliki 5 RW dan 56 RT dengan jumlah rumah tangga sebanyak 4.138 KK dan jumlah warga sebanyak 13.124 jiwa, sehingga secara umum dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk wilayah Kawasan Permukiman Muara Angke dengan luas wilayah 0,38 km^2 sebesar 34.536 jiwa/km^2.

2) Sumberdaya Kesehatan

Sumberdaya kesehatan meliputi jumlah tenaga medis dan paramedis yang dimiliki, jumlah sarana pelayanan kesehatan dan kemampuan penduduk (responden) dalam menjangkau biaya kesehatan. Kondisi sumberdaya kesehatan di wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.40 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Pluit, 2017

No.	Jenis Sarana Kesehatan	Total
1	Rumah Sakit	-
2	Rumah Bersalin	1
3	Poliklinik/Balai Pengobatan	6
4	Puskesmas	1
5	Posyandu	8
6	Apotik	10
7	Dokter Praktek	54

No.	Jenis Sarana Kesehatan	Total
8	Bidan Praktek	4

Sumber: Kecamatan Penjaringan Dalam Angka 2018

Berdasarkan data primer hasil olahan wawancara warga masyarakat Kawasan Muara Angke sebagai responden dengan jumlah sebanyak 85 orang di wilayah studi (65 responden yang bertempat tinggal di Kawasan Muara Angke dan 20 responden yang bekerja tetapi tidak bertempat tinggal di Kawasan Muara Angke), dapat diketahui bahwa tempat untuk berobat terbanyak biasanya responden berobat di puskesmas sebanyak 64,71%, dokter praktek sebanyak 17,65%, dan rumah sakit 11,76%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

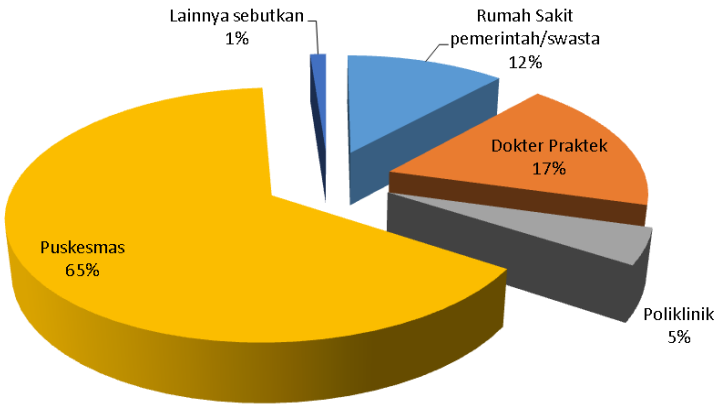

Sumber: Data Primer, Survei, 2020

Gambar III.13 Sarana Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Masyarakat di Kawasan Muara Angke

3) Kondisi Kesehatan Lingkungan

Kesehatan dan lingkungan merupakan dua hal yang terkait erat, lingkungan yang sehat, kondusif dan nyaman akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat atau perilaku hidup sehat, seperti penjelasan sebagai berikut:

- **Penanganan Limbah Padat Domestik**

  Indikator pertama perilaku hidup sehat dan bersih sebagai fokus pada kajian ini adalah penanganan limbah

padat domestik. Berdasarkan data primer hasil olahan wawancara warga masyarakat dan unit usaha Kawasan Muara Angke sebagai responden dengan jumlah sebanyak 85 responden di wilayah studi, didapatkan hasil sebagai berikut dari 65 responden yang bertempat tinggal di Kawasan Muara Angke sebagian besar responden dalam penanganan limbah padat domestik 92,31% responden menjawab limbah padat domestik dikumpulkan diambil petugas untuk dibawa ke TPS Muara Angke dan diangkut ke TPA melalui UPPP (Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan) Muara Angke bekerjasama dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara dan sisanya dalam penanganan limbah padat domestik responden menjawab dibakar 7,69% responden. Sedangkan 20 responden dari unit usaha di Kawasan Muara Angke 100% responden menjawab limbah padat domestik dikumpulkan diambil petugas untuk dibawa ke TPS Muara Angke dan diangkut ke TPA melalui UPPP (Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan) Muara Angke bekerjasama dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara.

- **Pemberantasan Vektor Penyakit**
  Indikator kedua perilaku hidup sehat dan bersih sebagai fokus pada kajian ini adalah pemberantasan jentik nyamuk. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam program pemerintah terkait pelaksanaan Pemberantas Sarang Nyamuk (PSN) yang dapat dinilai dalam kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) dengan indikator Angka Bebas Jentik (ABJ). Berdasarkan data primer hasil olahan wawancara warga masyarakat dan unit usaha sebagai responden dengan jumlah sebanyak 85 orang, dapat diketahui bahwa adanya vektor penyakit yang diakibatkan dari nyamuk, tikus dan lalat di Kawasan Muara Angke adalah sebagai berikut.

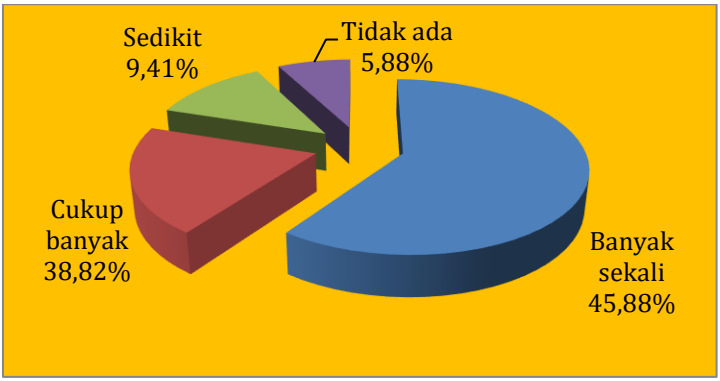

Sumber: Data Primer, Survei, 2020

Gambar III.14 Adanya Nyamuk di Tempat Tinggal atau Unit Usaha Responden di Kawasan Muara Angke

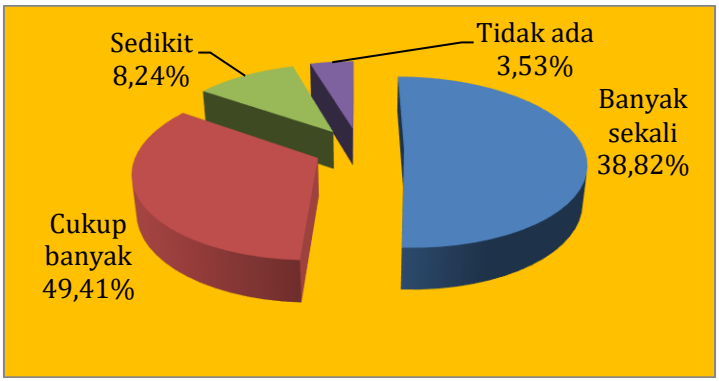

Sumber: Data Primer, Survei, 2020

Gambar III.15 Adanya Tikus di Tempat Tinggal atau Unit Usaha Responden di Kawasan Muara Angke

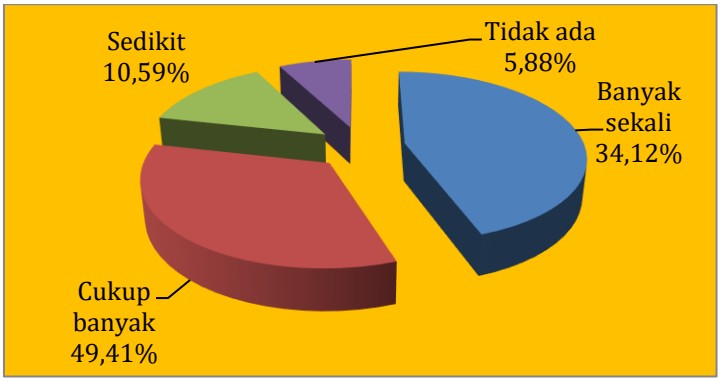

Sumber: Data Primer, Survei, 2020

Gambar III.16 Adanya Lalat di Tempat Tinggal atau Unit Usaha Responden di Kawasan Muara Angke

- **Kebutuhan Air Bersih**
  Berdasarkan data primer hasil olahan wawancara warga masyarakat dan unit usaha sebagai responden dengan jumlah sebanyak 85 orang di wilayah studi, dapat diketahui bahwa sumber penggunaan air bersih dari sumur bor dalam sebanyak 1,54%, penggunaan air bersih lainnya sebanyak 30,77%, dan sisanya 98,46% sudah menggunakan air PAM. Penggunaan sumber air bersih untuk unit usaha seperti UPI, *Docking* Kapal, dan SPBU rata-rata penggunaan air diperoleh dari pembelian air tangki kapasitas 8.000 L untuk operasional dan kebutuhan sehari-harinya, sementara untuk kebutuhan air di Kios, Warung, dan PHPT terdapat dua penggunaan air, yaitu air bersih untuk masak dan minum menggunakan air galon, sementara untuk kebutuhan mandi dan cuci menggunakan air jerigen yang dijual keliling. Hal tersebut dikarenakan belum adanya instalasi pemasangan air PAM ke unit usaha tersebut. Sedangkan untuk Pasar Ikan dan PT. Lautan Mutiara Jaya menggunakan air yang berasal dari pengolahan air laut untuk bersih-bersih dan toilet.

- **Penanganan Air Limbah Rumah Tangga**
  Berdasarkan data primer hasil olahan wawancara warga masyarakat dan unit usaha sebagai responden dengan jumlah sebanyak 85 orang responden, didapatkan hasil masih ada warga yang buang air besar di WC pribadi cubluk/jamban sebanyak 8,24% sedangkan sisanya sudah menggunakan WC pribadi dengan *septic tank* sebanyak 91,76%. Sedangkan air limbah yang berasal dari air bekas cucian disalurkan ke selokan sebanyak 88,24%, dirembeskan ke tanah sebanyak 9,41%, dan dialirkan ke permukaan tanah/galian/kubangan sebanyak 2,35%.

- **Rumah Sehat**
  Rumah sehat adalah kondisi fisik, kimia, dan biologi di dalam rumah dan perumahan sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh kesehatan yang optimal. Berdasarkan data primer hasil olahan wawancara warga masyarakat sebagai responden dengan jumlah sebanyak 65 orang di wilayah studi yang bertempat tinggal di Kawasan Muara Angke, untuk kondisi rumah kebanyakan sudah permanen sebanyak 83,08%, dimana rumah yang dimiliki oleh responden memiliki ventilasi yang tergolong cukup baik sebanyak 92,31%. Selain itu, untuk rumah semi permanen terdapat 7,69% dan 9,23% rumah responden masih berupa temporer dengan dinding kayu.
  Sementara lantai rumah responden dominan telah menggunakan ubin/tegel sebanyak 89,23%, adapula berlantai plester terdapat 7,69%, dan 3,08% masih memiliki lantai tanah liat. Sedangkan fasilitas listrik Kawasan Muara Angke sudah menggunakan listrik yang bersumber dari PLN.

BAB IV

KEGIATAN OPERASIONAL, IDENTIFIKASI DAMPAK DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Operasional yang menjadi Sumber dan Besaran Dampak Lingkungan yang Terjadi

Dampak terhadap lingkungan yang terjadi karena kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke dapat berupa dampak yang bersifat negatif maupun positif. Dampak yang muncul dari setiap kegiatan tidak pasti terjadi pada semua aspek dari setiap komponen lingkungan. Potensi dampak yang memberikan pengaruh nyata dan besar pada komponen lingkungan, harus mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan dampak yang tidak nyata. Bahkan pada dampak yang bersifat negatif, perhatian tersebut dimungkinkan menjadi lebih intensif atau justru memerlukan penanganan atau pengelolaan yang lebih serius dan mungkin membutuhkan monitoring secara terus menerus untuk tujuan keberlanjutan kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke. Kegiatan operasional yang menimbulkan dampak pada komponen lingkungan adalah :

A. Operasional Kegiatan Perikanan di Kawasan Muara Angke

1. Pelabuhan Perikanan Nusantara
2. Tempat Pelelangan Ikan

3. Pasar Ikan Muara Angke
4. Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)
5. Unit Pengolahan Ikan (UPI)
6. Eks BTPI (*Docking* dan Perbengkelan)
7. Aktivitas Perkantoran
8. SPBU
9. Tempat Usaha (Kios Perbekalan, Warungan, Pujaseri dan Resto Apung)

B. Operasional Sarana Penunjang

Komponen lingkungan yang terpengaruh dampak dengan adanya Kegiatan Operasional Perikanan Kawasan Muara Angke adalah sebagai berikut.

1. Geo-Fisik-Kimia

a. Penurunan Kualitas Udara Ambien

Sumber Dampak

Sumber penurunan kualitas udara ambien pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari mobilisasi kendaraan laut yaitu berasal dari mesin-mesin kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara dan aktivitas *docking* pada saat kegiatan pengelupasan cat, pelapisan dan pengecatan lambung kapal di Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), hal tersebut akan meningkatkan parameter SO_2, NO_2, CO, TSP, O_3, HC dan Pb.

Besaran Dampak

Berdasarkan data dari Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) tahun 2019 didapatkan data frekuensi kapal yang masuk ke kolam pelabuhan dan melakukan tambat labuh rata-rata sebanyak 4.292 unit per tahun yang terdiri dari kapal berukuran 0-30 GT sebanyak 2.483 unit per tahun dan lebih dari 30 GT sebanyak 1.809 unit per tahun, serta aktivitas *docking* dalam satu bulan, rata-rata dapat melayani 60 kapal dengan ukuran 10 GT hingga 100 GT.

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien di Kawasan Muara Angke dengan 7 parameter kimia yaitu sulfur dioksida (SO_2); karbon monoksida (CO); nitrogen dioksida (NO_2); total partikulat; timah hitam (Pb); oksidan (O_3) dan hidro karbon (HC) di wilayah studi tidak ada parameter yang melebihi baku

mutu kualitas udara ambien berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.

b. Peningkatan Kebauan

Sumber Dampak

Sumber peningkatan kebauan pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) dari ikan yang di jemur.

Besaran Dampak

Besaran dampak berasal dari rata-rata produksi ikan asin, cumi asin, pindang asap, trasi dan penyamakan kulit ikan pari sebesar 525 ton/bulan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kebauan di Kawasan Muara Angke menunjukkan bahwa tingkat kebauan di Kawasan Muara Angke sama dengan baku mutu khususnya untuk parameter Hidrogen Sulfida (H_2S) sebesar 0,02 ppm sedangkan parameter yang dipersyaratkan berdasarkan baku mutu menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan untuk parameter Hidrogen Sulfida (H_2S) adalah 0,02 ppm.

c. Peningkatan Kebisingan

Sumber Dampak

Sumber peningkatan kebisingan pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari mobilisasi kendaraan laut yaitu berasal dari mesin-mesin kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara dan aktivitas *docking* pada saat kegiatan perbaikan kapal di Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).

Besaran Dampak

Berdasarkan data dari Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) tahun 2019 didapatkan data frekuensi kapal yang masuk ke kolam pelabuhan dan melakukan tambat labuh rata-rata sebanyak 4.292 unit per tahun yang terdiri dari kapal berukuran 0-30 GT sebanyak 2.483 unit per tahun dan lebih dari 30 GT sebanyak 1.809

unit per tahun, serta aktivitas *docking* dalam satu bulan, rata-rata dapat melayani 60 kapal dengan ukuran 10 GT hingga 100 GT.

Berdasarkan hasil pengukuran parameter tingkat kebisingan di Kawasan Muara Angke menunjukkan bahwa parameter tingkat kebisingan di Kawasan Muara Angke masih dalam kondisi yang baik, yaitu masih di bawah baku tingkat kebisingan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.

d. Penurunan Kualitas Air Laut

Sumber Dampak

Sumber penurunan kualitas air laut pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan berikut ini:

1) Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara mengakibatkan penurunan kualitas air laut yang berasal dari tambat labuh kapal yang diprakirakan akan menimbulkan kekeruhan pada air laut.
2) Operasional sarana penunjang di Kawasan Muara Angke mengakibatkan penurunan kualitas air laut yang berasal dari pengolahan kolam limbah. Hal tersebut dapat meningkatkan parameter TSS.

Besaran Dampak

Berdasarkan data dari Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) tahun 2019 didapatkan data frekuensi kapal yang masuk ke kolam pelabuhan dan melakukan tambat labuh rata-rata sebanyak 4.292 unit per tahun yang terdiri dari kapal berukuran 0-30 GT sebanyak 2.483 unit per tahun dan lebih dari 30 GT sebanyak 1.809 unit per tahun serta aktivitas pembuangan air kolam limbah ke laut tiap harinya.

Berdasarkan hasil dari laboratorium kualitas air laut yang diambil di Kawasan Muara Angke bahwa parameter kecerahan, kadmium (Cd) dan timbal (Pb) sudah melampaui ambang batas yang dipersyaratkan menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan.

e. Limpasan Air Permukaan

Sumber Dampak

Sumber limpasan air permukaan pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari sarana penunjang yang kurang memadai yaitu tidak mengalirnya drainase karena tersumbat oleh sampah (limbah padat) dan lumpur sehingga aliran air mudah menggenang. Selain itu, karena Kawasan Muara Angke merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 1 meter dari permukaan laut, sehingga daerah ini sering dilanda oleh banjir pasang (rob).

Besaran Dampak

Besarnya limpasan air permukaan yang diakibatkan dari tata guna lahan sebesar 121.389,62 m^2 dimanfaatkan untuk bangunan gedung seperti kantor, SPBU, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Bengkel, *Docking*, Kios dan Pujaseri serta Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebesar 24.440,47 m^2.

f. Peningkatan Timbulan Limbah Padat

Sumber Dampak

Sumber peningkatan timbulan limbah padat pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), Perkantoran, SPBU dan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbengkelan, Warungan, Resto Apung).

Besaran Dampak

Besarnya timbulan limbah padat yang dihasilkan dari tenaga kerja di Kawasan Muara Angke adalah sebanyak 23,92 m^3/hari atau 3,19 ton/hari. Sedangkan produksi sampah di TPS Dekat PHPT rata-rata sebanyak 1.211,17 m^3/bulan atau 448,70 ton/hari.

g. Peningkatan Timbulan Limbah B3

Sumber Dampak

Sumber peningkatan timbulan limbah B3 pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan di Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) dan penggunaan genset di Pasar Ikan dan Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Besaran Dampak

Besarnya timbulan limbah B3 berasal dari aktivitas perbaikan *docking* kapal berupa oli bekas dan kemasan cat serta penggunaan genset di Pasar Ikan dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berupa oli bekas.

h. Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri

Sumber Dampak

Sumber peningkatan timbulan air limbah industri pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan operasional Tempat Pelelangan Ikan yang berasal dari pembersihan Tempat Pelelangan Ikan.
2) Kegiatan operasional Pasar Ikan yang berasal dari pembersihan lapak-lapak di Pasar Ikan serta air bekas rendaman ikan.
3) Kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) yang berasal dari air bekas pencucian, rendaman dan rebusan ikan serta air bekas pencucian wadah.
4) Kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berasal dari air bekas pencucian ikan dan wadahnya.

Besaran Dampak

Besarnya timbulan air limbah industri di Kawasan Muara Angke yang berasal dari TPI, Pasar Grosir sebanyak 1.358 lapak, Pasar Eceran sebanyak 89 lapak, PHPT sebanyak 207 unit dan UPI sebanyak 74 unit.

i. Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik

Sumber Dampak

Sumber peningkatan timbulan air limbah domestik pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal aktivitas karyawan dan pengunjung di Tempat Pelelangan Ikan, Pengolahan

Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), SPBU dan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbengkelan, Warungan, Resto Apung) serta Toilet Umum.

Besaran Dampak

Besarnya timbulan air limbah domestik di Kawasan Muara Angke sebanyak 1.275.640 m^3/hari.

j. Gangguan Kelancaran Lalu Lintas

Sumber Dampak

Sumber gangguan kelancaran lalu lintas pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari aktivitas pengunjung di Pasar Ikan, mobilisasi kendaraan pengangkut ikan yang berasal dari 34 Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan mobilisasi kendaraan pengangkut ikan yang berasal dari 207 unit Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).

Besaran Dampak

Besarnya gangguan kelancaran lalu lintas dapat dilihat dari volume lalu lintas dan kinerja ruang jalan di Kawasan Muara Angke. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pelayanan jalan di:

- Jl. Pluit Karang Ayu Barat dan Jl. Muara Angke berada pada tingkat pelayanan B, yaitu arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan, dan pengemudi masih cukup bebas memilih kecepatannya dengan jalur jalan yang digunakan.
- Jl. Pluit Karang Utara berada pada tingkat pelayanan C, yaitu berada dalam tingkatan arus stabil tapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, dan pengemudi mulai dibatasi dalam memilih kecepatan.
- Jl. Pluit Karang Barat berada pada tingkat pelayanan D, yaitu arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus, kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar, dan pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam

menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat.

k. Bahaya Kebakaran

Sumber Dampak

Sumber bahaya kebakaran pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), Perkantoran, SPBU dan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbengkelan, Warungan, Resto Apung).

Besaran Dampak

Besarnya bahaya kebakaran berasal dari mesin-mesin kapal serta bahan kapal yang mudah terbakar. Posisi kapal yang tambat pun rapat sehingga mempercepat penyebaran api jika terjadi kebakaran. Selain itu, berasal dari instalasi listrik.

2. Biologi

a. Berkurangnya Keanekaragaman Benthos dan Plankton

Sumber Dampak

Sumber berkurangnya keanekaragaman benthos dan plankton pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara.

Besaran Dampak

Berdasarkan data dari Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) tahun 2019 didapatkan data frekuensi kapal yang masuk ke kolam pelabuhan dan melakukan tambat labuh rata-rata sebanyak 4.292 unit per tahun yang terdiri dari kapal berukuran 0-30 GT sebanyak 2.483 unit per tahun dan lebih dari 30 GT sebanyak 1.809 unit per tahun.

Berdasarkan hasil pemantauan keanekaragaman benthos dan plankton di Kali Adem dan Kali Asin, tidak ada parameter yang melebihi baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran III tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut.

3. Sosial, Ekonomi, dan Budaya

a. Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha

Sumber Dampak

Sumber dampak terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), Perkantoran, SPBU dan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbengkelan, Warungan, Resto Apung).

Besaran Dampak

Jumlah tenaga kerja yang terserap dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke sebanyak 32.249 orang.

b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Sumber Dampak

Sumber dampak peningkatan pendapatan masyarakat berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), Perkantoran, SPBU dan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbengkelan, Warungan, Resto Apung) mengakibatkan dampak turunan yaitu peningkatan pendapatan masyarakat.

Besaran Dampak

Besarnya peningkatan pendapatan berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang menyerap tenaga kerja sebanyak 32.249 orang.

c. Peningkatan PAD

Sumber Dampak

Sumber dampak peningkatan PAD berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), SPBU dan

Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbengkelan, Warungan, Resto Apung).

Besaran Dampak

Besarnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan-kegiatan perikanan yang ada di Kawasan Muara Angke berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

d. Persepsi dan Sikap Masyarakat

Sumber Dampak

Sumber dampak sikap dan persepsi masyarakat berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), SPBU dan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbengkelan, Warungan, Resto Apung).

Besaran Dampak

Dari hasil survei diketahui bahwa, penduduk sekitar lokasi studi mayoritas (100%) setuju dengan adanya kegiatan penataan Kawasan Muara Angke karena dianggap menguntungkan masyarakat sekitar adalah sebagai berikut:

- Demi kebaikan wilayah Muara Angke, agar lebih tertata dengan rapi dan bersih.
- Agar dapat melestarikan Kawasan Muara Angke.
- Baik untuk lingkungan Kawasan Muara Angke.
- Asal ditata serentak dan rapi untuk lingkungan.
- Agar Kawasan Muara Angke lebih bagus.
- Kepentingan bersama.
- Membantu program pemerintah.
- Menguntungkan bagi buruh dan nelayan setempat, selain itu ada tempat berdagang dan perumahan yang lebih tertata.
- Daerah pesisir laut jadi jalan harus dinaikkan agar tidak terjadi banjir.
- Mempermudah akses.
- Agar lebih bersih dan lancar saluran drainase.

- Agar Kawasan Muara Angke tidak kumuh lagi.
- Masih bisa usaha di Resto Apung.
- Biaya sewa untuk pemilik usaha lama diringankan.
- Sektor informal (pedagang kaki lima) disediakan tempat/tidak di gusur.

Sedangkan kekhawatiran masyarakat jika kegiatan tersebut dilaksanakan adalah takut jika dibongkar bangunannya dan digusur, terjadi kebakaran, banjir, pencurian kendaraan bermotor dan gangguan terhadap nelayan.

Harapan/saran masyarakat dan pelaku usaha di Kawasan Muara Angke adalah sebagai berikut:

- Adil, memperhatikan masyarakat kecil.
- Tetap tinggal disini.
- Lebih baik dan rapi.
- Kesejahteraan rakyat diutamakan.
- Drainase dan bangunan ditata dan dikelola dengan baik.
- Membuat suasana menjadi lebih bersih dan rapi.
- Persampahan harus diurus.
- Kawasan Muara Angke ke depannya lebih maju, lebih indah dan berkembang.
- Pembangunan harus memperhatikan lingkungan sekitar.
- Pembersihan drainase secara berkala, karena banyak drainase di Muara Angke yang tidak berfungsi dengan baik akibat banyak sedimen dan sampah di saluran drainase.
- Pembangunan ke depannya untuk nelayan tradisional.
- Pembangunan boleh tapi jangan memaksakan.
- Reklamasi harus memperhatikan lingkungan.
- Lapangan usaha sebesar-besarnya ketika konstruksi.
- Mengutamakan drainase dan jalan.
- Sosialisasi kepada warga terkait dengan pembangunan.
- Pembangunan harus memperhatikan saluran drainase agar tidak ada masalah selanjutnya.
- Agar Kawasan Muara Angke lebih bersih, air dan listrik tercukupi untuk kedepannya.
- Agar jaringan PAM bisa masuk ke Muara Angke.
- Penambahan sarana usaha perikanan karena bahan baku cukup.
- Agar dipermudah saat melakukan pengurusan izin kapal.

- Dilakukan perbaikan sarana di pelabuhan.
- Fasilitas di pasar ikan masih kurang memadai karena kualitas air yang digunakan untuk mencuci ikan kurang memadai. Air laut kotor sedangkan air tawar mahal.
- Jalur transportasi antara unit usaha dan permukiman dibedakan, untuk mengurangi kemacetan.

4. Kesehatan Masyarakat

a. Vektor Penyakit

Sumber Dampak

Sumber dampak vektor penyakit berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) dan Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) yang berasal dari kegiatan pembuangan limbah padat domestik.

Besaran Dampak

Besarnya vektor penyakit dari kegiatan-kegiatan yang ada di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan operasional Pasar Ikan Muara Angke mengakibatkan vektor penyakit. Dengan adanya kegiatan Pasar Ikan Muara Angke, jumlah partikulat juga akan meningkat sehingga dapat menyebabkan bertambahnya vektor penyakit yang diakibatkan karena banyaknya timbunan limbah padat khususnya sisa ikan dan ikan yang sudah busuk.
2) Kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) mengakibatkan vektor penyakit. Dengan adanya kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), jumlah partikulat juga akan meningkat sehingga dapat menyebabkan bertambahnya vektor penyakit yang diakibatkan karena banyaknya timbunan limbah padat khususnya sis ikan dan ikan yang sudah busuk.
3) Kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) mengakibatkan adanya vektor penyakit yang berasal dari timbunan sampah pekerja dan sampah sisa material yang digunakan untuk perbaikan kapal.

b. Sanitasi Lingkungan

Sumber Dampak

Sumber dampak sanitasi lingkungan berasal dari operasional kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke dan operasional sarana penunjang dimana menimbulkan dampak sanitasi lingkungan yang berasal dari kegiatan pembuangan limbah padat domestik dan pembuangan air limbah.

Besaran Dampak

Besarnya sanitasi lingkungan dari timbulan limbah padat yang dihasilkan dari tenaga kerja di Kawasan Muara Angke adalah sebanyak 23,92 m^3/hari atau 3,19 ton/hari, produksi sampah di TPS Dekat PHPT rata-rata sebanyak 1.211,17 m^3/bulan atau 448,70 ton/hari. Besarnya timbulan air limbah industri di Kawasan Muara Angke yang berasal dari TPI, Pasar Grosir sebanyak 1.358 lapak, Pasar Eceran sebanyak 89 lapak, PHPT sebanyak 207 unit dan UPI sebanyak 74 unit. Sedangkan timbulan air limbah domestik dari kegiatan-kegiatan yang ada di Kawasan Muara Angke sebanyak 1.275.640 m^3/hari m^3/hari.

Identifikasi Dampak

Identifikasi dampak belum merupakan upaya untuk menilai penting atau tidaknya dampak, pada tahap ini hanya dilakukan penyusunan daftar segenap dampak yang mungkin akan timbul tanpa memperhatikan penting tidaknya dampak. Identifikasi dampak ini dilakukan melalui:

1) Penelaahan Pustaka
   Penelaahan pustaka dilakukan guna menangkap permasalahan lingkungan yang bersifat *project specific* melalui penelaahan laporan atau dokumen sejenis.
2) Penggalian Informasi dari Pemrakarsa
   Penggalian informasi dari pemrakarsa terutama ditujukan guna mengenali deskripsi rencana kegiatan yang akan dilakukan.
3) Diskusi/*Brainstorming*
   Diskusi/*brainstorming* dilakukan diantara anggota tim penyusun DELH guna memperoleh kata sepakat mengenai identifikasi dampak yang perlu dicermati. Di samping melakukan diskusi antar anggota tim penyusun DELH, juga dilakukan konsultasi dengan pakar. Konsultasi dengan pakar

yang telah berpengalaman ditujukan untuk memberikan arahan dan masukan pada tim studi agar dampak lingkungan nantinya menjadi dampak yang relatif menjadi sasaran untuk dikaji. Sedangkan diskusi dengan para pakar dimaksudkan untuk menggali jenis dan perilaku dampak yang biasanya timbul akibat kegiatan sejenis.

4) Survei Pendahuluan
   Survei pendahuluan dilakukan guna mempertajam hasil identifikasi dampak, sehingga diperoleh daftar dampak yang sifatnya spesifik lokasi.
5) Matriks Interaksi
   Setelah memperoleh data mengenai deskripsi rencana kegiatan dan rona awal lingkungan hidup secara umum, kemudian dituangkan ke dalam matriks interaksi yang menunjukkan adanya keterkaitan antara komponen kegiatan yang menimbulkan dampak dengan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak. Dengan matriks interaksi ini diharapkan dapat diperoleh daftar komponen lingkungan yang potensial terkena dampak rencana kegiatan.

Tabel IV.1 Matriks Hasil Identifikasi Dampak Kegiatan Operasional terhadap Komponen Lingkungan

No	Komponen Lingkungan	A									B
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A.	**Geo-Fisik-Kimia**										
1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	●					●				
2.	Peningkatan Kebauan				●						
3.	Peningkatan Kebisingan	●					●				
4.	Penurunan Kualitas Air Laut	●									●
5.	Limpasan Air Permukaan										●
6.	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7.	Peningkatan Timbulan Limbah B3			●		●	●				

No	Komponen Lingkungan	A									B
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8.	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri		●	●	●	●					
9.	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik		●		●	●		●	●	●	●
10.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas			●	●	●					
11.	Bahaya Kebakaran	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
B.	**Biologi**										
1.	Berkurangnya Keanekaragaman Benthos dan Plankton	●									
C.	**Sosial, Ekonomi, dan Budaya**										
1.	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	●	●	●	●	●	●		●	●	
2.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	●	●	●	●	●	●		●	●	
3.	Peningkatan PAD	●	●	●	●	●	●		●	●	
4.	Persepsi dan Sikap Masyarakat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
D.	**Kesehatan Masyarakat**										
1.	Vektor Penyakit			●	●		●				
2.	Sanitasi Lingkungan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rekapitulasi		11	9	11	12	11	11	5	8	8	5
Total Dampak		91									

Keterangan: ● = Identifikasi Jenis Dampak yang Ditimbulkan

TAHAP KEGIATAN

A. Operasional Kegiatan Perikanan
   - Pelabuhan Perikanan Nusantara
   - Tempat Pelelangan Ikan
   - Pasar Ikan
   - Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)
   - Unit Pengolahan Ikan (UPI)
   - Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)
   - Aktivitas Perkantoran
   - SPBU
   - Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)

B. Operasional Sarana Penunjang

Tabel IV.2 Hasil Identifikasi Dampak

No	Kegiatan yang Menimbulkan Dampak	Dampak
A	**Operasional Kegiatan Perikanan**	
1	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Penurunan Kualitas Udara Ambien
		Peningkatan Kebisingan
		Penurunan Kualitas Air Laut
		Peningkatan Timbulan Limbah Padat
		Bahaya Kebakaran
		Berkurangnya Keanekaragaman Benthos dan Plankton
		Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha
		Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Peningkatan PAD
		Persepsi dan Sikap Masyarakat
		Sanitasi Lingkungan
2	Tempat Pelelangan Ikan	Peningkatan Timbulan Limbah Padat

No	Kegiatan yang Menimbulkan Dampak	Dampak
		Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri
		Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik
		Bahaya Kebakaran
		Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha
		Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Peningkatan PAD
		Persepsi dan Sikap Masyarakat
		Sanitasi Lingkungan
3	Pasar Ikan	Peningkatan Timbulan Limbah Padat
		Peningkatan Timbulan Limbah B3
		Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri
		Gangguan Kelancaran Lalu Lintas
		Bahaya Kebakaran
		Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha
		Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Peningkatan PAD
		Persepsi dan Sikap Masyarakat
		Vektor Penyakit
		Sanitasi Lingkungan
4	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Peningkatan Kebauan
		Peningkatan Timbulan Limbah Padat
		Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri

No	Kegiatan yang Menimbulkan Dampak	Dampak
		Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik
		Gangguan Kelancaran Lalu Lintas
		Bahaya Kebakaran
		Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha
		Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Peningkatan PAD
		Persepsi dan Sikap Masyarakat
		Vektor Penyakit
		Sanitasi Lingkungan
5	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Peningkatan Timbulan Limbah Padat
		Peningkatan Timbulan Limbah B3
		Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri
		Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik
		Gangguan Kelancaran Lalu Lintas
		Bahaya Kebakaran
		Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha
		Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Peningkatan PAD
		Persepsi dan Sikap Masyarakat
		Sanitasi Lingkungan
6	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Penurunan Kualitas Udara Ambien
		Peningkatan Kebisingan

No	Kegiatan yang Menimbulkan Dampak	Dampak
		Peningkatan Timbulan Limbah Padat
		Peningkatan Timbulan Limbah B3
		Bahaya Kebakaran
		Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha
		Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Peningkatan PAD
		Persepsi dan Sikap Masyarakat
		Vektor Penyakit
		Sanitasi Lingkungan
7	Aktivitas Perkantoran	Peningkatan Timbulan Limbah Padat
		Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik
		Bahaya Kebakaran
		Persepsi dan Sikap Masyarakat
		Sanitasi Lingkungan
8	SPBU	Peningkatan Timbulan Limbah Padat
		Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik
		Bahaya Kebakaran
		Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha
		Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Peningkatan PAD
		Persepsi dan Sikap Masyarakat
		Sanitasi Lingkungan
9	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan,	Peningkatan Timbulan Limbah Padat

No	Kegiatan yang Menimbulkan Dampak	Dampak
	Warungan, Resto Apung)	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik
		Bahaya Kebakaran
		Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha
		Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Peningkatan PAD
		Persepsi dan Sikap Masyarakat
		Sanitasi Lingkungan
B	**Operasional Sarana Penunjang**	Penurunan Kualitas Air Laut
		Limpasan Air Permukaan
		Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik
		Persepsi dan Sikap Masyarakat
		Sanitasi Lingkungan

Sumber: Analisis Tim DELH, 2020

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan untuk mengurangi potensi dampak yang dapat timbul akibat rencana usaha dan/atau kegiatan. Adapun pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan pada Kegiatan Perikanan di Kawasan Perkantoran Setu adalah sebagai berikut

Tabel IV.3 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan terhadap Komponen Lingkungan Hidup

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
A.	**Operasional Kegiatan Perikanan**				
1.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Sumber penurunan kualitas udara ambien pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari mobilisasi kendaraan laut yaitu berasal dari mesin-mesin kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara hal tersebut akan meningkatkan parameter SO_2, NO_2, CO, TSP, O_3, HC dan Pb.	Mematikan mesin utama kapal saat kapal tambat sehingga hanya menyalakan mesin bantu untuk lampu, pendingin ruangan, dan lemari pendingin.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
2	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Peningkatan Kebisingan	Sumber peningkatan kebisingan pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari mobilisasi kendaraan laut yaitu berasal dari mesin-mesin kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Menggunakan alat dan kendaraan yang laik operasi dan sesuai SNI.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
3	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Penurunan Kualitas Air Laut	Sumber penurunan kualitas air laut pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara mengakibatkan penurunan kualitas	Mengeruk sedimen setiap satu minggu sekali.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			air laut yang berasal dari tambat labuh kapal yang diprakirakan akan menimbulkan kekeruhan pada air laut.		
4	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Peningkatan Timbulan limbah Padat	Sumber peningkatan timbulan limbah padat pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara.	• Menyediakan tempat sampah di area Pelabuhan Perikanan Nusantara. • Mengangkut sampah dari tempat sampah di Pelabuhan Perikanan Nusantara ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
5	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Bahaya Kebakaran	Sumber bahaya kebakaran pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara.	• Menempatkan APAR di kapal perikanan. • Memasang instalasi listrik dilakukan sesuai dengan SOP pemasangan listrik.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
6	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Sumber dampak terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Membuka kesempatan kerja dan peluang berusaha di Pelabuhan Perikanan Nusantara, seperti nelayan penangkap ikan dan jasa angkut.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
7	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Sumber dampak peningkatan pendapatan masyarakat berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Melakukan pembayaran upah pada pekerja dan jasa angkut di Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
8	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Peningkatan PAD	Sumber dampak peningkatan PAD berasal dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Melakukan penarikan retribusi dari kegiatan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
9	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Sanitasi Lingkungan	Sumber dampak sanitasi lingkungan berasal dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara.	• Menyediakan tempat sampah di area Pelabuhan Perikanan Nusantara. • Mengangkut sampah dari tempat sampah di Pelabuhan Perikanan Nusantara ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
10	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Sumber peningkatan timbulan limbah padat pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	• Menyediakan tempat sampah di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). • Mengangkut sampah dari tempat sampah di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ke TPS dilakukan setiap hari	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
				oleh petugas UPPP Muara Angke.	
11	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Sumber peningkatan timbulan air limbah domestik pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal aktivitas karyawan dan pengunjung di Tempat Pelelangan Ikan.	• Menyediakan kamar mandi yang dilengkapi dengan *septic tank.* • Melakukan penyedotan tinja secara berkala.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
12	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Bahaya Kebakaran	Sumber bahaya kebakaran pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	• Menempatkan APAR di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). • Memasang instalasi listrik dilakukan sesuai dengan SOP pemasangan listrik.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
13	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan PAD	Sumber dampak peningkatan PAD berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	Melakukan penarikan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
14	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Sanitasi Lingkungan	Sumber dampak sanitasi lingkungan berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	• Membersihkan area lelang sebelum dan sesudah dilakukannya lelang. • Menyediakan tempat sampah di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). • Mengangkut sampah dari tempat sampah	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
				di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	
15	Pasar Ikan	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Sumber peningkatan timbulan limbah padat pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal kegiatan Pasar Ikan.	• Menyediakan tempat sampah di Pasar Ikan. • Mengangkut sampah dari tempat sampah di Pasar Ikan ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
16	Pasar Ikan	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Sumber peningkatan timbulan air limbah industri pada kegiatan operasional Pasar Ikan yang berasal dari pembersihan Pasar	• Menyediakan drainase keliling di Pasar Ikan. • Drainase di Pasar Ikan dialirkan ke kolam limbah.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			Ikan serta air bekas rendaman ikan.		
17	Pasar Ikan	Bahaya Kebakaran	Sumber bahaya kebakaran pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Pasar Ikan.	• Menempatkan APAR di Pasar Ikan. • Memasang instalasi listrik dilakukan sesuai dengan SOP pemasangan listrik.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
18	Pasar Ikan	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Sumber dampak terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Pasar Ikan.	Membuka kesempatan kerja dan peluang berusaha di Pasar Ikan, seperti berjualan ikan dan jasa angkut.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
19	Pasar Ikan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Sumber dampak peningkatan pendapatan masyarakat berasal	Melakukan pembayaran upah pada pekerja dan jasa angkut di Pasar Ikan.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Pasar Ikan.		pemantauan lingkungan hidup.
20	Pasar Ikan	Peningkatan PAD	Sumber dampak peningkatan PAD berasal dari kegiatan Pasar Ikan.	Melakukan penarikan retribusi dari sewa lapak di Pasar Ikan.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
21	Pasar Ikan	Vektor Penyakit	Sumber dampak vektor penyakit berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang	• Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan 3M plus (Menguras, Menutup,	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			diakibatkan dari kegiatan Pasar Ikan.	Mengubur) tempat-tempat perindukan nyamuk. • Melakukan kegiatan pembersihan lingkungan.	
22	Pasar Ikan	Sanitasi Lingkungan	Sumber dampak sanitasi lingkungan berasal dari kegiatan Pasar Ikan.	• Membersihkan area Pasar Ikan setiap hari. • Menyediakan tempat sampah di Pasar Ikan. • Mengangkut sampah dari tempat sampah di Pasar Ikan ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
23	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Sumber peningkatan timbulan limbah padat pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara	• Menyediakan tempat sampah di area Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			Angke berasal kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Mengangkut sampah dari tempat sampah di area Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke. • Memanfaatkan limbah ikan dari PHPT untuk diolah menjadi limbah organik cair.	
24	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Sumber peningkatan timbulan air limbah domestik pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal aktivitas karyawan	• Menyediakan kamar mandi yang dilengkapi dengan *septic tank.* • Melakukan penyedotan tinja secara berkala.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			dan pengunjung di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).		
25	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Bahaya Kebakaran	Sumber bahaya kebakaran pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Memasang instalasi listrik dilakukan sesuai dengan SOP pemasangan listrik.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
26	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Sumber dampak terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Pengolahan	Membuka kesempatan kerja di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) yaitu dengan menjadi tenaga kerja pengolah hasil perikanan.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).		
27	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Sumber dampak peningkatan pendapatan masyarakat berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Membayar upah tenaga kerja di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
28	Pengolahan Hasil Perikanan	Peningkatan PAD	Sumber dampak peningkatan PAD berasal dari kegiatan	Melakukan penarikan retribusi dari sewa lahan dan bangunan di	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
	Tradisional (PHPT)		Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	pemantauan lingkungan hidup.
29	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Vektor Penyakit	Sumber dampak vektor penyakit berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur) tempat-tempat perindukan nyamuk. • Melakukan kegiatan pembersihan lingkungan.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
30	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Sanitasi Lingkungan	Sumber dampak sanitasi lingkungan berasal dari kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Membersihkan area Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) setiap hari.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
				• Menyediakan tempat sampah di area Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT). • Mengangkut sampah dari tempat sampah di area Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	
31	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Sumber peningkatan timbulan limbah padat pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal kegiatan Unit	• Menyediakan tempat sampah di area Unit Pengolahan Ikan (UPI). • Mengangkut sampah dari tempat sampah di area Unit	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			Pengolahan Ikan (UPI).	Pengolahan Ikan (UPI). ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	
32	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Sumber peningkatan timbulan air limbah domestik pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal aktivitas karyawan dan pengunjung di Unit Pengolahan Ikan (UPI).	• Menyediakan kamar mandi yang dilengkapi dengan *septic tank.* • Melakukan penyedotan tinja secara berkala.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
33	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Bahaya Kebakaran	Sumber bahaya kebakaran pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Unit	• Menempatkan APAR di Unit Pengolahan Ikan (UPI). • Memasang instalasi listrik dilakukan	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			Pengolahan Ikan (UPI).	sesuai dengan SOP pemasangan listrik.	
34	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Sumber dampak terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Membuka kesempatan kerja untuk bekerja di Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
35	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Sumber dampak peningkatan pendapatan masyarakat berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang	Membayar upah tenaga kerja di Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).		
36	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Peningkatan PAD	Sumber dampak peningkatan PAD berasal dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Melakukan penarikan retribusi dari sewa lahan dan bangunan di Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
37	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Sanitasi Lingkungan	Sumber dampak sanitasi lingkungan berasal dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	• Membersihkan area Unit Pengolahan Ikan (UPI) setiap hari. • Menyediakan tempat sampah di area Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
				• Mengangkut sampah dari tempat sampah di area Unit Pengolahan Ikan (UPI) ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	
38	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Sumber peningkatan timbulan limbah padat pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal kegiatan Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	• Menyediakan tempat sampah di Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel). • Mengangkut sampah dari tempat sampah di Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
39	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Bahaya Kebakaran	Sumber bahaya kebakaran pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Memasang instalasi listrik dilakukan sesuai dengan SOP pemasangan listrik.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
40	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Sumber dampak terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Membuka kesempatan kerja untuk bekerja di Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
41	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Sumber dampak peningkatan pendapatan masyarakat berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Membayar upah tenaga kerja di Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
42	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Peningkatan PAD	Sumber dampak peningkatan PAD berasal dari kegiatan Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Melakukan penarikan retribusi dari sewa lahan dan kegiatan *docking* di Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
43	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Vektor Penyakit	Sumber dampak vektor penyakit berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	• Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur) tempat-tempat perindukan nyamuk. • Melakukan kegiatan pembersihan lingkungan.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
44	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Sanitasi Lingkungan	Sumber dampak sanitasi lingkungan berasal dari kegiatan Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	• Membersihkan area Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) setiap hari. • Menyediakan tempat sampah di Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
				• Mengangkut sampah dari tempat sampah di Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	
45	Aktivitas Perkantoran	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Sumber peningkatan timbulan limbah padat pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal kegiatan aktivitas perkantoran.	• Menyediakan tempat sampah di kantor. • Mengangkut sampah dari tempat sampah di kantor ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
46	Aktivitas Perkantoran	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Sumber peningkatan timbulan air limbah domestik pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal	• Menyediakan kamar mandi yang dilengkapi dengan *septic tank.*	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			aktivitas karyawan dan pengunjung di perkantoran.	• Melakukan penyedotan tinja secara berkala.	
47	Aktivitas Perkantoran	Bahaya Kebakaran	Sumber bahaya kebakaran pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	• Menempatkan APAR di kantor. • Memasang instalasi listrik dilakukan sesuai dengan SOP pemasangan listrik.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
48	Aktivitas Perkantoran	Sanitasi Lingkungan	Sumber dampak sanitasi lingkungan berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	• Membersihkan area kantor setiap hari. • Menyediakan tempat sampah di kantor. • Mengangkut sampah dari tempat sampah di kantor ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
49	SPBU	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Sumber peningkatan timbulan limbah padat pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal kegiatan SPBU.	• Menyediakan tempat sampah di SPBU. • Mengangkut sampah dari tempat sampah di SPBU ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
50	SPBU	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Sumber peningkatan timbulan air limbah domestik pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal aktivitas karyawan dan pengunjung di SPBU.	• Menyediakan kamar mandi yang dilengkapi dengan *septic tank.* • Melakukan penyedotan tinja secara berkala.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
51	SPBU	Bahaya Kebakaran	Sumber bahaya kebakaran pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara	• Menempatkan APAR di SPBU. • Memasang instalasi listrik dilakukan	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			Angke berasal dari kegiatan SPBU.	sesuai dengan SOP pemasangan listrik.	pemantauan lingkungan hidup.
52	SPBU	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Sumber dampak terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan SPBU.	Membuka kesempatan kerja untuk bekerja di SPBU.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
53	SPBU	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Sumber dampak peningkatan pendapatan masyarakat berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya	Membayar upah tenaga kerja di SPBU.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan SPBU.		
54	SPBU	Peningkatan PAD	Sumber dampak peningkatan PAD berasal dari kegiatan SPBU.	Melakukan penarikan retribusi dari sewa lahan di SPBU.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
55	SPBU	Sanitasi Lingkungan	Sumber dampak sanitasi lingkungan berasal dari kegiatan SPBU.	• Membersihkan area SPBU setiap hari. • Menyediakan tempat sampah di SPBU. • Mengangkut sampah dari tempat sampah di SPBU ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
56	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Sumber peningkatan timbulan limbah padat pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal kegiatan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	• Menyediakan tempat sampah di area tempat usaha. • Mengangkut sampah dari tempat sampah di area tempat usaha ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
57	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Sumber peningkatan timbulan air limbah domestik pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal aktivitas karyawan dan pengunjung di Tempat Usaha	• Menyediakan kamar mandi yang dilengkapi dengan *septic tank.* • Melakukan penyedotan tinja secara berkala.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			(Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).		
58	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Sumber dampak terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	Membuka peluang berusaha untuk berjualan atau membuat usaha di tempa usaha.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
59	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Sumber dampak peningkatan pendapatan	Membayar upah pekerja di tempat usaha.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
	Perbekalan, Warungan, Resto Apung)		masyarakat berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).		pemantauan lingkungan hidup.
60	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan,	Peningkatan PAD	Sumber dampak peningkatan PAD berasal dari kegiatan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios	Melakukan penarikan retribusi dari sewa lahan di tempat usaha.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
	Warungan, Resto Apung)		Perbekalan, Warungan, Resto Apung).		
61	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)	Sanitasi Lingkungan	Sumber dampak sanitasi lingkungan berasal dari kegiatan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	• Membersihkan tempat usaha setiap hari. • Menyediakan tempat sampah di tempat usaha. • Mengangkut sampah dari tempat sampah di tempat usaha ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas UPPP Muara Angke.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
B.	**Operasional Sarana Penunjang**				
1.	Operasional Sarana Penunjang	Penurunan Kualitas Air Laut	Sumber penurunan kualitas air laut pada kegiatan operasional sarana penunjang di Kawasan Muara	Mengeruk sedimen setiap satu minggu sekali.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			Angke mengakibatkan penurunan kualitas air laut yang berasal dari pengolahan kolam limbah. Hal tersebut dapat meningkatkan parameter TSS.		
2	Operasional Sarana Penunjang	Limpasan Air Permukaan	Sumber limpasan air permukaan pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari sarana penunjang yang kurang memadai yaitu tidak mengalirnya drainase karena tersumbat oleh sampah (limbah	• Melakukan pembangunan tanggul/turap secara bertahap sejak tahun 2014. • Melakukan perbaikan saluran drainase. • Melakukan peninggian jalan. • Melakukan pengerukan saluran drainase.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
			padat) dan lumpur sehingga aliran air mudah menggenang. Selain itu, karena Kawasan Muara Angke merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 1 meter dari permukaan laut, sehingga daerah ini sering dilanda oleh banjir pasang (rob).	• Melakukan peninggian dermaga. • Menyediakan petugas yang bertugas untuk melakukan pengecekan drainase keliling Kawasan Muara Angke secara berkala dan membersihkan saluran drainase.	

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
3	Operasional Sarana Penunjang	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Sumber peningkatan timbulan air limbah domestik pada kegiatan operasional sarana penunjang yang diakibatkan dari pemakaian toilet umum.	• Menyediakan kamar mandi yang dilengkapi dengan *septic tank.* • Melakukan penyedotan tinja secara berkala.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
4	Operasional Sarana Penunjang	Sanitasi Lingkungan	Sumber dampak sanitasi lingkungan berasal dari kegiatan operasional sarana penunjang.	• Melakukan pembersihan TPS, toilet umum, drainase, unit pengolahan air laut, kolam limbah, area parkir, dan masjid setiap hari. • Melakukan pengangkutan sampah dari tempat sampah yang berasal dari kegiatan	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan
				perikanan di Kawasan Muara Angke ke TPS setiap hari. Pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas UPPP Muara Angke. • Melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sehari 3 kali. Pengangkutan sampah bekerja sama dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara.	

Sumber: Analisis Tim DELH, 2020

BAB V

EVALUASI DAMPAK ANTAR KOMPONEN KEGIATAN

Pada bab ini akan diuraikan evaluasi dampak dengan kondisi lingkungan hidup eksisting yang mencakup informasi terkait atau relevan dengan dampak yang terjadi. Deskripsi terkait rona lingkungan hidup dan evaluasi berdasarkan data informasi primer dan sekunder yang bersifat aktual dan menggunakan sumber data informasi yang valid serta didukung dengan data kualitas lingkungan dan observasi lapangan. Evaluasi dampak lingkungan pada Kawasan Muara Angke dilakukan untuk mengetahui dampak lingkungan yang terjadi dan merencanakan penyelesaian dampak lingkungan tersebut, yang meliputi:

1. Keterkaitan antar komponen kegiatan yang menjadi sumber dampak, dampak atau limbah yang dihasilkan dari sumber dampak, rona lingkungan terkena dampak, baku mutu/ peraturan/izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan dengan sumber dampak dan dampak yang dihasilkan, efektifitas upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan, serta informasi kegiatan dan kondisi lingkungan di sekitar. Adapun proses evaluasi dapat dilakukan dengan melihat keterkaitan misalnya sebagai berikut:
   a. Dampak lingkungan langsung (seperti pembuangan air limbah olahan ke badan sungai, yang mana pembangunan tersebut berlangsung terus menerus sepanjang hari atau berkala, berapa volume per satuan waktu, bagaimana kualitas air limbah yang dihasilkan serta dampaknya terhadap lingkungan).

b. Evaluasi perubahan dampak (seperti seberapa besar perubahan kualitas air di suatu badan air akibat pembuangan air limbah).
c. Aspek ketaatan hukum atas dampak lingkungan yang telah terjadi (seperti peninjauan kembali tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
d. Upaya penanggulangan dampak dan hasilnya.

2. Hasil kajian dampak harus dapat menyimpulkan mengenai dampak yang terjadi, efektifitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan, serta usulan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang seharusnya dilakukan.
3. Kajian evaluasi dampak dilakukan dalam rangka menentukan seberapa jauh/besar langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan untuk setiap dampak yang terjadi.
4. Hasil kajian evaluasi merumuskan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar penyusunan RKL-RPL yang lebih detail. Memastikan hasil evaluasi memberikan arahan bagi perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang meliputi:
   a. Arahan atas tindakan perbaikan dan penanggulangan yang paling tepat atas dampak yang telah terjadi terhadap lingkungan dan pemantauan hasilnya.
   b. Arahan atas upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi aspek lingkungan lain yang penting serta dapat menimbulkan dampak lingkungan.

Keterlibatan antar Komponen Kegiatan

Keterkaitan antar komponen kegiatan yang menjadi sumber dampak, dampak atau limbah yang dihasilkan dari sumber dampak, rona lingkungan terkena dampak, baku mutu/peraturan/ izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan dengan sumber dampak dan dampak yang dihasilkan, efektifitas upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan, serta informasi kegiatan dan kondisi lingkungan di sekitar. Adapun proses evaluasi dapat dilakukan dengan melihat keterkaitan sebagai berikut.

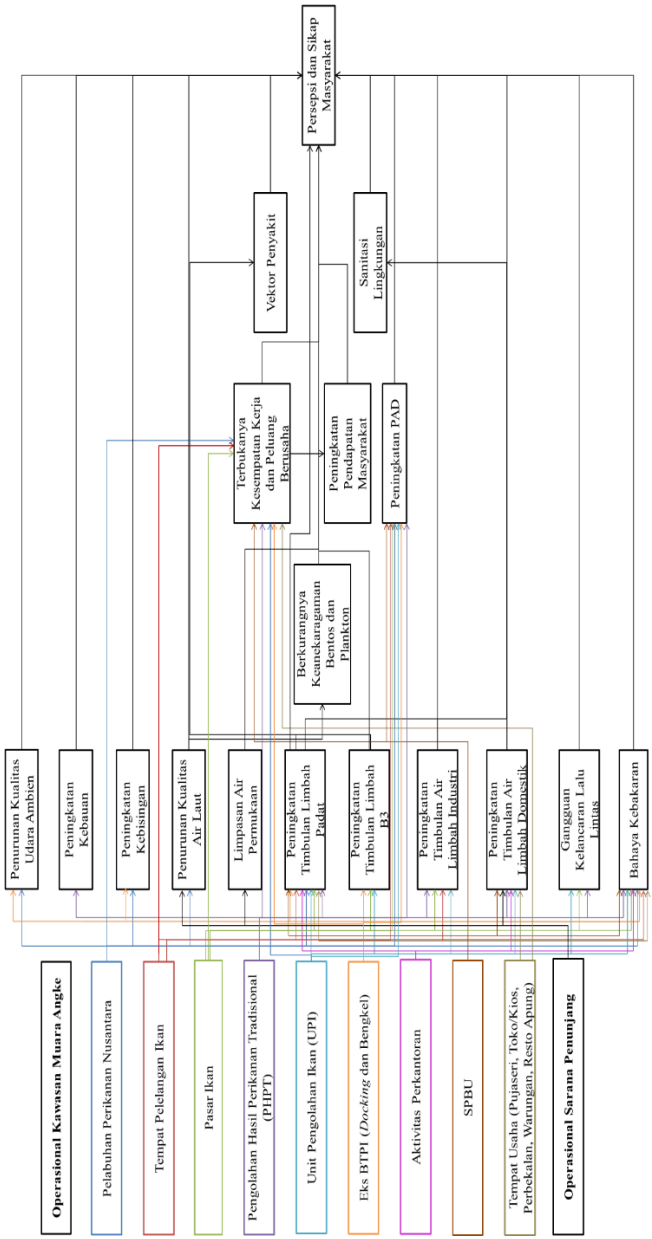

Gambar V.1 Keterkaitan Komponen Kegiatan Operasional Perikanan dan Sarana Penunjang di Kawasan Muara Angke

1. Komponen Geo-Fisik-Kimia

a. Penurunan Kualitas Udara Ambien

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Adanya potensi dampak penurunan kualitas udara ambien yang diakibatkan dari peningkatan parameter SO_2, NO_2, CO, TSP, O_3, HC dan Pb yang berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari mobilisasi kendaraan laut yaitu berasal dari mesin-mesin kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara dan aktivitas *docking* pada saat kegiatan pengelupasan cat, pelapisan dan pengecatan lambung kapal di Eks BTPI.
- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara di Kawasan Muara Angke dengan 7 parameter kimia yaitu sulfur dioksida (SO_2); karbon monoksida (CO); nitrogen dioksida (NO_2); total partikulat; timah hitam (Pb); oksidan (O_3) dan hidro karbon (HC) di wilayah studi dengan seluruh parameter masih berada di bawah baku mutu berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.
- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Pengelolaan kualitas udara ambien menggunakan baku mutu menurut Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.
- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Upaya penanggulangan dampak yang sudah dilakukan adalah pada saat kapal tambat, mesin utama dimatikan, hanya mesin bantu untuk lampu, pendingin ruangan, lemari pendingin yang diperbolehkan dihidupkan.

b. Peningkatan Kebauan

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Adanya potensi dampak peningkatan kebauan yang berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) dari ikan yang di jemur.

- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Berdasarkan data hasil uji laboratorium dapat diketahui bahwa parameter Amoniak (NH_3) masih dibawah baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan sehingga dapat disimpulkan bahwa parameter Amoniak (NH_3) sedangkan untuk parameter Hidrogen Sulfida (H_2S) telah mencapai tingkat baku mutu yaitu 0,02 ppm.
- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Pengelolaan peningkatan kebauan menggunakan baku mutu menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.
- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Upaya penanggulangan dampak belum ada.

c. Peningkatan Kebisingan

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Adanya potensi dampak peningkatan kebisingan yang berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari mobilisasi kendaraan laut yaitu berasal dari mesin-mesin kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara dan aktivitas *docking* pada saat kegiatan perbaikan kapal di Eks BTPI.
- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Berdasarkan hasil pengukuran parameter tingkat kebisingan di Kawasan Muara Angke menunjukkan bahwa parameter tingkat kebisingan di Kawasan Muara Angke masih dalam kondisi yang baik, yaitu masih di bawah baku tingkat kebisingan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.
- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Pengelolaan kebisingan menggunakan baku mutu menurut Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.

- **Upaya Penanggulangan Dampak**

  Upaya penanggulangan dampak yang sudah dilakukan adalah menggunakan alat dan kendaraan yang laik operasi dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

d. Penurunan Kualitas Air Laut

- **Dampak Lingkungan Langsung**

  Adanya potensi dampak penurunan kualitas air laut yang berasal dari kegiatan berikut ini:

  1) Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara mengakibatkan penurunan kualitas air laut yang berasal dari tambat labuh kapal yang diprakirakan akan menimbulkan kekeruhan pada air laut.
  2) Operasional sarana penunjang di Kawasan Muara Angke mengakibatkan penurunan kualitas air laut yang berasal dari pengolahan kolam limbah. Hal tersebut dapat meningkatkan parameter TSS.

- **Evaluasi Perubahan Dampak**

  Berdasarkan hasil dari laboratorium kualitas air laut yang diambil di Kawasan Muara Angke bahwa parameter kecerahan, kadmium (Cd) dan timbal (Pb) sudah melampaui ambang batas yang dipersyaratkan menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan.

- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**

  Pengelolaan kualitas air laut menggunakan baku mutu menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan.

- **Upaya Penanggulangan Dampak**

  Upaya penanggulangan dampak yang sudah dilakukan adalah pemasangan saringan pada inlet kolam limbah, melakukan penyedotan kolam limbah ke laut setiap hari dan melakukan pengerukan sedimen kolam limbah seminggu sekali.

e. Limpasan Air Permukaan

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Adanya potensi limpasan air permukaan yang berasal dari tidak mengalirnya drainase karena tersumbat oleh sampah (limbah padat) dan lumpur sehingga aliran air mudah menggenang. Selain itu, karena Kawasan Muara Angke merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 1 meter dari permukaan laut, sehingga daerah ini sering dilanda oleh banjir pasang (rob).
- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Sejak tahun 2014 secara bertahap telah dibangun tanggul/turap dan perbaikan saluran drainase serta peninggian jalan. Pihak Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Muara Angke sudah melakukan pengerukan saluran air dan peninggian dermaga agar kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke terbebas dari banjir, dengan membuat tanggul/turap dalam bentuk *sheet pile* yang mengelilingi daratan Muara Angke dan perbaikan elevasi saluran sampai menuju waduk penampungan. Namun, tanggul yang dibuat belum mengelilingi Kawasan Muara Angke sehingga masih sering terjadi rob. Serta kondisi drainase Kawasan Muara Angke belum berjalan optimal, meskipun sudah dilakukan penyedotan air dan pembersihan sampah di drainase, selain itu sedimentasi yang tinggi menyebabkan pendangkalan pada drainase di Kawasan Muara Angke. Terdapat 1 (satu) area mangrove di Kawasan Muara Angke. Lokasi empang ini berada di tengah-tengah Kawasan Muara Angke dengan luas 20.463,47 m^2. Jenis tanaman mangrove yang ada di lokasi adalah *Rhizophora mucronata.* Mangrove ini berfungsi sebagai daerah tangkapan hujan.
- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Pengelolaan limpasan air permukaan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan No. 12 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air Hujan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Upaya penanggulangan dampak yang sudah dilakukan adalah pembangunan tanggul/turap dan perbaikan saluran drainase serta peninggian jalan, pembersihan saluran drainase dari sampah dan melakukan penyedotan saluran drainase, menyediakan petugas yang bertugas untuk melakukan pengecekan drainase keliling Kawasan Muara Angke secara berkala dan membersihkan saluran drainase serta penyediaan area mangrove di Kawasan Muara Angke dengan luas 20.463,47 m^2.

f. Peningkatan Timbulan Limbah Padat

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Adanya potensi peningkatan timbulan limbah padat yang berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), Perkantoran, SPBU dan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbengkelan, Warungan, Resto Apung).
- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Timbulan limbah padat yang dihasilkan dari tenaga kerja pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke adalah sebanyak 23,92 m^3/hari atau 3,19 ton/hari. Sedangkan produksi sampah di TPS dekat PHPT rata-rata sebanyak 1.211,17 m^3/bulan atau 448,70 ton/hari. Jenis limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut beragam, seperti sampah ikan, kardus, kertas, plastik, botol, kaleng bekas, *styrofoam*, sisa makanan, dan lain-lain. Pengelolaan limbah padat ini dilakukan dengan cara penempatan limbah padat ke wadah atau tempat sampah kemudian diangkut oleh petugas UPPP Muara Angke setiap harinya untuk dibuang ke TPS. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan sehari tiga kali dengan menggunakan truk tronton yang memiliki kapasitas 20 ton. Pengangkutan sampah ini bekerja sama dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara.

- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Pengelolaan tentang persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Upaya penanggulangan dampak yang sudah dilakukan adalah penyediaan tempat sampah di Kawasan Muara Angke, penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke, pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan sehari tiga kali. Serta limbah ikan yang dihasilkan dari Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) dimanfaatkan untuk pupuk organik cair.

g. Peningkatan Timbulan Limbah B3

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Munculnya timbulan limbah B3 pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan perbaikan *docking* kapal di Eks BTPI dan penggunaan genset di Pasar Ikan dan Unit Pengolahan Ikan (UPI).
- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan *Docking* Eks BTPI dan genset mengakibatkan peningkatan timbulan limbah B3 yang berasal dari oli bekas dan kemasan cat. Pengelolaan yang telah dilakukan di Kawasan Muara Angke belum ada.
- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Pengelolaan limbah B3 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Keputusan Kepala Bapedal No. 01/Bapedal/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengumpulan Limbah B3.
- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Belum dilakukan upaya penanggulangan dampak.

h. Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Adanya potensi peningkatan air limbah industri yang berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan operasional Tempat Pelelangan Ikan yang berasal dari pembersihan Tempat Pelelangan Ikan.
2) Kegiatan operasional Pasar Ikan yang berasal dari pembersihan lapak-lapak di Pasar Ikan serta air bekas rendaman ikan.
3) Kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) yang berasal dari air bekas pencucian, rendaman dan rebusan ikan serta air bekas pencucian wadah.
4) Kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berasal dari air bekas pencucian ikan dan wadahnya.

- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Air limbah industri yang dihasilkan dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke sebesar 1.366 m^3/hari yang berasal dari Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Grosir sebanyak 1.358 lapak, Pasar Eceran sebanyak 89 lapak, PHPT sebanyak 207 unit dan UPI sebanyak 74 unit. Kegiatan industri ini belum dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan jadi langsung dialirkan ke drainase menuju laut. Hanya pada kegiatan pasar ikan yang sudah dilakukan pengelolaan berupa air bekas bersih-bersih lapak dialirkan ke drainase menuju ke kolam limbah. Setelah itu, dilakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum masuk kolam limbah. Di kolam limbah hanya dilakukan proses penyaringan, pengendapan dan penyedotan dan belum ada proses lanjutan.
- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Pengelolaan air limbah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Belum dilakukan upaya penanggulangan dampak.

i. Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Adanya potensi peningkatan air limbah domestik pada kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal aktivitas karyawan dan pengunjung di Tempat Pelelangan Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit

Pengolahan Ikan (UPI), SPBU dan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbengkelan, Warungan, Resto Apung) serta Toilet Umum.

- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Kebutuhan air bersih untuk aktivitas tenaga kerja kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke sebesar 1.594.550 m^3/hari. Pengolahan air limbah domestiknya selama ini adalah untuk *black water*-nya dialirkan ke *septic tank* sedangkan *grey water*-nya dialirkan ke saluran drainase. Menurut Pratiwi dan Purwanti (2015), air bersih yang menjadi limbah diprakirakan sebesar 80% dari kebutuhan air bersih. Oleh karena itu, prakiraan volume air limbah yang dihasilkan setiap harinya (diasumsikan ada 20% air yang tidak berpotensi menjadi limbah, yaitu air yang tercecer di dinding kamar mandi dan menempel di badan) dapat dihitung menggunakan rumus berikut.
  Air Limbah = 80% x Kebutuhan air bersih
  = 80% x 1.594.550 m^3/hari
  = 1.275.640 m^3/hari
  Air limbah yang dihasilkan dari aktivitas tenaga kerja kegiatan perikanan sebanyak 1.275.640 m^3/hari.
- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Pengelolaan air limbah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Upaya penanggulangan dampak yang sudah dilakukan adalah penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*.

j. Gangguan Kelancaran Lalu Lintas

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Adanya potensi gangguan kelancaran lalu lintas akibat dari aktivitas pengunjung di Pasar Ikan, mobilisasi kendaraan pengangkut ikan yang berasal dari 74 Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan mobilisasi kendaraan pengangkut ikan yang berasal dari 207 unit Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).

- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Berdasarkan kajian analisis lalu lintas didapatkan hasil sebagai berikut:
  1) Jl. Pluit Karang Ayu Barat dan Jl. Muara Angke berada pada tingkat pelayanan B, yaitu arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan, dan pengemudi masih cukup bebas memilih kecepatannya dengan jalur jalan yang digunakan.
  2) Jl. Pluit Karang Utara berada pada tingkat pelayanan C, yaitu berada dalam tingkatan arus stabil tapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, dan pengemudi mulai dibatasi dalam memilih kecepatan.
  3) Jl. Pluit Karang Barat berada pada tingkat pelayanan D, yaitu arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus, kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar, dan pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat.
- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Pengelolaan kelancaran lalu lintas berdasarkan KepMenHub No. KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan, Panduan Keselamatan Jalan, ADB, 1996 dan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2014.
- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Belum dilakukan upaya penanggulangan dampak.

k. Bahaya Kebakaran

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Adanya potensi terjadinya bahaya kebakaran yang berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Eks BTPI

(*Docking* dan Bengkel), Perkantoran, SPBU dan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbengkelan, Warungan, Resto Apung).

- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Potensi kebakaran dapat ditimbulkan akibat adanya korsleting sehingga dapat terjadi kebakaran. Berdasarkan hasil survei kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke didapatkan hasil bahwa sudah ada APAR pada masing-masing kantor, kapal, TPI, kantor pasar ikan dan UPI. Sedangkan pada kegiatan *docking* dan bengkel belum terdapat APAR.
- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Pengelolaan kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Upaya penanggulangan dampak yang sudah dilakukan adalah menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik dan pengoperasian genset sesuai SOP.

2. Komponen Biologi

a. Berkurangnya Keanekaragaman Benthos dan Plankton

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Adanya potensi terjadinya berkurangnya keanekaragaman benthos dan plankton yang diakibatkan dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara.
- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Berdasarkan hasil pemantauan keanekaragaman benthos dan plankton di Kali Adem dan Kali Asin, tidak ada parameter yang melebihi baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran III tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut.
- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Pengelolaan keanekaragaman benthos dan plankton menggunakan baku mutu menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku

Mutu Air Laut, Lampiran III tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut.

- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Belum dilakukan upaya penanggulangan dampak.

3. Komponen Sosial Ekonomi Budaya

a. Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Dengan adanya berbagai kegiatan di Kawasan Muara Angke ini menimbulkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat di sekitar lokasi seperti kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), Perkantoran, SPBU dan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbengkelan, Warungan, Resto Apung).
- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke dapat menyerap tenaga kerja sebesar 32.249 orang, sebagai tenaga kerja tetap dan kontrak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.1 Data Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap dari Kegiatan Perikanan di Kawasan Muara Angke

No.	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)
1.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	19.986
2.	Pasar Grosir	2.716
3.	Pasar Eceran	178
4.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	2.010
5.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	4.599
6.	*Docking*	80
7.	Bengkel	1.045
8.	SPBU	70
9.	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto)	1.065

No.	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)
10.	Jasa Angkut	500
	Jumlah	**32.249**

Sumber : Data UPPP 2019 dan Data Survei 2020

- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Pengelolaan peningkatan pendapatan masyarakat berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KLBI) Tahun 2009.
- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Upaya penanggulangan dampak yang sudah dilakukan adalah merekrut tenaga kerja sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan.

b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Kegiatan operasional Kawasan Muara Angke mengakibatkan kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan tersebut mengakibatkan dampak turunan yaitu peningkatan pendapatan masyarakat berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), Perkantoran, SPBU dan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbengkelan, Warungan, Resto Apung).
- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan-kegiatan yang ada di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan sebagai berikut:
  1) Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara mengakibatkan peningkatan pendapatan masyarakat berasal dari banyaknya pengusaha perikanan tangkap sebesar 577 orang dan banyaknya tenaga kerja yang terserap.

2) Kegiatan operasional Tempat Pelelangan Ikan mengakibatkan peningkatan pendapatan masyarakat berasal dari banyaknya ikan yang terjual pada saat proses pelelangan tiap harinya serta jasa angkut.
3) Kegiatan operasional Pasar Ikan mengakibatkan peningkatan pendapatan masyarakat berasal dari banyaknya ikan yang terjual di Pasar Ikan, tenaga kerja yang terserap serta jasa angkut.
4) Kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) mengakibatkan peningkatan pendapatan masyarakat berasal dari banyaknya ikan yang terjual di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) rata-rata sebesar 525 ton/bulan dan tenaga kerja yang terserap.
5) Kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI) mengakibatkan peningkatan pendapatan masyarakat berasal dari banyaknya ikan yang terjual di Unit Pengolahan Ikan (UPI) yaitu 74 Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan tenaga kerja yang terserap.
6) Kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) mengakibatkan peningkatan pendapatan masyarakat berasal dari banyaknya kapal perikanan yang diperbaiki dan tenaga kerja yang terserap.
7) Kegiatan SPBU mengakibatkan peningkatan pendapatan masyarakat berasal dari banyaknya bahan bakar yang terjual dan tenaga kerja yang terserap.
8) Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbengkelan, Warungan, Resto Apung) mengakibatkan peningkatan pendapatan masyarakat berasal dari banyaknya makanan yang terjual dan tenaga kerja yang terserap.

- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Pengelolaan peningkatan pendapatan masyarakat berdasarkan Ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019.

- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Upaya penanggulangan dampak yang sudah dilakukan adalah membayar upah tenaga kerja.

c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Adanya potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke berasal dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), SPBU dan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbengkelan, Warungan, Resto Apung).
- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan-kegiatan yang ada di Kawasan Muara Angke sudah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagai berikut:
  1) Retribusi masuk Kawasan Muara Angke untuk sepeda motor sebesar Rp. 2.000,-/hari, bajaj sebesar Rp. 2.000,-/hari, mobil Rp. 4.000,- /hari dan truk/bis sebesar Rp. 6.000,-/hari.
  2) Pemakaian tanah di Kawasan Muara Angke untuk gudang alat perikanan, pengolahan ikan, bengkel, pabrik es, cool storage, SPBU, restoran dan depot sebesar Rp. 24.000,-/m^2/tahun dan dock kapal sebesar Rp. 12.000,-/m^2/tahun.
  3) Pemakaian alur *docking* untuk Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT sebesar Rp. 30.000,-/kapal/satu kali *docking*, lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT sebesar Rp. 40.000,-/kapal/satu kali *docking*, lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT sebesar Rp. 50.000,-/kapal/satu kali *docking*, lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT sebesar Rp. 75.000,-/kapal/satu kali *docking* dan lebih dari 50 GT sebesar Rp. 100.000,-/kapal/satu kali *docking*.

4) Pemakaian alur *docking* untuk Kapal bukan Perikanan sampai dengan 10 GT sebesar Rp. 50.000,-/kapal/satu kali *docking*, lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT sebesar Rp. 75.000,-/kapal/satu kali docking, lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT sebesar Rp. 100.000,-/kapal/satu kali *docking*, lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT sebesar Rp. 125.000,-/kapal/satu kali *docking* dan lebih dari 50 GT sebesar Rp. 200.000,-/kapal/satu kali *docking*.
5) Pemakaian fasilitas *docking* kapal untuk Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT sebesar Rp. 20.000,-/kapal/satu kali *docking*, lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT sebesar Rp. 30.000,-/kapal/satu kali *docking*, lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT sebesar Rp. 45.000,-/kapal/satu kali *docking*, lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT sebesar Rp. 70.000,-/kapal/satu kali *docking* dan lebih dari 50 GT sebesar Rp. 100.000,-/kapal/satu kali *docking*.
6) Pemakaian fasilitas *docking* kapal untuk Kapal bukan Perikanan sampai dengan 20 GT sebesar Rp. 60.000,-/kapal/satu kali *docking*, lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT sebesar Rp. 85.000,-/kapal/satu kali *docking*, lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT sebesar Rp. 110.000,-/kapal/satu kali *docking* dan lebih dari 50 GT sebesar Rp. 150.000,-/kapal/satu kali *docking*.
7) Pemakaian Kios Pengecer Ikan di Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp. 2.500,-/m^2/bulan.
8) Pemakaian tempat pendaratan kapal di Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke yaitu
   a. Hari ke 1 (satu) sampai dengan hari ke 2 (dua):
      - Lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT sebesar Rp. 4.000,-/kapal/24 jam.
      - Lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT sebesar Rp. 8.000,-/kapal/24 jam.
      - Lebih dari 20 GT sebesar Rp. 12.000,-/kapal/24 jam.
   b. Hari ke 3 (tiga) sampai dengan hari ke 5 (lima):
      - Lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT sebesar Rp. 4.500,-/kapal/24 jam.

- Lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT sebesar Rp. 8.500,-/kapal/24 jam.
- Lebih dari 20 GT sebesar Rp. 13.000,-/kapal/24 jam.

c. Hari ke 6 (enam) sampai dengan Hari ke 9 (sembilan):
- Lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT sebesar Rp. 5.000,-/kapal/24 jam.
- Lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT sebesar Rp. 9.000,-/kapal/24 jam.
- Lebih dari 20 GT sebesar Rp. 14.000,-/kapal/24 jam.

d. Hari ke 10 (sepuluh) ke atas:
- Lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT sebesar Rp. 5.500,-/kapal/24 jam.
- Lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT sebesar Rp. 9.500,-/kapal/24 jam.
- Lebih dari 20 GT sebesar Rp. 14.500,-/kapal/24 jam.

9) Pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan:
a. Pemakaian Kios Pengecer, Kios Pujaseri, Kios Alat Perikanan, Kantor, Gudang Alat Perikanan, Tempat Pengepakan Ikan dan Gudang Garam sebesar Rp. 15.000,-/m^2/bulan.
b. Pemakaian fasilitas tempat pengolahan ikan di PHPT sebesar Rp. 100.000,-/m^2/bulan.

10) Lapak pasar grosir sebesar Rp. 6.000/m^2/bulan.

Dari retribusi diatas kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara mengakibatkan peningkatan PAD yang berasal dari tambat labuh kapal dan retribusi sewa aset fasilitas pelabuhan. Retribusi yang dihasilkan dari kegiatan tambat labuh kapal adalah sebesar Rp. 1.771.884.500,- per tahun dan retribusi sewa aset fasilitas pelabuhan adalah sebesar Rp. 7.509.052.00,- per tahun.

- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**

Pengelolaan peningkatan pendapatan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Upaya penanggulangan dampak yang sudah dilakukan adalah melakukan penarikan retribusi dari kegiatan operasional di Kawasan Muara Angke.

d. Persepsi dan Sikap Masyarakat

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Adanya potensi terjadinya persepsi dan sikap masyarakat yang berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), SPBU dan Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbengkelan, Warungan, Resto Apung).
- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Dari hasil survei diketahui bahwa, penduduk sekitar lokasi studi mayoritas (100%) setuju dengan adanya kegiatan penataan Kawasan Muara Angke karena dianggap menguntungkan masyarakat sekitar adalah sebagai berikut :
  1) Demi kebaikan wilayah Muara Angke, agar lebih tertata dengan rapi dan bersih.
  2) Agar dapat melestarikan Kawasan Muara Angke.
  3) Baik untuk lingkungan Kawasan Muara Angke.
  4) Asal ditata serentak dan rapi untuk lingkungan.
  5) Agar Kawasan Muara Angke lebih bagus.
  6) Kepentingan bersama.
  7) Membantu program pemerintah.
  8) Menguntungkan bagi buruh dan nelayan setempat, selain itu ada tempat berdagang dan perumahan yang lebih tertata.
  9) Daerah pesisir laut jadi jalan harus dinaikkan agar tidak terjadi banjir.
  10) Mempermudah akses.
  11) Agar lebih bersih dan lancar saluran drainase.
  12) Agar Kawasan Muara Angke tidak kumuh lagi.

13) Masih bisa usaha di Resto Apung.
14) Biaya sewa untuk pemilik usaha lama diringankan.
15) Sektor informal (pedagang kaki lima) disediakan tempat/tidak di gusur.

Sedangkan kekhawatiran masyarakat jika kegiatan tersebut dilaksanakan adalah takut jika dibongkar bangunannya dan digusur, terjadi kebakaran, banjir, pencurian kendaraan bermotor dan gangguan terhadap nelayan.
Harapan/saran masyarakat dan pelaku usaha di Kawasan Muara Angke adalah sebagai berikut:
1) Adil, memperhatikan masyarakat kecil.
2) Tetap tinggal disini.
3) Lebih baik dan rapi.
4) Kesejahteraan rakyat diutamakan.
5) Drainase dan bangunan ditata dan dikelola dengan baik.
6) Membuat suasana menjadi lebih bersih dan rapi.
7) Persampahan harus diurus.
8) Kawasan Muara Angke ke depannya lebih maju, lebih indah dan berkembang.
9) Pembangunan harus memperhatikan lingkungan sekitar.
10) Pembersihan drainase secara berkala, karena banyak drainase di Muara Angke yang tidak berfungsi dengan baik akibat banyak sedimen dan sampah di saluran drainase.
11) Pembangunan ke depannya untuk nelayan tradisional.
12) Pembangunan boleh tapi jangan memaksakan.
13) Reklamasi harus memperhatikan lingkungan.
14) Lapangan usaha sebesar-besarnya ketika konstruksi.
15) Mengutamakan drainase dan jalan.
16) Sosialisasi kepada warga terkait dengan pembangunan.
17) Pembangunan harus memperhatikan saluran drainase agar tidak ada masalah selanjutnya.
18) Agar Kawasan Muara Angke lebih bersih, air dan listrik tercukupi untuk kedepannya.
19) Agar jaringan PAM bisa masuk ke Muara Angke.

20) Penambahan sarana usaha perikanan karena bahan baku cukup.
21) Agar dipermudah saat melakukan pengurusan izin kapal.
22) Dilakukan perbaikan sarana di pelabuhan.
23) Fasilitas di pasar ikan masih kurang memadai karena kualitas air yang digunakan untuk mencuci ikan kurang memadai. Air laut kotor sedangkan air tawar mahal.
24) Jalur transportasi antara unit usaha dan permukiman dibedakan, untuk mengurangi kemacetan.

- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Tidak terdapat aspek ketaatan hukum mengenai hal tersebut.
- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Belum dilakukan upaya penanggulangan dampak.

4. Komponen Kesehatan Masyarakat

a. Vektor Penyakit

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Adanya potensi terjadinya vektor penyakit akibat dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan Pasar Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) dan Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) yang berasal dari kegiatan pembuangan limbah padat domestik.
- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Berdasarkan data primer hasil olahan wawancara warga masyarakat dan unit usaha sebagai responden dengan jumlah sebanyak 85 orang di wilayah studi, 34,12% responden menjawab masih banyak sekali lalat dan 49,41% menjawab cukup banyak, sedangkan untuk tikus 38,82% responden menjawab banyak sekali dan 49,41% responden menjawab cukup banyak, sedangkan untuk nyamuk 45,88% menjawab cukup banyak dan 38,82% menjawab banyak sekali. Sedangkan dari hasil pengamatan pada area produksi seperti Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Pasar Ikan, Eks BPTI terdapat banyak lalat juga.

- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Pengelolaan vektor penyakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor Penyakit dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya.
- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Upaya penanggulangan dampak yang sudah dilakukan adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur) tempat-tempat perindukan nyamuk dan melakukan kegiatan pembersihan di lingkungan.

b. Sanitasi Lingkungan

- **Dampak Lingkungan Langsung**
  Adanya potensi sanitasi lingkungan dari dampak turunan yang dihasilkan dari operasional kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke dan operasional sarana penunjang yang berasal dari kegiatan pembuangan limbah padat domestik, pembuangan air limbah domestik dan pembuangan air limbah industri.
- **Evaluasi Perubahan Dampak**
  Banyaknya sampah yang dibuang ke TPS rata-rata per bulan sebesar 1.211,17 m^3/bulan atau 448,70 ton/hari. Namun, sudah dilakukan pengelolaan terkait dengan persampahan yaitu dengan pengangkutan sampah dilakukan sehari tiga kali, sampah dari TPS dekat PHPT diangkut ke TPA dengan menggunakan truk tronton yang memiliki kapasitas 20 ton. Pengangkutan sampah ini bekerja sama dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara, tetapi masih mengalami penumpukan. Sedangkan untuk drainase sudah dilakukan penanganan yaitu dengan penyedotan air dan pembersihan sampah di drainase tapi masih belum maksimal. Sehingga air tidak bisa mengalir. Untuk pengelolaan toilet umum sudah ada tenaga kebersihan dan proses pengolahan air limbahnya masuk ke *septic tank* dan secara berkala disedot menggunakan mobil tinja.

Berdasarkan data primer hasil olahan wawancara warga masyarakat dan unit usaha sebagai responden dengan jumlah sebanyak 85 orang responden, didapatkan hasil masih ada warga yang buang air besar di WC pribadi cubluk/jamban sebanyak 8,24% sedangkan sisanya sudah menggunakan WC pribadi dengan *septic tank* sebanyak 91,76%. Sedangkan air limbah yang berasal dari air bekas cucian disalurkan ke selokan sebanyak 88,24%, dirembeskan ke tanah sebanyak 9,41%, dan dialirkan ke permukaan tanah/galian/kubangan sebanyak 2,35%. Sedangkan untuk penanganan limbah padat domestik didapatkan hasil sebagai berikut dari 65 responden yang bertempat tinggal di Kawasan Muara Angke sebagian besar responden dalam penanganan limbah padat domestik 92,31% responden menjawab limbah padat domestik dikumpulkan diambil petugas untuk dibawa ke TPS Muara Angke dan diangkut ke TPA melalui UPPP (Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan) Muara Angke bekerjasama dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara dan sisanya dalam penanganan limbah padat domestik responden menjawab dibakar 7,69% responden. Sedangkan 20 responden dari unit usaha di Kawasan Muara Angke 100% responden menjawab limbah padat domestik dikumpulkan diambil petugas untuk dibawa ke TPS Muara Angke dan diangkut ke TPA melalui UPPP (Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan) Muara Angke bekerjasama dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara.

- **Berdasarkan Aspek Ketaatan Hukum**
  Pengelolaan sanitasi lingkungan berdasarkan Parameter lingkungan untuk limbah padat domestik dengan pendekatan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Parameter lingkungan untuk limbah B3 dengan penanganan timbulan limbah B3 sesuai PPRI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Keputusan Kepala Bapedal No. 01/Bapedal/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengumpulan Limbah B3 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 122 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- **Upaya Penanggulangan Dampak**
  Upaya penanggulangan dampak yang sudah dilakukan adalah penyediaan tempat sampah di tempat-tempat umum, penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke, pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas, dan penyediaan kamar mandi/WC umum yang dilengkapi dengan *septic tank* dan secara berkala disedot menggunakan mobil tinja.

Hasil Kajian Evaluasi

Hasil kajian evaluasi dari dampak lingkungan yang timbul akibat adanya kegiatan operasional di Kawasan Muara Angke disajikan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel V.2 Hasil Kajian Evaluasi pada Tahap Operasional di Kawasan Muara Angke

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
A.	**Operasional Kegiatan Perikanan**			
A.1.	**Pelabuhan Perikanan Nusantara**			
1	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Berasal dari mesin-mesin kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara hal tersebut akan meningkatkan parameter SO_2, NO_2, CO, TSP, O_3, HC dan Pb.	Sudah dilakukan pengelolaan seperti pada saat kapal tambat, mesin utama dimatikan, hanya mesin bantu untuk lampu, pendingin ruangan, lemari pendingin yang diperbolehkan dihidupkan. Hasil pemantauan kualitas udara ambien dapat dilihat pada **Tabel II.22.** tidak ada parameter kualitas udara ambien yang melebihi baku mutu berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.	
2	Peningkatan Kebisingan	Berasal dari mobilisasi kendaraan laut yaitu berasal dari mesin-mesin kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Sudah dilakukan pengelolaan seperti menggunakan alat dan kendaraan yang laik operasi dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan baku mutu tingkat kebisingan, wilayah studi berada pada peruntukan kawasan pelabuhan laut yaitu 70 dB(A). Hasil pemeriksaan tingkat kebisingan di Pelabuhan Perikanan Nusantara didapatkan hasil pengukuran sebesar 60,7 dBA masih di bawah baku tingkat kebisingan menurut Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.	
3	Penurunan Kualitas Air Laut	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara mengakibatkan penurunan kualitas air laut yang berasal dari tambat labuh kapal yang diprakirakan akan menimbulkan kekeruhan pada air laut.	Sudah dilakukan pengelolaan berupa pengerukan sedimen seminggu sekali. Namun, dari hasil pengelolaan belum maksimal karena itu parameter Pb dan Cd di atas baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan disajikan pada **Tabel II.28**.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
4	Peningkatan Timbulan limbah Padat	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Sudah dilakukan pengelolaan sebagai berikut: a. Penyediaan tempat sampah	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali Namun, dari hasil pengelolaan belum maksimal karena masih banyak sampah yang dibuang di sembarang tempat dan masih ada penumpukan sampah di TPS.	pemantauan lingkungan hidup.
5	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Sudah dilakukan pengelolaan bahaya kebakaran berupa pemasangan APAR pada tiap kapal serta pemasangan instalasi listrik sesuai dengan	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			SOP pemasangan listrik. Tapi, posisi kapal yang tambat pun rapat belum ada pengaturan tentang parkir kapal padahal hal tersebut dapat mempercepat penyebaran api jika terjadi kebakaran. Dari hasil survei didapatkan hasil tidak adanya kebakaran kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke dalam 6 bulan terakhir. Hal ini, belum sesuai dengan peraturan pengelolaan kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.	

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
6	Berkurangnya Keanekaragaman Benthos dan Plankton	Berasal dari kegiatan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
7	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Sudah dilakukan pengelolaan seperti membuka lowongan kerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara, serta didapatkan hasil terserapnya tenaga kerja sebanyak 19.986 orang dan terdapat jasa angkut dari kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara sebanyak 500 orang.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
8	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan	Sudah dilakukan pengelolaan dengan membayar upah pada pekerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara dan pembayaran jasa angkut yang	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
		kerja dan peluang berusaha dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	diakibatkan dari kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara.	
9	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Sudah dilakukan penarikan retribusi dari kegiatan operasional di Pelabuhan Perikanan Nusantara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
10	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
11	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Sudah dilakukan pengelolaan pada area Pelabuhan Perikanan Nusantara setiap hari, sudah terdapat tempat sampah serta pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS tiap hari. Namun dari hasil survei masih didapatkan sampah yang tercecer dijalan (ceceran ikan). Hal ini belum sesuai dengan peraturan pengelolaan sanitasi lingkungan berdasarkan parameter lingkungan untuk limbah padat domestik dengan pendekatan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
A.2.	**Tempat Pelelangan Ikan**			
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Pelelangan Ikan.	Sudah dilakukan pengelolaan sebagai berikut: a. Penyediaan tempat sampah b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali Dari hasil survei didapatkan Tempat Pelelangan Ikan sudah menerapkan pengelolaan dengan baik.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup
2	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Berasal dari pembersihan Tempat Pelelangan Ikan.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	**Pemantauan yang Telah Dilakukan**
				pemantauan lingkungan hidup.
3	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di Tempat Pelelangan Ikan.	Sudah dilakukan pengelolaan berupa tersedianya kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*, serta dilakukan penyedotan tinja secara berkala. Jadi, saat ini pengelolaan yang diterapkan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, dimana pengelolaan air limbah yang ada saat ini belum dikelola dengan sistem IPAL melainkan masih menggunakan *septic tank*.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
4	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	Sudah dilakukan pengelolaan bahaya kebakaran berupa pemasangan APAR di Tempat Pelelangan Ikan serta pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. Dari hasil survei didapatkan hasil tidak adanya kebakaran di Tempat Pelelangan Ikan.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
5	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Pelelangan Ikan.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
6	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
		kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.		
7	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	Sudah dilakukan penarikan retribusi dari kegiatan operasional di Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
8	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
9	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	Sudah dilakukan pengelolaan berupa pembersihan area	Belum terdapat statement yang

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			Tempat Pelelangan Ikan setiap hari sebelum dilakukan kegiatan lelang dan setelah dilakukan kegiatan lelang, sudah terdapat tempat sampah serta pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS tiap hari. Dari hasil survei area Tempat Pelelangan Ikan higienis dan bersih. Tetapi pengelolaan air limbah belum sesuai dengan peraturan pengelolaan sanitasi lingkungan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
A.3.	**Pasar Ikan**			
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal kegiatan operasional Pasar Ikan.	Sudah dilakukan pengelolaan sebagai berikut: a. Penyediaan tempat sampah b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali Dari hasil survei didapatkan Pasar Ikan sudah menerapkan pengelolaan limbah padat. Namun, masih ada sampah yang tercecer di jalan dan drainase sekeliling lapak.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
2	Peningkatan Timbulan Limbah B3	Berasal kegiatan operasional Pasar Ikan yang diakibatkan penggunaan genset.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan survei lapangan didapatkan hasil kemasan cat saat ini dibuang di tempat sampah sedangkan oli bekas dibuat pelumas atau kadang dijual ke pihak ketiga. Juga belum terdapat TPS B3 untuk menampung limbah B3. Jadi, belum sesuai dengan Pengelolaan limbah B3 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Keputusan Kepala Bapedal No. 01/Bapedal/1995 tentang Tata	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			Cara dan Persyaratan Pengumpulan Limbah B3.	
3	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Berasal dari pembersihan Pasar Ikan serta air bekas rendaman ikan.	Sudah dilakukan pengelolaan berupa air bekas bersih-bersih lapak dialirkan ke drainase menuju ke kolam limbah. Setelah itu, dilakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum masuk kolam limbah. Di kolam limbah hanya dilakukan proses penyaringan, pengendapan dan penyedotan. Jadi, belum ada proses lanjutan. Jadi, saat ini pengelolaan yang diterapkan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			DKI Jakarta, dimana pengelolaan air limbah yang ada saat ini belum dikelola dengan sistem IPAL melainkan hanya dilakukan proses penyaringan, pengendapan dan penyedotan.	
4	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Berasal dari aktivitas pengunjung di Pasar Ikan.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
5	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	Sudah dilakukan pengelolaan bahaya kebakaran berupa pemasangan APAR di Pasar Ikan serta pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. Dari hasil survei didapatkan hasil	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			tidak adanya kebakaran di Pasar Ikan.	
6	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	Sudah dilakukan pengelolaan seperti membuka lowongan kerja di Pasar Ikan, serta didapatkan hasil terserapnya tenaga kerja sebanyak 2.716 orang di pasar grosir, 178 orang di pasar eceran dan terdapat jasa angkut dari kegiatan di Pasar Ikan sebanyak 500 orang.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
7	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Pasar Ikan.	Sudah dilakukan pengelolaan dengan membayar upah pada pekerja di Pasar Ikan dan pembayaran jasa angkut yang diakibatkan dari kegiatan Pasar Ikan.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
8	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	Sudah dilakukan penarikan retribusi dari kegiatan operasional di Pasar Ikan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
9	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
10	Vektor Penyakit	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan Pasar Ikan.	Sudah dilakukan pengelolaan berupa Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur) tempat-	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			tempat perindukan nyamuk dan melakukan kegiatan pembersihan di lingkungan. Namun, belum berjalan efektif jadi masih terdapat nyamuk, lalat dan tikus. Hal ini berarti belum sesuai dengan peraturan pengelolaan vektor penyakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor Penyakit dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya.	
11	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	Sudah dilakukan pengelolaan berupa pembersihan area Pasar Ikan setiap hari, sudah	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			terdapat tempat sampah serta pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS tiap hari. Dari hasil survei didapatkan Pasar Ikan sudah menerapkan pengelolaan limbah padat. Namun, masih ada sampah yang tercecer di jalan dan drainase sekeliling lapak. Limbah B3 belum dikelola dan air limbah industri juga. Hal ini belum sesuai dengan peraturan pengelolaan sanitasi lingkungan berdasarkan parameter lingkungan untuk limbah padat domestik dengan pendekatan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Parameter lingkungan	pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			untuk limbah B3 dengan penanganan timbulan limbah B3 sesuai PPRI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Keputusan Kepala Bapedal No. 01/Bapedal/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengumpulan Limbah B3 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
A.4.	**Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)**			
1	Peningkatan Kebauan	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
		Tradisional (PHPT) dari ikan yang di jemur.		pemantauan lingkungan hidup.
2	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Sudah dilakukan pengelolaan sebagai berikut: a. Penyediaan tempat sampah di semua kegiatan Kawasan Muara Angke b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali e. Memanfaatkan limbah ikan dari PHPT menjadi pupuk organik cair Namun, dari hasil pengelolaan belum maksimal karena masih	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			banyak sampah yang dibuang di sembarang tempat dan masih ada penumpukan sampah di TPS.	
3	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Berasal dari air bekas pencucian, rendaman dan rebusan ikan serta air bekas pencucian wadah.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
4	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal aktivitas karyawan dan pengunjung di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Sudah dilakukan pengelolaan berupa tersedianya kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*, serta dilakukan penyedotan tinja secara berkala. Jadi, saat ini pengelolaan yang diterapkan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2005, tentang	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	**Pemantauan yang Telah Dilakukan**
			Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, dimana pengelolaan air limbah yang ada saat ini belum dikelola dengan sistem IPAL melainkan masih menggunakan *septic tank*.	
5	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi belum sesuai dengan Pengelolaan kelancaran lalu lintas berdasarkan KepMenHub No. KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan, Panduan Keselamatan Jalan, ADB, 1996 dan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2014.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
6	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Sudah dilakukan pengelolaan bahaya kebakaran berupa pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. Dari hasil survei didapatkan hasil tidak adanya kebakaran di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
7	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Sudah dilakukan pengelolaan seperti membuka lowongan kerja di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), serta didapatkan hasil terserapnya tenaga kerja sebanyak 2.010 orang.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
8	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan	Sudah dilakukan pengelolaan dengan membayar upah pada pekerja di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
		terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).		pemantauan lingkungan hidup.
9	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Sudah dilakukan penarikan retribusi dari kegiatan operasional di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
10	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
		Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).		pemantauan lingkungan hidup.
11	Vektor Penyakit	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Sudah dilakukan pengelolaan berupa Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur) tempat-tempat perindukan nyamuk dan melakukan kegiatan pembersihan di lingkungan. Namun, belum berjalan efektif jadi masih terdapat nyamuk, lalat dan tikus. Hal ini berarti belum sesuai dengan peraturan pengelolaan vektor penyakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			Kesehatan untuk Vektor Penyakit dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya.	
12	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Sudah dilakukan pengelolaan berupa pembersihan area Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) setiap hari, sudah terdapat tempat sampah serta pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS tiap hari. Namun, masih ada sampah yang tercecer di area Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT). Serta belum ada pengelolaan buat air limbah industri dan domestik. Jadi, hal ini belum sesuai dengan peraturan pengelolaan sanitasi lingkungan	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			berdasarkan parameter lingkungan untuk limbah padat domestik dengan pendekatan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Parameter lingkungan untuk limbah B3 dengan penanganan timbulan limbah B3 sesuai PPRI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Keputusan Kepala Bapedal No. 01/Bapedal/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengumpulan Limbah B3 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah	

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	**Pemantauan yang Telah Dilakukan**
			Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
A.5.	**Unit Pengolahan Ikan (UPI)**			
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Sudah dilakukan pengelolaan sebagai berikut: a. Penyediaan tempat sampah b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali Dari hasil survei didapatkan area kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) sudah menerapkan pengelolaan dengan baik.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
2	Peningkatan Timbulan Limbah B3	Berasal kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang diakibatkan penggunaan genset.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan survei lapangan didapatkan hasil kemasan cat saat ini dibuang di tempat sampah sedangkan oli bekas dibuat pelumas atau kadang dijual ke pihak ketiga. Juga belum terdapat TPS B3 untuk menampung limbah B3. Jadi, belum sesuai dengan Pengelolaan limbah B3 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Keputusan Kepala Bapedal No. 01/Bapedal/1995 tentang Tata	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			Cara dan Persyaratan Pengumpulan Limbah B3.	
3	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Berasal dari air bekas pencucian ikan dan wadahnya.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
4	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal aktivitas karyawan dan pengunjung di Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Sudah dilakukan pengelolaan berupa tersedianya kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*, serta dilakukan penyedotan tinja secara berkala. Jadi, saat ini pengelolaan yang diterapkan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			Jakarta, dimana pengelolaan air limbah yang ada saat ini belum dikelola dengan sistem IPAL melainkan masih menggunakan *septic tank*.	
5	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Berasal dari aktivitas pengunjung di Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi belum sesuai dengan Pengelolaan kelancaran lalu lintas berdasarkan KepMenHub No. KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan, Panduan Keselamatan Jalan, ADB, 1996 dan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2014.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
6	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Sudah dilakukan pengelolaan bahaya kebakaran berupa pemasangan APAR di Unit	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			Pengolahan Ikan (UPI) serta pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. Dari hasil survei didapatkan hasil tidak adanya kebakaran di Unit Pengolahan Ikan (UPI).	pemantauan lingkungan hidup.
7	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Sudah dilakukan pengelolaan seperti membuka lowongan kerja di Unit Pengolahan Ikan (UPI), serta didapatkan hasil terserapnya tenaga kerja sebanyak 4.599 orang.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
8	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan	Sudah dilakukan pengelolaan dengan membayar upah pada pekerja di Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
		Unit Pengolahan Ikan (UPI).		
9	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Sudah dilakukan penarikan retribusi dari kegiatan operasional di Unit Pengolahan Ikan (UPI) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
10	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup.
11	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Sudah dilakukan pengelolaan berupa pembersihan area Unit Pengolahan Ikan (UPI) setiap	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			hari, sudah terdapat tempat sampah serta pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS tiap hari. Dari hasil survei area Unit Pengolahan Ikan (UPI) higienis dan bersih. Tetapi belum terdapat pengelolaan buat air limbah industri dan domestik hal ini belum sesuai dengan peraturan pengelolaan sanitasi lingkungan berdasarkan parameter lingkungan untuk limbah padat domestik dengan pendekatan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Parameter lingkungan untuk limbah B3 dengan penanganan timbulan limbah B3 sesuai	pemantauan lingkungan hidup.

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	**Pemantauan yang Telah Dilakukan**
			PPRI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Keputusan Kepala Bapedal No. 01/Bapedal/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengumpulan Limbah B3 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
A.6.	**Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)**			
1	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Berasal dari aktivitas *docking* pada saat kegiatan pengelupasan cat, pelapisan dan pengecatan lambung kapal di Eks BTPI.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
2	Peningkatan Kebisingan	Berasal dari aktivitas *docking* pada saat kegiatan perbaikan kapal di Eks BTPI.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup
3	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Sudah dilakukan pengelolaan sebagai berikut: a. Penyediaan tempat sampah b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali Dari hasil survei didapatkan area Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) masih terdapat sampah yang berserakan.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
4	Peningkatan Timbulan Limbah B3	Berasal kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan survei lapangan didapatkan hasil kemasan cat saat ini dibuang di tempat sampah sedangkan oli bekas dibuat pelumas atau kadang dijual ke pihak ketiga. Juga belum terdapat TPS B3 untuk menampung limbah B3. Jadi, belum sesuai dengan Pengelolaan limbah B3 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Keputusan Kepala Bapedal No. 01/Bapedal/1995 tentang Tata	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			Cara dan Persyaratan Pengumpulan Limbah B3.	
5	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Sudah dilakukan pengelolaan bahaya kebakaran berupa pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. Dari hasil survei didapatkan hasil tidak adanya kebakaran di Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup
6	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Sudah dilakukan pengelolaan seperti membuka lowongan kerja di Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), serta didapatkan hasil terserapnya tenaga kerja sebanyak 80 orang di *docking* dan 1.045 orang di bengkel.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup
7	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang	Sudah dilakukan pengelolaan dengan membayar upah pada	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
		mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	pekerja di Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	pemantauan lingkungan hidup
8	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Sudah dilakukan penarikan retribusi dari kegiatan operasional di Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup
9	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
				pemantauan lingkungan hidup
10	Vektor Penyakit	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Sudah dilakukan pengelolaan berupa Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur) tempat-tempat perindukan nyamuk dan melakukan kegiatan pembersihan di lingkungan. Namun, belum berjalan efektif jadi masih terdapat nyamuk, lalat dan tikus. Hal ini berarti belum sesuai dengan peraturan pengelolaan vektor penyakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			Kesehatan untuk Vektor Penyakit dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya.	
11	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Sudah dilakukan pengelolaan berupa pembersihan area Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) setiap hari, sudah terdapat tempat sampah serta pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS tiap hari. Dari hasil survei area Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) masih berserakan tidak tertata rapi dan limbah B3 belum dikelola. Hal ini belum sesuai dengan peraturan pengelolaan sanitasi lingkungan berdasarkan parameter lingkungan untuk limbah padat	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	**Pemantauan yang Telah Dilakukan**
			domestik dengan pendekatan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Parameter lingkungan untuk limbah B3 dengan penanganan timbulan limbah B3 sesuai PPRI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Keputusan Kepala Bapedal No. 01/Bapedal/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengumpulan Limbah B3.	
A.7.	**Aktivitas Perkantoran**			
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	Sudah dilakukan pengelolaan sebagai berikut: a. Penyediaan tempat sampah	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali Dari hasil survei didapatkan area perkantoran sudah menerapkan pengelolaan dengan baik.	pemantauan lingkungan hidup
2	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di perkantoran.	Sudah dilakukan pengelolaan berupa tersedianya kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*, serta dilakukan penyedotan tinja secara berkala. Jadi, saat ini pengelolaan yang diterapkan belum sesuai dengan peraturan	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	**Pemantauan yang Telah Dilakukan**
			yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, dimana pengelolaan air limbah yang ada saat ini belum dikelola dengan sistem IPAL melainkan masih menggunakan *septic tank*.	
3	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	Sudah dilakukan pengelolaan bahaya kebakaran berupa pemasangan APAR di perkantoran serta pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. Dari hasil survei didapatkan hasil tidak adanya kebakaran di perkantoran.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
4	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup
5	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	Sudah dilakukan pengelolaan berupa pembersihan area aktivitas perkantoran setiap hari, sudah terdapat tempat sampah serta pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS tiap hari. Namun, air limbah domestiknya belum dikelola hal ini belum sesuai dengan peraturan pengelolaan sanitasi lingkungan berdasarkan parameter lingkungan pengelolaan air limbah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	**Pemantauan yang Telah Dilakukan**
			No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
A.8.	**SPBU**			
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	Sudah dilakukan pengelolaan sebagai berikut: a. Penyediaan tempat sampah b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali Dari hasil survei didapatkan area SPBU sudah menerapkan pengelolaan dengan baik.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
2	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di SPBU.	Sudah dilakukan pengelolaan berupa tersedianya kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*, serta dilakukan penyedotan tinja secara berkala. Jadi, saat ini pengelolaan yang diterapkan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, dimana pengelolaan air limbah yang ada saat ini belum dikelola dengan sistem IPAL melainkan masih menggunakan *septic tank*.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup
3	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	Sudah dilakukan pengelolaan bahaya kebakaran berupa	Belum terdapat statement yang

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			pemasangan APAR di SPBU serta pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. Dari hasil survei didapatkan hasil tidak adanya kebakaran di SPBU.	dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup
4	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	Sudah dilakukan pengelolaan seperti membuka lowongan kerja di SPBU, serta didapatkan hasil terserapnya tenaga kerja sebanyak 70 orang.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup
5	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan operasional SPBU.	Sudah dilakukan pengelolaan dengan membayar upah pada pekerja di SPBU.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
6	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	Sudah dilakukan penarikan retribusi dari kegiatan operasional di SPBU sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup
7	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup
8	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	Sudah dilakukan pengelolaan berupa pembersihan area SPBU setiap hari, sudah terdapat tempat sampah serta pengangkutan sampah dari	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			tempat sampah ke TPS tiap hari. Namun, air limbah domestiknya belum dikelola hal ini belum sesuai dengan peraturan pengelolaan sanitasi lingkungan berdasarkan parameter lingkungan pengelolaan air limbah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
A.9.	**Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)**			
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan,	Sudah dilakukan pengelolaan sebagai berikut: a. Penyediaan tempat sampah b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
		Warungan, Resto Apung).	dilakukan setiap hari oleh petugas c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali Dari hasil survei didapatkan area Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung) sudah menerapkan pengelolaan dengan baik.	
2	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	Sudah dilakukan pengelolaan berupa tersedianya kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*, serta dilakukan penyedotan tinja secara berkala. Jadi, saat ini pengelolaan yang diterapkan belum sesuai dengan peraturan	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	**Pemantauan yang Telah Dilakukan**
			yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, dimana pengelolaan air limbah yang ada saat ini belum dikelola dengan sistem IPAL melainkan masih menggunakan *septic tank*.	
3	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup
4	Terbukanya Kesempatan Kerja dan	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan,	Sudah dilakukan pengelolaan seperti membuka lowongan kerja di Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
	Peluang Berusaha	Warungan, Resto Apung).	Perbekalan, Warungan, Resto Apung), serta didapatkan hasil terserapnya tenaga kerja sebanyak 1.065 orang.	pemantauan lingkungan hidup
5	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	Sudah dilakukan pengelolaan dengan membayar upah pada pekerja di Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup
6	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan,	Sudah dilakukan penarikan retribusi dari kegiatan operasional di Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
		Warungan, Resto Apung).	Perbekalan, Warungan, Resto Apung) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.	pemantauan lingkungan hidup
7	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup
8	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	Sudah dilakukan pengelolaan berupa pembersihan area Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung) setiap hari, sudah terdapat tempat	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			sampah serta pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS tiap hari. Namun, air limbah domestiknya belum dikelola hal ini belum sesuai dengan peraturan pengelolaan sanitasi lingkungan berdasarkan parameter lingkungan pengelolaan air limbah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
B	**Operasional Sarana Penunjang**			
1	Penurunan Kualitas Air Laut	Berasal dari pengolahan kolam limbah. Hal tersebut dapat	Sudah dilakukan pengelolaan berupa pengerukan sedimen seminggu sekali. Namun, dari hasil pengelolaan belum	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
		meningkatkan parameter TSS.	maksimal karena itu parameter Pb dan Cd di atas baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan disajikan pada **Tabel II.28**.	pemantauan lingkungan hidup
2	Limpasan Air Permukaan	Berasal dari operasional sarana penunjang yang kurang memadai yaitu tidak mengalirnya drainase karena tersumbat oleh sampah (limbah padat) dan lumpur sehingga aliran air mudah menggenang. Selain itu, karena	Sejak tahun 2014 secara bertahap telah dibangun tanggul/turap dan perbaikan saluran drainase serta peninggian jalan. Pihak Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Muara Angke sudah melakukan pengerukan saluran air dan peninggian dermaga agar kawasan Pelabuhan Perikanan	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
		Kawasan Muara Angke merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 1 meter dari permukaan laut, sehingga daerah ini sering dilanda oleh banjir pasang (rob).	Muara Angke terbebas dari banjir. Namun, ketika turun hujan masih terjadi genangan air. Serta disediakan petugas yang bertugas untuk melakukan pengecekan drainase keliling Kawasan Muara Angke secara berkala dan membersihkan saluran drainase. Namun, masih terdapat sampah dan lumpur di saluran drainase.	
3	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal dari kegiatan operasional sarana penunjang yang diakibatkan dari pemakaian toilet umum.	Sudah dilakukan pengelolaan berupa tersedianya kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*, serta dilakukan penyedotan tinja secara berkala. Jadi, saat ini pengelolaan yang diterapkan	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, dimana pengelolaan air limbah yang ada saat ini belum dikelola dengan sistem IPAL melainkan masih menggunakan *septic tank*.	
4	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional sarana penunjang.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup
5	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional sarana penunjang.	Sudah dilakukan pengelolaan berupa pembersihan area TPS, toilet umum, drainase, unit pengolahan air laut, kolam	Belum terdapat statement yang dilakukan dalam

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			limbah, parkir dan masjid setiap hari, sudah terdapat tempat sampah serta pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS tiap hari. Namun, dari hasil survei masih ada sampah yang berserakan meskipun seperti area unit pengolahan air laut, masjid dan toilet umum bersih. Namun air limbah yang dihasilkan belum dikelola dengan baik berdasarkan peraturan dengan pendekatan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah	pemantauan lingkungan hidup

No.	Jenis Dampak	Sumber Dampak	Efektivitas	
			Pengelolaan yang Telah Dilakukan	Pemantauan yang Telah Dilakukan
			Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	

Hasil Kajian Dampak

Pada bagian ini dampak lingkungan yang telah dikaji mencemari atau mengganggu lingkungan akan dievaluasi. Kegiatan perikanan dan sarana penunjang di Kawasan Muara Angke menimbulkan penurunan kualitas udara ambien, peningkatan kebauan, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air laut, limpasan air permukaan, peningkatan timbulan limbah padat, peningkatan timbulan limbah B3, peningkatan timbulan air limbah industri, peningkatan timbulan air limbah domestik, sedimentasi laut, gangguan kelancaran lalu lintas, bahaya kebakaran, berkurangnya keanekaragaman benthos dan plankton, terbukanya kesempatan kerja, peluang berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan PAD, persepsi dan sikap masyarakat serta vektor penyakit dan sanitasi lingkungan.

Keseluruhan hasil pemantauan kualitas udara ambien, tingkat kebauan dan tingkat kebisingan dalam kondisi baik yaitu di bawah baku mutu yang dipersyaratkan. Berdasarkan hasil tersebut maka pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan harus dipertahankan sehingga kualitas lingkungan tidak mengalami degradasi. Namun, hasil pemantauan kualitas air laut sudah di atas baku mutu yang dipersyaratkan. Berdasarkan hasil tersebut maka pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan harus diganti sehingga kualitas lingkungan tidak mengalami degradasi.

Arahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Tahap selanjutnya adalah merumuskan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian evaluasi di atas. Arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup digunakan sebagai dasar penyusunan RKL-RPL yang lebih detail. Hasil evaluasi memberikan arahan bagi perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang meliputi:

- Arahan atas tindakan perbaikan dan penanggulangan yang paling tepat atas dampak yang telah terjadi terhadap lingkungan dan pemantauan hasilnya.
- Arahan atas upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi aspek lingkungan lain yang penting serta yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

Tabel V.3 Matriks Arahan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
A.	**Operasional Kegiatan Perikanan**			
A.1.	**Pelabuhan Perikanan Nusantara**			
1	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Berasal dari mesin-mesin kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara hal tersebut akan meningkatkan parameter SO_2, NO_2, CO, TSP, O_3, HC dan Pb.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Selama kapal tambat, mesin utama dimatikan, hanya mesin bantu untuk lampu, pendingin ruangan, lemari pendingin yang diperbolehkan dihidupkan. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Melakukan penanaman pohon pelindung di lokasi kegiatan yang berfungsi sebagai penyaring udara seperti ketapang kencana, bintaro. b. Melakukan penghijauan dengan menanam tanaman potisasi seperti lidah mertua, lidah menantu, bougenville, palem kuning dan pucuk merah.	• Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan cara pengukuran langsung (in-situ) di titik pemantauan yang telah ditentukan. Pengukuran kualitas udara menggunakan "*multiple impinger*" dengan metode *colorimetrik* dengan alat *spektrofometer*. • Hasil analisis laboratorium kemudian dibandingkan dengan baku mutu kualitas

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
				udara ambien menurut Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.
2	Peningkatan Kebisingan	Berasal dari mobilisasi kendaraan laut yaitu berasal dari mesin-mesin kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Menggunakan alat dan kendaraan yang laik operasi dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** Melakukan penanaman pohon sebagai *sound barrier* seperti flamboyan, cemara kipas atau lilin, dan mahoni.	• Data kebisingan diukur dengan *Sound Level Meter*. • Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu tingkat kebisingan menurut Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
				Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.
3	Penurunan Kualitas Air Laut	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara mengakibatkan penurunan kualitas air laut yang berasal dari tambat labuh kapal yang diprakirakan akan menimbulkan kekeruhan pada air laut.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Melakukan pengerukan sedimen kolam limbah seminggu sekali **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Pengelolaan mengikuti Peraturan MARPOL 73/78, Lampiran I menyebutkan persyaratan pembuangan air limbah mencegah pencemaran air laut oleh minyak dan bahan berminyak. b. Memasang papan pengumuman larangan membuang sampah ke laut. c. Pembersihan saluran drainase secara berkala.	• Metode Pengambilan: pengambilan sampel air laut dilakukan dengan menggunakan *Water Sampler* cara *composite vertikal*. Sampel disimpan dalam tempat yang tahan asam dengan volume tertentu sesuai dengan parameter. • Metode Pengujian: dilakukan di laboratorium dengan metode pengujian dan peralatan tertentu sesuai dengan karakteristik

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
				parameter yang ingin dipantau. • Data tersebut dibandingkan dengan baku mutu kualitas air laut mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan.
4	Peningkatan Timbulan limbah Padat	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah. b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali bekerjasama dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu) yang kedap air di Pelabuhan Perikanan Nusantara. b. Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. c. Pembuatan TPS di Pelabuhan Perikanan Nusantara. d. Pemberian atap di lokasi TPS. e. Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah padat domestik.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			memilah sampah yang bernilai ekonomis.	
5	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) b. Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik **Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Pengaturan posisi kapal pada saat tambat labuh kapal. b. Setiap kapal wajib memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR). c. Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, *moving* pada APAR 1 bulan sekali).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			d. Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. e. Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api. f. Terjaminnya peralatan fasilitas/instalasi kelistrikan yang aman.	
6	Berkurangnya Keanekaragaman Benthos dan Plankton	Berasal dari kegiatan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Larangan membuang sampah sembarangan di laut.	Pemantauan biota air dilakukan dengan pengambilan sampel plankton dengan menggunakan Plankton Net #25. Sampling Benthos menggunakan Ekmann Grab. Analisis data menggunakan Indeks keanekaragaman plankton dan benthos menurut *Shannon* & *Wiene*r dan *indeks*

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
				dominansi menurut *Simpson*.
7	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan setempat. b. Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. c. Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia. d. Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme. e. Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			f. Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. g. Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi. h. Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk mengisi peluang kesempatan kerja. i. Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan. j. Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait. k. Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.	

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
8	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
9	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		Perikanan Nusantara.		menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
10	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Pengelolaan kebisingan dan udara ambien yang dihasilkan dari kegiatan mesin-mesin kapal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b. Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam area Pelabuhan Perikanan Nusantara sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. c. Pengelolaan limbah padat domestik sesuai dengan SOP.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			d. Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.	
11	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah. b. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. c. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Melakukan pembersihan drainase secara rutin. b. Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut: • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			membuang sampah sembarangan. • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah.	
A.2.	**Tempat Pelelangan Ikan**			
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Pelelangan Ikan.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah. b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			Pengelolaan yang akan dilakukan: a. Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu) yang kedap air di Tempat Pelelangan Ikan. b. Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. c. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. d. Pemberian atap di lokasi TPS. e. Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan memilah sampah yang bernilai ekonomis.	limbah padat domestik.
2	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Berasal dari pembersihan Tempat Pelelangan Ikan.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Pembuatan IPAL Industri di Kawasan Muara Angke. b. Pemasangan instalasi air limbah industri menuju IPAL Industri.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			c. Air limbah industri yang berasal dari kegiatan perikanan masuk ke IPAL Industri. d. Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah industri.	pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
3	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di Tempat Pelelangan Ikan.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank* dan dilakukan penyedotan tinja secara berkala. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Pembuatan IPAL Domestik di Kawasan Muara Angke. b. Pemasangan instalasi air limbah domestik menuju IPAL Domestik. c. Air limbah yang berasal dari kegiatan aktivitas karyawan dan pengunjung masuk ke IPAL Domestik.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			d. Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah domestik.	
4	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) namun belum di semua gedung. b. Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, *moving* pada APAR 1 bulan sekali). b. Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/tangga darurat, mudah dilihat, aman dari kondisi	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai). c. Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api. d. Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. e. Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api. f. Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran. g. Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran. h. Tersedianya daftar pejabat/instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran.	

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			i. Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air. j. Terjaminnya peralatan fasilitas/instalasi kelistrikan yang aman. k. Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.	
5	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Pelelangan Ikan.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan setempat. b. Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. c. Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			d. Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme. e. Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar. f. Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. g. Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi. h. Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk mengisi peluang kesempatan kerja. i. Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan.	

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			j. Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait. k. Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.	
6	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Mengutamakan/memprioritaskan kepada masyarakat sekitar lokasi studi untuk menjual ikan hasil tangkap di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). b. Menghindari terjadinya proses penerimaan ikan yang dilelangkan melalui perantara/makelar. c. Mengikuti prosedur yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). d. Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			e. Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat terkait dengan tempat pelelangan ikan.	
7	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan Operasional Tempat Pelelangan Ikan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
8	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** a. Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			b. Air limbah industri diolah terlebih dahulu di IPAL Industri dan air limbah domestik diolah terlebih dahulu di IPAL Domestik. c. Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
9	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah. b. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. c. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. d. Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			Pengelolaan yang akan Dilakukan: a. Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase. b. Melakukan pembersihan drainase secara rutin. c. Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut: • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang sampah sembarangan. • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah. • Melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah secara	

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			rutin setiap hari dan akan dilakukan pengangkutan ke TPS secara rutin. d. Pengelolaan air limbah sebagai berikut: • Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. • Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air. • Air limbah domestik diolah ke IPAL Domestik dan air limbah industri diolah ke IPAL Industri.	
A.3.	**Pasar Ikan**			
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal kegiatan operasional Pasar Ikan.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah. b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu) yang kedap air di Pasar Ikan. b. Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. c. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. d. Pemberian atap di lokasi TPS. e. Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan memilah sampah yang bernilai ekonomis.	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah padat domestik.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
2	Peningkatan Timbulan Limbah B3	Berasal kegiatan operasional Pasar Ikan yang diakibatkan penggunaan genset.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Menyediakan TPS B3. b. Pemberian label peringatan limbah B3 dan sticker yang sesuai dengan jenis limbahnya, sesuai dengan Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya. c. Melakukan penimbangan dan pencatatan jenis dan jumlah limbah B3 pada neraca limbah setiap harinya. d. Pengelolaan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Pengolahan dan pengangkutannya limbah B3. e. Melakukan pengurusan Izin Penyimpanan Limbah B3.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah B3.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
3	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Berasal dari pembersihan Pasar Ikan serta air bekas rendaman ikan.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Pembuatan IPAL Industri di Kawasan Muara Angke. b. Pemasangan instalasi air limbah industri menuju IPAL Industri. c. Air limbah industri yang berasal dari kegiatan perikanan masuk ke IPAL Industri. d. Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah industri.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
4	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Berasal dari aktivitas pengunjung di Pasar Ikan.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Melengkapi fasilitas lalu lintas, berupa rambu lalu lintas, marka jalan, dan trotoar pejalan kaki. b. Menyediakan area parkir terpisah bagi karyawan dan pengunjung. c. Memisahkan sirkulasi jalur di Kawasan Muara Angke, yaitu jalur angkutan industri perikanan, pejalan kaki, mobil pribadi dan angkutan kawasan.	• Pengumpulan data lalu lintas dilakukan dengan survei lalu lintas. • Data lalu lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar (PKJI, 2014).

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			d. Melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara terkait pengelolaan lalu lintas di kawasan Muara Angke.	
5	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). b. Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. c. Pengoperasian genset sesuai SOP. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, *moving* pada APAR 1 bulan sekali). b. Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/tangga darurat, mudah	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			dilihat, aman dari kondisi merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai). c. Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api. d. Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. e. Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api. f. Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran. g. Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran. h. Tersedianya daftar pejabat/ instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran.	

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			i. Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air. j. Terjaminnya peralatan fasilitas/ instalasi kelistrikan yang aman. k. Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.	
6	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan setempat. b. Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. c. Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			d. Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme. e. Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar. f. Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. g. Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi. h. Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk mengisi peluang kesempatan kerja. i. Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan.	

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			j. Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait. k. Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.	
7	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Pasar Ikan.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
8	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan Pasar Ikan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
9	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. b. Air limbah industri diolah terlebih dahulu di IPAL Industri. c. Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
10	Vektor Penyakit	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan Pasar Ikan.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur) tempat-tempat perindukan nyamuk dan melakukan kegiatan pembersihan di lingkungan. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Melakukan pembersihan area Pasar Ikan setiap hari. b. Melakukan pembersihan tempat sampah secara rutin. c. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari atau apabila wadah telah terisi ¾ dari volume wadah. d. Pengendalian vektor penyakit oleh pihak ketiga yang berijin.	• Pemantauan data dilakukan dengan cara pengamatan secara visual. • Parameter yang dipantau adalah jumlah kehadiran hewan yang termasuk vektor penyakit.
11	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah.	• Pengumpulan data dilakukan dengan

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		operasional Pasar Ikan.	b. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. c. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. d. Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Menjaga area berjualan tetap higienis. b. Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase. c. Melakukan pembersihan drainase secara rutin. d. Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut: • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak	cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			membuang sampah sembarangan. • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah. e. Pengelolaan air limbah sebagai berikut: • Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. • Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air. • Air limbah industri diolah ke IPAL Industri sebelum dibuang ke laut.	
A.4.	**Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)**			
1	Peningkatan Kebauan	Berasal dari kegiatan operasional	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Pembersihan saluran drainase secara berkala.	• Pemantauan tingkat kebauan dilakukan dengan cara

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) dari ikan yang di jemur.	b. Air bekas pencucian ikan dan cumi sebelum dibuang ke laut diolah dulu ke IPAL Industri. c. Pembuatan IPAL Industri di area Kawasan Muara Angke. d. Melakukan potisasi yang dapat menyerap bau sekaligus sebagai penghijauan seperti lidah mertua, lidah menantu, bougenville, palem waregu dan pucuk merah.	pengukuran langsung (in-situ) di titik pemantauan yang telah ditentukan dan kemudian dianalisis di laboratorium yang sudah terakreditasi. • Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu tingkat kebauan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.
2	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal kegiatan operasional Pengolahan Hasil	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		Perikanan Tradisional (PHPT).	b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu) yang kedap air di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT). b. Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. c. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. d. Pemberian atap di lokasi TPS. e. Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan	menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah padat domestik.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			memilah sampah yang bernilai ekonomis.	
3	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Berasal dari air bekas pencucian, rendaman dan rebusan ikan serta air bekas pencucian wadah.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Pembuatan IPAL Industri di Kawasan Muara Angke. b. Pemasangan instalasi air limbah industri menuju IPAL Industri. c. Air limbah industri yang berasal dari kegiatan perikanan masuk ke IPAL Industri. d. Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah industri.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
4	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal aktivitas karyawan dan pengunjung di Pengolahan Hasil Perikanan	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank* dan dilakukan penyedotan tinja secara berkala.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL).

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		Tradisional (PHPT).	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Pembuatan IPAL Domestik di Kawasan Muara Angke. b. Pemasangan instalasi air limbah domestik menuju IPAL Domestik. c. Air limbah yang berasal dari kegiatan aktivitas karyawan dan pengunjung masuk ke IPAL Domestik. d. Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah domestik.	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
5	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Melengkapi fasilitas lalu lintas, berupa rambu lalu lintas, marka jalan, dan trotoar pejalan kaki. b. Menyediakan area parkir terpisah bagi karyawan dan pengunjung. c. Memisahkan sirkulasi jalur di Kawasan Muara Angke, yaitu jalur angkutan industri perikanan,	• Pengumpulan data lalu lintas dilakukan dengan survei lalu lintas. • Data lalu lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar (PKJI, 2014).

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			pejalan kaki, mobil pribadi dan angkutan kawasan. d. Melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara terkait pengelolaan lalu lintas di kawasan Muara Angke.	
6	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). b. Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, *moving* pada APAR 1 bulan sekali). c. Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			tangga darurat, mudah dilihat, aman dari kondisi merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai). d. Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api. e. Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. f. Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api. g. Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran. h. Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran. i. Tersedianya daftar pejabat/ instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran.	

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			j. Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air. k. Terjaminnya peralatan fasilitas/ instalasi kelistrikan yang aman. l. Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.	
7	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan setempat. b. Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. c. Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			d. Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme. e. Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar. f. Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. g. Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi. h. Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk mengisi peluang kesempatan kerja. i. Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan.	

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			j. Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait. k. Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.	
8	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		Tradisional (PHPT).		
9	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
10	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. b. Air limbah industri diolah terlebih dahulu di IPAL Industri sedangkan	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			air limbah domestik diolah ke IPAL Domestik. c. Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.	
11	Vektor Penyakit	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur) tempat-tempat perindukan nyamuk dan melakukan kegiatan pembersihan di lingkungan. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Melakukan pembersihan area produksi secara rutin. b. Melakukan pembasmian lalat dengan menggunakan insektisida alami, seperti serai wangi, geranium, bawang putih, cengkeh, dan lain-lain.	• Pemantauan data dilakukan dengan cara pengamatan secara visual. • Parameter yang dipantau adalah jumlah kehadiran hewan yang termasuk vektor penyakit.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			c. Pengendalian vektor penyakit oleh pihak ketiga yang berijin. d. Pengangkutan limbah padat domestik dilakukan setiap hari.	
12	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah. b. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. c. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. d. Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Menjaga area produksi tetap higienis. b. Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			c. Melakukan pembersihan drainase secara rutin. d. Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut: • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang sampah sembarangan. • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah. e. Pengelolaan air limbah sebagai berikut: • Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. • Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air.	

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			• Air limbah industri diolah ke IPAL Industri sebelum dibuang ke laut.	
A.5.	**Unit Pengolahan Ikan (UPI)**			
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI).	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah. b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu) yang kedap air di Unit Pengolahan Ikan (UPI).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah padat domestik.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			b. Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. c. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. d. Pemberian atap di lokasi TPS. e. Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan memilah sampah yang bernilai ekonomis.	
2	Peningkatan Timbulan Limbah B3	Berasal kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang diakibatkan penggunaan genset.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Menyediakan TPS B3. b. Pemberian label peringatan limbah B3 dan sticker yang sesuai dengan jenis limbahnya, sesuai dengan Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya. c. Melakukan penimbangan dan pencatatan jenis dan jumlah	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			limbah B3 pada neraca limbah setiap harinya. d. Pengelolaan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Pengolahan dan pengangkutannya limbah B3. e. Melakukan pengurusan Izin Penyimpanan Limbah B3.	• Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah B3.
3	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Berasal dari air bekas pencucian ikan dan wadahnya.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Pembuatan IPAL Industri di Kawasan Muara Angke. b. Pemasangan instalasi air limbah industri menuju IPAL Industri. c. Air limbah industri yang berasal dari kegiatan perikanan masuk ke IPAL Industri. d. Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah industri.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
4	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal aktivitas karyawan dan pengunjung di Unit Pengolahan Ikan (UPI).	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank* dan dilakukan penyedotan tinja secara berkala. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Pembuatan IPAL Domestik di Kawasan Muara Angke. b. Pemasangan instalasi air limbah domestik menuju IPAL Domestik. c. Air limbah yang berasal dari kegiatan aktivitas karyawan dan pengunjung masuk ke IPAL Domestik. d. Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah domestik.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
5	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Berasal dari aktivitas pengunjung di	**Pengelolaan yang akan dilakukan:**	• Pengumpulan data lalu lintas dilakukan

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		Unit Pengolahan Ikan (UPI).	a. Melengkapi fasilitas lalu lintas, berupa rambu lalu lintas, marka jalan, dan trotoar pejalan kaki. b. Menyediakan area parkir terpisah bagi karyawan dan pengunjung. c. Memisahkan sirkulasi jalur di Kawasan Muara Angke, yaitu jalur angkutan industri perikanan, pejalan kaki, mobil pribadi dan angkutan kawasan. d. Melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara terkait pengelolaan lalu lintas di kawasan Muara Angke.	dengan survei lalu lintas. • Data lalu lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar (PKJI, 2014).
6	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI).	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). b. Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. c. Pengoperasian genset sesuai SOP.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			Pengelolaan yang akan dilakukan: a. Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, *moving* pada APAR 1 bulan sekali). b. Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/tangga darurat, mudah dilihat, aman dari kondisi merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai). c. Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api. d. Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. e. Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api.	per kapal terkait APAR). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			f. Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran. g. Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran. h. Tersedianya daftar pejabat/instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran. i. Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air. j. Terjaminnya peralatan fasilitas/ instalasi kelistrikan yang aman. k. Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.	
7	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Unit	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan setempat.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		Pengolahan Ikan (UPI).	b. Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. c. Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia. d. Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme. e. Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar. f. Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. g. Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi. h. Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk	menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			mengisi peluang kesempatan kerja. i. Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan. j. Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait. k. Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.	
8	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).		• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
9	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
10	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Pengelolaan kebisingan dan udara ambien yang dihasilkan dari kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI) sesuai	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b. Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. c. Pengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik. d. Pengolahan air limbah industri menggunakan IPAL Industri. e. Memberikan CSR pada masyarakat Kawasan Muara Angke seperti fogging nyamuk, penyuluhan kepada masyarakat dengan tema sanitasi lingkungan dan pemberian bibit tanaman.	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
11	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			b. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. c. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. d. Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Menjaga area produksi tetap higienis. b. Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase. c. Melakukan pembersihan drainase secara rutin. d. Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut: • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar	wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			tidak membuang sampah sembarangan. • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah. e. Pengelolaan air limbah sebagai berikut: • Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. • Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air. • Melakukan pengolahan air limbah industri diolah terlebih dahulu di IPAL Industri dan air limbah domestik diolah terlebih dahulu di IPAl Domestik.	

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
A.6.	**Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)**			
1	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Berasal dari aktivitas *docking* pada saat kegiatan pengelupasan cat, pelapisan dan pengecatan lambung kapal di Eks BTPI.	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Melakukan penanaman pohon pelindung di lokasi kegiatan yang berfungsi sebagai penyaring udara seperti ketapang kencana, bintaro. b. Melakukan penghijauan dengan menanam tanaman potisasi seperti lidah mertua, lidah menantu, bougenville, palem kuning dan pucuk merah. c. Bagi pekerja *docking* kapal menggunakan APD terutama masker dan sarung tangan ketika pengelupasan dan pengecatan.	• Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan cara pengukuran langsung (in-situ) di titik pemantauan yang telah ditentukan. Pengukuran kualitas udara menggunakan "*multiple impinger*" dengan metode *colorimetrik* dengan alat *spektrofometer*. • Hasil analisis laboratorium kemudian dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambien menurut Keputusan Gubernur

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
				Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.
2	Peningkatan Kebisingan	Berasal dari aktivitas *docking* pada saat kegiatan perbaikan kapal di Eks BTPI.	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** Melakukan penanaman pohon sebagai *sound barrier* seperti flamboyan, cemara kipas atau lilin, dan mahoni.	• Data kebisingan diukur dengan *Sound Level Meter*. • Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu tingkat kebisingan menurut Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
				Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.
3	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah. b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu) yang kedap air di Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel). b. Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah padat domestik.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			c. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. d. Pemberian atap di lokasi TPS. e. Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan memilah sampah yang bernilai ekonomis.	
4	Peningkatan Timbulan Limbah B3	Berasal kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Menyediakan TPS B3. b. Pemberian label peringatan limbah B3 dan sticker yang sesuai dengan jenis limbahnya, sesuai dengan Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya. c. Melakukan penimbangan dan pencatatan jenis dan jumlah limbah B3 pada neraca limbah setiap harinya.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah B3.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			d. Pengelolaan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Pengolahan dan pengangkutannya limbah B3. e. Melakukan pengurusan Izin Penyimpanan Limbah B3.	
5	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). b. Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, *moving* pada APAR 1 bulan sekali).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			c. Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/ tangga darurat, mudah dilihat, aman dari kondisi merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai). d. Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api. e. Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. f. Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api. g. Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran. h. Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran.	

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			i. Tersedianya daftar pejabat/ instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran. j. Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air. k. Terjaminnya peralatan fasilitas/ instalasi kelistrikan yang aman. l. Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.	
6	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan setempat. b. Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			c. Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia. d. Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme. e. Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar. f. Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. g. Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi. h. Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk mengisi peluang kesempatan kerja. i. Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses	

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan. j. Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait. k. Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.	
7	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Eks	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		BTPI (*Docking* dan Bengkel).		
8	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
9	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Pengelolaan kebisingan dan udara ambien yang dihasilkan dari kegiatan mesin-mesin kapal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b. Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. c. Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.	
10	Vektor Penyakit	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur) tempat-tempat perindukan nyamuk dan melakukan kegiatan pembersihan di lingkungan. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Melakukan pembersihan ares *Docking* dan Bengkel setiap hari. b. Melakukan pembersihan tempat sampah secara rutin. c. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari atau apabila wadah telah terisi ¾ dari volume wadah.	• Pemantauan data dilakukan dengan cara pengamatan secara visual. • Parameter yang dipantau adalah jumlah kehadiran hewan yang termasuk vektor penyakit.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			d. Pengendalian vektor penyakit oleh pihak ketiga yang berijin.	
11	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah. b. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. c. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan persampahan dan drainase. b. Melakukan pembersihan drainase secara rutin. c. Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut: • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang sampah sembarangan. • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah.	
A.7.	**Aktivitas Perkantoran**			
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah pilah 5 (organik, kertas, B3, plastik dan residu). b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. b. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. c. Pemberian atap di lokasi TPS. d. Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan memilah sampah yang bernilai ekonomis.	pelaporan neraca limbah padat domestik.
2	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di perkantoran.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank* dan dilakukan penyedotan tinja secara berkala.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL).

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			Pengelolaan yang akan Dilakukan: a. Pembuatan IPAL Domestik di Kawasan Muara Angke. b. Pemasangan instalasi air limbah domestik menuju IPAL Domestik. c. Air limbah yang berasal dari kegiatan aktivitas karyawan dan pengunjung masuk ke IPAL Domestik. d. Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah domestik.	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
3	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR). b. Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. c. Pengoperasian genset sesuai SOP.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR).

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			Pengelolaan yang akan dilakukan: a. Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, *moving* pada APAR 1 bulan sekali). b. Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/tangga darurat, mudah dilihat, aman dari kondisi merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai). c. Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api. d. Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. e. Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api.	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			f. Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran. g. Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran. h. Tersedianya daftar pejabat/ instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran. i. Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air. j. Terjaminnya peralatan fasilitas/ instalasi kelistrikan yang aman. k. Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.	
4	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. b. Pengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik. c. Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.	menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
5	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah. b. Penyediaan TPS Kawasan di Kawasan Muara Angke. c. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. d. Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			Pengelolaan yang akan Dilakukan: a. Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase. b. Melakukan pembersihan drainase secara rutin. c. Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut: • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang sampah sembarangan. • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah. d. Pengelolaan air limbah sebagai berikut:	

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			• Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. • Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air. • Mengolah air limbah domestik ke IPAL Domestik terlebih dahulu sebelum dibuang ke laut.	
A.8.	**SPBU**			
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah. b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			Pengelolaan yang akan dilakukan: a. Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu) yang kedap air di SPBU. b. Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. c. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. d. Pemberian atap di lokasi TPS. e. Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan memilah sampah yang bernilai ekonomis.	limbah padat domestik.
2	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di SPBU.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank* dan dilakukan penyedotan tinja secara berkala.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL).

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			Pengelolaan yang akan Dilakukan: a. Pembuatan IPAL Domestik di Kawasan Muara Angke. b. Pemasangan instalasi air limbah domestik menuju IPAL Domestik. c. Air limbah yang berasal dari kegiatan aktivitas karyawan dan pengunjung masuk ke IPAL Domestik. d. Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah domestik.	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
3	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). b. Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. c. Pengoperasian genset sesuai SOP. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR).

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, *moving* pada APAR 1 bulan sekali). b. Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/tangga darurat, mudah dilihat, aman dari kondisi merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai). c. Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api. d. Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. e. Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api. f. Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran.	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			g. Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran. h. Tersedianya daftar pejabat/instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran. i. Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air. j. Terjaminnya peralatan fasilitas/instalasi kelistrikan yang aman. k. Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.	
4	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan setempat. b. Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. c. Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia. d. Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme. e. Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar. f. Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. g. Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi. h. Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk mengisi peluang kesempatan kerja.	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			i. Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan. j. Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait. k. Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.	
5	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		berusaha dari kegiatan operasional SPBU.		
6	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan operasional SPBU.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
7	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			b. Pengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik. c. Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
8	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah. b. Penyediaan TPS Kawasan di Kawasan Muara Angke. c. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. d. Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			b. Melakukan pembersihan drainase secara rutin. c. Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut: • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang sampah sembarangan. • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah. d. Pengelolaan air limbah sebagai berikut: • Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. • Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air dan	

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			fasilitas pengolahan air limbah. • Mengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik.	
A.9.	**Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)**			
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah. b. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. c. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. d. Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu) yang kedap air di Tempat Usaha	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah padat domestik.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			(Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung). b. Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. c. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. d. Pemberian atap di lokasi TPS. e. Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan memilah sampah yang bernilai ekonomis.	
2	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan,	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank* dan dilakukan penyedotan tinja secara berkala.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL).

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		Warungan, Resto Apung).	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Pembuatan IPAL Domestik di Kawasan Muara Angke. b. Pemasangan instalasi air limbah domestik menuju IPAL Domestik. c. Air limbah yang berasal dari kegiatan aktivitas karyawan dan pengunjung masuk ke IPAL Domestik. d. Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah domestik.	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
3	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada tiap bangunan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR).

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			b. Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, *moving* pada APAR 1 bulan sekali). c. Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/tangga darurat, mudah dilihat, aman dari kondisi merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai). d. Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api. e. Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. f. Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api.	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			g. Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran. h. Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran. i. Tersedianya daftar pejabat/instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran. j. Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air. k. Terjaminnya peralatan fasilitas/instalasi kelistrikan yang aman. l. Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.	
4	Terbukanya Kesempatan Kerja dan	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
	Peluang Berusaha	(Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	melalui Kantor Kelurahan setempat. b. Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. c. Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia. d. Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme. e. Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar. f. Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. g. Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi.	wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			h. Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk mengisi peluang kesempatan kerja. i. Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan. j. Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait. k. Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.	
5	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).		• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
6	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
				• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
7	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. b. Pengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik. c. Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
8	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah. b. Penyediaan TPS Kawasan di Kawasan Muara Angke.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	c. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. d. Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase. b. Melakukan pembersihan drainase secara rutin. c. Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut: • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang sampah sembarangan.	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			• Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah. d. Pengelolaan air limbah sebagai berikut: • Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. • Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air dan fasilitas pengolahan air limbah. • Mengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik.	
B	**Operasional Sarana Penunjang**			
1	Penurunan Kualitas Air Laut	Berasal dari pengolahan kolam limbah. Hal tersebut	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** a. Pemasangan saringan pada inlet kolam limbah.	• Metode Pengambilan: pengambilan sampel air laut dilakukan dengan menggunakan

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		dapat meningkatkan parameter TSS.	b. Melakukan penyedotan kolam limbah ke laut setiap hari. c. Melakukan pengerukan sedimen kolam limbah seminggu sekali **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Memasang papan pengumuman larangan membuang sampah ke laut. b. Pembersihan saluran drainase secara berkala. c. Pembuatan IPAL Industri di Kawasan Muara Angke.	*Water Sampler* cara *composite vertikal*. Sampel disimpan dalam tempat yang tahan asam dengan volume tertentu sesuai dengan parameter. • Metode Pengujian: dilakukan di laboratorium dengan metode pengujian dan peralatan tertentu sesuai dengan karakteristik parameter yang ingin dipantau. • Data tersebut dibandingkan dengan baku mutu kualitas air laut mengacu pada Keputusan Menteri

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
				Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan.
2	Limpasan Air Permukaan	Berasal dari operasional sarana penunjang yang kurang memadai yaitu tidak mengalirnya drainase karena tersumbat oleh sampah (limbah padat) dan lumpur	**Pengelolaan yang Sudah Dilakukan:** a. Pembangunan tanggul/turap dan perbaikan saluran drainase serta peninggian jalan. b. Pembersihan saluran drainase dari sampah. c. Penyedotan saluran drainase secara berkala. d. Penyediaan area mangrove di Kawasan Muara Angke dengan luas 20.463,47 m^2. e. Menyediakan petugas yang bertugas untuk melakukan	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya sampah atau endapan lumpur di drainase). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		sehingga aliran air mudah menggenang. Selain itu, karena Kawasan Muara Angke merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 1 meter dari permukaan laut, sehingga	pengecekan drainase keliling Kawasan Muara Angke secara berkala dan membersihkan saluran drainase. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Membuat tanggul dengan tipe yang disesuaikan dengan peruntukan lahan (*land use*). b. Ketinggian tanggul disesuaikan dengan rencana NCICD. c. Melakukan penghijauan dengan menanam tanaman pucuk merah dan tanaman berbuah. d. Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.	

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
		daerah ini sering dilanda oleh banjir pasang (rob).		
3	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal dari kegiatan operasional sarana penunjang yang diakibatkan dari pemakaian toilet umum.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank* dan dilakukan penyedotan tinja secara berkala. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Pembuatan IPAL Domestik di Kawasan Muara Angke. b. Pemasangan instalasi air limbah domestik menuju IPAL Domestik. c. Air limbah yang berasal dari kegiatan aktivitas karyawan dan pengunjung masuk ke IPAL Domestik.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			d. Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah domestik.	
4	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional sarana penunjang.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** a. Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. b. Pengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik. c. Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
5	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional sarana penunjang.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** a. Penyediaan tempat sampah di semua lokasi sumber sampah. b. Penyediaan TPS Kawasan di Kawasan Muara Angke.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			c. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. d. Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** a. Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase. b. Melakukan pembersihan drainase secara rutin. c. Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut: • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang hajat dan sampah sembarangan.	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

No	Dampak	Sumber Dampak	Arahan Pengelolaan Lingkungan	Arahan Pemantauan Lingkungan
			• Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah. d. Pengelolaan air limbah sebagai berikut: • Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. • Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air dan fasilitas pengolahan air limbah. • Mengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik.	

BAB VI

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Pada sub bab Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup diuraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dasar dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimalisasi, dan/atau mengendalikan dampak negatif serta meningkatkan dampak positif. Uraian tersebut dituangkan dan/atau dicantumkan secara singkat dan jelas dalam bentuk matriks atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan. Elemen-elemen yang disampaikan adalah sebagai berikut :

a. Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya)
b. Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya)
c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup
d. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup
e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup
f. Periode pengelolaan lingkungan hidup
g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup
   - Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup
   - Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penanggung jawab kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, pengelolaan kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke diserahkan kepada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) Muara Angke selaku penanggung jawab kawasan. Setelah diperoleh Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta kepada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup akan diserahkan kepada masing-masing unit usaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan pemantauannya akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta C.q. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) Muara Angke.

Berikut adalah Matriks Pengelolaan Lingkungan Hidup dampak kegiatan Kawasan Muara Angke dapat dilihat pada **Tabel VI.1.**

Tabel VI.1 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	**Operasional Kawasan Muara Angke**						
A.1.	**Pelabuhan Perikanan Nusantara**						
1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Berasal dari mesin-mesin kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara hal tersebut akan meningkatkan parameter SO_2, NO_2, CO, TSP, O_3, HC dan Pb.	Tolok ukur berpedoman pada Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Selama kapal tambat, mesin utama dimatikan, hanya mesin bantu untuk lampu, pendingin ruangan, lemari pendingin yang diperbolehkan dihidupkan. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Melakukan penanaman pohon pelindung di lokasi kegiatan yang berfungsi sebagai penyaring udara seperti ketapang kencana, bintaro. • Melakukan penghijauan dengan menanam tanaman potisasi seperti lidah mertua, lidah menantu, bougenville, palem kuning dan pucuk merah.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama Pelabuhan Perikanan Nusantara beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	Peningkatan Kebisingan	Berasal dari mobilisasi kendaraan laut yaitu berasal dari mesin-mesin kapal di Pelabuhan	Parameter lingkungan hidup yang dipantau, yaitu tingkat kebisingan sebagai sumber dampak utama (primer) dengan tolok ukur	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Menggunakan alat dan kendaraan yang laik operasi dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama Pelabuhan Perikanan Nusantara beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Perikanan Nusantara.	sesuai Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** Melakukan penanaman pohon sebagai *sound barrier* seperti flamboyan, cemara kipas atau lilin, dan mahoni.			Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3.	Penurunan Kualitas Air Laut	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara mengakibatkan penurunan kualitas air laut yang berasal dari tambat labuh kapal yang diprakirakan akan menimbulkan kekeruhan pada air laut.	Parameter lingkungan hidup yang dipantau, yaitu penurunan kualitas air laut sebagai sumber dampak utama (primer) dengan tolok ukur sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Melakukan pengerukan sedimen kolam limbah seminggu sekali **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pengelolaan mengikuti Peraturan MARPOL 73/78, Lampiran I menyebutkan persyaratan pembuangan air limbah mencegah pencemaran air laut oleh minyak dan bahan berminyak. • Memasang papan pengumuman larangan membuang sampah ke laut. • Pembersihan saluran drainase secara berkala.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama Pelabuhan Perikanan Nusantara beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Administrasi Jakarta Utara
4.	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	**Indikator Teknis**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait penanganan timbulan limbah padat domestik adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **Indikator Peraturan**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah. • Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. • Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. • Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali bekerjasama dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu) yang kedap air di Pelabuhan Perikanan Nusantara. • Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. • Pembuatan TPS di Pelabuhan Perikanan Nusantara. • Pemberian atap di lokasi TPS. • Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan memilah sampah yang bernilai ekonomis.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama Pelabuhan Perikanan Nusantara beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Tidak ada insiden kebakaran.	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) • Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik **Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Pengaturan posisi kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara. • Setiap kapal wajib memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR). • Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, *moving* pada APAR 1 bulan sekali). • Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. • Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api. • Terjaminnya peralatan fasilitas/instalasi kelistrikan yang aman.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama Pelabuhan Perikanan Nusantara beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	Berkurangnya Keragaman Benthos dan Plankton	Berasal dari kegiatan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara	Tolak ukur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran III tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Larangan membuang sampah sembarangan di laut.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama Pelabuhan Perikanan Nusantara beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
7.	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga kerja operasional kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan setempat. • Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama Pelabuhan Perikanan Nusantara beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia. • Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme. • Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar. • Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. • Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi. • Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk mengisi peluang kesempatan kerja. • Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan. • Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait. • Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.			• Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Tolak ukur berdasarkan Ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama Pelabuhan Perikanan Nusantara beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	**Indikator Teknis** Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah "Pembayaran pajak daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku". **Indikator Peraturan** Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama Pelabuhan Perikanan Nusantara beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Provinsi DKI Jakarta c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Provinsi DKI Jakarta
10.	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Pengelolaan kebisingan dan udara ambien yang dihasilkan dari kegiatan mesin-mesin kapal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Kawasan Muara Angke	Selama Pelabuhan Perikanan Nusantara beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas :

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	• Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam area Pelabuhan Perikanan Nusantara sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. • Pengelolaan limbah padat domestik sesuai dengan SOP. • Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.			• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
11.	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah. • Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama Pelabuhan Perikanan Nusantara beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas :

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)

				• Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas.
				
				Pengelolaan yang akan Dilakukan:
				• Melakukan pembersihan drainase secara rutin.
				• Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut:
				  • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang sampah sembarangan.
				  • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah.
							• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
							• Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
							c. Instansi Penerima Laporan:
							• DLH Provinsi DKI Jakarta
							• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
							• Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

A.2.	**Tempat Pelelangan Ikan**						
1.	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Pelelangan Ikan.	**<u>Indikator Teknis</u>**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah. • Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. • Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke.	Tempat Pelelangan Ikan	Selama Tempat Pelelangan Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			penanganan timbulan limbah padat domestik adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **<u>Indikator Peraturan</u>**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.	• Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu) yang kedap air di Tempat Pelelangan Ikan. • Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. • Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. • Pemberian atap di lokasi TPS. • Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan memilah sampah yang bernilai ekonomis.			Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Berasal dari pembersihan Tempat Pelelangan Ikan.	Tidak ada air limbah industri yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Pembuatan IPAL Industri di Kawasan Muara Angke. • Pemasangan instalasi air limbah industri menuju IPAL Industri. • Air limbah industri yang berasal dari kegiatan perikanan masuk ke IPAL Industri. • Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah industri.	Tempat Pelelangan Ikan	Selama Tempat Pelelangan Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
							c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3.	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di Tempat Pelelangan Ikan.	Tidak ada air limbah domestik yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank* dan dilakukan penyedotan tinja secara berkala. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pembuatan IPAL Domestik di Kawasan Muara Angke. • Pemasangan instalasi air limbah domestik menuju IPAL Domestik. • Air limbah yang berasal dari kegiatan aktivitas karyawan dan pengunjung masuk ke IPAL Domestik. • Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah domestik.	Tempat Pelelangan Ikan	Selama Tempat Pelelangan Ikan beroperasi	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	Tidak ada insiden kebakaran	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) namun belum di semua gedung. • Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, *moving* pada APAR 1 bulan sekali). • Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/tangga darurat, mudah dilihat, aman dari kondisi merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai). • Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api. • Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. • Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api. • Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran.	Tempat Pelelangan Ikan	Selama Tempat Pelelangan Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran. • Tersedianya daftar pejabat/ instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran. • Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air. • Terjaminnya peralatan fasilitas/instalasi kelistrikan yang aman. • Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.			
5.	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Pelelangan Ikan.	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga kerja operasional kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan setempat. • Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. • Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia. • Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme.	Tempat Pelelangan Ikan	Selama Tempat Pelelangan Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar. • Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. • Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi. • Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk mengisi peluang kesempatan kerja. • Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan. • Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait. • Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.			• Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
6.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan	Tidak adanya masyarakat sekitar yang kesulitan menjual maupun membeli ikan di pelelangan ikan.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Mengutamakan/memprioritaskan kepada masyarakat sekitar lokasi studi untuk menjual ikan hasil tangkap di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).	Tempat Pelelangan Ikan	Selama Tempat Pelelangan Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas :

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.		• Menghindari terjadinya proses penerimaan ikan yang dilelangkan melalui perantara/makelar. • Mengikuti prosedur yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). • Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait. • Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat terkait dengan tempat pelelangan ikan.			• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
7.	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	**<u>Indikator Teknis</u>** Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan Operasional Tempat Pelelangan Ikan.	Tempat Pelelangan Ikan	Selama Tempat Pelelangan Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas :

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			terkait Pendapatan Asli Daerah adalah "Pembayaran pajak daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku". **<u>Indikator Peraturan</u>** Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah				• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Provinsi DKI Jakarta c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Provinsi DKI Jakarta
8.	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** • Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. • Air limbah industri diolah terlebih dahulu di IPAL Industri dan air limbah domestik diolah terlebih dahulu di IPAL Domestik.	Kawasan Muara Angke	Selama Tempat Pelelangan Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	• Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.			• Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
9.	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah. • Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. • Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. • Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*.	Tempat Pelelangan Ikan	Selama Tempat Pelelangan Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)

				Pengelolaan yang akan Dilakukan:
				• Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase.
				• Melakukan pembersihan drainase secara rutin.
				• Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut:
				  • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang sampah sembarangan.
				  • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah.
				  • Melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah secara rutin setiap hari dan akan dilakukan pengangkutan ke TPS secara rutin.
				• Pengelolaan air limbah sebagai berikut:
				  • Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*.
							• Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
							c. Instansi Penerima Laporan:
							• DLH Provinsi DKI Jakarta
							• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
							• Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air. • Air limbah domestik diolah ke IPAL Domestik dan air limbah industri diolah ke IPAL Industri.			
A.3.	**Pasar Ikan**						
1.	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal kegiatan operasional Pasar Ikan.	**<u>Indikator Teknis</u>**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait penanganan timbulan limbah padat domestik adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **<u>Indikator Peraturan</u>**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah. • Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. • Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. • Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu) yang kedap air di Pasar Ikan. • Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. • Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. • Pemberian atap di lokasi TPS. • Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan	Pasar Ikan	Selama Pasar Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			tentang Pengelolaan Sampah.	memilah sampah yang bernilai ekonomis.			
2.	Peningkatan Timbulan Limbah B3	Berasal kegiatan operasional Pasar Ikan yang diakibatkan penggunaan genset.	Tidak ada timbulan limbah B3 yang mengganggu dan mencemari lingkungan	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Menyediakan TPS B3. • Pemberian label peringatan limbah B3 dan sticker yang sesuai dengan jenis limbahnya, sesuai dengan Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya. • Melakukan penimbangan dan pencatatan jenis dan jumlah limbah B3 pada neraca limbah setiap harinya. • Pengelolaan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Pengolahan dan pengangkutannya limbah B3. • Melakukan pengurusan Izin Penyimpanan Limbah B3.	Pasar Ikan	Selama Pasar Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3.	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Berasal dari pembersihan Pasar Ikan serta air bekas rendaman ikan.	Tidak ada air limbah industri yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Pembuatan IPAL Industri di Kawasan Muara Angke. • Pemasangan instalasi air limbah industri menuju IPAL Industri.	Pasar Ikan	Selama Pasar Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas :

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Air limbah industri yang berasal dari kegiatan perikanan masuk ke IPAL Industri. • Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah industri.			• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
4.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Berasal dari aktivitas pengunjung di Pasar Ikan.	**Indikator Teknis** Indikator sebagai tolak ukur dampak terkait parameter kualitas lingkungan untuk keselamatan lalu lintas melalui tingkat pelayanan jalan sesuai dengan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2014. **Indikator Peraturan** KepMenHub No. KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Melengkapi fasilitas lalu lintas, berupa rambu lalu lintas, marka jalan, dan trotoar pejalan kaki. • Menyediakan area parkir terpisah bagi karyawan dan pengunjung. • Memisahkan sirkulasi jalur di Kawasan Muara Angke, yaitu jalur angkutan industri perikanan, pejalan kaki, mobil pribadi dan angkutan kawasan. • Melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara terkait pengelolaan lalu lintas di kawasan Muara Angke.	Pasar Ikan	Selama Pasar Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan:

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.				• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara
5.	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	Tidak ada insiden kebakaran	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). • Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. • Pengoperasian genset sesuai SOP. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, *moving* pada APAR 1 bulan sekali). • Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/tangga darurat, mudah dilihat, aman dari kondisi merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai).	Pasar Ikan	Selama Pasar Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api. • Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. • Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api. • Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran. • Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran. • Tersedianya daftar pejabat/instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran. • Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air. • Terjaminnya peralatan fasilitas/instalasi kelistrikan yang aman. • Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.			• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara
6.	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan setempat.	Pasar Ikan	Selama Pasar Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			kerja operasional kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke.	• Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. • Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia. • Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme. • Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar. • Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. • Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi. • Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk mengisi peluang kesempatan kerja. • Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan.			b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait. • Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.			• Aparat Kelurahan Pluit
7.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Pasar Ikan.	Tolak ukur berdasarkan Ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.	Pasar Ikan	Selama Pasar Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
							• Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
8.	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	**Indikator Teknis** Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah "Pembayaran pajak daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku". **Indikator Peraturan** Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan Pasar Ikan.	Pasar Ikan	Selama Pasar Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Provinsi DKI Jakarta c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Provinsi DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. • Air limbah industri diolah terlebih dahulu di IPAL Industri. • Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.	Kawasan Muara Angke	Selama Pasar Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.	Vektor Penyakit	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan Pasar Ikan.	Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus).	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur) tempat-tempat perindukan nyamuk dan melakukan kegiatan pembersihan di lingkungan. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Melakukan pembersihan area Pasar Ikan setiap hari. • Melakukan pembersihan tempat sampah secara rutin. • Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari atau apabila wadah telah terisi ¾ dari volume wadah. • Pengendalian vektor penyakit oleh pihak ketiga yang berijin.	Pasar Ikan	Selama Pasar Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
11.	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah. • Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. • Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. • Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*.	Pasar Ikan	Selama Pasar Ikan beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)

				Pengelolaan yang akan Dilakukan:
				• Menjaga area berjualan tetap higienis.
				• Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase.
				• Melakukan pembersihan drainase secara rutin.
				• Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut:
				  • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang sampah sembarangan.
				  • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah.
				• Pengelolaan air limbah sebagai berikut:
				  • Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*.
				  • Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air.
				  • Air limbah industri diolah ke IPAL Industri sebelum dibuang ke laut.
							• Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
							c. Instansi Penerima Laporan:
							• DLH Provinsi DKI Jakarta
							• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
							• Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.4.	**Pengelolaan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)**						
1.	Peningkatan Kebauan	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) dari ikan yang di jemur.	Parameter lingkungan hidup yang dipantau, yaitu tingkat kebauan sebagai sumber dampak utama (primer) dengan tolok ukur sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pembersihan saluran drainase secara berkala. • Air bekas pencucian ikan dan cumi sebelum dibuang ke laut diolah dulu ke IPAL Industri. • Pembuatan IPAL Industri di area Kawasan Muara Angke. • Melakukan potisasi yang dapat menyerap bau sekaligus sebagai penghijauan seperti lidah mertua, lidah menantu, bougenville, palem waregu dan pucuk merah.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) beroperasi	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	**Indikator Teknis**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait penanganan timbulan limbah padat domestik	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah. • Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. • Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. • Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **<u>Indikator Peraturan</u>**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu) yang kedap air di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT). • Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. • Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. • Pemberian atap di lokasi TPS. • Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan memilah sampah yang bernilai ekonomis.			Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3.	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Berasal dari air bekas pencucian, rendaman dan rebusan ikan serta air bekas pencucian wadah.	Tidak ada air limbah industri yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Pembuatan IPAL Industri di Kawasan Muara Angke. • Pemasangan instalasi air limbah industri menuju IPAL Industri. • Air limbah industri yang berasal dari kegiatan perikanan masuk ke IPAL Industri. • Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah industri.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
							• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
4.	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal aktivitas karyawan dan pengunjung di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Tidak ada air limbah domestik yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank* dan dilakukan penyedotan tinja secara berkala. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pembuatan IPAL Domestik di Kawasan Muara Angke. • Pemasangan instalasi air limbah domestik menuju IPAL Domestik. • Air limbah yang berasal dari kegiatan aktivitas karyawan dan pengunjung masuk ke IPAL Domestik. • Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah domestik.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
5.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan	**<u>Indikator Teknis</u>** Indikator sebagai tolak ukur dampak terkait parameter kualitas lingkungan untuk keselamatan	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Melengkapi fasilitas lalu lintas, berupa rambu lalu lintas, marka jalan, dan trotoar pejalan kaki. • Menyediakan area parkir terpisah bagi karyawan dan pengunjung.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas :

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tradisional (PHPT).	lalu lintas melalui tingkat pelayanan jalan sesuai dengan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2014. **Indikator Peraturan** KepMenHub No. KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.	• Memisahkan sirkulasi jalur di Kawasan Muara Angke, yaitu jalur angkutan industri perikanan, pejalan kaki, mobil pribadi dan angkutan kawasan. • Melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara terkait pengelolaan lalu lintas di kawasan Muara Angke.		(PHPT) beroperasi.	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara
6.	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Tidak ada insiden kebakaran	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). • Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				pelindung masih tersegel, *moving* pada APAR 1 bulan sekali). • Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/tangga darurat, mudah dilihat, aman dari kondisi merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai). • Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api. • Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. • Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api. • Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran. • Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran. • Tersedianya daftar pejabat/instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran. • Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air.			• Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Terjaminnya peralatan fasilitas/instalasi kelistrikan yang aman. • Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.			
7.	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga kerja operasional kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan setempat. • Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. • Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia. • Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme. • Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar. • Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. • Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk mengisi peluang kesempatan kerja. • Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan. • Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait. • Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.			Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
8.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Tolak ukur berdasarkan Ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
							c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
9.	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	**Indikator Teknis** Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah "Pembayaran pajak daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku". **Indikator Peraturan**	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Provinsi DKI Jakarta c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah				• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Provinsi DKI Jakarta
10.	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. • Air limbah industri diolah terlebih dahulu di IPAL Industri sedangkan air limbah domestik diolah ke IPAL Domestik. • Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.	Kawasan Muara Angke	Selama Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
11.	Vektor Penyakit	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus).	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur) tempat-tempat perindukan nyamuk dan melakukan kegiatan pembersihan di lingkungan. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Melakukan pembersihan area produksi secara rutin. • Melakukan pembasmian lalat dengan menggunakan insektisida alami, seperti serai wangi, geranium, bawang putih, cengkeh, dan lain-lain. • Pengendalian vektor penyakit oleh pihak ketiga yang berijin. • Pengangkutan limbah padat domestik dilakukan setiap hari.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
							• Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
12.	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** e. Penyediaan tempat sampah. f. Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. g. Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. h. Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Menjaga area produksi tetap higienis. • Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase. • Melakukan pembersihan drainase secara rutin. • Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut: • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang sampah sembarangan.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)

				• Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah.
				• Pengelolaan air limbah sebagai berikut:
				  • Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*.
				  • Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air.
				  • Air limbah industri diolah ke IPAL Industri sebelum dibuang ke laut.
							Administrasi Jakarta Utara

A.5.	**Unit Pengolahan Ikan (UPI)**						

1.	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI).	**<u>Indikator Teknis</u>**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait penanganan timbulan limbah padat domestik adalah: "pengendalian timbulan sampah,	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:**
				• Penyediaan tempat sampah.
				• Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas.
				• Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke.
				• Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali.
				
				Pengelolaan yang akan dilakukan:
				• Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu)
					Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama Unit Pengolahan Ikan (UPI) beroperasi.	a. Pelaksana :
							  • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke
							b. Pengawas :
							  • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
							c. Instansi Penerima Laporan:

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **<u>Indikator Peraturan</u>**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.	yang kedap air di Unit Pengolahan Ikan (UPI). • Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. • Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. • Pemberian atap di lokasi TPS. • Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan memilah sampah yang bernilai ekonomis.			• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	Peningkatan Timbulan Limbah B3	Berasal kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang diakibatkan penggunaan genset.	Tidak ada timbulan limbah B3 yang mengganggu dan mencemari lingkungan	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Menyediakan TPS B3. • Pemberian label peringatan limbah B3 dan sticker yang sesuai dengan jenis limbahnya, sesuai dengan Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya. • Melakukan penimbangan dan pencatatan jenis dan jumlah limbah B3 pada neraca limbah setiap harinya. • Pengelolaan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama Unit Pengolahan Ikan (UPI) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan Kehutanan terkait Pengolahan dan pengangkutannya limbah B3. • Melakukan pengurusan Izin Penyimpanan Limbah B3.			Administrasi Jakarta Utara
3.	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Berasal dari air bekas pencucian ikan dan wadahnya.	Tidak ada air limbah industri yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Pembuatan IPAL Industri di Kawasan Muara Angke. • Pemasangan instalasi air limbah industri menuju IPAL Industri. • Air limbah industri yang berasal dari kegiatan perikanan masuk ke IPAL Industri. • Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah industri.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama Unit Pengolahan Ikan (UPI) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
4.	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal aktivitas karyawan dan pengunjung di Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Tidak ada air limbah domestik yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank* dan dilakukan penyedotan tinja secara berkala.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama Unit Pengolahan Ikan (UPI) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas :

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pengelolaan yang akan Dilakukan: • Pembuatan IPAL Domestik di Kawasan Muara Angke. • Pemasangan instalasi air limbah domestik menuju IPAL Domestik. • Air limbah yang berasal dari kegiatan aktivitas karyawan dan pengunjung masuk ke IPAL Domestik. • Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah domestik.			• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
5.	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Berasal dari aktivitas pengunjung di Unit Pengolahan Ikan (UPI).	**<u>Indikator Teknis</u>** Indikator sebagai tolak ukur dampak terkait parameter kualitas lingkungan untuk keselamatan lalu lintas melalui tingkat pelayanan jalan sesuai dengan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2014. **<u>Indikator Peraturan</u>** KepMenHub No. KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Melengkapi fasilitas lalu lintas, berupa rambu lalu lintas, marka jalan, dan trotoar pejalan kaki. • Menyediakan area parkir terpisah bagi karyawan dan pengunjung. • Memisahkan sirkulasi jalur di Kawasan Muara Angke, yaitu jalur angkutan industri perikanan, pejalan kaki, mobil pribadi dan angkutan kawasan. • Melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara terkait pengelolaan lalu lintas di kawasan Muara Angke.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama Unit Pengolahan Ikan (UPI) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan:

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.				• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara
6.	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Tidak ada insiden kebakaran	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). • Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. • Pengoperasian genset sesuai SOP. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, moving pada APAR 1 bulan sekali). • Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/tangga darurat, mudah dilihat, aman dari kondisi merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai).	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama Unit Pengolahan Ikan (UPI) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api. • Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. • Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api. • Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran. • Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran. • Tersedianya daftar pejabat/instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran. • Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air. • Terjaminnya peralatan fasilitas/instalasi kelistrikan yang aman. • Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.			• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara
7.	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Unit	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan setempat.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama Unit Pengolahan Ikan (UPI) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengolahan Ikan (UPI).	kerja operasional kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke.	• Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. • Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia. • Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme. • Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar. • Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. • Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi. • Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk mengisi peluang kesempatan kerja. • Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan. • Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait.			b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.			• Aparat Kelurahan Pluit
8.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Tolak ukur berdasarkan Ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama Unit Pengolahan Ikan (UPI) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
							• Aparat Kelurahan Pluit
9.	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI).	**Indikator Teknis** Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah "Pembayaran pajak daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku". **Indikator Peraturan** Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI).	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama Unit Pengolahan Ikan (UPI) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Provinsi DKI Jakarta c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Provinsi DKI Jakarta
10.	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pengelolaan kebisingan dan udara ambien yang dihasilkan dari kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI) sesuai	Kawasan Muara Angke	Selama Unit Pengolahan Ikan (UPI) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	ketentuan perundang-undangan yang berlaku. • Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. • Pengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik. • Pengolahan air limbah industri menggunakan IPAL Industri. • Memberikan CSR pada masyarakat Kawasan Muara Angke seperti fogging nyamuk, penyuluhan kepada masyarakat dengan tema sanitasi lingkungan dan pemberian bibit tanaman.			b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
11.	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah. • Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama Unit Pengolahan Ikan (UPI) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas :

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)

				• Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas.
				• Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan septic tan*k*.
				
				Pengelolaan yang akan Dilakukan:
				• Menjaga area produksi tetap higienis.
				• Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase.
				• Melakukan pembersihan drainase secara rutin.
				• Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut:
				  • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang sampah sembarangan.
				  • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah.
							• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
							• Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
							c. Instansi Penerima Laporan:
							• DLH Provinsi DKI Jakarta
							• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
							• Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)

				• Pengelolaan air limbah sebagai berikut:
				  • Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*.
				  • Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air.
				  • Melakukan pengolahan air limbah industri diolah terlebih dahulu di IPAL Industri dan air limbah domestik diolah terlebih dahulu di IPAl Domestik.			

A.6.	**Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)**						

1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Berasal dari aktivitas *docking* pada saat kegiatan pengelupasan cat, pelapisan dan pengecatan lambung kapal di Eks BTPI.	Tolok ukur berpedoman pada Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:**
				• Melakukan penanaman pohon pelindung di lokasi kegiatan yang berfungsi sebagai penyaring udara seperti ketapang kencana, bintaro.
				• Melakukan penghijauan dengan menanam tanaman potisasi seperti lidah mertua, lidah menantu, bougenville, palem kuning dan pucuk merah.
				• Bagi pekerja docking kapal menggunakan APD terutama masker dan sarung tangan ketika pengelupasan dan pengecatan.
					Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) beroperasi.	a. Pelaksana :
							  • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke
							b. Pengawas :
							  • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
							c. Instansi Penerima Laporan:
							  • DLH Provinsi DKI Jakarta
							  • Suku Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	Peningkatan Kebisingan	Berasal dari aktivitas *docking* pada saat kegiatan perbaikan kapal di Eks BTPI.	Parameter lingkungan hidup yang dipantau, yaitu tingkat kebisingan sebagai sumber dampak utama (primer) dengan tolok ukur sesuai Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** Melakukan penanaman pohon sebagai *sound barrier* seperti flamboyan, cemara kipas atau lilin, dan mahoni.	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3.	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	**Indikator Teknis**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah. • Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. • Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke.	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			penanganan timbulan limbah padat domestik adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **Indikator Peraturan**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.	• Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu) yang kedap air di Eks BTPI (Docking dan Bengkel). • Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. • Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. • Pemberian atap di lokasi TPS. • Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dengan memilah sampah yang bernilai ekonomis.			Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
4.	Peningkatan Timbulan Limbah B3	Berasal kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Tidak ada timbulan limbah B3 yang mengganggu dan mencemari lingkungan	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Menyediakan TPS B3. • Pemberian label peringatan limbah B3 dan sticker yang sesuai dengan jenis limbahnya, sesuai dengan Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya.	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel), beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Melakukan penimbangan dan pencatatan jenis dan jumlah limbah B3 pada neraca limbah setiap harinya. • Pengelolaan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Pengolahan dan pengangkutannya limbah B3. • Melakukan pengurusan Izin Penyimpanan Limbah B3.			c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
5.	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Tidak ada insiden kebakaran	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). • Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, moving pada APAR 1 bulan sekali). • Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/tangga darurat, mudah dilihat, aman dari kondisi merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai).	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan:

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api. • Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. • Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api. • Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran. • Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran. • Tersedianya daftar pejabat/instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran. • Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air. • Terjaminnya peralatan fasilitas/instalasi kelistrikan yang aman. • Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.			• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara
6.	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan setempat.	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			kerja operasional kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke.	• Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. • Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia. • Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme. • Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar. • Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. • Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi. • Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk mengisi peluang kesempatan kerja. • Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan. • Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait.			b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.			• Aparat Kelurahan Pluit
7.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Tolak ukur berdasarkan Ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
							• Aparat Kelurahan Pluit
8.	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	**<u>Indikator Teknis</u>** Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah "Pembayaran pajak daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku". **<u>Indikator Peraturan</u>** Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Provinsi DKI Jakarta c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Provinsi DKI Jakarta
9.	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif	**Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pengelolaan kebisingan dan udara ambien yang dihasilkan dari kegiatan mesin-mesin kapal sesuai	Kawasan Muara Angke	Selama Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	ketentuan perundang-undangan yang berlaku. • Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. • Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.			b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
10.	Vektor Penyakit	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang	Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus).	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur) tempat-tempat perindukan nyamuk	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas :

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		diakibatkan dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).		dan melakukan kegiatan pembersihan di lingkungan. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Melakukan pembersihan ares Docking dan Bengkel setiap hari. • Melakukan pembersihan tempat sampah secara rutin. • Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari atau apabila wadah telah terisi ¾ dari volume wadah. • Pengendalian vektor penyakit oleh pihak ketiga yang berijin.			• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
11.	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah. • Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. • Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan persampahan dan drainase. • Melakukan pembersihan drainase secara rutin. • Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut:	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan:

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang sampah sembarangan. • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah.			• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
A.7.	**Aktivitas Perkantoran**						
1.	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	**<u>Indikator Teknis</u>**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait penanganan timbulan limbah padat domestik adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan".	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah pilah 5 (organik, kertas, B3, plastik dan residu). • Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. • Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. • Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. • Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. • Pemberian atap di lokasi TPS.	Perkantoran	Selama Perkantoran beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Indikator Peraturan: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.	• Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan memilah sampah yang bernilai ekonomis.			Administrasi Jakarta Utara
2.	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di perkantoran.	Tidak ada air limbah domestik yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank* dan dilakukan penyedotan tinja secara berkala. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pembuatan IPAL Domestik di Kawasan Muara Angke. • Pemasangan instalasi air limbah domestik menuju IPAL Domestik. • Air limbah yang berasal dari kegiatan aktivitas karyawan dan pengunjung masuk ke IPAL Domestik. • Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah domestik.	Perkantoran	Selama Perkantoran beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3.	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	Tidak ada insiden kebakaran	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	Perkantoran	Selama Perkantoran beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q.

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. • Pengoperasian genset sesuai SOP. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, moving pada APAR 1 bulan sekali). • Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/tangga darurat, mudah dilihat, aman dari kondisi merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai). • Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api. • Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. • Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api. • Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran. • Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran.			UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Tersedianya daftar pejabat/instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran. • Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air. • Terjaminnya peralatan fasilitas/instalasi kelistrikan yang aman. • Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.			
4.	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. • Pengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik. • Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.	Kawasan Muara Angke	Selama kegiatan Perkantoran beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan:

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
							• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
5.	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah. • Penyediaan TPS Kawasan di Kawasan Muara Angke. • Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. • Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan septic tank. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase. • Melakukan pembersihan drainase secara rutin. • Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut:	Perkantoran	Selama kegiatan Perkantoran beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)

				• Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang sampah sembarangan.
				• Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah.
				• Pengelolaan air limbah sebagai berikut:
				  • Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*.
				  • Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air.
				  • Mengolah air limbah domestik ke IPAL Domestik terlebih dahulu sebelum dibuang ke laut.
							• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
							• Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

A.8.	**SPBU**						
1.	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	**<u>Indikator Teknis</u>**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah. • Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. • Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke.	SPBU	Selama SPBU beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			penanganan timbulan limbah padat domestik adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **<u>Indikator Peraturan</u>**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.	• Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu) yang kedap air di SPBU. • Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. • Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. • Pemberian atap di lokasi TPS. • Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dengan memilah sampah yang bernilai ekonomis.			Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di SPBU.	Tidak ada air limbah domestik yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank* dan dilakukan penyedotan tinja secara berkala. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pembuatan IPAL Domestik di Kawasan Muara Angke. • Pemasangan instalasi air limbah domestik menuju IPAL Domestik.	SPBU	Selama SPBU beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan:

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Air limbah yang berasal dari kegiatan aktivitas karyawan dan pengunjung masuk ke IPAL Domestik. • Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah domestik.			• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3.	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	Tidak ada insiden kebakaran	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). • Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik. • Pengoperasian genset sesuai SOP. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, moving pada APAR 1 bulan sekali). • Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/tangga darurat, mudah dilihat, aman dari kondisi merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai). • Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api.	SPBU	Selama SPBU beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. • Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api. • Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran. • Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran. • Tersedianya daftar pejabat/instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran. • Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air. • Terjaminnya peralatan fasilitas/instalasi kelistrikan yang aman. • Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.			Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara
4.	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga kerja operasional kegiatan perikanan	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan setempat. • Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sesuai dengan	SPBU	Selama SPBU beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			di Kawasan Muara Angke.	peraturan perundangan yang berlaku. • Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia. • Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme. • Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar. • Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. • Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi. • Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk mengisi peluang kesempatan kerja. • Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan. • Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait. • Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.			Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan operasional SPBU.	Tolak ukur berdasarkan Ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.	SPBU	Selama SPBU beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	**Indikator Teknis** Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah "Pembayaran pajak daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku". **Indikator Peraturan** Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan operasional SPBU.	SPBU	Selama SPBU beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Provinsi DKI Jakarta c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Provinsi DKI Jakarta
7.	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit.	SPBU	Selama SPBU beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas :

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	• Pengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik. • Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.			• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
8.	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah. • Penyediaan TPS Kawasan di Kawasan Muara Angke.	SPBU	Selama SPBU beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas :

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)

				• Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas.
				• Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan septic tank.
				
				Pengelolaan yang akan Dilakukan:
				• Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase.
				• Melakukan pembersihan drainase secara rutin.
				• Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut:
				  • Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang sampah sembarangan.
				  • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah.
				• Pengelolaan air limbah sebagai berikut:
				  • Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*.
							• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
							• Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
							c. Instansi Penerima Laporan:
							• DLH Provinsi DKI Jakarta
							• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
							• Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air dan fasilitas pengolahan air limbah. • Mengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik.			
A.9.	**Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung)**						
1.	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	**Indikator Teknis**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait penanganan timbulan limbah padat domestik adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **Indikator Peraturan**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah. • Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. • Penyediaan TPS di Kawasan Muara Angke. • Pengangkutan dari TPS ke TPA sehari 3 kali. **Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah pilah 3 (organik, daur ulang dan residu) yang kedap air di Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung). • Melakukan penimbangan dan pencatatan volume sampah setiap hari. • Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari ke TPS oleh petugas. • Pemberian atap di lokasi TPS.	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung)	Selama Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.	• Melakukan pengurangan dan pemilahan dengan prinsip 3R (reduce, r*euse, recycle*) dengan memilah sampah yang bernilai ekonomis.			
2.	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	Tidak ada air limbah domestik yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank* dan dilakukan penyedotan tinja secara berkala. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pembuatan IPAL Domestik di Kawasan Muara Angke. • Pemasangan instalasi air limbah domestik menuju IPAL Domestik. • Air limbah yang berasal dari kegiatan aktivitas karyawan dan pengunjung masuk ke IPAL Domestik. • Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah domestik.	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung)	Selama Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3.	Bahaya Kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios	Tidak ada insiden kebakaran	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan SOP pemasangan listrik.	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung)	Selama Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung,	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas :

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Perbekalan, Warungan, Resto Apung).		**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada tiap bangunan. • Melakukan pemeliharaan terhadap APAR (pemeriksaan terhadap karat/cacat, tanggal kadaluarsa, memastikan pelindung masih tersegel, moving pada APAR 1 bulan sekali). • Penempatan APAR secara tepat (dapat cepat diambil, dekat pintu/tangga darurat, mudah dilihat, aman dari kondisi merusak, merata, 125 cm dari puncak APAR ke lantai). • Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api. • Menghubungi Suku Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api. • Menjauhkan barang-barang mudah terbakar dari api. • Menyediakan tenaga terampil dan terlatih dalam pengoperasian alat pemadam kebakaran. • Tersedianya alat komunikasi di tempat potensial terjadi kebakaran.		Resto Apung) beroperasi.	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Tersedianya daftar pejabat/instansi yang harus dihubungi apabila terjadi kebakaran. • Tersedianya daftar dan denah penempatan alat pemadam kebakaran dan sumber air. • Terjaminnya peralatan fasilitas/instalasi kelistrikan yang aman. • Larangan merokok pada area yang mudah terbakar.			
4.	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga kerja operasional kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan setempat. • Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. • Memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja sesuai dengan formasi yang tersedia. • Melakukan penyaringan tenaga kerja secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme. • Menghindari terjadinya proses penerimaan tenaga kerja melalui perantara atau makelar.	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung)	Selama Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Membuat kontrak kerja antara karyawan dan pemilik usaha dengan materai. • Memberikan ruang bagi peluang usaha di sektor informal terutama masyarakat sekitar lokasi studi. • Bekerjasama dengan Aparat Kelurahan setempat untuk mengisi peluang kesempatan kerja. • Kerjasama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara agar proses penerimaan tenaga kerja sesuai dengan peraturan. • Menertibkan PKL di sekitar lokasi studi yang berkoordinasi dengan instansi terkait. • Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.			• Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
5.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang	Tolak ukur berdasarkan Ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** Memberikan upah minimal Upah Minimum Regional (UMR) dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung)	Selama Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		berusaha dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	Minimum Provinsi Tahun 2019				• Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
6.	Peningkatan PAD	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	**Indikator Teknis** Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah "Pembayaran pajak daerah tepat waktu dan sesuai dengan	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penarikan retribusi dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung)	Selama Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			peraturan yang berlaku". **<u>Indikator Peraturan</u>** Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah				• BPKD Provinsi DKI Jakarta c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Provinsi DKI Jakarta
7.	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. • Pengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik. • Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung)	Selama Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan:

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
							• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
8.	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah. • Penyediaan TPS Kawasan di Kawasan Muara Angke. • Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. • Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase. • Melakukan pembersihan drainase secara rutin. • Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut:	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung)	Selama Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios, Warung, Resto Apung) beroperasi.	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang sampah sembarangan. • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah. • Pengelolaan air limbah sebagai berikut: • Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. • Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air dan fasilitas pengolahan air limbah. • Mengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik.			• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
B.	**Operasional Sarana Penunjang**						
1.	Penurunan Kualitas Air Laut	Berasal dari pengolahan kolam limbah. Hal tersebut dapat meningkatkan parameter TSS.	Parameter lingkungan hidup yang dipantau, yaitu penurunan kualitas air laut sebagai sumber dampak utama (primer)	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** • Pemasangan saringan pada inlet kolam limbah. • Melakukan penyedotan kolam limbah ke laut setiap hari.	Kolam limbah	Selama Operasional sarana penunjang beroperasi	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas :

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dengan tolok ukur sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan.	• Melakukan pengerukan sedimen kolam limbah seminggu sekali **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Memasang papan pengumuman larangan membuang sampah ke laut. • Pembersihan saluran drainase secara berkala. • Pembuatan IPAL Industri di Kawasan Muara Angke.			• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	Limpasan Air Permukaan	Berasal dari operasional sarana penunjang yang kurang memadai yaitu tidak mengalirnya drainase karena tersumbat oleh sampah (limbah padat) dan lumpur sehingga aliran air mudah menggenang. Selain itu,	Tidak terjadinya genangan air di lingkungan	**Pendekatan yang Sudah Dilakukan:** • Pembangunan tanggul/turap dan perbaikan saluran drainase serta peninggian jalan. • Pembersihan saluran drainase dari sampah. • Penyedotan saluran drainase secara berkala. • Penyediaan area mangrove di Kawasan Muara Angke dengan luas 20.463,47 m2. • Menyediakan petugas yang bertugas untuk melakukan pengecekan drainase keliling Kawasan Muara Angke secara berkala dan membersihkan saluran drainase.	Saluran drainase Kawasan Muara Angke dan Mangrove	Setiap hari selama kegiatan Kawasan Muara Angke beroperasi	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		karena Kawasan Muara Angke merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 1 meter dari permukaan laut, sehingga daerah ini sering dilanda oleh banjir pasang (rob).		**Pendekatan yang akan Dilakukan:** • Membuat tanggul dengan tipe yang disesuaikan dengan peruntukan lahan (land use). • Ketinggian tanggul disesuaikan dengan rencana NCICD. • Melakukan penghijauan dengan menanam tanaman pucuk merah dan tanaman berbuah. • Membuka layanan pengaduan untuk penampung aspirasi dan harapan masyarakat.			Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3.	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Berasal dari kegiatan operasional sarana penunjang yang diakibatkan dari pemakaian toilet umum.	Tidak ada air limbah domestik yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	**Pengelolaan yang sudah Dilakukan:** Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank* dan dilakukan penyedotan tinja secara berkala. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pembuatan IPAL Domestik di Kawasan Muara Angke.	Toilet Umum kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke	Selama Operasional sarana penunjang beroperasi	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Pemasangan instalasi air limbah domestik menuju IPAL Domestik. • Air limbah yang berasal dari kegiatan aktivitas karyawan dan pengunjung masuk ke IPAL Domestik. • Bekerjasama dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengolahan air limbah domestik.			Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
4.	Persepsi dan Sikap Masyarakat	Berasal dari kegiatan operasional sarana penunjang.	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	**Pengelolaan yang akan dilakukan:** • Pengelolaan limbah padat domestik agar tidak terjadi penumpukan yang terlalu lama di dalam TPS sehingga sampah tidak menimbulkan bau dan memunculkan vektor penyakit. • Pengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik. • Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat.	Kawasan Muara Angke	Selama Operasional sarana penunjang beroperasi	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
							• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
5.	Sanitasi Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional sarana penunjang.	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	**Pengelolaan yang sudah dilakukan:** • Penyediaan tempat sampah di semua lokasi sumber sampah. • Penyediaan TPS Kawasan di Kawasan Muara Angke. • Pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPS dilakukan setiap hari oleh petugas. • Penyediaan kamar mandi/WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. **Pengelolaan yang akan Dilakukan:** • Pembuatan sanitasi yang layak mulai pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase. • Melakukan pembersihan drainase secara rutin. • Melakukan pengelolaan limbah padat domestik sebagai berikut:	Tempat-Tempat Umum kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke	Selama Operasional sarana penunjang beroperasi	a. Pelaksana : • DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke b. Pengawas : • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara c. Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				• Menjaga kebersihan dan menerapkan peraturan tegas bagi pelaku kegiatan agar tidak membuang hajat dan sampah sembarangan. • Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" dan "BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA" di lokasi-lokasi sumber sampah. • Pengelolaan air limbah sebagai berikut: • Pembuatan WC yang dilengkapi dengan *septic tank*. • Menjaga kebersihan toilet termasuk pasokan air dan fasilitas pengolahan air limbah. • Mengolah air limbah domestik menggunakan IPAL Domestik.			Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

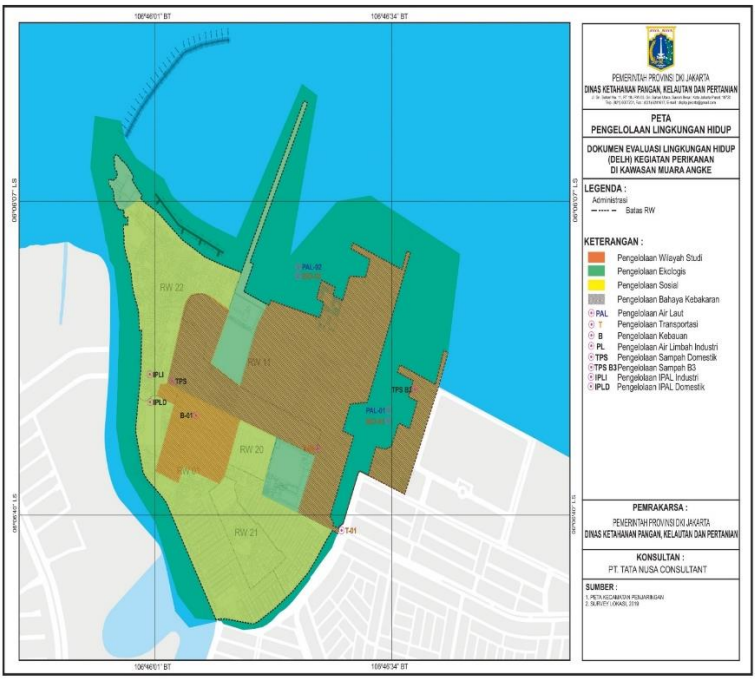

Gambar VI.1 Peta Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Pada rencana kegiatan di Kawasan Muara Angke dalam pembahasan bab sebelumnya telah diuraikan mengenai identifikasi dampak dan sumber dampak serta evaluasi dampak penting, sehingga teridentifikasi seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap komponen-komponen fisika-kimia, sosial ekonomi dan budaya, serta aspek transportasi.

Untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, maka dalam pelaksanaan kegiatan operasional di Kawasan Muara Angke akan dikelola komponen-komponen kegiatan yang dapat menimbulkan dampak, sedangkan untuk mengetahui seberapa jauh kebersihan/efektifitas pengelolaan tersebut, maka akan dilaksanakan pemantauan lingkungan terhadap komponen-komponen lingkungan yang terdampak. Dengan dilakukannya pemantauan lingkungan, maka apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera diantisipasi dan dilakukan usaha-usaha perbaikan

selanjutnya. Sebaliknya apabila ada gejala-gejala yang bersifat positif akan segera diketahui dan dapat dilakukan usaha-usaha peningkatan.

Untuk lebih memudahkan dalam melakukan pemantauan lingkungan, maka bahasan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) ini diperinci berdasarkan pembahasan sebagai berikut:

- ✓ Dampak yang Dipantau
  - Jenis Dampak yang Terjadi
  - Komponen Lingkungan yang Terkena Dampak
  - Indikator/Parameter yang Dipantau dan Sumber Dampak
- ✓ Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup
  - Metode Pengumpulan dan Analisis Data
  - Lokasi Pemantauan
  - Waktu dan Frekuensi Pemantauan
- ✓ Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
  - Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup
  - Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup
  - Penerima Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup

Berikut adalah tabel yang menyajikan rencana pemantauan lingkungan yang akan dilakukan terhadap komponen lingkungan fisik-kimia, transportasi dan sosekbud, baik pada tahap operasional.

Tabel VI.2 Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	**Operasional Kegiatan Perikanan**								
A.1.	**Pelabuhan Perikanan Nusantara**								
1	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Tolok ukur berpedoman pada Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.	Berasal dari mesin-mesin kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara hal tersebut akan meningkatkan parameter SO_2, NO_2, CO, TSP, O_3, HC dan Pb.	• Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan cara pengukuran langsung (in-situ) di titik pemantauan yang telah ditentukan. Pengukuran kualitas udara menggunakan "*multiple impinger*" dengan metode *colorimetrik* dengan alat *spektrofometer*. • Hasil analisis laboratorium kemudian dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambien menurut Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Propinsi DKI Jakarta.					
2	Peningkatan Kebisingan	Parameter lingkungan hidup yang dipantau, yaitu tingkat kebisingan sebagai sumber dampak utama (primer) dengan tolok ukur sesuai Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.	Berasal dari mobilisasi kendaraan laut yaitu berasal dari mesin-mesin kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara.	• Data kebisingan diukur dengan *Sound Level Meter*. • Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu tingkat kebisingan menurut Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3	Penurunan Kualitas Air Laut	Parameter lingkungan hidup yang dipantau, yaitu penurunan kualitas air laut sebagai sumber dampak utama (primer) dengan tolok ukur sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara mengakibatkan penurunan kualitas air laut yang berasal dari tambat labuh kapal	• Metode Pengambilan: pengambilan sampel air laut dilakukan dengan menggunakan *Water Sampler* cara *composite vertikal*. Sampel disimpan dalam tempat yang tahan asam dengan	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan.	yang diprakirakan akan menimbulkan kekeruhan pada air laut.	volume tertentu sesuai dengan parameter. • Metode Pengujian: dilakukan di laboratorium dengan metode pengujian dan peralatan tertentu sesuai dengan karakteristik parameter yang ingin dipantau. • Data tersebut dibandingkan dengan baku mutu kualitas air laut mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan.					
4	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	**Indikator Teknis**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		terkait penanganan timbulan limbah padat domestik adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **Indikator Peraturan**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.		deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah padat domestik.					
5	Bahaya Kebakaran	Tidak ada insiden kebakaran.	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Utara
6	Berkurangnya Keanekaragaman	Tolak ukur berdasarkan Keputusan	Berasal dari kegiatan tambat labuh kapal di	Pemantauan biota air dilakukan dengan	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama tahap operasional dengan	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q.	Suku Dinas Lingkungan Hidup	• DLH Provinsi DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Benthos dan Plankton	Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran III tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	pengambilan sampel plankton dengan menggunakan Plankton Net #25. Sampling Benthos menggunakan Ekmann Grab. Analisis data menggunakan Indeks keanekaragaman plankton dan benthos menurut *Shannon & Wiener* dan *indeks dominansi* menurut *Simpson* .		frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	UPPP Muara Angke	Kota Administrasi Jakarta Utara	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
7	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga kerja operasional kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke.	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
8	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Tolak ukur berdasarkan Ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019.	mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.		bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali		• Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
9	Peningkatan PAD	**Indikator Teknis** Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah "Pembayaran pajak daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku". **Indikator Peraturan** Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Prov. DKI Jakarta	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Prov. DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah							
10	Persepsi dan Sikap Masyarakat	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Kawasan Muara Angke	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
11	Sanitasi Lingkungan	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	Berasal dari kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				deskriptif kualitatif.					Administrasi Jakarta Utara
A.2.	**Tempat Pelelangan Ikan**								
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	**Indikator Teknis**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait penanganan timbulan limbah padat domestik adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **Indikator Peraturan**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Pelelangan Ikan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah padat domestik.	Tempat Pelelangan Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
2	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Tidak ada air limbah industri yang dibuang ke laut tanpa proses	Berasal dari pembersihan Tempat	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada	Tempat Pelelangan Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		pengolahan terlebih dahulu.	Pelelangan Ikan.	tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.		pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	UPPP Muara Angke		Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Tidak ada air limbah domestik yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di Tempat Pelelangan Ikan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Tempat Pelelangan Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
4	Bahaya Kebakaran	Tidak ada insiden kebakaran	Berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Tempat Pelelangan Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga kerja operasional kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke.	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Pelelangan Ikan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Tempat Pelelangan Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
6	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Tidak adanya masyarakat sekitar yang kesulitan menjual maupun membeli ikan di pelelangan ikan.	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Tempat Pelelangan Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
7	Peningkatan PAD	**Indikator Teknis** Indikator sebagai	Berasal dari kegiatan Tempat	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara	Tempat Pelelangan Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q.	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah "Pembayaran pajak daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku". **Indikator Peraturan** Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	Pelelangan Ikan.	menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.		pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	UPPP Muara Angke	Administrasi Jakarta Utara • BPKD Prov. DKI Jakarta	Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Prov. DKI Jakarta
8	Persepsi dan Sikap Masyarakat	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi	Berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara	Kawasan Muara Angke	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.		deskriptif kualitatif.				• Aparat Kelurahan Pluit	• Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
9	Sanitasi Lingkungan	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	Berasal dari kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Tempat Pelelangan Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
A.3.	**Pasar Ikan**								
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	**<u>Indikator Teknis</u>**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait penanganan timbulan limbah padat domestik	Berasal kegiatan operasional Pasar Ikan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Pasar Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **Indikator Peraturan**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.		• Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah padat domestik.					
2	Peningkatan Timbulan Limbah B3	Tidak ada timbulan limbah B3 yang mengganggu dan mencemari lingkungan	Berasal kegiatan operasional Pasar Ikan yang diakibatkan penggunaan genset.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah B3.	Pasar Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Tidak ada air limbah industri yang dibuang ke laut tanpa proses	Berasal dari pembersihan Pasar Ikan serta	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada	Pasar Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi	UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		pengolahan terlebih dahulu.	air bekas rendaman ikan.	tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.		pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali			Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
4	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	**Indikator Teknis** Indikator sebagai tolak ukur dampak terkait parameter kualitas lingkungan untuk keselamatan lalu lintas melalui tingkat pelayanan jalan sesuai dengan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2014. **Indikator Peraturan** KepMenHub No. KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.	Berasal dari aktivitas pengunjung di Pasar Ikan.	• Pengumpulan data lalu lintas dilakukan dengan survei lalu lintas. • Data lalu lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar (PKJI, 2014).	Pasar Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Bahaya Kebakaran	Tidak ada insiden kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Pasar Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara
6	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga kerja operasional kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke.	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Pasar Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
7	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Tolak ukur berdasarkan Ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner.	Pasar Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019	kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Pasar Ikan.	• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.		dan pelaporan 6 bulan sekali		• Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
8	Peningkatan PAD	**Indikator Teknis** Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah "Pembayaran pajak daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku". **Indikator Peraturan** Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Pasar Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Prov. DKI Jakarta	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Prov. DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.							
9	Persepsi dan Sikap Masyarakat	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Kawasan Muara Angke	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
10	Vektor Penyakit	Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus).	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan Pasar Ikan.	• Pemantauan data dilakukan dengan cara pengamatan secara visual. • Parameter yang dipantau adalah jumlah kehadiran hewan yang termasuk vektor penyakit.	Pasar Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Sanitasi Lingkungan	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	Berasal dari kegiatan operasional Pasar Ikan.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Pasar Ikan	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
A.4.	**Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)**								
1	Peningkatan Kebauan	Parameter lingkungan hidup yang dipantau, yaitu tingkat kebauan sebagai sumber dampak utama (primer) dengan tolok ukur sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) dari ikan yang di jemur.	• Pemantauan tingkat kebauan dilakukan dengan cara pengukuran langsung (in-situ) di titik pemantauan yang telah ditentukan dan kemudian dianalisis di laboratorium yang sudah terakreditasi. • Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu tingkat kebauan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	**Indikator Teknis**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait penanganan timbulan limbah padat domestik adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **Indikator Peraturan**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.	Berasal kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah padat domestik.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Tidak ada air limbah industri yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	Berasal dari air bekas pencucian, rendaman dan rebusan ikan serta air bekas	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			pencucian wadah.	pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.		dan pelaporan 6 bulan sekali			Administrasi Jakarta Utara
4	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Tidak ada air limbah domestik yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	Berasal aktivitas karyawan dan pengunjung di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
5	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	**<u>Indikator Teknis</u>** Indikator sebagai tolak ukur dampak terkait parameter kualitas lingkungan untuk keselamatan lalu lintas melalui tingkat pelayanan jalan sesuai dengan Pedoman Kapasitas Jalan	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Pengumpulan data lalu lintas dilakukan dengan survei lalu lintas. • Data lalu lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar (PKJI, 2014).	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Indonesia (PKJI) 2014. **<u>Indikator Peraturan</u>** KepMenHub No. KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.							
6	Bahaya Kebakaran	Tidak ada insiden kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara
7	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga kerja operasional kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke.	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								• Aparat Kelurahan Pluit	• Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
8	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Tolak ukur berdasarkan Ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
9	Peningkatan PAD	**Indikator Teknis** Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Prov. DKI Jakarta	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Prov. DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		"Pembayaran pajak daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku". **Indikator Peraturan** Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah							
10	Persepsi dan Sikap Masyarakat	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Kawasan Muara Angke	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kawasan Muara Angke.							
11	Vektor Penyakit	Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus).	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Pemantauan data dilakukan dengan cara pengamatan secara visual. • Parameter yang dipantau adalah jumlah kehadiran hewan yang termasuk vektor penyakit.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
12	Sanitasi Lingkungan	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	Berasal dari kegiatan operasional Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
A.5.	**Unit Pengolahan Ikan (UPI)**								
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	**Indikator Teknis**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait penanganan	Berasal kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		timbulan limbah padat domestik adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **Indikator Peraturan**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.		• Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah padat domestik.					
2	Peningkatan Timbulan Limbah B3	Tidak ada timbulan limbah B3 yang mengganggu dan mencemari lingkungan	Berasal kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang diakibatkan penggunaan genset.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah B3.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Peningkatan Timbulan Air Limbah Industri	Tidak ada air limbah industri yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	Berasal dari air bekas pencucian ikan dan wadahnya.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
4	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Tidak ada air limbah domestik yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	Berasal aktivitas karyawan dan pengunjung di Unit Pengolahan Ikan (UPI).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
5	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	**Indikator Teknis** Indikator sebagai tolak ukur dampak terkait parameter kualitas lingkungan untuk keselamatan lalu lintas	Berasal dari aktivitas pengunjung di Unit Pengolahan Ikan (UPI).	• Pengumpulan data lalu lintas dilakukan dengan survei lalu lintas. • Data lalu lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar (PKJI, 2014).	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		melalui tingkat pelayanan jalan sesuai dengan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2014. **Indikator Peraturan** KepMenHub No. KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.							
6	Bahaya Kebakaran	Tidak ada insiden kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara
7	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga kerja operasional kegiatan	Berasal dari kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		perikanan di Kawasan Muara Angke.		deskriptif kualitatif.				Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
8	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Tolak ukur berdasarkan Ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
9	Peningkatan PAD	**<u>Indikator Teknis</u>** Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas	Berasal dari kegiatan operasional Unit Pengolahan Ikan (UPI).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Prov. DKI Jakarta	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Prov. DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		lingkungan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah "Pembayaran pajak daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku". **Indikator Peraturan** Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah		deskriptif kualitatif.					
10	Persepsi dan Sikap Masyarakat	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan	Berasal dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Kawasan Muara Angke	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.							
11	Sanitasi Lingkungan	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	Berasal dari kegiatan Unit Pengolahan Ikan (UPI).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
A.6.	**Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)**								
1	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Tolok ukur berpedoman pada Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta	Berasal dari aktivitas *docking* pada saat kegiatan pengelupasan cat, pelapisan dan pengecatan lambung kapal di Eks BTPI.	• Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan cara pengukuran langsung (in-situ) di titik pemantauan yang telah ditentukan. Pengukuran kualitas udara menggunakan "*multiple impinger*" dengan metode *colorimetrik* dengan alat *spektrofometer*.	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				• Hasil analisis laboratorium kemudian dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambien menurut Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.					
2	Peningkatan Kebisingan	Parameter lingkungan hidup yang dipantau, yaitu tingkat kebisingan sebagai sumber dampak utama (primer) dengan tolok ukur sesuai Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan	Berasal dari aktivitas *docking* pada saat kegiatan perbaikan kapal di Eks BTPI.	• Data kebisingan diukur dengan *Sound Level Meter*. • Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu tingkat kebisingan menurut Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta.							
3	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	**Indikator Teknis**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait penanganan timbulan limbah padat domestik adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **Indikator Peraturan**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah padat domestik.	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
4	Peningkatan Timbulan Limbah B3	Tidak ada timbulan limbah B3 yang	Berasal kegiatan operasional Eks	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama tahap operasional dengan	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q.	Suku Dinas Lingkungan Hidup	• DLH Provinsi DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		mengganggu dan mencemari lingkungan	BTPI (*Docking* dan Bengkel).	wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah B3.		frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	UPPP Muara Angke	Kota Administrasi Jakarta Utara	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
5	Bahaya Kebakaran	Tidak ada insiden kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara
6	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga kerja operasional kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke.	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								• Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
7	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Tolak ukur berdasarkan Ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
8	Peningkatan PAD	**Indikator Teknis** Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah "Pembayaran pajak daerah	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Prov. DKI Jakarta	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Prov. DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku". **<u>Indikator Peraturan</u>** Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah							
9	Persepsi dan Sikap Masyarakat	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	Berasal dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Kawasan Muara Angke	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Vektor Penyakit	Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus).	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	• Pemantauan data dilakukan dengan cara pengamatan secara visual. • Parameter yang dipantau adalah jumlah kehadiran hewan yang termasuk vektor penyakit.	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
11	Sanitasi Lingkungan	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang diakibatkan dari kegiatan operasional Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Eks BTPI (*Docking* dan Bengkel)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
A.7.	**Aktivitas Perkantoran**								
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	**Indikator Teknis**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait penanganan timbulan limbah padat domestik adalah:	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara	Perkantoran	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		"pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **Indikator Peraturan**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.		harian dan pelaporan neraca limbah padat domestik.					
2	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Tidak ada air limbah domestik yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di perkantoran.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Perkantoran	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3	Bahaya Kebakaran	Tidak ada insiden kebakaran	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR).	Perkantoran	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				• Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.				Kebakaran Jakarta Utara	• Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara
4	Persepsi dan Sikap Masyarakat	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Kawasan Muara Angke	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
5	Sanitasi Lingkungan	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	Berasal dari kegiatan aktivitas perkantoran.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Perkantoran	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.8.	**SPBU**								
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	**Indikator Teknis**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait penanganan timbulan limbah padat domestik adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **Indikator Peraturan**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah padat domestik.	SPBU	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
2	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Tidak ada air limbah domestik yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di SPBU.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi	SPBU	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.		dan pelaporan 6 bulan sekali			Administrasi Jakarta Utara
3	Bahaya Kebakaran	Tidak ada insiden kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	SPBU	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara
4	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga kerja operasional kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke.	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	SPBU	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									• Aparat Kelurahan Pluit
5	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Tolak ukur berdasarkan Ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan operasional SPBU.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	SPBU	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
6	Peningkatan PAD	**Indikator Teknis** Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah "Pembayaran pajak daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku".	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	SPBU	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Prov. DKI Jakarta	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Prov. DKI Jakarta

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Indikator Peraturan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah							
7	Persepsi dan Sikap Masyarakat	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Kawasan Muara Angke	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
8	Sanitasi Lingkungan	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat	Berasal dari kegiatan operasional SPBU.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara	SPBU	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		rendah dan tidak ada tikus)		menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.		dan pelaporan 6 bulan sekali		• Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
A.9.	**Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)**								
1	Peningkatan Timbulan Limbah Padat	**Indikator Teknis**: Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan hidup terkait penanganan timbulan limbah padat domestik adalah: "pengendalian timbulan sampah, pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan". **Indikator Peraturan**: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. • Melakukan pencatatan secara harian dan pelaporan neraca limbah padat domestik.	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pengelolaan Sampah.							
2	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Tidak ada air limbah domestik yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	Berasal dari aktivitas karyawan dan pengunjung di Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3	Bahaya Kebakaran	Tidak ada insiden kebakaran	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner (check list per kapal terkait APAR). • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara
4	Terbukanya Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	Terdapat minimal 20 % warga masyarakat sekitar tapak proyek yang menjadi tenaga kerja operasional	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan,	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	• DLH Provinsi DKI Jakarta • • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke.	Warungan, Resto Apung).	dianalisis secara deskriptif kualitatif.				Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
5	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Tolak ukur berdasarkan Ketetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019	Berasal dari kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke yang mengakibatkan terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
6	Peningkatan PAD	**<u>Indikator Teknis</u>** Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan,	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • BPKD Prov. DKI Jakarta	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		parameter kualitas lingkungan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah "Pembayaran pajak daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku". **Indikator Peraturan** Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	Warungan, Resto Apung).	dianalisis secara deskriptif kualitatif.					• BPKD Prov. DKI Jakarta
7	Persepsi dan Sikap Masyarakat	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif.	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Kawasan Muara Angke	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		• Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.							
8	Sanitasi Lingkungan	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	Berasal dari kegiatan operasional Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung).	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Tempat Usaha (Pujaseri, Toko/Kios Perbekalan, Warungan, Resto Apung)	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
B	**Operasional Sarana Penunjang**								
1	Penurunan Kualitas Air Laut	Parameter lingkungan hidup yang dipantau, yaitu penurunan kualitas air laut sebagai sumber dampak utama (primer) dengan tolok ukur sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut,	Berasal dari pengolahan kolam limbah. Hal tersebut dapat meningkatkan parameter TSS.	• Metode Pengambilan: pengambilan sampel air laut dilakukan dengan menggunakan *Water Sampler* cara *composite vertikal*. Sampel disimpan dalam tempat yang tahan asam dengan volume tertentu sesuai dengan parameter.	Kolam limbah	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan.		• Metode Pengujian: dilakukan di laboratorium dengan metode pengujian dan peralatan tertentu sesuai dengan karakteristik parameter yang ingin dipantau. • Data tersebut dibandingkan dengan baku mutu kualitas air laut mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan.					
2	Limpasan Air Permukaan	Tidak terjadinya genangan air di lingkungan	Berasal dari operasional sarana penunjang yang kurang memadai yaitu tidak mengalirnya drainase karena tersumbat oleh sampah (limbah	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya sampah atau endapan lumpur di drainase). • Data yang terkumpul dianalisis secara	Saluran drainase Kawasan Muara Angke dan Mangrove	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			padat) dan lumpur sehingga aliran air mudah menggenang. Selain itu, karena Kawasan Muara Angke merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 1 meter dari permukaan laut, sehingga daerah ini sering dilanda oleh banjir pasang (rob).	deskriptif kualitatif.					
3	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Tidak ada air limbah domestik yang dibuang ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.	Berasal dari kegiatan operasional sarana penunjang yang diakibatkan dari pemakaian toilet umum.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (ada tidaknya instalasi pemasangan air limbah ke IPAL). • Data yang terkumpul	Toilet Umum kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				dianalisis secara deskriptif kualitatif.					
4	Persepsi dan Sikap Masyarakat	• Semakin meningkatnya persepsi masyarakat yang bersifat positif dibandingkan dengan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. • Semakin menurunnya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kawasan Muara Angke.	Berasal dari kegiatan operasional sarana penunjang.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Kawasan Muara Angke	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Aparat Kecamatan Penjaringan • Aparat Kelurahan Pluit
5	Sanitasi Lingkungan	• Tidak ada genangan air. • Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat rendah dan tidak ada tikus)	Berasal dari kegiatan operasional sarana penunjang.	• Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Tempat-Tempat Umum kegiatan perikanan di Kawasan Muara Angke	Selama tahap operasional dengan frekuensi pemantauan dan pelaporan 6 bulan sekali	DKPKP Provinsi DKI Jakarta C.q. UPPP Muara Angke	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	• DLH Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara • Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

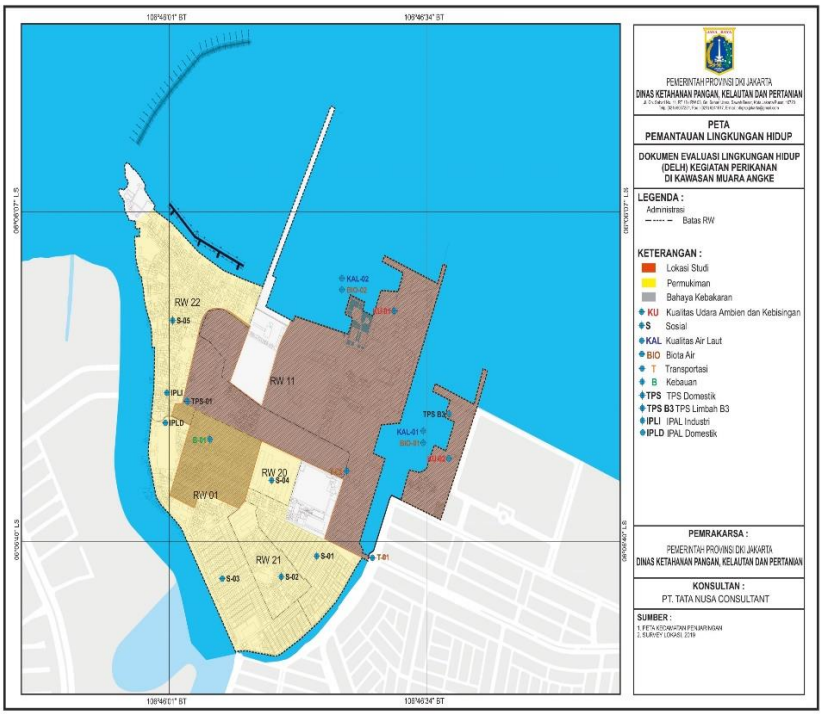

Gambar VI.2 Peta Pemantauan Lingkungan Hidup

DAFTAR PUSTAKA

APHA. 1980. *Standard Methods for The Examination of Waste Water*. American Public Health Association, Washington, D.C.

Canter L. W. 1996. *Environmental Impact Assessment*. Mc Graw Hill Inc New York.

Departemen Pekerjaan Umum, 1997, *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Ditjen Bina Marga, Jakarta.

Direktorat Jenderal Bina Marga, 2014, *Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI),* Jakarta.

Kecamatan Penjaringan Dalam Angka. 2018. Pemerintah Daerah Kota
Administrasi Jakarta Utara.

Keputusan Kepala Bapedal No. 01/Bapedal/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengumpulan Limbah B3.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 876/MENKES/SK/VII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL).

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor Penyakit dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemar Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Reksohadiprodjo, S. dan A.B.P. Brodjonegoro. 1987. *Ekonomi Lingkungan (Suatu Pengantar)*. BPFE. Yogyakarta.

Soemarto, C. D. 1987. *Hidrologi Teknik*. Usaha Nasional. Surabaya.

Sumarwoto, O. 1990. *Analisis Dampak Lingkungan.* Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Suprapto, R.A. 1988. *Analisis Dampak Sosial; Memperkirakan dan Menelaah Dampak Lingkungan Sosial,* HIPIIS. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

WHO. 1982. *Rapid Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution*. England. WHO offset Publication No.62.

INDEKS

B

Biologi, 84, 97, 100, 101, 140, 147, 203
Budaya, 79, 104, 110, 114, 141, 147, 204

E

Ekonomi, xii, 104, 105, 106, 108, 141, 147, 204, 536
Evaluasi Dampak, viii

G

Geo-Fisik-Kimia, 72, 134, 146, 194

K

Kawasan Muara Angke, 5, viii, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 27, 28, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 77, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 188, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 221, 224, 226, 229, 233, 234, 238, 241, 243, 246, 250, 254, 256, 258, 260, 264, 266, 268, 271, 274, 279, 283, 289, 291, 292, 293, 294, 299, 301, 303, 306, 311, 313, 315, 316, 318, 319, 324, 326, 327, 329, 331, 332, 337, 338,

339, 344, 350, 352, 353, 354, 355, 359, 361, 362, 367, 369, 371, 372, 377, 379, 381, 383, 385, 386, 390, 391, 393, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 404, 405, 407, 408, 410, 411, 412, 414, 416, 418, 419, 421, 422, 423, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 437, 439, 440, 441, 444, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 461, 463, 464, 465, 467, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 487, 489, 492, 493, 497, 499, 503, 504, 505, 506, 509, 510, 511, 515, 516, 517, 518, 520, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 530, 531, 532
Kegiatan Perikanan, viii, x, xiii, 1, 3, 7, 13, 14, 15, 61, 133, 148, 152, 153, 204, 216, 280, 483
Kesehatan Masyarakat, xii, 118, 119, 127, 144, 147, 212
Kesesuaian Lokasi, 12

O

Operasional, viii, xii, xiii, xvii, 14, 15, 19, 45, 133, 134, 136, 146, 148, 152, 153, 185, 186, 188, 193, 196, 216, 273, 280, 289, 300, 381, 391, 398, 406, 475, 477, 478, 479, 483, 529

P

Pemantauan, viii, xiii, xvii, 128, 152, 153, 216, 279, 280, 286, 313, 315, 326, 342, 352, 482, 483, 486, 499, 500, 506, 512, 518, 533
Penggunaan Lahan, xiv, 13, 14

R

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), 481, 482, 483
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), 389, 391
Rona Lingkungan Hidup, viii

S

Sosial, xii, 12, 80, 104, 105, 108, 110, 112, 113, 141, 147, 204, 536

T

Tata Ruang, 8, 12, 534, 535
Transportasi, 76, 80, 87, 95

PROFIL PENULIS

Dr. Ir. Hj. Benny Diah Madusari, M.Pi., lahir 18 Agustus 1964. Pendidikan formal SD, SMP, dan SMA penulis tempuh di Kota Pekalongan dan melanjutkan S1 di UNIKAL. Sedangkan S2 dan S3 di Prodi Manajemen Sumber Daya Pantai UNDIP Semarang. Selama kuliah memperoleh beasiswa dari pemerintah BPPDN dan beasiswa *Sandwich-like* di Stirling University Scotland.